



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NO : 01 TAHUN 2019**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018-2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2019**



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018-2023**



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sebagai visi dan misi kepala daerah terpilih dalam masa pemerintahannya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

DAN

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2018 – 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.

8. Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian di Daerah.
9. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung risiko.
10. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah.
11. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
12. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut RTRWK adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

18. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan visi, misi, analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.
19. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan, untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan RPJMD adalah sebagai pedoman dalam :
 - a. penyusunan Renstra PD; dan
 - b. penyusunan RKPD; dan
 - c. penyusunan Renja PD.
- (2) Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk :
 - a. menetapkan visi, misi, dan Program pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra PD, RKPD, Renja PD, dan perencanaan penganggaran;

- c. menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra PD, RKPD, Renja PD, dan perencanaan penganggaran serta perencanaan penganggaran Daerah; dan
- d. mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 3

RPJMD merupakan :

- a. penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, Program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan Daerah, dengan mempertimbangkan RPJPD dan RTRWK; dan
- b. dokumen perencanaan Daerah Provinsi yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPJMD, meliputi :

- BAB I : PENDAHULUAN
Memuat gambaran umum penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Memuat secara logis dasar-dasar analisis dan gambaran umum kondisi Daerah, yang meliputi aspek geografi dan demografi secara indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
Memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap perumusan ke dalam sub bab.
- BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
Memuat permasalahan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
Menjelaskan visi dan misi Pemerintah daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja setiap misi pembangunan.
- BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.
- BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra PD beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, PD penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.
- BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Memuat gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.
- BAB IX : PENUTUP

BAB IV ISI DAN URAIAN RPJMD

Pasal 5

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan
 - b. pelaksanaan RPJMD.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bappeda.
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal



BUPATI PURWAKARTA,

ANIE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

Drs. H. IYUS PERMANA, MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT : (1/48/2019)

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-8
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-11
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-14
1.5. Sistematika Penulisan.....	I-15
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-13
2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi....	II-13
2.2.2 Kesejahteraan Sosial.....	II-18
2.2.3 Seni Budaya dan Olahraga	II-24
2.3. Aspek Pelayanan Umum.....	II-26
2.3.1 Pelayanan Urusan Wajib.....	II-26
2.3.2 Pelayanan Urusan Pilihan.....	II-71
2.4. Aspek Daya Saing Daerah.....	II-93
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	III-3
3.1.2 Neraca Daerah	III-12

3.1.2.1 Aset.....	III-12
3.1.2.2 Kewajiban.....	III-12
3.1.2.3 Ekuitas Dana.....	III-13
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	III-15
3.2.1 Proposi Penggunaan Anggaran.....	III-18
3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah.....	III-18
3.3. Kerangka Pendanaan.....	III-21
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja	III-21
3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan	III-25
 BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	 IV-1
4.1. Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.1.1 Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah	IV-1
4.1.2 Bidang Ekonomi	IV-3
4.1.3 Bidang Sosial dan Budaya	IV-6
4.1.4 Bidang Pemerintahan	IV-9
4.2. Isu Strategis	IV-12
4.2.1 Isu Strategis Internasional	IV-12
4.2.2 Isu Strategis Nasional	IV-17
4.2.3 Isu Strategis Regional	IV-22
4.2.3.1 RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023	IV-22
4.2.3.1 RTRW Provinsi Jawa Barat 2010-2030	IV-25
4.2.4 Isu Strategis Lokal	IV-32
4.2.4.1 RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025	IV-22
4.2.4.2 RTRW Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2023	IV-38
4.2.5 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023	IV-43
4.2.6 Telaahan Tujuan Pembangunan Berkelan	IV-66

	jutan (TPB)/SDGs	
	4.2.7 Penetapan Isu Strategis	IV-70
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
	5.1. Visi	V-1
	5.2. Misi	V-3
	5.3 Tujuan dan Sasaran	V-10
	5.4 Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati	V-22
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
	6.1 Strategi	VI-2
	6.2 Arah Kebijakan	VI-5
	6.3 Program Pembangunan Daerah	VI-9
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VIII-1
BAB IX	PENUTUP	IX-1
	9.1 Kaidah Pelaksanaan	IX-1
	9.2 Pedoman Transisi	IX-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta	II-5
Tabel 2.2	Persebaran Kawasan Rawan Bencana Gempabumi Kabupaten Purwakarta	II-7
Tabel 2.3	Persebaran Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah Kabupaten Purwakarta	II-8
Tabel 2.4	Persebaran Kawasan Rawan Bencana Banjir Kabupaten Purwakarta	II-9
Tabel 2.5	Persebaran Kawasan Rawan Bencana Kegagalan Waduk Kabupaten Purwakarta	II-10
Tabel 2.6	Kawasan Rawan Bencana Banjir Dengan Peruntukkan Permukiman Perkotaan	II-10
Tabel 2.7	Antara Kawasan Rawan Bencana Gempa dengan peruntukkan permukiman perkotaan	II-11
Tabel 2.8	Penyebaran Penduduk Kabupaten Purwakarta Menurut Kelompok Umur Tahun 2017	II-13
Tabel 2.9	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta dari Tahun 2013-2017	II-14
Tabel 2.10	Laju Inflasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018	II-16
Tabel 2.11	Penduduk Miskin Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-17
Tabel 2.12	Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-18
Tabel 2.13	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018	II-19
Tabel 2.14	Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018	II-20
Tabel 2.15	Kelulusan (AL) Untuk SD/MI, dan SMP, di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-20
Tabel 2.16	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI/Paket A Sederajat, dan SMP/MTs Sederajat di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-	II-21

2017

Tabel 2.17	Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Ibu di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-22
Tabel 2.18	Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018	II-23
Tabel 2.19	Perkembangan IPM (Metode Baru) di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018	II-24
Tabel 2.20	Perkembangan Seni dan Budaya di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-25
Tabel 2.21	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-26
Tabel 2.22	Hasil Pelaksanaan Pembangunan di Bidang Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2017	II-28
Tabel 2.23	Komposisi Jenis Permukaan Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2016	II-30
Tabel 2.24	Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2016 (dalam Km)	II-32
Tabel 2.25	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2016 (Km)	II-33
Tabel 2.26	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2016	II-35
Tabel 2.27	Tingkat Pencapaian Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Purwakarta Sampai Dengan Tahun 2018	II-38
Tabel 2.28	Perkembangan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sampai Dengan Tahun 2018	II-38
Tabel 2.29	Perkembangan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Purwakarta Tahun 2013- 2016	II-39
Tabel 2.30	Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-40
Tabel 2.31	Banyaknya Kendaraan yang Diuji Menurut Jenis Kendaraan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-42
Tabel 2.32	Data Terminal di Kabupaten Purwakarta Sampai Dengan Tahun 2017	II-43
Tabel 2.33	Banyaknya Fasilitas/Perlengkapan Keselamatan	II-43

Jalan Raya di Kabupaten Purwakarta sampai dengan Tahun 2017

Tabel 2.34	Rekapitulasi Target Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-44
Tabel 2.35	Penanganan Sampah di Perkotaan Kabupaten Purwakarta Tahun 2016	II-45
Tabel 2.36	Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-46
Tabel 2.37	Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ibu dan Anak di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-47
Tabel 2.38	Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-48
Tabel 2.39	Perkembangan Kondisi Penyandang Masalah Sosial di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2016	II-50
Tabel 2.40	Perkembangan Jumlah Pengangguran (Pencari Kerja Yang Terdaftar) di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-52
Tabel 2.41	Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Purwakarta Tahun 2013- 2017	II-53
Tabel 2.42	Jumlah Koperasi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-54
Tabel 2.43	Data UMKM Binaan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-55
Tabel 2.44	Jumlah Perijinan Dan Realisasi Retribusi Ijin dan Non Perijinan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-58
Tabel 2.45	Jumlah Izin dan Non Perizinan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-58
Tabel 2.46	Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-60
Tabel 2.47	Tabel Indikator Kinerja dari Frekuensi Pengendalian Pengamanan dan Penertiban	II-62

	Penegakan Peraturan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	
Tabel 2.48	Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminstrasi Keuangan Daerah: Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-64
Tabel 2.49	Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-67
Tabel 2.50	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-69
Tabel 2.51	Data Hasil Pembangunan pada Bagian Kaharti Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017	II-70
Tabel 2.52	Jumlah Perpustakaan/layanan Baca Binaan dan Titik Layanan Pusling di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-71
Tabel 2.53	Penanaman Komoditas Strategis dan Unggulan Pertanian	II-72
Tabel 2.54	Produksi Tanaman Pangan dan Sayuran serta buah buahan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2016	II-73
Tabel 2.55	Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2016	II-74
Tabel 2.56	Ketersediaan Pangan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2016	II-74
Tabel 2.57	Produksi Daging Berdasarkan Jenis Ternak Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-75
Tabel 2.58	Produksi Hasil Ternak Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-76
Tabel 2.59	Populasi Ternak Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-77
Tabel 2.60	Produksi Hasil Hutan Kayu di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2016	II-78
Tabel 2.61	Komoditi Produktif Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2016	II-79
Tabel 2.62	Rehabilitasi Lahan Kritis di Kabupaten Purwakarta 2013 – 2016	II-79

Tabel 2.63	Data Pertambangan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2016	II-80
Tabel 2.64	Kecukupan Energi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-81
Tabel 2.65	Data Pemanfaatan Air Tanah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2016	II-81
Tabel 2.66	Jumlah KK Miskin Penerima Bantuan Listrik Pedesaan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2016	II-81
Tabel 2.67	Data Potensi Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-83
Tabel 2.68	Produksi Perikanan Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-87
Tabel 2.69	Jumlah Pasar di Kabupaten Purwakarta sampai dengan Tahun 2013-2017	II-89
Tabel 2.70	Ekspor Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-90
Tabel 2.71	Banyaknya Unit Usaha Tenaga Kerja Industri Kecil Menurut Kelompok di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-91
Tabel 2.72	Capaian Perkembangan jumlah Transmigrasi dan Lokasi Pemukiman Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2016	II-92
Tabel 2.73	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 - 2017	II-93
Tabel 2.74	Tabel Capaian Indikator Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 - 2017	II-94
Tabel 2.75	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Jenis Purwakarta Tahun 2013-2018	II-103
Tabel 2.76	Capaian Indikator SDGs Kabupaten Purwakarta	II-115
Tabel 2.77	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Jenis Distribusi Kelas dan Luasan Daya Dukung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Purwakarta	II-120
Tabel 2.78	Distribusi Kelas dan Luasan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem	II-120
Tabel 2.79	Kualitas Udara Ambien Kabupaten Purwakarta	II-122

Tahun 2017

Tabel 2.80	Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2017	II-129
Tabel 2.81	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017	II-129
Tabel 2.82	Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018	II-133
Tabel 2.83	Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018	II-138
Tabel 2.84	Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Purwakarta Tahun 2018	II-141
Tabel 2.85	Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Purwakarta Tahun 2018	II-142
Tabel 2.86	Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Purwakarta Tahun 2018	II-144
Tabel 2.87	Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bersumber dari BUMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2017	II-146
Tabel 3.1	Rata-Rata Pertumbuhan APBD di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	III-10
Tabel 3.2	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah di Kabupaten Purwakarta	III-13
Tabel 3.3	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur di Kabupaten Purwakarta	III-18
Tabel 3.4	Defisit Riil Anggaran di Kabupaten Purwakarta Tahun 2015-2017	III-19
Tabel 3.5	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran di Kabupaten Purwakarta Tahun 2015-2017	III-20
Tabel 3.6	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran di Kabupaten Purwakarta Tahun 2015-2017	III-20
Tabel 3.7	Proyeksi APBD Tahun 2019-2023 Kabupaten Purwakarta	III-23
Tabel 3.8	Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023	III-26
Tabel 3.9	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2019-2023 Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta	III-27
Tabel 3.10	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2019 – 2023 Kabupaten	III-28

	Purwakarta	
Tabel 4.1	Rekomendasi Program dan Sasaran Dimensi Sosial	IV-45
Tabel 4.2	Rekomendasi Program dan Sasaran Dimensi Ekonomi	IV-49
Tabel 4.3	Rekomendasi Program dan Sasaran Dimensi Lingkungan	IV-53
Tabel 4.4	Rekomendasi Program dan Sasaran Dimensi Kelembagaan	IV-59
Tabel 4.5	Pencapaian Indikator SDGs Kabupaten Purwakarta	IV-65
Tabel 5.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023	V-15
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023	VII-2
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023	VIII-3
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023	VIII-7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Orientasi Kabupaten Purwakarta	II-1
Gambar 2.2	Peta Administrasi Kabupaten Purwakarta	II-3
Gambar 2.3	Komposisi Jenis Permukaan Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2016	II-31
Gambar 2.4	Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta Sampai Dengan Tahun 2018	II-32
Gambar 2.5	Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2016 (dalam Km)	II-33
Gambar 2.6	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2016 (%)	II-34
Gambar 2.7	Produksi Daging Berdasarkan Jenis Ternak Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017 (dalam Kg)	II-75
Gambar 2.8	Produksi Hasil Ternak Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017 (dalam Kg)	II-76
Gambar 2.9	Populasi Ternak Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017 (dalam Ekor)	II-77
Gambar 2.10	Produksi Perikanan Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017 (dalam Ton)	II-88
Gambar 3.1	Proporsi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah di Kab.Purwakarta Tahun 2013-2017	III-6
Gambar 3.2	Proporsi Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	III-8

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus sinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan rencana sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan. Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan berakhirnya masa bakti Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Periode Tahun 2013-2018 pada Bulan Maret 2018, maka Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada), dimana Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta terpilih untuk Periode Tahun 2018–2023, Hj. Anne Ratna Mustika, SE dan H. Aming telah dilantik oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat pada tanggal 20 September 2018.

Oleh karena itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam kurun waktu enam bulan setelah pelantikan tersebut, Pemerintah Kabupaten Purwakarta harus sudah menyusun dan menetapkan RPJMD Tahun 2018–2023. Dokumen RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023 memperhatikan dan bersinergi dengan RPJMN Tahun 2015–2019 dan rancangan teknokratik RPJMN Tahun 2020-2023, serta RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Purwakarta, Penyusunan RPJMD Tahun 2018–2023 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005–2025 khususnya pada Tahap Ke IV Rencana Pembangunan Lima Tahunan. Arah

Kebijakan Pembangunan Tahap Ke IV dalam RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005–2025 ditekankan pada:

1. Penuntasan Wajar Dikdas 12 Tahun;
2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Daerah Terhadap Kondisi Ekonomi Provinsi Jawa Barat;
3. Mempertahankan dan Mengembangkan Komoditi Unggulan Spesifik Lokal; dan
4. Mewujudkan Kawasan-Kawasan Bisnis Berskala Nasional.

Dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023 menggunakan 4 (empat) pendekatan yaitu:

1. **Pendekatan teknokratis** menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. **Pendekatan partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. **Pendekatan politis** dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
4. **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas** merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Pendekatan Teknokratis ini dilakukan diawali dengan penyusunan rencana pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan dilanjutkan dengan penyajian pada rancangan RPJMD. Berdasarkan analisis data yang dilakukan dirumuskan permasalahan dan isu strategis. Isu strategis digunakan sebagai

dasar untuk menyusun visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi dan arah kebijakan. Pendekatan teknoratis juga dilakukan untuk menyusun proyeksi keuangan daerah dan target capaian indikator untuk masing-masing ukuran.

Pendekatan Partisipatif dalam Penyusunan RPJMD dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan:

1. Relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
2. Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
3. Adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
4. Keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pengarusutamaan gender;
5. Terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
6. Terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

Pendekatan politis dalam penyusunan RPJMD adalah upaya untuk menterjemahkan program-program pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam Rancangan RPJMD, melalui tahapan :

1. Menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
2. Melakukan konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
3. Melakukan pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.

Pendekatan yang terakhir digunakan dalam Penyusunan RPJMD adalah perpaduan antara pendekatan **bottom up** dan **top down**, hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023 juga memperhatikan pemenuhan pendekatan substansi penyusunan dokumen perencanaan, yang meliputi:

- a. Pendekatan Holistic-Tematik, Integratif dan Spasial.
 1. Pendekatan Holistic Tematik: dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
 2. Pendekatan Integratif: dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

3. Pendekatan Spasial: dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

b. Kebijakan Anggaran Belanja Money Follow Programme

Penyusunan RPJMD Kabupaten Purwakarta merupakan rangkaian yang berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan sampai dengan penetapan Perda tentang RPJMD. Pada tahap persiapan telah dilakukan Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD, sesuai amanat dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Hasil dari Rancangan Teknokratik RPJMD menjadi salah satu input bagi Penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Selanjutnya Rancangan Awal disusun dan disempurnakan dengan Hasil Konsultasi Publik, Pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD Kabupaten Purwakarta serta Hasil Konsultasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Rancangan Awal yang telah disempurnakan selanjutnya menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Hasil dari Penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah menjadi Rancangan Renstra sebagai masukan dalam merumuskan Rancangan RPJMD dan setelahnya menjadi bahan yang diahas dalam Musrenbang RPJMD.

Hasil Musrenbang RPJMD menjadi masukan untuk penyempurnaan menjadi Rancangan Akhir RPJMD. Rancangan Akhir RPJMD selanjutnya diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD. Setelah disetujui, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dievaluasi oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat. Hasil Evaluasi Gubernur menjadi dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, yang selanjutnya ditetapkan dengan Perda tentang RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta menjadi dokumen yang sangat strategis, sebab merupakan:

1. Media untuk mengimplementasikan janji bupati dan wakil bupati terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat.
2. Penjabaran pelaksanaan RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005–2025 periode/tahap keempat.
3. Pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.
4. Instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala daerah dan kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun.
5. Instrumen pengendalian bagi (Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Bappedalitbang.

Selanjutnya RPJMD yang telah disusun akan menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018–2023. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategik di RPJMD dengan perencanaan operasional di Perangkat Daerah, dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023 berlandaskan pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2852);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Purwakarta Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat

Penyusunan RPJMD Kabupaten Purwakarta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dengan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan provinsi, sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.

1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Purwakarta Dengan RPJPD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005–2025 yang memuat Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah selama 20 tahun ke depan merupakan pedoman bagi Penyusunan RPJMD.

Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan Tahap IV RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005–2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi pedoman bagi Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD merupakan rencana kerja 5 (lima) tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian Visi, Misi dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah sebagaimana termuat dalam RPJMD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. Penjabaran Renstra PD termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Selanjutnya, RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Dalam pelaksanaannya di tahunan, RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Purwakarta Dengan RTRW Kabupaten Purwakarta

Penyusunan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031. Berpedoman pada RTRW dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Purwakarta dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang.

1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Purwakarta Dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Purwakarta

Salah satu dokumen yang ditelaah dalam Penyusunan RPJMD yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan (Dalam Renstra PD).

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah merupakan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Purwakarta 5 (lima) tahun. Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Media untuk mengimplementasikan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih.
2. Menelaah kinerja pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta periode lalu (Tahun 2013–2018).
3. Menelaah kinerja keuangan masa lalu dan menganalisis kerangka pendanaan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan.
4. Merumuskan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah beberapa tahun terakhir.
5. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal Kabupaten Purwakarta.
6. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Purwakarta selama 5 (lima) tahun ke depan.
7. Merumuskan program pembangunan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan dan rencana program perangkat daerah untuk seluruh perangkat daerah.
8. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) beserta target untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Dokumen RPJMD.

Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah beberapa tahun terakhir yang disajikan dalam 4 (empat) aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Selain itu, Bab ini memuat hasil RPJMD periode lalu yang dilengkapi dengan analisis faktor penghambat dan faktor pendukung dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's).

Bab III. Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini memuat kondisi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai dasar untuk merancang kerangka pendanaan untuk membiayai pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Bab IV. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Bab ini memuat permasalahan pembangunan dan isu strategis pembangunan daerah kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Bab V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab ini memuat Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah. Selanjutnya Misi dijabarkan kedalam Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah.

Bab VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini menyajikan strategi dan arah kebijakan pembangunan termasuk integrasinya dengan arahan pemanfaatan ruang untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Selanjutnya ditetapkan Program Pembangunan Daerah yang akan menunjang pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan strategi yang telah dipilih.

Bab VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat Program Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun pembangunan di Kabupaten Purwakarta, disertai dengan pendanaannya yang bersifat indikatif.

Bab VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini memuat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diwakili oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disajikan beserta target setiap tahun sampai dengan Tahun 2023.

Bab IX. Penutup

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan RPJMD dan pedoman transisi pada saat RPJMD ini berakhir untuk menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.

BAB II

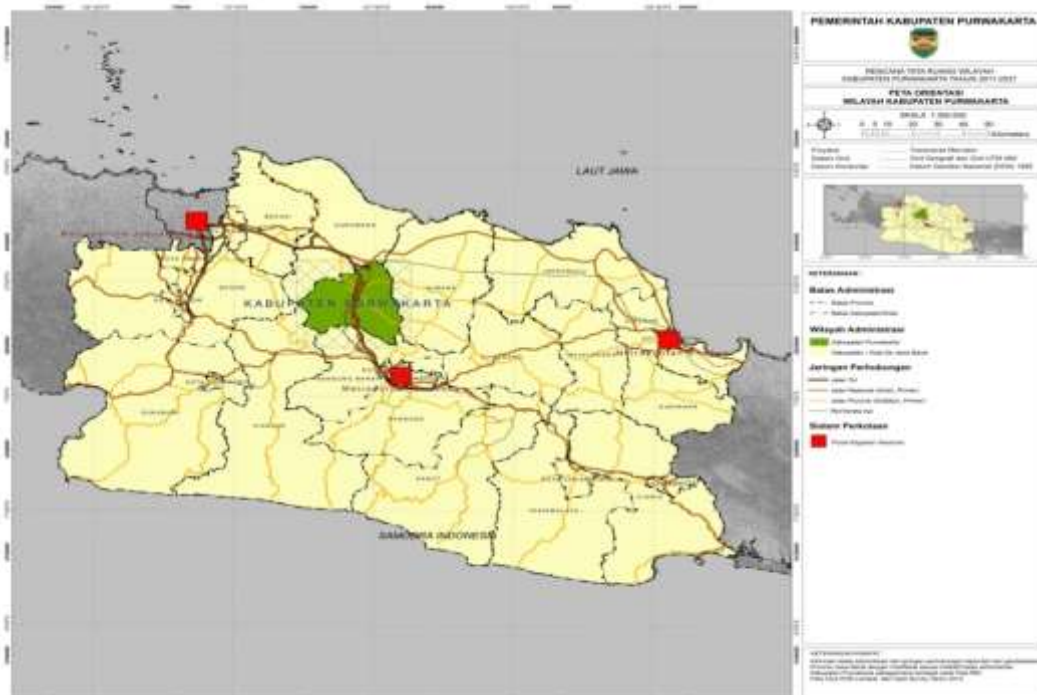
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Secara geografis wilayah Kabupaten Purwakarta terletak di bagian Utara Provinsi Jawa Barat dengan batas koordinat yaitu antara 107°30' - 107°40' Bujur Timur dan 6°25' - 6°45' Lintang Selatan. Posisi Kabupaten Purwakarta terletak di persimpangan jalan nasional yang menghubungkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dengan Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, dan yang menghubungkan Jakarta dengan Cirebon. Peta orientasi Kabupaten Purwakarta disajikan pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.1
Peta Orientasi Kabupaten Purwakarta



Sumber: Bappeda dan Litbang Kab. Purwakarta

Kabupaten Purwakarta berbatasan dengan 5 (lima) kabupaten, yaitu dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor.

Luas wilayah Kabupaten Purwakarta 97.172 hektar (971,72 km²) atau 2,81 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari 17 kecamatan, 183 desa, 9 kelurahan, 505 dusun, 1.125 Rukun Warga (RW), dan 3.498 Rukun Tetangga (RT).

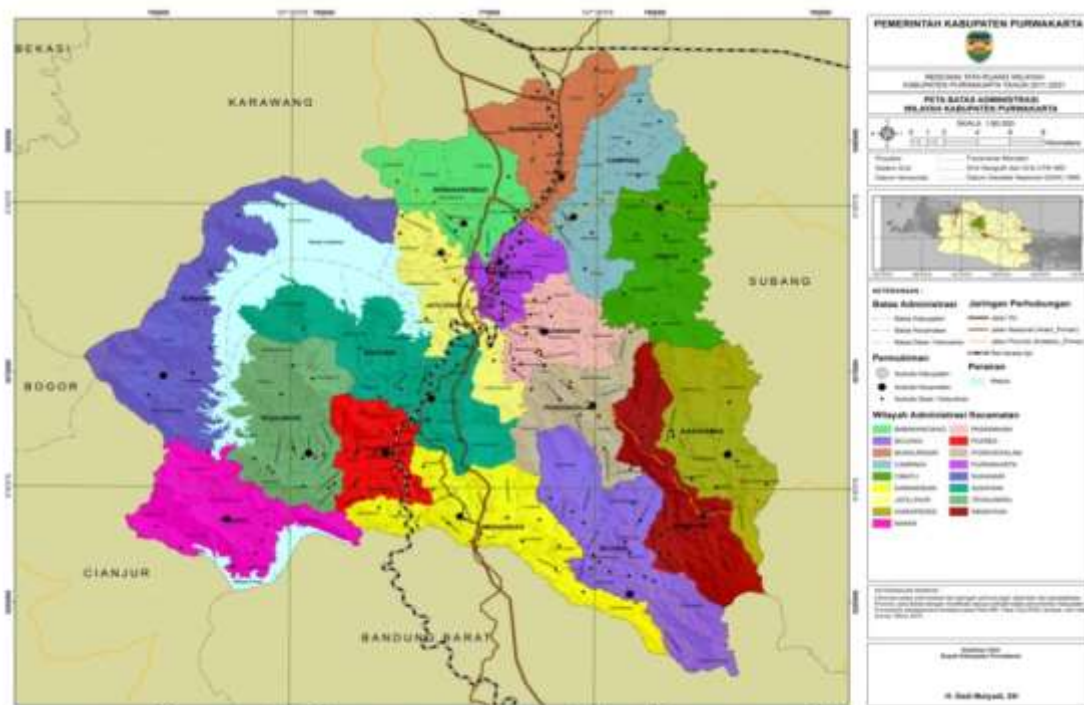
Ditinjau dari aspek geografis, letak Kabupaten Purwakarta dapat dibagi atas beberapa wilayah, yaitu Bagian Utara, Bagian Barat, Bagian Selatan dan Bagian Timur. Wilayah Bagian Utara mencakup Kecamatan Campaka, Kecamatan Bungursari, Kecamatan Cibat, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Babakancikao, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Pondoksalam, Kecamatan Wanayasa dan Kecamatan Kiarapedes dimana sebagian besar wilayahnya terletak pada ketinggian antara 25-500 meter di atas permukaan laut (m dpl). Wilayah Bagian Barat meliputi Kecamatan Jatiluhur dan Kecamatan Sukasari dimana sebagian wilayahnya merupakan permukaan air Danau Ir. H. Juanda yang mempunyai ketinggian 107 m dpl, sedangkan tanah daratan di sekitarnya berada pada ketinggian sekitar 400 m dpl. Wilayah bagian Selatan dan Timur, wilayahnya meliputi Kecamatan Plered, Kecamatan Maniis, Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Darangdan dan Kecamatan Bojong,

dengan ketinggian lebih dari 200 m dpl. Dilihat dari Aspek Topografi, Kabupaten Purwakarta dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) wilayah, yaitu:

- a. Wilayah Pegunungan, yang terletak di tenggara Kabupaten Purwakarta, dengan ketinggian 1.100-2.036 m dpl, dan meliputi 29,73% dari total luas wilayah.
- b. Wilayah Perbukitan, yang terletak di barat laut Kabupaten Purwakarta dengan ketinggian 500-1.100 m dpl, dan meliputi 33,80% dari total luas wilayah.
- c. Wilayah Dataran, yang terletak di utara Kabupaten Purwakarta dengan ketinggian 35-499 m dpl, dan meliputi 36,47% dari total luas wilayah.

Peta Administrasi Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.2
Peta Administrasi Kabupaten Purwakarta



Sumber: Bappeda dan Litbang Kab. Purwakarta

Kabupaten Purwakarta yang memiliki struktur wilayah yang unik, wilayahnya terdiri dari pegunungan, perbukitan disebelah selatan, tenggara dan barat, mendatar di tengah dan utara. Di Purwakarta juga terdapat Danau Jatiluhur sebagai salah satu tenaga pembangkit listrik yang memasok kebutuhan listrik untuk daerah Jawa Bali.

Di Purwakarta berkembang kegiatan-kegiatan industri bersama dengan perkembangan di Kabupaten Bekasi dan Karawang. Pertimbangan umumnya adalah aksesibilitas keJakarta sebagai pusat perdagangan dan outlet perdagangan nasional-internasional. Perkembangan ini cenderung bersifat alami mengikuti aglomerasi kegiatan ekonomi. Umumnya kegiatan ini terjadi di wilayah utara Purwakarta.

Kabupaten Purwakarta memiliki letak daerah yang sangat strategis, yang dilalui oleh jalur nasional (Jakarta, Bandung dan Cirebon). Masih banyak wisata lain yang belumdikembangkan secara optimal oleh pemerintah daerah. Di masa yang akan datang potensi pariwisata di Kabupaten Purwakarta akan terus diarahkan pada wisata alam, wisata belanja, wisata agro dan wisata budaya.

Kabupaten Purwakarta juga merupakan kabupaten yang mempunyai banyak lahan pertanian dan perkebunan, yang juga sebagai pemasok barang kebutuhan utama di Pasar Induk Bandung dan Jakarta. Kondisi tanah yang subur dan air yang melimpah dapat ditanami banyak jenis pohon. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah ditingkat masyarakat pada hamparan wilayah tertentu, misalnya persawahan, perkebunan dan lain sebagainya akan dapat meningkatkan skala ekonomi.

Kedekatan dengan pusat-pusat permintaan (*demand*) seperti Jakarta dan Bandung adalah keunggulan geografis Purwakarta. Sektor finansial yang berkembang pesat di Purwakarta dapat menjadi pendukung peningkatan produktivitas ekonomi, namun masalah penjaminan bagi usaha kecil juga penting menjadi perhatian.

Sebagai salah satu daerah tujuan investasi, Purwakarta memiliki potensi masuknya berbagai investasi. Zona dan kawasan usaha perlu dipersiapkan dengan baik, termasuk penyiapan kondisi kultural masyarakatnya. Momentum potensi investasi ini harus lebih dimanfaatkan secara terencana, terarah, terpadu, berkelanjutan dan terkoneksi antar sektor pembangunan daerah lainnya. Luas Wilayah dan jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta

KECAMATAN	LUAS WILAYAH		JUMLAH DESA/ KELURAHAN
	Km ²	%	
1. Jatiluhur	60,11	6,19	10
2. Sukasari	92,01	9,47	5
3. Maniis	71,64	7,37	8
4. Tegalwaru	73,23	7,54	13
5. Plered	31,48	3,24	16
6. Sukatani	95,43	9,82	14
7. Darangdan	67,39	6,94	15
8. Bojong	68,69	7,07	14
9. Wanayasa	56,55	5,82	15
10. Kiarapedes	52,16	5,37	10
11. Pasawahan	36,96	3,80	12
12. Pondoksalam	44,08	4,54	11
13. Purwakarta	24,83	2,56	10
14. Babakancikao	42,40	4,36	9
15. Campaka	43,60	4,49	10
16. Cibatuh	56,50	5,81	10
17. Bungursari	54,66	5,63	10
JUMLAH	971,72	100,00	192

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta

Dari tabel di atas terlihat bahwa Kecamatan Sukatani merupakan wilayah terluas dari luas wilayah Kabupaten Purwakarta yaitu seluas 95,43 km² atau 9,82%, sedangkan Kecamatan Purwakarta merupakan luas wilayah terkecil yaitu seluas 24,83 km² atau 2,56%. Untuk jumlah desa/kelurahan terbanyak berada di Kecamatan Plered sebanyak 16 desa, sedangkan Kecamatan Babakancikao merupakan kecamatan yang paling sedikit jumlah desanya yaitu 9 desa.

2.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan Rawan Bencana (KRB) pada daerah Purwakarta berdasarkan data yang didapatkan dari RTRW Kabupaten Purwakarta dan Badan Geologi Kementerian ESDM yaitu gerakan tanah, gempa bumi, banjir dan kegagalan waduk. Paragraf dibawah akan menjelaskan ke-empat KRB tersebut.

Kabupaten Purwakarta merupakan daerah yang cukup memiliki potensi bencana gempa yang cukup besar. Hal ini dikarenakan terdapatnya sesar aktif pada bagian selatan terdapat Sesar Cimandiri dan Lembang dibagian utara yaitu Sesar Baribis. Hal ini membuat hampir 78% berada pada Kawasan Rawan Bencana Menengah dengan intensitas VII-VIII MMI. Sisanya adalah KRB Tinggi pada Kecamatan Maniis, Sukasari, Darangdan, Babakancikao, Bojong, Wanayasa, Kiarapedes.

Persebaran Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Purwakarta

Kelas	Keterangan	Luas (Ha)	Kecamatan	Persentase (%)
Kawasan Rawan Bencana Menengah	Kawasan berpotensi terlanda goncangan gempabumi dengan intensitas VII-VIII MMI (<i>Modified Mercalli Intensity</i>).	71.617,23	Seluruh Kecamatan	77,96
Kawasan Rawan Bencana Tinggi	Kawasan berpotensi terlanda goncangan gempa bumi kuat dengan skala intensitas lebih dari VIII MMI (<i>Modified Mercalli Intensity</i>).	20.249,63	Maniis, Sukasari, Darangdan, Babakancikao, Bojong, Wanayasa, Kiarapedes	22,04

Sumber: Badan Geolog

Kawasan rawan bencana gerakan tanah pada Kabupaten Purwakarta didominasi lebih dari setengah wilayahnya adalah KRB menengah yang hampir tersebar diseluruh kecamatan. Kawasan dengan potensi gerakan tanah tinggi hanya kurang dari 10% dan beberapa berada pada bagian Selatan hingga bagian tengah, Tenggara dan Barat. Sedangkan Kawasan dengan kerentanan rendah sampai sangat rendah memiliki persentase masing-masing 27,45% dan 12,66%. Kawasan ini cukup banyak tersebar di bagian utara Kabupaten Purwakarta.

**Persebaran Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah
Kabupaten Purwakarta**

Kelas	Keterangan	Luas (Ha)	Kecamatan	Persentase (%)
Sangat Rendah	Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan sangat rendah untuk terkena gerakan tanah. Pada zona ini jarang atau hampir tidak pernah terjadi gerakan tanah, baik gerakan tanah lama maupun gerakan tanah baru, kecuali pada daerah tidak luas pada tebing sungai.	11.670,28	Babakancikao, Bungursari, Campaka, Cibatu, Purwakarta, Tegalwaru, Maniis	12,66
Rendah	Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan rendah untuk terkena gerakan tanah. Umumnya pada Zona ini jarang terjadi gerakan tanah jika tidak mengalami gangguan pada lereng, dan jika terdapat gerakan tanah lama, lereng telah mantap kembali.	25310,29	Seluruh Kecamatan di Purwakarta, hanya sedikit pada Kecamatan Pondoksalam	27,45
Menengah	Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan menengah untuk terkena gerakan tanah. Pada Zona ini dapat terjadi gerakan tanah terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan, atau jika lereng mengalami gangguan.	47677,32	Seluruh Kecamatan di Purwakarta, hanya sedikit pada Kecamatan Campaka dan Bungursari	51,70

Kelas	Keterangan	Luas (Ha)	Kecamatan	Persentase (%)
Tinggi	Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan tinggi untuk terkena gerakan tanah. Pada zona ini sering terjadi gerakan tanah, sedangkan gerakan tanah lama dan gerakan tanah baru masih aktif bergerak, akibat curah hujan yang tinggi dan erosi kuat	7559,46	Sukasari, Tegalwaru, Sukatani, Maniis, Plered, Darangdan, Pasawahan, Pondoksalam, Bojong, Wanayasa	8,20

Sumber: Badan Geologi

Selanjutnya adalah Kawasan Rawan Bencana Banjir dan Kegagalan Waduk. KRB Banjir terdapat pada Kecamatan Babakancikao, Sukasari dan Jatiluhur yang memiliki total luas 690,17 Ha. Sedangkan KRB Kegagalan Waduk terpusat pada 2 lokasi, yaitu pada Waduk Jatiluhur meliputi kecamatan Sukasari, Babakancikao, Jatiluhur dan pada Waduk Cirata meliputi kecamatan Manis, Darangdan, Plered, Tegalwaru. Kedua lokasi tersebut memiliki luas 3.747,18 Ha.

Tabel 2.4
Persebaran Kawasan Rawan Bencana Banjir
Kabupaten Purwakarta

Kelas Unsur	Luas (Ha)	Kecamatan
Sangat Tinggi	72,21	Babakancikao dan Jatiluhur
Tinggi	266,36	Sukasari, Babakancikao dan Jatiluhur
Menengah	351,60	Sukasari, Babakancikao dan Jatiluhur

Sumber: Hasil Pengolahan Peta Revisi RTRW Kabupaten Purwakarta, 2018

**Persebaran Kawasan Rawan Bencana
Kegagalan Waduk Kabupaten Purwakarta**

Kelas Unsur	Luas (Ha)	Kecamatan
Sedang	2259,17	Sukasari, Babakancikao, Jatiluhur, Tegalwaru, Maniis, Plered, Darangdan
Tinggi	1488,02	Sukasari, Babakancikao, Jatiluhur, Tegalwaru, Maniis, Plered, Darangdan

Sumber: Hasil Pengolahan Peta Revisi RTRW Kabupaten Purwakarta, 2018

Rawan Bencana Banjir

Kawasan rawan bencana banjir pada permukiman perkotaan mencapai 123,5 Ha dengan persebaran pada 2 kecamatan yaitu Kecamatan Babakanckao dan Jatiluhur. Kawasan dengan potensi sangat tinggi mencapai 3,9 Ha dan berada hanya pada Babakancikao. Sedangkan pada Kecamatan Jatiluhur dominan dengan potensi bencana banjir menengah. Berikut merupakan tabel dan gambar yang menjelaskan antara kawasan permukiman perkotaan dengan rawan bencana banjir.

**Tabel 2.6
Kawasan Rawan Bencana Banjir
Dengan Peruntukkan Permukiman Perkotaan**

Kecamatan	Kelas	Luas (Ha)
Babakancikao	Menengah	42,863173
Babakancikao	Sangat Tinggi	3,914049
Babakancikao	Tinggi	21,624621
Jatiluhur	Menengah	50,725791
Jatiluhur	Tinggi	4,364611

Sumber: Hasil Pengolahan Peta Revisi RTRW Kabupaten Purwakarta, 2018

Antara Kawasan Rawan Bencana Gempa dengan peruntukkan permukiman perkotaan

Kecamatan	Kelas	Luas (Ha)
Babakancikao	Kawasan Rawan Bencana Menengah	1218,998400
Bojong	Kawasan Rawan Bencana Tinggi	238,488460
Bungursari	Kawasan Rawan Bencana Menengah	1391,025600
Campaka	Kawasan Rawan Bencana Menengah	292,289090
Cibatu	Kawasan Rawan Bencana Menengah	117,518920
Darangdan	Kawasan Rawan Bencana Menengah	25,276698
Darangdan	Kawasan Rawan Bencana Tinggi	522,027860
Jatiluhur	Kawasan Rawan Bencana Menengah	959,190100
Kiarapedes	Kawasan Rawan Bencana Tinggi	40,836198
Maniis	Kawasan Rawan Bencana Menengah	112,294550
Maniis	Kawasan Rawan Bencana Tinggi	5,335957
Pasawahan	Kawasan Rawan Bencana Menengah	542,988790
Plered	Kawasan Rawan Bencana Menengah	302,468970
Pondoksalam	Kawasan Rawan Bencana Menengah	109,986170
Purwakarta	Kawasan Rawan Bencana Menengah	1583,489300
Sukasari	Kawasan Rawan Bencana Menengah	12,141346
Sukatani	Kawasan Rawan Bencana Menengah	395,611030
Tegalwaru	Kawasan Rawan Bencana Menengah	148,682990
Wanayasa	Kawasan Rawan Bencana Menengah	36,621561
Wanayasa	Kawasan Rawan Bencana Tinggi	198,792000

Sumber: Hasil Pengolahan Peta Revisi RTRW Kabupaten Purwakarta, 2018

2.1.3 Demografi

Gambaran Umum Demografis Wilayah Kabupaten Purwakarta tercermin dari jumlah Penduduk Purwakarta. Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jumlah Penduduk Kabupaten Purwakarta mencapai sebanyak 852.521 jiwa. Sedangkan Jumlah Penduduk Kabupaten Purwakarta Pada Tahun 2017 diasumsikan mencapai sebanyak 943.337 jiwa. Bila dibandingkan dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 sebanyak 932.701 jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 1,20%.

Hal ini disebabkan selain akibat faktor pertumbuhan penduduk alami, dipengaruhi juga oleh faktor migrasi penduduk. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, bersumber dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Semester I, bahwa Jumlah Penduduk Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 sebanyak 912.708 jiwa, terdiri dari 463.029 laki-laki dan 449.679 perempuan. Data jumlah penduduk yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data yang disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada perbedaan, hal ini dikarenakan tidak samanya indikator yang digunakan, misalnya BPS tidak menghitung penduduk yang tidak berada di Kabupaten Purwakarta minimal selama 6 bulan, sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap menghitung penduduk tersebut selama masih mempunyai KTP dan terdaftar di Kartu Keluarga.

Dalam dokumen RPJMD ini menggunakan data dari BPS, dengan pertimbangan bahwa jumlah penduduk dari BPS menjadi dasar perhitungan untuk menentukan berbagai indikator makro pembangunan baik tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun tingkat nasional/pusat. Data penyebaran penduduk Kabupaten Purwakarta menurut kelompok umur tahun 2017, dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Penyebaran Penduduk Kabupaten Purwakarta Menurut Kelompok Umur Tahun 2017

No.	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 – 14	121.597	114.308	235.905
2.	15 – 64	315.964	309.012	624.976
3.	65 +	25.468	26.359	51.827
Jumlah		463.029	449.679	912.708

Keterangan: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 yang terbanyak antara usia 15 - 64 tahun yaitu sebesar 68,47%, hal ini menunjukkan penduduk Kabupaten Purwakarta berada dalam usia produktif. Sedangkan berdasarkan gender, Penduduk Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 hampir seimbang, yaitu laki-laki sebanyak 50,73% dan perempuan sebanyak 49,27%.

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan gambaran kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumberdaya manusia yang dimiliki, ini dapat dilihat dari nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi dalam daerah tersebut. Total dari nilai tambah tersebut dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ada dua cara perhitungan PDRB, yaitu PDRB menurut harga berlaku dan PDRB berdasarkan harga konstan. PDRB digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.

Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh factor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta dari tahun 2013-2017, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Purwakarta dari Tahun 2013-2017

NO.	PDRB	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017*)
1.	Atas dasar harga berlaku (milyar)	40.609	45.491	50.141	54.358	58.886
2.	Atas dasar harga konstan 2010 (milyar)	34.216	36.172	37.892	47.107	52.137
3.	Per kapita Atas dasar harga berlaku (milyar)	45.222	49.990	54.407	58.700	63.177
4.	Per Kapita Atas dasar harga konstan 2010 (milyar)	38.103	39.750	41.116	47.144	50.627

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta (Data Diolah)

*)Data Proyeksi Bappeda Kab. Purwakarta

Kinerja pembangunan ekonomi Kabupaten Purwakarta dapat dilihat dari berbagai indikator, seperti pertumbuhan ekonomi makro, struktur perekonomian, pendapatan perkapita dan indikator ekonomi lainnya yang terus menunjukkan pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun. Data PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku sampai dengan Tahun 2017

cenderung mengalami peningkatan, begitu juga dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan mengalami peningkatan. Sedangkan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dari Tahun 2013-2017 meningkat sebesar 32,87%. PDRB Kabupaten Purwakarta selain menunjukkan pertumbuhan ekonomi, juga dapat menggambarkan struktur ekonomi. Struktur ekonomi tersebut dapat dilihat dari peranan masing-masing sector dalam sumbangannya terhadap PDRB total, dimana di Tahun 2017 peranan tersebut didukung oleh kegiatan ekonomi yang tergabung dalam kelompok Sektor Industri Pengolahan, berikutnya Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan kemudian Sektor Pertanian.

b. Laju Inflasi

Dalam ilmu ekonomi, inflasi memiliki pengertian suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinyu). Dengan kata lain peristiwa dan bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Inflasi merupakan gejala kenaikan harga umum yang terjadi pada suatu wilayah, hal ini dipengaruhi oleh harga barang dan jasa serta kebijakan pemerintahan. Dengan kata lain, Inflasi merupakan dinamika harga barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat yang berdampak langsung terhadap daya beli dan biaya hidup masyarakat, perubahan nilai asset/kewajiban serta nilai kontrak/transaksi bisnis. Statistik harga, khususnya statistik harga konsumen dikumpulkan dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Pengukuran inflasi bisa dilakukan dengan menggunakan indeks harga konsumen atau dengan menggunakan deflator PDRB.

Perkembangan inflasi sebagaimana yang tercermin pada nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan, menunjukkan adanya bentuk keseimbangan antara permintaan (demand) dengan penyediaan (supply). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta inflasi tahun 2016 mencapai angka 6.16 persen. sedangkan berdasarkan data proyeksi tahun 2018 angka inflasi meningkat menjadi 4,74 persen. Berikut adalah Tabel Perkembangan Laju Inflasi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2018:

Tabel 2.10
Laju Inflasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018

No	Tahun	Jumlah (%)
1	2013	9.32
2	2014	8.51
3	2015	4,16
4	2016	6,16
5	2017	3,58
6.	2018*)	4,74

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta

*Keterangan: *) data proyeksi Bappedalitbang Kabupaten Purwakarta*

c. Penduduk Miskin

Kemiskinan menurut pengertian umum adalah keadaan dimana individu atau sekelompok masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti makanan, pakaian tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan yang layak. Adapun data penyaluran Raskin Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Penduduk Miskin Kabupaten Purwakarta
Tahun 2013-2017**

No	Tahun	RTS-PM (KK)	Alokasi (Kg/RTS-PM/Bln)	Beras Yang Disalurkan (Kg)
1	2013	48.354	725.310	8.703.720
2	2014	48.354	725.310	8.703.720
3	2015	48.354	725.310	8.703.720
4	2016	48.354	725.310	8.703.720
5	2017	46.582	698.730	8.384.760

Sumber: Bagian Perekonomian Setda.

Keterangan: Kuota alokasi Raskin/Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Penyaluran atau pendistribusian raskin pada tahun 2013 sampai tahun 2016 tidak mengalami perubahan kuota sesuai data yang sudah ditetapkan berdasarkan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS-2011) BPS. Adapun hubungan dalam RTS = PM dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk Kabupaten Purwakarta sebanyak 48.354 KK/RTM atau setara dengan 725.310 Kg/RTS-PM/Bln atau setara dengan 8.703.720 Kg/RTS-PM/Thn. Pada tahun 2017 kuota beras untuk masyarakat miskin di Kabupaten Purwakarta mengalami penurunan sebesar 1.772 RTS-PM (KK) atau sebesar 3,69%, sehingga kuota Raskin untuk Kabupaten Purwakarta pada tahun 2017 sebesar 46.582 RTS-PM (KK) atau setara dengan 698.730 Kg/RTS-PM/Bulan atau setara dengan 8.384.760 Kg/RTS-PM/Tahun, hal ini dikarenakan jumlah/angka/subjek penduduk miskin dipastikan berubah dengan melihat multi faktor. Kabupaten Purwakarta berupaya menekan angka tersebut melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan. Sebagai informasi bahwa Program Penyaluran Raskin, mulai tahun

2017 diganti menjadi Program Subsidi Rastra dan pada tahun 2018 berubah nomenklatur menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

2.2.2 Kesejahteraan Sosial

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak usia Dini merupakan jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak-anak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, dan informal. Perkembangan Pendidikan Anak usia Dini di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017 yang terus bergerak naik dari 22,62% pada tahun 2013 dan mencapai sebesar 45,64% di tahun 2017. Berikut adalah Tabel Pendidikan Anak usia Dini di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017:

Tabel 2.12
Pendidikan Anak Usia Dini
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017

Uraian	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
IKK Pendidikan Anak Usia Dini	22,62	35,76	37,64	38,13	45,64

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta

b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 yang terus bergerak naik dari angka 11,22 pada tahun 2013 kemudian mencapai sebesar 12,09 ditahun 2018. Berikut adalah Tabel Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018:

Tabel 2.13
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018*)
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	11,22	11,33	11,44	11,82	11,89	12,09

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta

**) Data Proyeksi Bappeda Litbang 2019*

d. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Angka Rata Rata Lama Sekolah (RLS), didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Capaian Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Purwakarta terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 capaian Rata Rata Lama Sekolah Kabupaten Purwakarta mencapai sebesar 7.11 tahun dan meningkat perlahan sebesar 7.81 tahun pada tahun 2018. Masih besarnya proporsi penduduk yang hanya berpendidikan SD ke bawah mempunyai kontribusi sebagai penyebab relatif lambatnya kemajuan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Purwakarta. Berikut adalah Tabel Perkembangan

Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018:

Tabel 2.14
Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018

Indeks	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	7,11	7,17	7,35	7,42	7,74	7,81

Sumber: BPS Kabupaten Purwakarta

e. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan atau dalam hal ini Angka Kelulusan (AL) di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017 untuk SD/MI secara umum mengalami perkembangan yang cukup signifikan dimana pada Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 Angka Kelulusan (AL) untuk SMP di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2008 telah mencapai sebesar 100,00%. Berikut adalah Tabel Perkembangan Angka Kelulusan (AL) untuk SD/MI, dan SMP, di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017:

Tabel 2.15
Kelulusan (AL) Untuk SD/MI, dan SMP,
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	99,29	100,00	100,00	100,00	100,00
Angka Kelulusan (AL) SMP(%)	98,99	99,75	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta

f. Angka Partisipasi Murni (APM)

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017 untuk SD/MI/Paket A Sederajat secara umum mengalami perkembangan yang cukup signifikan dimana pada Tahun 2013 Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI/Paket A sederajat di Kabupaten Purwakarta telah mencapai sebesar 98,35% dan pada Tahun 2017 mencapai sebesar 99,53%. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SMP/MTs Sederajat di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2013 sebesar 96,93% dan tahun 2017 sebesar 99,70%. Berikut adalah Tabel Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI/Paket A, dan SMP/MTs Sederajat, di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017:

Tabel 2.16
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk
SD/MI/Paket A Sederajat, dan SMP/MTs Sederajat
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI/Paket A Sederajat	98,35	99,34	99,48	99,50	99,53
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Sederajat	96,93	99,18	99,50	99,69	99,70

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta

g. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Kebijakan Pembangunan dalam Bidang Kesehatan di Kabupaten Purwakarta diarahkan untuk meningkatkan pelayanan dan kesehatan masyarakat. Pencapaian hasil pembangunan Bidang kesehatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017, dapat dilihat dan diukur dari capaian kinerja pada Indikator Derajat

Kesehatan Masyarakat. Derajat Kesehatan masyarakat ini dihitung dari tinggi rendahnya indeks kesehatan, yang dipengaruhi oleh beberapa indikator seperti Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Ibu di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.17
Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Ibu
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017

NO.	URAIAN	TAHUN					KETERANGAN
		2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Jumlah Kasus Kematian						
	A. Neonatal	95	108	107	95	45	Penyebab Kematian: Asfiksia, BBLR, TN, Cacat Bawaan, Pneumonia, Masalah Laktasi dan Lain-Lain.
	B. Bayi	123	138	130	115	52	Penyebab Kematian: ISPA, Diare, Pneumonia, dan Lain-Lain.
2.	Jumlah Kasus Kematian ibu	18	28	30	25	9	Penyebab Kematian: Pendarahan, PEB, Ekslamsia, Infeksi, Partus Lama dan Lain-Lain

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta

Dari tabel dapat dilihat bahwa jumlah kasus kematian neonatal dan ibu dalam kurun waktu lima tahun mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan perkembangan yang positif dari dampak pelayanan yang terus menerus dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada masyarakat diantaranya adalah dengan dilakukannya penyuluhan dan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan status gizi masyarakat (ibu hamil dan bayi); peningkatan kesehatan anak serta peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

h. Angka Harapan Hidup (AHH)

Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purwakarta secara umum mengalami

perkembangan yang cukup signifikan dimana tahun 2013 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Purwakarta mencapai sebesar 69,95 Tahun dan pada Tahun 2018 menjadi sebesar 70,58 Tahun. Berikut adalah Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018:

Tabel 2.18
Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH)
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	69,95	69,96	70,26	70,34	70,42	70,58

Sumber: BPS Kabupaten Purwakarta

i. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

UNDP (*United National Development Programme*) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*princial means*) untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan, (UNDP,1995). Konsep pembangunan manusia dalam pengertian di atas jauh lebih baik dari pada teori-teori pembangunan ekonomi yang konvensional termasuk model pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia (SDM), pendekatan kesejahteraan dan pendekatan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia.

Model pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan-peningkatan dan produksi nasional (GNP). Pembangunan manusia terutama sebagai input dari proses produksi (sebagai suatu sarana bukan tujuan). Pendekatan kesejahteraan melihat manusia

sebagai agen perubahan dalam pembangunan. Pendekatan kebutuhan dasar memfokuskan pada penyediaan barang dan jasa kebutuhan hidup.

Untuk dapat membuat indeks pembangunan manusia (IPM) maka UNDP mensponsori sebuah proyek tahun 1989 yang dilaksanakan oleh tim ekonomi dan pembangunan. Tim tersebut menciptakan kemampuan dasar. Kemampuan dasar itu adalah umur panjang, pengetahuan dan daya beli. Umur panjang yang di kualifikasikan dalam umur harapan hidup saat lahir atau sering disebut Angka Harapan Hidup (AHH). Pengetahuan di kualifikasikan dalam kemampuan baca tulis/angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama bersekolah (RLS). Daya beli di kuantifikasi dalam kemampuan mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak.

Perkembangan IPM kabupaten purwakarta 2013-2018 menunjukkan trend yang meningkat, pencapaian IPM Kabupaten Purwakarta tahun 2013 telah mencapai 72,30. Dalam kurun waktu tersebut, pada seluruh komponen IPM terjadi peningkatan. Berikut adalah Tabel Perkembangan Indeks Kesehatan, Pendidikan dan Daya beli di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018:

Tabel 2.19
Perkembangan IPM (Metode Baru) di Kabupaten Purwakarta
Tahun 2013-2018

Indeks	TAHUN					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
IPM	67,09	67,32	67,84	68,56	69,28	69,70

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta

2.2.3 Seni Budaya dan Olahraga

Budaya dalam sebuah bangsa selalu identic dengan keragaman kesenian yang dimiliki, budaya sebuah bangsa dapat berupa sesuatu yang khas dan dapat mencerminkan identitas bangsa. Pembangunan

Bidang Seni, Budaya Dan Olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Seni budaya merupakan wujud kearifan lokal yang keberadaannya harus dipertahankan oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Purwakarta dari Tahun 2013-2017 telah dilaksanakan selama 14 kali. Dimana sarana penyelenggaraan seni dan budaya terdapat sekitar 6 buah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan mencapai sebanyak 14 buah. Berikut adalah Tabel Perkembangan Seni dan Budaya di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017:

Tabel 2.20
Perkembangan Seni dan Budaya di Kabupaten Purwakarta
Tahun 2013-2017

No	Capaian Pembangunan	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (Kali)	-	3	3	4	4
2	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya (Buah)	4	4	5	5	6
3	Benda, Situs, Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan (Buah)	11	11	12	13	14

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Purwakarta

Sementara itu aktivitas masyarakat dalam menjaga kebugaran tubuhnya dan bersosialisasi, salah satunya ditunjukkan dengan banyaknya klub olahraga. Dari tahun 2013-2018, jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Purwakarta mencapai sekitar 30 buah. Sementara jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Purwakarta sampai dengan Tahun 2018 mencapai sekitar 30 buah dengan kegiatan kepemudaan yang telah dilaksanakan mencapai sebanyak 76 kali.

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 Pelayanan Urusan Wajib

a. Pendidikan

Pelayanan umum di sektor pendidikan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintahan daerah kabupaten purwakarta ditujukan untuk menciptakan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas sebagai salah satu faktor utama pembangunan. Oleh karena itu peningkatan kualitas SDM terutama lebih difokuskan kepada aksesibilitas masyarakat terhadap bidang pendidikan. Relatif baiknya capaian kinerja pada Urusan Pendidikan dapat dilihat dari meningkatnya capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pendidikan dalam rentang waktu 2013-2018. Data IKK Urusan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017, selengkapnya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.21
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pendidikan
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun (%)					Trend (+/-)
		2013	2014	2015	2016	2017	
1.	IKK Pendidikan Anak Usia Dini	22,62	35,76	37,64	38,13	45,64	23,02
2	IKK Penduduk Yang Berusia Dibawah 15 Tahun Melek Huruf	96,50	97,17	97,27	99,55	99,57	0,02
3.	IKK Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Sederajat	98,35	99,34	99,48	99,50	99,53	0,03
4.	IKK Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts Sederajat	96,93	99,18	99,50	99,69	99,70	0,01
5.	IKK Angka Kelulusan (AL) SD/MI Sederajat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	IKK Angka Putus Sekolah (APS) SMP/Mts Sederajat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	IKK Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100	100
8	IKK Angka Kelulusan (AL) SMP	100	100	100	100	100	100
9	IKK Angka Melanjutkan dari SD/MI/Paket A Sederajat ke SMP/Mts Sederajat	100	99,98	100	100	100	100
10	IKK Angka Melanjutkan dari SMP/Mts Sederajat ke SMA/SMK/MA Sederajat	100	99,53	99,54	100	100	100
11.	IKK Guru-Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV	79,60	89,62	91,05	92,27	92,27	0

b. Kesehatan

Guna meningkatkan pelayanan kesehatan harus ditunjang oleh kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan yang baik dan tersebar di setiap kecamatan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan tahun 2018, di Kabupaten Purwakarta terdapat 1 unit rumah sakit negeri (daerah), 1 unit rumah sakit negeri (TNI), 5 unit rumah sakit umum swasta, 1 unit rumah sakit khusus swasta, 3 unit rumah sakit ibu dan anak swasta dan 15 unit rumah sakit bersalin, 20 unit Puskesmas, 44 unit Puskesmas pembantu, 77 Poliklinik kesehatan, dan 1.014 Posyandu yang tersebar di kecamatan, yang diimbangi juga dengan peningkatan jumlah tenaga medis dan keperawatan.

Dalam upaya mempermudah pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Purwakarta sampai dengan tahun 2017 telah membangun 5 unit Puskesmas Rawat Inap (DPT/dengan tempat perawatan) yang berlokasi di Kecamatan Cibatuh, kecamatan Wanayasa, Kecamatan Sukatani, dan Kecamatan Darangdan.

Selain itu untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi telah berdiri 12 unit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) yang berlokasi di Kecamatan Pesawahan, Kecamatan Campaka, Kelurahan Munjuljaya, Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Sukatani, dan Kecamatan Maniis. Berikut adalah Tabel Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan di Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2017:

**Hasil Pelaksanaan Pembangunan
di Bidang Kesehatan Kabupaten Purwakarta
Tahun 2013 – 2017**

No	Uraian	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Rumah Sakit					
	a. Rumah Sakit Negeri (Daerah)	1	1	1	0	0
	b. Rumah Sakit Negeri (TNI)	1	1	1	1	1
	c. Rumah Sakit Umum Swasta	5	5	5	5	5
	d. Rumah Sakit Khusus Swasta	1	1	1	1	1
	e. Rumah Sakit Ibu dan Anak Swasta	4	4	3	3	3
	f. Rumah Bersalin	14	14	15	15	15
2	Jumlah Puskesmas					
	a. Jumlah Puskesmas	20	20	20	20	20
	b. Jumlah Puskesmas dengan Tempat Perawatan (DTP)	4	4	5	5	5
	c. Jumlah Puskesmas Pembantu	44	44	44	44	44
	d. Jumlah Klinik Kesehatan	79	79	77	77	77
	e. Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi	0	0	0	5	5
	f. Jumlah Poned	12	12	12	12	12
	g. Jumlah Posyandu	992	1000	1.010	1.014	1.014
	h. Jumlah Poskesdes	19	19	19	19	19
3	Persentasi Imunisasi					
	a. BCG	95,0	98,46	93,01	96,66	52,52
	b. DPT (DPT 3)	97,1	96,1	100,3	100,85	49,04
	c. Polio (Polio 4)	91,8	96,14	100,65	98,38	47,55
	d. Campak	91,6	94,61	99,82	101,09	48,42
4	Permohonan Register Obat dan Makanan (PIRT)	98	272	266	291	73
5	Operasi Pengawasan Obat dan Makanan (Survei ke PIRT)	98	272	266	291	73
6	Penemuan dan Penanganan Balita Gizi Buruk	70	85	69	100	43
7	Penemuan dan Penanganan Penderita TBC	113,68	84,25	84	83,64	75,52
8	Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	282	236	518	772	78
9	Jumlah Masyarakat Yang Memanfaatkan Jamkesmas (JKN)	68,052	142,878	137,562	138,058	42,281
10	Jumlah Masyarakat Yang Memanfaatkan Program Jampi	21.928	25.357	27.980	138.879	13.571
11	Jumlah Tenaga Kesehatan					
	a. Tenaga Medis (dr. drg)	73	72	63	65	62
	b. Tenaga Keperawatan (Perawat, Perawat Gigi)	201	237	230	221	203
	c. Bidan	317	340	336	344	333

No	Uraian	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
	d. Sanitarian	14	25	33	27	20
	e. Kesehatan Masyarakat	2	18	29	26	33
	f. Nutrisi/Gizi	20	26	25	24	22
	g. Apoteker	4	10	16	13	10
	h. Farmasi	20	23	23	24	23
	i. Analis Kesehatan	23	28	27	28	30
	j. Perkam Medis	1	1	1	1	1
12	Jumlah Persalinan dengan Bantuan Tenaga Kesehatan	21.366	22.775	19.205	10.102	9.592
13	Persentase Ibu Yang Mendapatkan Pelayanan Kehamilan dan Kunjungan Pertama (K1)	100,03	101,05	104,08	106,2	53,64
14	Persentase Ibu Yang Mendapatkan Pelayanan Kehamilan dan Kunjungan 4 kali (K4)	92,20	95,05	99,62	99,67	48,82
15	Persentase Stimulasi Deteksi Intervei Dini Tumbuh Kembang Anak Balita (%)	59,20	56,71	54,53	61,89	52,48
16	Cakupan Pemberian Vitamin A (%)	97,70	98,89	96,92	96,13	97,8
17	Cakupan Penjangkaran Anak Sekolah (%)	94,64	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Cakupan Pemeriksaan Lansia (%)	50,50	7,19	88,87	101,75	13,99
19	Jumlah Kasus Kematian					
	a. Neonatal	95	108	107	95	45
	b. Bayi	123	138	130	115	52
20	Jumlah Kasus Kematian Ibu	18	28	30	25	9

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta

c. Pekerjaan Umum

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Purwakarta Bidang Pekerjaan Umum merupakan prioritas utama, dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang layak dan mampu untuk mendukung tumbuh kembangnya aktivitas sosial-ekonomi masyarakat dalam pendistribusian barang dan jasa. Sebagai daerah yang terus berkembang, kebutuhan akan ketersediaan infrastruktur wilayah yang baik seperti jalan, jembatan, irigasi, drainase, dan air bersih terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Kebijakan dalam Urusan Pekerjaan Umum yang terdapat dalam RPJM 2013-2018 diantaranya: membangun mengembangkan dan memperbaiki ruas-ruas jalan strategis; meningkatkan ketersediaan sarana prasarana air bersih komunal dan perpipaan; meningkatkan dan merevitalisasi fungsi jaringan irigasi dan keadaan air alami berbasiskan partisipasi masyarakat melalui program pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif (ppsip); membangun dan memperbaiki jalan lingkungan; dan membangun dan memperbaiki sistem drainase lingkungan.

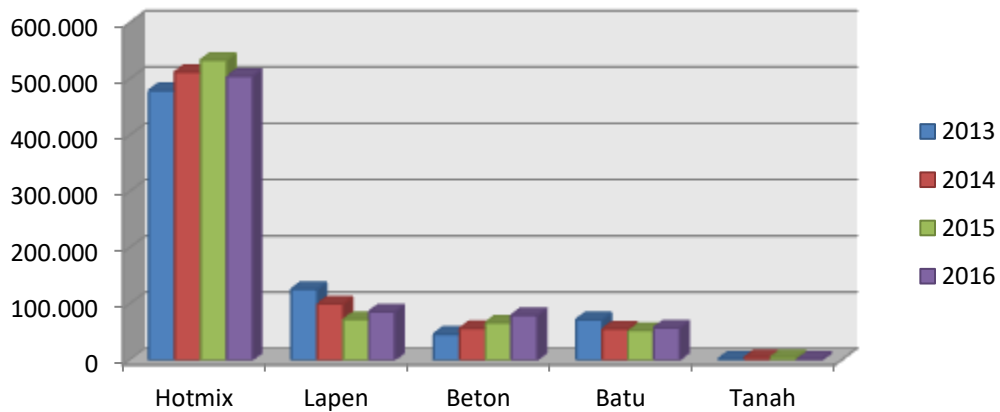
Capaian Urusan Pekerjaan Umum Sub Bidang Jalan, berdasarkan Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta, panjang Jalan Kabupaten sampai dengan tahun 2016 sepanjang 728,924 km, yang terdiri tipe perkerasan Jalan Hotmix sepanjang 504,577 km atau 69,22%, Jalan Aspal Lapen sepanjang 85.783 km atau 11,77%, Jalan Beton sepanjang 79,614 km atau 10,92%, Jalan Batu/Kerikil sepanjang 57,330 km atau 7,87%, dan Jalan Tanah sepanjang 1,620 km atau 0,22%. Komposisi jenis permukaan Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2016, dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 2.23
Komposisi Jenis Permukaan Jalan Kabupaten
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2016

NO.	TIPE PERMUKAAN	PANJANG (Km)			
		2013	2014	2015	2016
1.	Jalan Aspal (hotmix)	479,433	511,992	533,499	504,577
2.	Jalan Aspal (Lapen)	125,761	99,901	72,236	85,783
3.	Jalan Beton	46,135	55,970	66,332	79,614
4.	Jalan Batu/Kerikil	71,771	55,405	52,482	57,330
5.	Jalan Tanah	1,900	4,345	4,375	1,620
JUMLAH		725,000	727,550	728,924	728,924

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta

Komposisi Jenis Permukaan Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2016



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta

Kondisi jalan kabupaten sampai dengan akhir 2018 dalam kondisi baik sepanjang 491,868 km atau 67,48%, kondisi sedang sepanjang 143,219 km atau 19,65%, kondisi rusak sepanjang 60,192 km atau 8,26%, dan kondisi rusak berat sepanjang 33,645 km atau 4,62%. Jalan Kabupaten dalam kondisi baik dari tahun 2013-2016 mengalami peningkatan sebesar 11,71%, kondisi sedang naik 7,43%, Kondisi Rusak turun -19,81% dan kondisi rusak berat berkurang sebesar 55,92%. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dan meningkatkan kondisi jalan kabupaten terus lebih baik. Kondisi jalan kabupaten di Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2016, dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.

Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2016 (dalam Km)

No.	Kondisi Jalan	2013	2014	2015	2016
1.	Baik	440,295	456,628	467,532	491,868
2.	Sedang	133,313	141,640	146,878	143,219
3.	Rusak	75,062	84,997	90,167	60,192
4.	Rusak Berat	76,330	44,285	24,346	33,645
Jumlah		725,000	727,550	728,924	728,924

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta

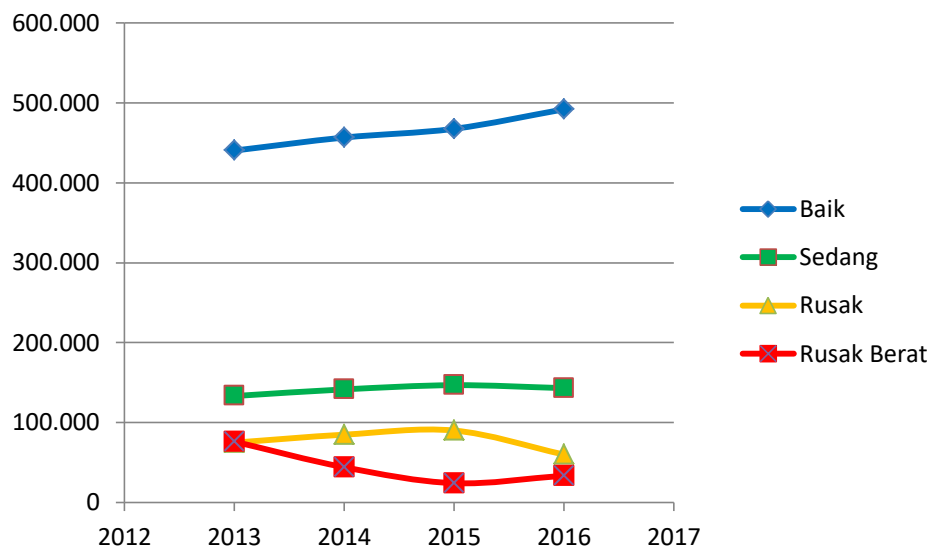
Berikut ini disajikan gambaran kondisi jalan di Kabupaten Purwakarta selama beberapa tahun terakhir sampai dengan Tahun 2018.

Gambar 2.4
Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta
Sampai Dengan Tahun 2018



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta

**Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta
Tahun 2013-2016 (dalam Km)**



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta

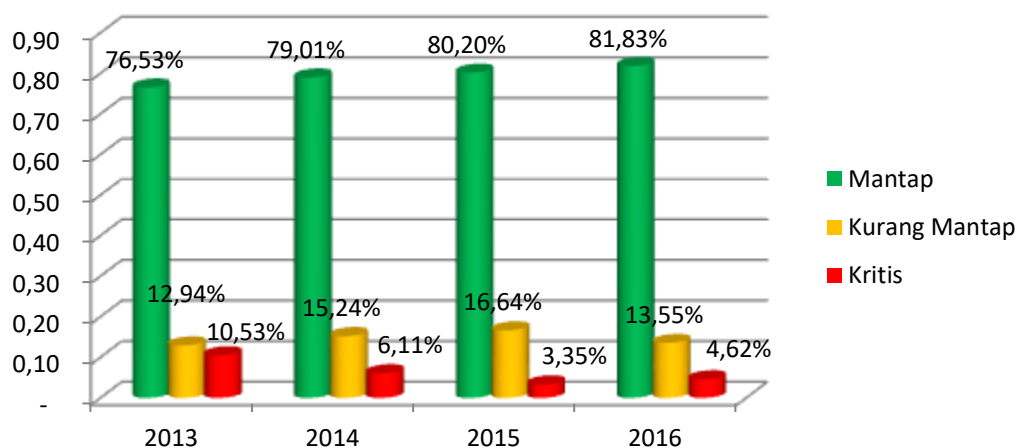
Data tingkat kemantapan jalan kabupaten di Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2016, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.25
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2016 (Km)

No.	Kondisi Jalan	2013	2014	2015	2016
1.	Mantap	554,837	572,803	583,504	596,482
2.	Kurang Mantap	93,833	110,462	121,074	98,797
3.	Kritis	76,330	44,285	24,346	33,645
Jumlah		725,000	725,000	727,550	728,924

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta

Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2016 (%)



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta

Sistem irigasi di Kabupaten Purwakarta terdiri dari Irigasi Teknis, Semi Teknis dan Pedesaan. Sistem Irigasi Teknis secara umum menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat dengan luasan 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha. Irigasi teknis terdiri dari tiga daerah irigasi, yaitu:

- Daerah Irigasi Solokangede 1.553 Ha,
- Daerah Irigasi Wanayasa 1.074 Ha,
- Daerah Irigasi Cisomang 2.117 Ha.

Untuk daerah Irigasi Pedesaan (Semi Teknis dan Sederhana) seluas 10.788 ha. Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bahwa pengelolaan jaringan irigasi di Kabupaten Purwakarta menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Perum Jasa Tirta II dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A). Dalam upaya perbaikan jaringan irigasi, Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan beberapa kegiatan di Daerah Irigasi (DI) kewenangan kabupaten, yaitu dengan Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi. Hasil kegiatan

fisik bidang keirigasian selama kurun waktu tahun 2013-2016, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.26
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2016

NO.	JENIS	TAHUN			
		2013	2014	2015	2016
1.	Saluran (M)	1.446,20	1.446,20	674,90	110,00
2.	Rehabilitasi Lining (M)	30,00	816,50	1.115,00	0
3.	Talang PVC Rangka Baja	86,70	0	2,00	0
4.	Tembok Penahan Tanah (TPT)	86,30	241,95	386,10	0
5.	Rehabilitasi Bendung (Buah)	2,00	2,00	2,00	0
6.	Free Intake	0	1,00	0	0
7.	Terjunan	1,00	3,00	0	0
8.	Bangunan Pengambilan	2,00	0	3,00	0
9.	Bangunan Bagi	0	1,00	2,00	0
10.	Pintu Air	0	2,00	0	0
11.	Pasangan Bronjong	0	18,00	0	0
12.	Normalisasi Saluran	30,00	0	1.218,60	0

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta

Kebutuhan air bersih atau air minum merupakan kebutuhan pokok makhluk hidup baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, komersial maupun untuk kebutuhan lainnya. Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) yang ada di Kabupaten Purwakarta terdiri dari sistem perpipaan dan non-perpipaan. Cakupan layanan administrasi air minum sistem perpipaan perkotaan sebesar 20.85% meliputi Kota Purwakarta, Plered, Wanayasa, Kiarapedes dan Darangdan.

Sedangkan cakupan layanan untuk sistem non-perpipaan dengan sumber air yang digunakan berasal dari sumur dangkal atau mata air yang terlindungi sebanyak 39% atau 443.676 jiwa dan yang tidak terlindungi sebanyak 61% atau 451.911 jiwa.

d. Perumahan

Kebutuhan hunian yang layak di Kabupaten Purwakarta semakin tinggi seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat dan para pengembang kawasan perumahan, namun jumlah keluarga yang belum memiliki tempat tinggal sendiri ternyata masih sangat besar. Kendala yang dihadapi dalam penyediaan perumahan diantaranya adalah ketidakstabilan makro ekonomi yang mempengaruhi harga bahan-bahan bangunan serta keterbatasan kemampuan pembiayaan sebagian kelompok masyarakat.

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan rumah tangga, kawasan permukiman di Kabupaten Purwakarta dari tahun ke tahun semakin tersebar luas dan padat. Agar derajat kesehatan dan tingkat produktifitas penduduk yang tinggal di dalamnya tidak terganggu, kawasan permukiman tersebut perlu didukung oleh sarana prasarana dasar yang memadai. Kenyataannya ketersediaan sarana prasarana dasar di banyak lokasi permukiman dapat dikatakan masih minim. Jumlah fasilitas dan utilitas yang ada belum sebanding dengan penduduk yang harus dilayani. Sementara fasilitas dan utilitas yang ada terus mengalami degradasi seiring dengan perjalanan waktu.

Untuk menghadapi realitas diatas, pemerintah daerah merasa perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka mewujudkan lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan pembangunan bidang perumahan rakyat diarahkan pada upaya meningkatkan dan/atau merangsang tumbuhnya intensitas pembangunan rumah sederhana sehat, meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas dan utilitas lingkungan permukiman, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman.

e. Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Purwakarta memasuki babak baru setelah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031. Fokus utama pembangunan bidang penataan ruang pasca penetapan Perda tersebut lebih diarahkan kepada penyusunan rencana detail dan pemantapan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031, untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten, disusun rencana rinci tata ruang terdiri atas Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten, Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Kabupaten, dan Ketentuan/Peraturan Zonasi. Jumlah total rencana rinci tata ruang yang harus disusun dan ditetapkan sebagai peraturan daerah adalah sebanyak 27 rencana rinci, terdiri dari 15 rencana detail tata ruang kawasan perkotaan, dan 12 rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.

Sampai tahun 2016, jumlah rencana rinci tata ruang yang telah disusun sebanyak 15 rencana rinci, terdiri dari 10 rencana detail tata ruang kawasan perkotaan dan 5 rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten. Tingkat pencapaian penyusunan dokumen rencana rinci tata ruang adalah 55,55%. Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut ini:

**Tingkat Pencapaian Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang
Kabupaten Purwakarta Sampai Dengan Tahun 2018**

No.	Rencana Rinci Tata Ruang	Jumlah Yang Diamoatkatkan RTRW	Jumlah Yang Telah Disusun	Persentase (%)
1.	RTR Kawasan Perkotaan	15	10	66,7
2.	RTR Kawasan Strategis Kabupaten	12	5	41,7
Jumlah		27	15	55,55

Sumber: Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta

Adapun perkembangan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan sampai tahun 2018, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.28
**Perkembangan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Sampai Dengan Tahun 2018**

No.	RDTR	Dokumen	Perda
1.	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Purwakarta	Sudah	Belum
2.	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Wanayasa	Sudah	Belum
3.	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Plered	Sudah	Belum
4.	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Babakancikao	Sudah	Belum
5.	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Bojong	Sudah	Belum
6.	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Pondoksalam	Sudah	Belum
7.	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Campaka	Sudah	Belum
8.	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Pasawahan	Sudah	Belum
9.	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Bungursari	Sudah	Belum
10.	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Sukatani	Sudah	Belum

Sumber: Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta

Sedangkan perkembangan penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten sampai dengan tahun 2016, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.29
Perkembangan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Purwakarta Tahun 2013- 2016

No.	RTR KSK	Dokumen	Perda
1.	Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Perkotaan Cibatu	Sudah	Belum
2.	Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Perkotaan Sawit - Darangdan	Sudah	Belum
3.	Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Sadang	Sudah	Belum
4.	Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Agropolitan Tenggara Kabupaten Purwakarta	Sudah	Belum
5.	Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Jatiluhur	Sudah	Belum

Sumber: Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta

f. Perencanaan Pembangunan

Arahan kebijakan pembangunan Kabupaten Purwakarta untuk Urusan Perencanaan Pembangunan diantaranya adalah meningkatkan kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah; menerapkan mekanisme dan prosedur perencanaan pembangunan daerah; dan meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan data capaian target makrolindikator makro pembangunan, terlihat bahwa capaian Indeks Pembangunan Manusia sampai dengan Tahun 2017 mencapai sebesar 69,16 point; tersedianya sebanyak 424.802 angkatan kerja. terbukanya jumlah kesempatan kerja sebesar 90,94% kesempatan kerja dari 42.066 pencari kerja (data IPM). Peningkatan capaian makro lainnya sampai dengan Tahun 2017 antara lain meningkatnya Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menjadi sebesar 7,45 Tahun; meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH) menjadi sebesar 96,20%, meningkatkan capaian

Angka Harapan Hidup (AHH) menjadi sebesar 67,50%. Berikut adalah Tabel Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017:

Tabel 2.30
Perkembangan Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017

NO.	URAIAN	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Pembangunan Manusia	67,09	67,32	67,84	68,56	69,16
2	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	7.11	7,17	7.35	7.42	7.45
3	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	11,2	11,33	11,44	11,82	12,13
4	Angka Melek Huruf (AMH)	95.59	95.65	95.71	96.07	96.2
5	Angka Harapan Hidup (AHH)	69,95	69,96	70,26	70,34	70,34
6	Pengeluaran (Komponen IPM)	10.492	10.521	10.550	10.721	10.828
7	Pengeluaran Penduduk perkapita (Rp) Berdasar Susunan	882.870	934.754	1.030.583	1.316.748	1.484.290
8	Jumlah Penduduk (Orang)	898.001	910.007	921.598	932.701	947.497
9	Laju Pertumbuhan Pendudukan (%)	1,42	1,33	1,27	1,59	1,35
10	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	7,15	5,72	4,75	5,47	5,29
11	PDRB ADHB Tahun 2000 (Milyar)	40.609.157	45.491.326	50.141.217	54.356.623	58.886.814
12	PDRB ADHK Tahun 2000 (Milyar)	34.216.420	36.172.908	37.892.413	47.107.422	52.137.327

NO.	URAIAN	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
13	PDRB ADH Berlaku Per Kapita (Rp)	45.222	49.990	54.407	58.700	63.177
14	PDRB ADH Konstan Per Kapita (Rp)	38.103	39.750	41.116	47.144	50.627
15	Angkatan Kerja	391.228	407.360	412.842	418.802	424.802
16	Kesempatan Kerja	90,49	92,17	90,00	90,90	90,94
17	Pencari Kerja	37.213	31.905	41.299	40.609	42.066
18	Inflasi (%) per on year	9,32	8,51	4,16	6,16	6,08

Sumber: BPS dan Bappeda Kabupaten Purwakarta 2017 *) Data Proyeksi

g. Perhubungan

Pembangunan bidang perhubungan bertujuan mewujudkan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau. Tantangan utama dalam mewujudkan hal tersebut adalah pertumbuhan jumlah kendaraan yang tinggi, pelayanan transportasi umum yang terbatas, serta budaya tertib berlalu-lintas yang masih rendah. Hal tersebut disinyalir menjadi faktor penyebab utama kemacetan dan kecelakaan lalu-lintas. Sasaran pembangunan bidang perhubungan ditujukan pada tersedianya sistem transportasi yang mendukung kelancaran dan keamanan lalu lintas melalui pengembangan sistem pengaturan dan pengamanan lalulintas kendaraan dan pengembangan pelayanan angkutan umum. Pengujian kendaraan menjadi salah satu faktor penentu bagi peningkatan keselamatan berlalu lintas. Kendaraan yang sudah diuji dan layak jalan, dapat memperkecil kemungkinan adanya kecelakaan lalu lintas. Adapun banyaknya kendaraan yang diuji menurut jenis kendaraan di Kabupaten Purwakarta tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Banyaknya Kendaraan yang Diuji Menurut Jenis Kendaraan
diKabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017**

No.	Jenis Pelayanan	Tahun (Unit)				
		2013	2014	2015	2016	2017
Mobil Bus						
1.	Bus Besar	127	290	226	127	3
2.	Bus Sedang	120	156	166	167	73
3.	Mini Bus (Bus Kecil)	48	43	38	55	24
4.	Angkutan Kota	823	962	846	868	424
5.	Angkutan Perkotaan	823	1016	971	876	395
Mobil Barang						
1.	Truck/Bak Terbuka	2955	3452	3.088	2928	1242
2.	Pick Up	3647	6034	7.133	7040	3360
3.	Box/Bak Tertutup	795	1303	1.687	1871	728
4.	Tanki	50	73	51	43	10
5.	Tracktor	12	14	15	15	5
6.	Kereta Gandengan	1	2	0	0	0
7.	Kereta Tempelan	12	15	15	19	6
8.	Bland Van	24	46	79	119	74
9.	Ambulance	3	4	3	4	2
10.	Derek	3	2	2	1	0
11.	Bestel Wagon	48	37	29	55	8
Kendaraan Khusus						
1.	Kendaraan Bermotor TNI	0	6	0	0	0
2.	Kendaraan Bermotor POLRI	0	0	0	0	0
3.	Alat Berat (Forklift, Crane, Buldozer, Mesin Gilas, Loader)	2	0	0	1	0
4.	Penyandang Cacat	0	0	0	0	0
Jumlah		9.493	13.455	14.349	14.189	6354

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta

Ketersediaan terminal sebagai salah satu simpul sistem transportasi, dapat menjadi sarana untuk menciptakan ketertiban dalam arus lalu lintas kendaraan suatu daerah. Adapun data

terminal di Kabupaten Purwakarta sampai dengan tahun 2017, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.32
Data Terminal di Kabupaten Purwakarta
Sampai Dengan Tahun 2017

NO.	NAMA TERMINAL	LOKASI KECAMATAN	LUAS (M2)	TIPE
1.	Ciganea	Kec. Jatiluhur	1,500 M2	C
2.	Simpang/Gembong	Kec. Purwakarta	2.000 M2	C
3.	Wanayasa	Kec. Wanayasa	1.800 M2	C
4.	Sawit	Kec. Darangdan	1.500 M2	C

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta

Faktor lain yang dapat menentukan keselamatan berlalu-lintas adalah tersedianya berbagai fasilitas atau perlengkapan keselamatan di jalan raya. Di Kabupaten Purwakarta sampai dengan tahun 2017, banyaknya Fasilitas/Perlengkapan Keselamatan Jalan Raya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.33
Banyaknya Fasilitas/Perlengkapan Keselamatan Jalan Raya
di Kabupaten Purwakarta sampai dengan Tahun 2017

NO.	JENIS	S/D TAHUN 2017*)
1.	Rambu Peringatan	78
2.	Rambu Perintah	61
3.	Rambu Perintah	100
4.	Rambu Larangan	176
5.	Apil	26
6.	Zebra Cross	2.220.187
7.	Marka Garis	1.300.67
8.	Guard Rail	532
9.	Halte	13

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta

h. Lingkungan Hidup

Pembangunan bidang lingkungan hidup merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meminimalisir dampak yang ditimbulkan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat terhadap lingkungan hidup. Sasara pembangunan bidang lingkungan hidup pada tahun 2013-2017 adalah meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kualitas ruang dan fasilitas publik, dan terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat.

Tabel 2.34
Rekapitulasi Target Capaian Kinerja Urusan Lingkungan
Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
Tahun 2013-2017

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	ANGGARAN (Rp,00)					TARGET AKHIR RPJM
			2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Meningkatnya aparatur yang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidang LH	Jumlah aparatur yang bersertifikat		16	16	16	16	78
2.	Mewujudkan laboratorium lingkungan yang terakreditasi	jenis layanan pengujian lingkungan hidup yang terakrediasi		-	1	1	1	2
3.	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati	Jumlah dokumen LH yang disusun		4	4	4	4	20
4.	Meningkatkan pengamanan sumber mata air	Prosentase mata air yang diamankan (%)		35	40	45	50	55
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan bidang LH	Waktu penyelesaian rekomendasi dan izin LH		72	69	66	63	60
6.	Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan meningkatkan baku mutu lingkungan	Jenis kualitas lingkungan yang sipantau		2	2	2	2	3

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	ANGGARAN (Rp,00)					TARGET AKHIR RPJM
			2013	2014	2015	2016	2017	
7.	Meningkatnya penataan dan penegakan hukum lingkungan	Prosentase pengaduan dan sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan (%)		65	70	75	80	85

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

Capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup pada Sub Bidang Persampahan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.35
Penanganan Sampah di Perkotaan Kabupaten Purwakarta
Tahun 2016

No.	Jenis	Satuan	Jumlah
1.	Volume produksi sampah rata-rata	M ³ /Hari	3.398,52
2.	Volume Sampah Yang Dapat diangkut ke TPA oleh DKP	M ³ /Hari	500
3.	Volume Sampah Yang Dapat diangkut ke TPA oleh masing-masing kelurahan	M ³ /Hari	114

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

i. Kependudukan dan Catatan Sipil

Kebijakan pemerintah daerah pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil difokuskan untuk mewujudkan sistem layanan administrasi kependudukan (dasar) yang cepat, tepat, tertib dan terjangkau diseluruh desa seta kelurahan, yang dijabarkan pada Program Penatan Administrasi Kependudukan. Adapun capaian jenis pelayanan pada Unusan Kependudukan dan Catatan Sipil, antara lain terlihat dari peningkatan besaran jumlah cakupan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta. Tingginya capaian kinerja urusan Kependudukan dan Catatan Sipil sampai dengan Tahun 2017 sebagian besar didukung oleh

kebijakan kepala daerah dalam bentuk kegiatan intensifikasi pelayanan dokumen kependudukan secara gratis dan *Gempungan di Buruan Urang Lembur* antara lain meliputi kegiatan pelayanan pembuatan KTP, KK dan Akta Gratis. Berikut adalah Tabel Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017:

Tabel 2.36
Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Dokumen Kartu Tanda Penduduk Yang Diterbitkan	417.280	513.260	610.906	665.575	689.205
2	Jumlah Dokumen Kartu Keluarga Yang Diterbitkan	136.905	173.389	240.427	230.808	250.584
3	Jumlah Dokumen Akta Kelahiran Yang Diterbitkan	16.998	22.723	28.688	45.505	17.157
4	Jumlah Dokumen Angka Kematian Yang Diterbitkan	10	27	17	51	205
5	Jumlah Dokumen Akta Perceraian Yang Diterbitkan	53	52	54	48	102
6	Jumlah Dokumen Perceraian Yang Diterbitkan	5	1	2	1	2
7	Jumlah Dokumen SKTT Yang Diterbitkan	232	650	591	623	333
8	Jumlah Dokumen KIK WNA Yang Diterbitkan	242	75	80	64	42
9	Jumlah Dokumen SK Pindah Datang Yang Diterbitkan	0	1.688	3.635	6.011	4.482

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Purwakarta

j. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ibu dan Anak

Kebijakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Purwakarta diarahkan untuk meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak,

menyempurnakan perangkat hukum yang melindungi) setiap individu dan bertagal tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan hukum; memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarus gender dan anak dalam perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup perempuan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta peran perempuan di bidang politik; serta melanjutkan penyusunan data dan statistik gender. Berikut adalah Tabel Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ibu dan Anak di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017:

Tabel 2.37
Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ibu dan Anak di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Presentase Partisipasi PNS Perempuan Pemkab Per Angkatan Kerja Perempuan (%)	0	0	0	9,3	10,7
2	Jumlah KDRT Yang Dilaporkan (Kasus)	0	0	3	5	5
3	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	0	0	0	46.161	43.325
4	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan (Kasus)	0	0	3	5	5

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta

k. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pembangunan pada Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Purwakarta dlarahkan untuk meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, pemberdayaan keluarga, peningkatan

kesehatan reproduksi remaja, pelayanan keluarga berencana, penguatan kelembagaan dan jaringan KB, serta administrasi kependudukan.

Kegiatan ini didukung dengan penyelenggaraan advokasi, konseling dan komunikasi, informasi dan edukasi (KE) bagi masyarakat, keluarga Pasangan Usia Subur (PUS) serta remaja yang membutuhkan. Capaian Kinerja Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sampai dengan Tahun 2017 sebagian besar didukung oleh kebijakan kepala daerah dalam bentuk kegiatan Gempungan antara lain meliputi peningkatan kualitas hidup perempuan diadakan kegiatan pelayanan KB (UD dan implant dengan bekerjasama dengan instansi terkait, antara lain Dinas Kesehatan, serta ikut berpartisipasi pada kegiatan PKK KB-Kes.

Berikut adalah Tabel Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017:

Tabel 2.38
Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Total Fertility Rate (TFR) (Point)	0	0	178.355	174.822	177.358
2	Rasio Akseptor KB (%) / PUS	124.312	135.573	146.778	152.287	169.242
3	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	0	74.78	94.7	79.1	88.2
4	Capaian Akseptor KB Jenis IUD	9.690	10.322	12.277	14.370	17.873
5	Capaian Akseptor KB Jenis Implant	5.323	5.465	6.188	6.906	8.812
6	Capaian Akseptor KB Jenis Suntik	62.903	68.917	75.331	77.427	94.905
7	Capaian Akseptor KB Jenis Pil	41.508	45.703	47.595	46.922	58.354
8	Capaian Akseptor KB Jenis Lainnya	4.888	5.166	5.752	622	8.039

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta

1. Sosial

Kebijakan Pembangunan Sosial di Kabupaten Purwakarta diarahkan pada upaya untuk menyusun kebijakan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS; meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup PMKS dan kelompok rentan lainnya terhadap pelayanan sosial dasar; meningkatkan kualitas hasil penelitian, pengkajian, dan penataan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial: meningkatkan prakarsa dan peran aktif sosial yang melibatkan semua unsur dan komponen masyarakat termasuk dunia usaha, perguruan tinggi, dan Orsos/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial; meningkatkan kualitas penyuluhan kesejahteraan sosial; menjamin ketersediaan bantuan dasar bagi korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lainnya.

Selanjutnya pelayanan kesehatan diarahkan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan yaitu Anak Bermasalah Sosial, Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak Bermasalah Sosial Psikologis, Anak Jalanan, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Wanita Korban Tindak Kekerasan, Wanita Tuna Susila, Lansia Terlantar, Pengemis, Lansia Korban Kekerasan, Gelandangan, Penyandang Cacat, Waria, Penyandang Cacat Eks Penyakit Kronis, Bekas Warga Binaan LK, Korban Penyalahgunaan NAPZA, Keluarga Fakir Miskin, Jumlah Perkembangan Rumah Tidak Layak Huni, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, Komunitas Adat Terpencil, Masyarakat Tinggal Pada Daerah Rawan Bencana, Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Pekerja Migran Bermasalah, Orang dengan HIV/AIDS dan Keluarga Rentan. Berikut adalah Tabel Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2016:

**Perkembangan Kondisi Penyandang Masalah Sosial
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2016**

No.	URAIAN	TAHUN			
		3	4	5	6
1.	Anak Balita Terlantar	62	3	3	35
2.	Anak Terlantar	527	751	751	199
3.	Anak Berhadapan dengan Hukum	40	34	34	34
4.	Anak Bermasalah Sosial Psikologis	-	-	-	-
5.	Anak Jalanan	62	59	74	76
6.	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	1.478	1.480	1.480	3.098
7.	Wanita Korban Tindak Kekerasan	1	-	3	4
8.	Wanita Tuna Susila	215	14	16	13
9.	Lansia Terlantar	1.987	1.778	1.778	960
10.	Pengemis	1.495	13	13	11
11.	Lansia Korban Kekerasan	-	-	-	-
12.	Gelandangan	389	1	1	1
13.	Penyandang Cacat	1.689	1.425	1.425	1.520
14.	Waria	12	-	-	43
15.	Penyandang Cacat Eks Penyakit Kronis	-	-	-	-
16.	Bekas Warga Binaan LK	181	136	136	110
17.	Korban Penyalahgunaan NAPZA	52	3	3	21
18.	Keluarga Fakir Miskin	27.653	34.314	34.314	46.241
19.	Jumlah Perkembangan Rumah Tidak Layak Huni	3.093	9.326	9.326	9.326
20.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	5.227	296	206	104
21.	Komunitas Adat Terpencil	-	-	-	-
22.	Masyarakat Tinggal Pada Daerah Rawan Bencana	-	-	-	-
23.	Korban Bencana Alam	99	209	209	95
24.	Korban Bencana Sosial	122	111	111	149
25.	Pekerja Migran Bermasalah	2	10	17	15
26.	Orang dengan HIV/AIDS	-	-	-	-
27.	Keluarga Rentan	-	-	-	-
Jumlah		44.386	49.873	49.900	62.057

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta

m. Ketenagakerjaan

Permasalahan klasik yang menjadi issue strategis urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Purwakarta yaitu relatif belum meratanya peluang serta rendahnya aksesibilitas kesempatan kerja pada berbagai sektor unggulan yang sesuai dengan sebagian besar kondisi kompetensi SDM tenaga kerja, serta relatif masih adanya peningkatan pengangguran yang disebabkan oleh tingginya tingkat *turn over* pegawai di perusahaan. Oleh karena itu perlu mensinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja serta pelatihan dan pendidikan bagi tenaga kerja siap mandiri dan siap bekerja sesuai dengan ketrampilan serta penyediaan akses informasi pekerjaan bagi tenaga kerja usia produktif, maka program dan kegiatan diarahkan pada tujuan untuk mewujudkan tenaga kerja yang berdaya saing tinggi, profesional dan bermartabat menuju masyarakat Purwakarta yang produktif dan sejahtera.

Iklim ketenagakerjaan di Kabupaten Purwakarta yang perlu mendapat perhatian agar pertumbuhan angkatan kerja sebanding dengan pertumbuhan lapangan kerja, maka pemilihan kebijakan output program kegiatan pembangunannya diarahkan pada: Meningkatkan kualitas angkatan kerja dan pencari kerja; Mengupayakan akselerasi pertumbuhan lapangan kerja; dan Memberikan perlindungan kepada pekerja.

Kebijakan pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam upaya peningkatan capaian pembangunan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dilaksanakan dengan bertujuan Mewujudkan Pembangunan Berbasis Religi dan Kearifan Lokal yang Berorientasi pada Upaya Peningkatan Derajat Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat; dengan sasaran Meningkatkan Kualitas dan Iklim Ketenagakerjaan; dan dilakukan melalui strategi Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja; dengan arah kebijakan Menciptakan

Tenaga Kerja Yang Terampil Sesuai Dengan Kebutuhan Pasar, dan Fasilitas Penyelesaian Masalah-Masalah Ketenagakerjaan.

Dalam upaya peningkatan capaian pembangunan dibidang Urusan Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta sebagai OPD teknis melaksanakan beberapa program strategis dalam pencapaian pembangunan tersebut, diantaranya yaitu Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; Program Peningkatan Kesempatan Kerja; dan Program Perlindungan Pengembangan Lembaga ketenagakerjaan. Berikut ini data perkembangan jumlah pengangguran (Pencari Kerja yang terdaftar) mulai tahun 2013-2017 berdasarkan pada tingkat pendidikan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.40
Perkembangan Jumlah Pengangguran
(Pencari Kerja Yang Terdaftar) di Kabupaten Purwakarta
Tahun 2013-2017

No.	Tingkat Pendidikan	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	SD dan sederajat	1.992	1.628	1.295	921	743
2.	SLTP	5.852	5.484	5.188	4.692	1.530
3.	SLTA	11.677	11.562	12.911	12.681	5.360
4.	Akademi	486	482	375	437	138
5.	Universitas	1.104	794	602	593	208
		2.011	19.950	20.371	19.324	7.969

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta,

**) s/d Semester I tahun 2017.*

Sebagaimana dapat lihat dari data tabel diatas, bahwa jumlah pencari kerja yang terdaftar selama tahun 2017 sebanyak 7.969 orang yang terdiri dari 743 orang yang berpendidikan SD dan Sederajat, 1.530 orang SLTP, 5.360 orang SLTA, 138 orang Diploma, dan 208 orang berpendidikan Sarjana. Karakteristik penduduk yang bekerja di sektor industri dan perusahaan swasta masih menduduki

peringkat teratas, yaitu sebanyak 110,238 orang, disusul oleh penduduk yang bergerak disektor informal lainnya.

Perkembangan jumlah pengangguran (pencarikerja yang terdaftar) pada tahun 2013-2017 berjumlah 91.958 pencari kerja. Sedangkan perkembangan jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan tahun 2013-2017 di Kabupaten Purwakarta tercatat 1.347.978 pekerja. Dari dua data tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun jenis pekerjaan sektor buruh industri/karyawan menjadi sektor yang sangat diminati, akan tetapi tidak menjadikannya menjadi satu-satunya prioritas pilihan lapangan pekerjaan bagi pencari kerja dan/atau angkatan kerja.

Dapat disimpulkan bahwa jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia sebenarnya telah mencukupi untuk menyerap pencari kerja bahkan angkatan kerja jika tidak terpaku pada preferensi para pencari kerja untuk bekerja disektor industri/ manufaktur. Sedangkan jumlah kesempatan kerja yang ada pada tahun 2017 sebanyak 510 orang, sehingga jumlah Angkatan Kerja tahun 2017 tercatat sebanyak 1.035 orang serta pencari kerja sebanyak 7.969 orang. Perkembangan jumlah tenaga kerja Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2017, dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 2.41
Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja
Kabupaten Purwakarta Tahun 2013- 2017

No.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Angkatan Kerja	1.507	1.444	1.481	1.045	1.035
2.	Kesempatan Kerja	1.432	879	1.557	1.099	510
3.	Pencari Kerja (IPM)	21.111	19.950	20.371	19.324	7.969

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Purwakarta

*) tahun 2017 s/d semester I 2017

n. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Purwakarta banyak memberikan kontribusi terhadap sektor industri pengolahan dan perdagangan, sehingga peranannya dipandang sebagai salah satu sektor yang banyak mempengaruhi aspek pendapatan regional bruto masyarakat Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta.

Tabel 2.42
Jumlah Koperasi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Jumlah Koperasi (Unit)				Jumlah
		Aktif	%	Tidak Aktif	%	Total
1.	2013	438	51,96	405	48,04	826
2.	2014	470	54,60	391	45,40	861
3.	2015	473	53,99	403	46,01	876
4.	2016	480	54,29	404	45,71	884
5.	2017	484	54,50	404	49,50	888

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah koperasi aktif di Kabupaten Purwakarta sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 2,54%. Data UMKM binaan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2017, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.43
Data UMKM Binaan di Kabupaten Purwakarta
Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun				
I. Industri						
1.	Jumlah UMKM (Unit)	685	689	864	1.039	1.039
2.	Nilai Usaha (Rp,00)	160.000.000.000	177.570.000.000	177.825.000.000	255.000.000.000	255.000.000.000
3.	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	1.340	1.340	1.665	1.990	1.990
II. Perdagangan						
1.	Jumlah UMKM (Unit)	535	585	710	835	835
2.	Nilai Usaha (Rp,00)	75.000.000.000	81.485.000.000	81.640.000.000	155.000.000.000	155.000.000.000
3.	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	1.165	1.365	1.540	1.715	1.715
III. Aneka Jasa						
1.	Jumlah UMKM (Unit)	222	229	304	379	379
2.	Nilai Usaha (Rp,00)	50.000.000.000	68.441.000.000	68.526.000.000	85.000.000.000	85.000.000.000
3.	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	940	3.890	3.965	4.040	4.040
Jumlah Total UMKM (Unit)		1.442	1.503	1.878	375	375
Nilai Total Usaha (Rp,00)		285.000.000.000	327.496.000.000	327.991.000.000	495.000.000.000	495.000.000.000
Jumlah Total Tenaga Kerja (Orang)		3.445	6.595	7.170	7.745	7.745

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta

Dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai total usaha tahun 2017 bahwa terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2013, yaitu bertambah sebesar 73,68%, jumlah total tenaga kerja mengalami peningkatan sebesar 124,82% bila dibandingkan dengan tahun 2013.

o. Penanaman Modal

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman Modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman Modal luar negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. (Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 1 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3).

Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perijinan dan nonperijinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perijinan dan nonperijinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. (Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 1 ayat 10). Tujuan penyelenggaraan penanamam modal, antara lain untuk (Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 3 ayat 2) adalah Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; Menciptakan lapangan kerja; Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;

Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam Urusan Penanaman Modal ditujukan untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal, untuk penguatan daya saing perekonomian nasional, dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Dalam menetapkan kebijakan ini pemerintah (Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 4 ayat 1 dan ayat 2):

1. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
2. Menjamin hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perijinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam urusan penanaman modal dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2007. Adapun kebijakan daerah terkait Penanaman Modal adalah meningkatnya pertumbuhan investasi PMA dan PMDN, dengan indikator sasaran: Meningkatnya nilai realisasi investasi PMA dan PMDN; Meningkatnya pelayanan administrasi perijinan; dan Mengikuti pameran investasi dalam negeri. BPMPTSP Kabupaten

Purwakarta melaksanakan pemberian pelayanan di bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan Bupati. Dari 43 ijin yang dikelola oleh BPMPTSP pada tahun 2016, BPMPTSP telah mengeluarkan perizinan dan non-perizinan sebanyak 5.558 izin dari 40 jenis perizinan/non-perijinan dengan jumlah retribusi sebesar Rp12.519.702.450,00. Data jumlah ijin dan realisasi retribusi ijin dan nonperijinan Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.44
Jumlah Perijinan Dan Realisasi Retribusi Ijin dan Non Perijinan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017

NO.	TAHUN	JUMLAH PERIJINAN/ NON-PERIJINAN	JUMLAH RETRIBUSI (Rp,00)
1.	2013	8,131	20,479,418,668
2.	2014	6,252	27,325,963,850
3.	2015	5,785	20,310,131,550
4.	2016	5,975	12,519,702,750
5.	2017*)	2,365	271,350,000
JUMLAH		28,508	80,906,566,818

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Purwakarta

*) sampai dengan bulan juli 2017

Tabel 2.45
Jumlah Izin dan Non Perizinan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017

No	JENIS PERIZINAN/ NON-PERIZINAN	JUMLAH IZIN				
		2013	2014	2015	2016	2017*)
1.	IMB	865	741	768	815	416
2.	IZIN PRINSIP	47	46	59	82	21
3.	IZIN LOKASI	71	57	62	49	27
4.	SP3F	29	26	25	13	3
5.	SKFPL/IPPT	45	27	41	17	14
6.	SITU	768	824	763	752	11
7.	SIUP	993	1.017	874	882	403
8.	TDP	1.248	1.261	1.144	1.174	544
9.	IUI	0	0	0	0	0
10.	TDG	10	14	10	21	11
11.	TDI	67	61	54	43	24
12.	IPP	0	1	0	0	0

No	JENIS PERIZINAN/ NON-PERIZINAN	JUMLAH IZIN				
		2013	2014	2015	2016	2017*)
13.	SIPK	288	121	19	0	0
14.	SIUJK	29	87	78	77	29
15.	STPW	3	5	5	6	0
16.	HO	355	381	339	374	276
17.	REKLAME	357	318	324	294	122
18.	SIPA (ABT)	65	56	9	434	0
19.	SIPAM	2	2	2	0	0
20.	IPLP	31	17	15	17	3
21.	IPLC	18	11	26	18	7
22.	SIUP-KP	24	9	0	0	1
23.	IP	2	1	1	0	0
24.	IUKS/IUKU/TPS (B3)	13	52	3	43	23
25.	SIUP-KJA	1.597	120	85	0	1
26.	TRAYEK	243	232	233	203	121
27.	SIPAANGKUTAN/IUA	751	584	643	434	187
28.	IPRS	1	0	-	0	0
29.	IPRB	13	1	2	0	0
30.	IBP/IBAK	48	28	28	23	14
31.	IZIN APOTEK	18	15	17	29	20
32.	IPLPS	2	1	4	4	2
33.	SIBBW /SIBJK	0	0	1	0	0
34.	SIUK	90	106	125	147	74
35.	PKDTB	28	27	23	20	11
36.	REKOM KATERING	0	0	-	0	0
37.	IZIN LABORATORIUM	2	2	1	1	0
38.	IQRS	8	1	2	6	0
JUMLAH		8.131	6.252	5.785	5.978	2.365

Sumber: Dinas Penanaman Modal PTSP (Data s.d bulan Juli 2017)

p. Kebudayaan

Budaya dalam sebuah bangsa selalu identik dengan keragaman kesenian yang dimiliki, budaya sebuah bangsa dapat berupa suatu yang khas dan dapat mencerminkan identitas bangsa tidak terbatas pada keberagaman keseniannya saja. Kebudayaan bangsa Indonesia yang sering disebut dengan budaya nasional erat kaitannya dengan kepribadian bangsa. Dengan demikian kebudayaan khas Indonesia disertai dengan karakter yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Kebudayaan juga merupakan salah satu unsur penting yang dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan strategis yang akan diambil. Kebijakan Pembangunan Urusan Kebudayaan di Kabupaten Purwakarta diarahkan padaupaya untuk

mendorong peningkatan nilai tambah budaya; meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya; serta mengembangkan budaya dan nilai-nilai budaya yang positif.

Berkut adalah Tabel Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017:

Tabel 2.46
Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Kebudayaan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Capaian Kerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyelenggaraan Festival Seni Budaya (Kali)	-	3	3	4	4
2	Jumlah Kelompok Seni Budaya yang Dibina (Buah)	-	3	3	4	4
3	Benda, Situs, Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan (Buah)	-	4	4	6	7

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta

q. Kepemudaan dan Olahraga

Peningkatan partisipasi pemuda, budaya dan prestasi olah raga dilakukan melalui dua fokus prioritas. Pertama, peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan melalui: 1) Peningkatan character building, revitalisasi, dan konsolidasi gerakan kepemudaan. 2) Revitalisasi gerakan pramuka, 3). Pengembangan penguasaan teknologi, jiwa kewiraswastaan, dan kreativitas pemuda. 4). Penyadaran pemuda. 5). Pemberdayaan Pemuda, 6). Pengembangan kepemimpinan pemuda, 7). Pengembangan kewirausahaan pemuda, 8). Pengembangan kepeloporan/ kreativitas pemuda. Kedua: 1) Peningkatan koordinasi dan keemitraan kepemudaan, 2). Pengembangan prasarana dan sarana kepemudaan, 3).

Pemberdayaan organisasi kepemudaan, 4). Peningkatan peran serta masyarakat, dan 5). Pengembangan penghargaan kepemudaan. Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta pada Urusan Kepemudaan dan Olah raga diarahkan kepada pembinaan para pemuda dalam bidang sosial, ekonomi, politik, budaya dan agama; terbinanya kelompok usaha pemuda produktif (KUPP) dan Kelompok Pemuda Sebaya (KPS); terbinanya atlet dikalangan pelajar, terbinanya kelompok/ klub olahraga masyarakat; dan tersedianya sarana olahraga masyarakat.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, sepanjang tahun 2013-2016 tercatat memiliki 192 buah lapangan sepakbola, 69 buah lapangan basket, 266 lapangan volley, 224 buah lapangan bulu tangkis, 7 buah lapangan tenis lapang, 249 buah lapangan tenis meja, 7 buah kolam renang dan lain-lain sebanyak 68 lapangan yang tersebar di 17 kecamatan. Total jumlah sarana prasarana keolahragaan di Kabupaten Purwakarta sebanyak 1.105 unit.

r. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kebijakan pemerintah daerah pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diarahkan untuk meningkatkan penegakkan hukum dan kehidupan berdemokrasi, meningkatkan sistem deteksi dini dan mempersiapkan penanggulangan bencana alam; meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan; memelihara kantrantibmas dan mencegah tindak kriminal; meningkatkan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) memberdayakan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan; pemuktahiran data pemilih; perbaikan proses politik: penyempurnaan dan penguatan kelembagaan demokrasi; pembinaan politik bagi ormas dan LSM; dan pengembangan budaya politik.

Mengintensifkan komunikasi antara masyarakat dan muspida, penanaman wawasan keangsaan kepada masyarakat, menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat akan arti pentingnya keamanan dan ketertiban dalam rangka pelaksanaan pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebagai usaha perwujudan jaminan keamanan dan kestabilan politik daerah yang tangguh demi terselenggaranya pemerintahan daerah yang aman, tertib dan demokratis adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi beberapa kendala/permasalahan di atas.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan bagian perangkat di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satpol PP mempunyai tugas pokok menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Berikut adalah Tabel Indikator Kinerja dari Frekuensi Pengendalian Pengamanan dan Penertiban Penegakan Peraturan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017:

Tabel 2.47
Tabel Indikator Kinerja dari Frekuensi Pengendalian Pengamanan dan Penertiban Penegakan Peraturan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017

Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan pengendalian pengamanan dan Penertiban Penegakan Perda	Frekuensi Pengendalian, Penanganan dan Penertiban Penegakan Perda	127	147	54	79	99

Sumber: Kantor Satpol PP kabupaten Purwakarta

s. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Dalam tataran makro, ada dua hal yang merupakan pekerjaan rumah bagi urusan ini, yaitu Pertama, menentukan arah kebijakan prioritas bidang pemantapan desentralisasi, peningkatan kualitas hubungan pusat daerah, dan antar daerah dan pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah antar kabupaten/kota, meningkatkan kerjasama daerah, serta meningkatkan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Arah kebijakan pembangunan tersebut merupakan pedoman bagi penyusunan berbagai strategi pembangunan. Kedua, merupakan arah kebijakan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dengan membentuk pemerintah daerah yang mampu memberikan pelayanan public yang berkualitas, mendorong terbentuknya organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, serta memiliki kemampuan keuangan yang tinggi dan akuntabel sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian diarahkan pada upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas kelembagaan pemerintah daerah: meningkatkan kapasitas pengelolaan sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten; meningkatkan efektivitas dan optimisasi sumber-sumber penerimaan daerah yang berkeadilan termasuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan dunia usaha dan investasi. Berikut adalah Tabel Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminstrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017:

Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminstrasi Keuangan Daerah: Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Capaian kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Produk Hukum Daerah (Perda) Yang Telah Diterbitkan	18	5	11	10	3
2	Jumlah Produk Hukum Daerah (Perbup) Yang Telah Diterbitkan	114	154	185	228	143
3	Jumlah Produk Hukum Daerah (Kepbup) Yang Telah Diterbitkan	937	974	1170	995	490
4	Nota Kesepakatan/ Perjanjian Kerjasama	3	30	42	37	15
5	Penyaluran Raskin					
	1) PTS-PM (KK)	48.354	48.354	48.354	48.354	46.582
	2) Alokasi (Kg/RTS-M/Bln)	725.310	725.310	725.310	725.310	698.730
	3) Beras yang disalurkan (kg)	8.703.720	8.703.720	8.703.720	8.703.720	8.384.760
6	Jumlah Temuan Dari Inspektorat	771	757	807	671	95
7	Jumlah Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Dari Inpektoran	606	718	694	320	-
8	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dari Inspektoran	68	69	69	69	69
9	TP TGR	5	7	8	7	-
10	Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat	3	-	-	3	-
11	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (Berdasar Golongan I, II, III, Dan IV)					
	1) Laki-laki golongan I	220	208	185	152	129
	2) Laki-laki golongan 2	1440	1393	1.339	1.257	1.202
	3) Laki-laki golongan 3	1.696	1.774	1.830	1.785	1.562
	4) Laki-laki golongan 4	1.447	1.431	1.386	1.315	1.098
	5) Perempuan golongan I	5	6	8	7	7
	6) Perempuan golongan II	944	773	716	614	615
	7) Perempuan golongan III	1.869	1.993	2.191	2.264	2.029
	8) Perempuan	1.764	1.770	1.716	1.666	1.516

No.	Uraian	Capaian kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
	golongan IV					
12	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (Berdasarkan Eselon II, III, IV, Dan V)					
	1) eselon II	29	30	30	28	34
	2) eselon III	153	157	157	158	175
	3) eselon IV	635	649	655	638	678
	4) eselon V	56	57	59	55	-

Sumber: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat dan BKPSDM Kabupaten Purwakarta

t. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan masih menjadi persoalan nasional, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak azasi manusia manusia yang dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman dan beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan). Penyelenggaraan pangan menurut UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Urusan ketahanan pangan tidak ditangani oleh Badan atau Dinas secara khusus, akan tetapi dilaksanakan oleh beberapa Dinas yaitu Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan serta oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta. Kebijakan daerah dalam urusan ketahanan pangan adalah meningkatkan ketersediaan, akses dan panganekaragamana pangan masyarakat. Kebijakan ini mendapat dukungan program

peningkatan ketahanan pangan dan program penyelenggaraan urusan ketahanan pangan daerah.

Adapun capaian urusan ketahanan pangan adalah ketersediaan Energi Per Kapita Kabupaten Purwakarta tahun 2017 diperoleh sebesar 2.679 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein 113,3 g/kap/hari sedangkan pencapaian ketersediaan pangan idealnya sebesar 2.400 kkal/kap/hari dan 65 g/kap/hari berdasarkan WNPG X 2012, sehingga pencapaian ketersediaan Energi Protein Per Kapita pada tahun 2017 sebesar 112%. Apabila capaian tahun 2017 ini dibandingkan dengan target tahun 2016 dan target akhir RPJMD maka capaian ini telah melampaui target yang ditetapkan.

u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Desa secara empiris memiliki peran penting dan strategis dalam menunjang pembangunan. Ditinjau dari segi kewilayahan, desa merupakan wilayah pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat. Secara sosiologis desa berperan strategis sebagai unit sosial dan budaya yang menjadi wadah berlangsungnya sosialisasi, internalisasi dan institusional nilai-nilai sosial dan budaya yang akan membangun mentalitas penduduk desa pada khususnya. Penanganan dan pengelolaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa oleh pemerintah daerah adalah upaya pencapaian pembangunan dalam rangka menumbuh kembangkan dan mewujudkan pembangunan masyarakat dan desa yang memiliki kemampuan serta budaya guna memberikan kontribusinya terhadap proses pembangunan di desa. Pemberdayaan masyarakat lebih dititikberatkan pada upaya partisipasi masyarakat dalam membangun kembali karakter budaya dan tradisi adat istiadat setempat yang menjadi ciri khas kearifan lokal suatu daerah. Pemberdayaan masyarakat sifatnya membangun kesadaran dan memberdayakan kemampuan serta

ketrampilan masyarakat dan desa. Kebijakan pembangunan dalam Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Purwakarta diarahkan pada upaya untuk mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi dengan memperkuat keterkaitan sektoral antara pertanian, industri dan jasa penunjangnya serta keterkaitan spasial antara kawasan perdesaan dan perkotaan; menggalakkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian dan perdesaan lainnya untuk meningkatkan kontinuitas pasokan, khususnya ke pasar perkotaan terdekat serta industri pengolahan berbasis sumber daya lokal; meningkatkan prasarana dan sarana perdesaan; meningkatkan kapasitas masyarakat perdesaan untuk dapat menangkap peluang pengembangan ekonomi serta memperkuat kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan berupa jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Berikut adalah Tabel Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017:

Tabel 2.48
Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) (Buah)	192	192	192	192	192
2	Jumlah Posyandu	992	1.006	1.010	1.014	1.014
3	Jumlah Poskedes	19	19	19	19	19

Sumber : Bagian Pemerintahan Desa SETDA dan Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Ibu dan Anak Kabupaten Purwakarta

v. Kearsipan

Arsip merupakan aset yang paling berharga dan warisan nasional dari generasi ke generasi yang perlu dipelihara dan dilestarikan. Tingkat peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian terhadap arsipnya. Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam rangka meningkatkan sistem administrasi perkantoran yang modern, efisien dan akuntabel ditempuh kebijakan operasional manajemen kearsipan. Kebijakan Pembangunan Urusan Kearsipan di Kabupaten Purwakarta diarahkan pada upaya untuk pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan; Pembangunan Database Informasi Kearsipan; Pembangunan Sarana dan Prasarana; Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip; serta Pemeliharaan Arsip.

Secara umum capaian kinerja Kantor Arsip Daerah mengalami peningkatan dalam pelaksanaan urusan dibidang kearsipan yang berkaitandengan hal penataan dan pengelolaan dokumen kearsipan termasuk penataan dokumen arsip aktif dan non aktif, penyelamatan dokumen arsip dan pembinaan pengelolaan kearsipan. Berikut adalah Tabel Capaian Kinerja Urusan Kearsipan pada Kantor Arsip daerah Kabupaten Purwakarta sampai dengan Tahun 2017 semester pertama , dapat dilihat sebagai berikut:

Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Capaian kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Arsip terdaftar	960	2.184	1.263	3.207	1.096
2	Arsip/Dokumen Terselamatkan	650	1.810	1.263	1.510	419

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta

w. Komunikasi dan Informatika

Pengelolaan urusan Bidang Komunikasi dan Informatika menitikberatkan pada upaya meningkatkan penyediaan informasi pembangunan, keterbukaan informasi publik serta peningkatan sarana komunikasi dan infomatika yang mudah diakses dan diperoleh masyarakat. Dalam pelaksanaan komunikasi dan penyampaian informasi publik pada masa kini harus dituntut serba cepat, akurat dan mudah diakses oleh semua pihak, mengingat perkembangan komunikasi dan informasi public pada masa kini berkembang sangat pesat dan dinamis, oleh karena diperlukan teknologi dan informasi yang unggul dan terkini serta media sarana komunikasi yang efektif dan cepat dalam penyampaian informasi publik tersebut. Kebijakan pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purwakarta diarahkan untuk meningkatkan penyebaran informasi pembangunan. Keterbatasan dan keterisoliran suatu daerah dalam lingkup suatu wilayah dalam menyerap informasi pembangunan dapat berakibat Kurang baik bahkan dapat menimbulkan ekses yang negalit bukan hanya bagi daerah itu sendi melainkan dalam lingkup yang lebih luas dalam sebuah wilayah. Adapun capaian kinerja program dan kegiatan untuk urusan Informasi dan Komunikasi pada Bagian Kaharti Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2013-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.50
Data Hasil Pembangunan pada Bagian Kaharti
Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017

No	Jenis	Satuan	Target RPJMD	Realisasi
1	Jumlah MoU/Perjanjian Kerjasama yang Telah Ditandatangani	buah	11	38
2	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Berkelanjutan	%	70	70
3	Penanganan Gangguan Jaringan IT	titik	52	30
4	Layanan Informasi Publik	%	80	80

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta

x. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan salah satu sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kepribadian melalui penyediaan bahan pustaka yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan menunjukkan semakin pentingnya peran perpustakaan dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan secara demokratis menuju masyarakat cerdas, kritis dan inovatif, disamping sebagai pelestari nilai budaya di masyarakat. Berbagai upaya yang telah dilakukan, menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, antara lain ditandai oleh (1) meningkatnya sarana dan prasarana layanan perpustakaan; (2) tersedianya unit perpustakaan keliling; (3) promosi budaya baca melalui media cetak dan elektronik; (4) berkembangnya unit perpustakaan desa di 17 kecamatan; (5) meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap pentingnya layanan perpustakaan dalam pembangunan. Pengelolaan urusan perpustakaan di daerah lebih menitikberatkan pada penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai, penyediaan bahan pustaka atau koleksi buku yang beraneka ragam, pembinaan perpustakaan sekolah dan luar sekolah/masyarakat dan peningkatan minat baca anak sekolah dan masyarakat. Kebijakan pada Urusan Perpustakaan diarahkan pada upaya untuk

mengembangkan budayabaca dikalangan pelajar dan masyarakat serta membina lembaga-lembaga/ unit-unit perpustakaan yang ada di sekolah dan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pengadaan/penambahan buku/sumber bacaan dan pembinaan unit-unit perpustakaan di sekolah dan masyarakat. Berikut adalah Tabel Jumlah Perpustakaan/layanan Baca Binaan dan Titik Layanan Pusling Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017:

Tabel 2.51
Jumlah Perpustakaan/layanan Baca Binaan dan Titik Layanan Pusling di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Capaian kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Perpustakaan Desa	153	153	153	153	153
2	Perpustakaan SD	4	7	9	11	15
3	Perpustakaan SMP	6	8	8	8	9
4	Perpustakaan Pontren	26	26	26	26	26
5	Perpustakaan Mesjid	20	20	20	20	20
6	Taman Bacaan Masyarakat	3	3	3	3	3
7	Perpustakaan Lapas	1	1	1	1	1
8	Perpustakaan Keliling	93	96	96	96	84

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta

2.3.2 Pelayanan Urusan Pilihan

a. Pertanian

Kewenangan urusan pertanian di Kabupaten Purwakarta ditangani oleh dua OPD, yaitu Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan sejak Januari 2017 menjadi Dinas Pangan dan Pertanian); dan Dinas Peternakan dan Perikanan. Kebijakan umum urusan pertanian adalah meningkatnya produksi berbagai komoditas pertanian dan perkebunan. Arah kebijakan pembangunan pertanian periode Tahun 2013- 2018 sebagaimana tercantum

dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 yang dirumuskan dalam “Sembilan Tangga Cinta Purwakarta Istimewa”, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan bidang pertanian dan kehutanan adalah: Pengembangan sistem pertanian organik di 17 kecamatan yang terintegrasi dengan sistem kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan energi serta penguatan pusat pengobatan tradisional dan lumbung obat tradisional di Kecamatan Pasawahan, Pondoksalam, Wanayasa, Kiarapedes dan Darangdan. Peningkatan kemampuan aparat dan kelompok tani dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui diklat dan bimtek yang diikuti penyuluh dan kelompok tani. Hasil dari kegiatan tersebut berupa penerapan teknologi pertanian oleh 697 kelompok tani yang ada di Kabupaten Purwakarta. Pelaksanaan penanaman/ pengembangan komoditas strategis dan unggulan terdiri dari tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Luas penanaman padi sawah cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kebutuhan masyarakat akan makanan pokok yang berasal dari padi terus meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Sedangkan untuk luas penanaman manggis, teh, cengkeh dan pala mengalami fluktuasi. Luas tanam ubi kayu cenderung menurun karena jatuhnya harga jual dan penurunan kualitas. Perkembangan penanaman per komoditas tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.52
Penanaman Komoditas Strategis dan Unggulan Pertanian

Komoditas	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017*)
Padi sawah (Ha)	35.754	36.851	36.207	44.324	23.390
Manggis (pohon)	-	1.157	2.640	1.746	157
Teh (Ha)	-	15,6	157,5	100	52,1
Cengkeh (Ha)	-	8,39	9,37	3	2,3
Ubi kayu (Ha)	-	3.683	2.121	2.423	1.137

Komoditas	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017*)
Pala (Ha)	-	5,08	19,7	6	12,3

Ket: Data tahun 2017 s/d bulan Juni

Pengembangan pertanian organik yang dikembangkan sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 seluas 145 Ha. Sedangkan lumbung pangan yang dibangun sampai dengan Tahun 2017 sebanyak 24 unit. Untuk pengembangan usaha tani diberikan bantuan kepada kelompok tani. Serta promosi produk pertanian dan kehutanan setiap tahunnya dengan mengikuti Hari Krida Pertanian dan Hari Pangan Sedunia serta mengikuti Pekan Nasional (Pertanian) yang diadakan setiap 5 tahun.

Dari segi sarana dan prasarana, dikembangkan irigasi pertanian berupa Jaringan Irigasi Usaha Tani dan Jaringan irigasi desa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 sebanyak 201 unit yang tersebar di 17 kecamatan. Produksi pertanian berupa tanaman pangan (padi dan palawija) serta sayuran dan buah buahan mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan karena produksi pertanian sangat bergantung pada iklim dan curah hujan. Untuk angka produksi Tahun 2017 belum dapat disajikan dikarenakan belum adanya angka produksi di pertengahan tahun. Gambaran produksi sejak Tahun 2013 – 2016 tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.53
Produksi Tanaman Pangan dan Sayuran serta buah buahan
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2016

Jenis Pangan	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Padi (ton)	225.197	238.927	234.089	271.896
Palawija (ton)	128.325	104.265	71.850	69.579
Sayuran dan buah-buahan (ton)	166.164	213.124	265.997	164.903

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian

Produksi tanaman perkebunan utama terdiri dari teh, cengkeh dan pala. Produksi teh tahun 2016 mengalami peningkatan

apabila dibandingkan dengan tahun 2013. Sedangkan produksi cengkeh dan pala relatif stabil. Produksi komoditas perkebunan sejak tahun 2013 – 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.54
Produksi Tanaman Perkebunan
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2016

Komoditas	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Teh (ton)	5.584	5.522,94	5.482	6.070,86
Cengkeh (ton)	431	446,74	465	411,63
Pala (ton)	36	32,81	36	42,56

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian

Ketersediaan pangan berupa makanan pokok, sayuran dan buah – buahan dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 2.55
Ketersediaan Pangan
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2016

Jenis Pangan	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Beras (ton)	148.817	155.302	149.816	169.130
Umbi – umbian (ton)	113.478	97.980	66.902	61.207
Sayuran dan buah-buahan (ton)	166.164	213.124	265.997	164.903

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian

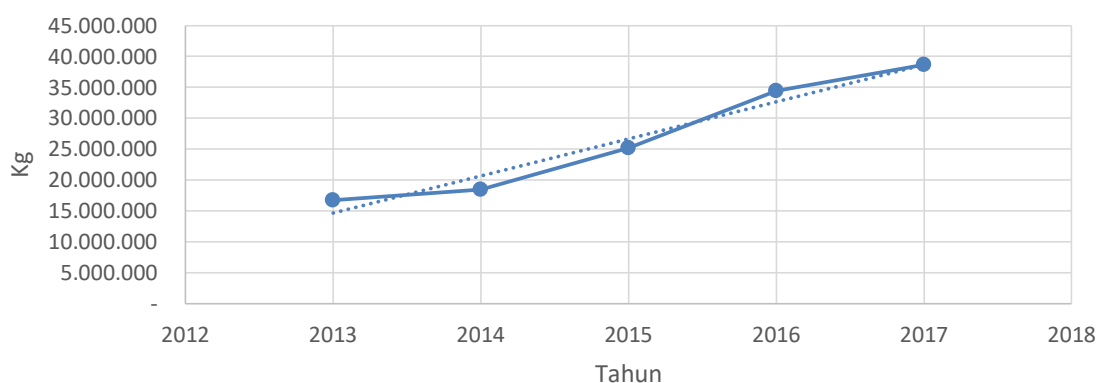
Besarnya produksi pertanian, sangat tergantung pada angka produktivitas yaitu angka produksi pertanian per satuan luas (kuintal /hektar). Untuk tahun 2016 produktivitas komoditas pertanian utama yaitu padi sawah sebesar 62,98 ku/ha, padi lading sebesar 37,83 ku/ha, jagung sebesar 53,58 ku/ha dan ubi kayu sebesar 210,03 ku/ha. Sedangkan untuk produktivitas komoditas perkebunan yaitu teh 1.533 ku/ha, cengkeh 384 ku/ha dan pala 502 ku/ha. Data produksi daging berdasarkan jenis ternak Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2017, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Produksi Daging Berdasarkan Jenis Ternak
Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017**

No.	Jenis Ternak	Produksi (Kg)				
		2013	2014	2015	2016	2017 *)
1.	Sapi Potong	890.102	933.273	939.309	847.115	350,366
2.	Kerbau	16.493	18.521	7.546	3.430	1,419
3.	Kambing	106.916	79.493	164.764	92.339	38,191
4.	Domba	312.190	115.028	20.438	22.903	9,473
5.	Ayam Buras	1.016.040	1.074.914	1.132.785	813.502	336,464
6.	Ayam Ras Pedaging	21.121	15.984.014	22.439.995	31.767.076	13,138,851
7.	Ayam Ras Petelur	14.145.147	21.476	69.324	36.571	15,126
8.	Itik	194.090	203.784	379.752	857.044	298,765
	Jumlah	16.702.060	18.430.504	25.100.357	34.439.980	14,188,655

Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta 2017*) Data sampai dengan triwulan I

Gambar 2.7
Produksi Daging Berdasarkan Jenis Ternak
Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017 (dalam Kg)



Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta

Dari tabel di atas terlihat trend produksi daging secara keseluruhan sampai dengan tahun 2017 semester I mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2016 produksi daging ruminansia seperti daging sapi, kerbau, kambing dan domba mengalami penurunan sebagai dampak beredarnya daging sapi beku dengan harga yang lebih murah di pasar tradisional dan supermarket di Kabupaten Purwakarta.

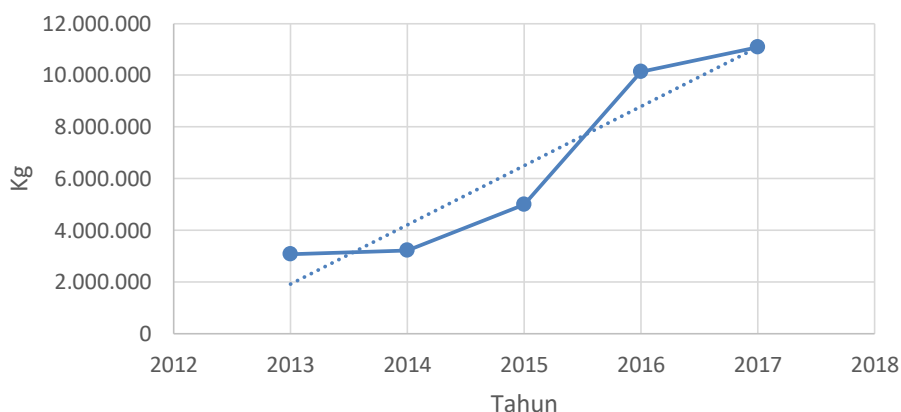
Peningkatan produksi terbesar dicapai oleh komoditi ayam ras pedaging dan itik karena daging ayam pedaging dan itik harganya lebih terjangkau, sehingga masyarakat beralih mengkonsumsi daging ayam pedaging dan itik dibanding daging ruminansia yang jauh lebih mahal. Untuk data produksi hasil ternak di Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2017, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.57
Produksi Hasil Ternak Kabupaten Purwakarta
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Produksi				
		2013	2014	2015	2016	2017 *)
1.	Telur Ayam Buras (Kg)	673.193	712.202	750.545	538.999	225.641
2.	Telur Ayam Ras Petelur (Kg)	371.938	374.393	1.208.540	637.539	266.893
3.	Telur Itik (Kg)	2.025.975	2.127.273	3.964.172	8.946.561	3.163.768
	JUMLAH	3.071.106	3.213.868	4.990.467	10.123.099	3.656.302

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta 2017) Data sampai dengan triwulan I*

Gambar 2.8
Produksi Hasil Ternak Kabupaten Purwakarta
Tahun 2013-2017 (dalam



Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta

Dari tabel di atas terlihat bahwa produksi hasil peternakan secara keseluruhan sampai dengan tahun 2017 semester I mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun 2016 produksi telur ayam buras dan produksi ayam ras petelur mengalami penurunan sebesar 28,19% dibandingkan tahun 2015, sedangkan produksi

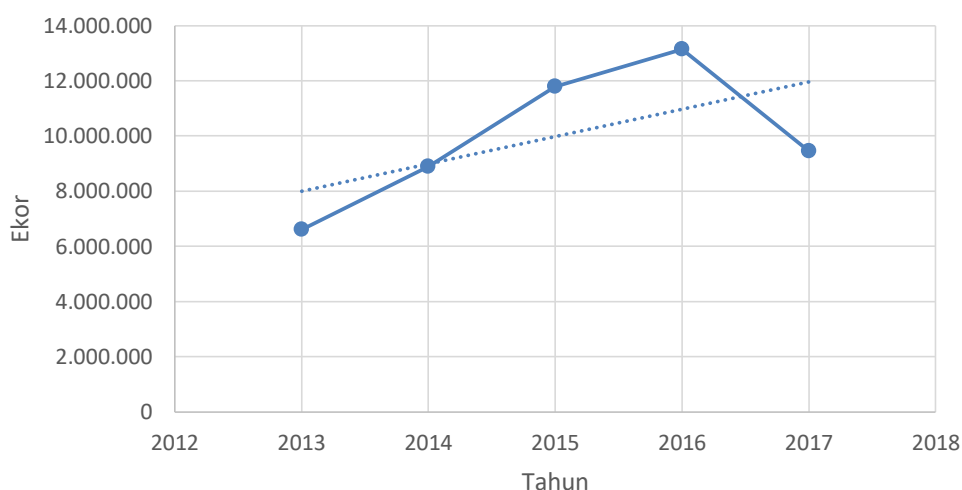
telur itik meningkat besar 125,69%. Data populasi ternak Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2017, dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 2.58
Populasi Ternak Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017

No.	Jenis Ternak	Produksi (Kg)				
		2013	2014	2015	2016	2017 *)
1.	Sapi Potong	11.465	11.591	11.617	11.728	6.807
2.	Sapi Perah	18	18	-	-	-
3.	Kerbau	10.772	11.331	11.733	12.352	6.671
4.	Domba	1.623.715	2.193.502	2.971.152	4.034.777	2.075.432
5.	Kambing	122.469	148.901	161.698	201.881	102.564
6.	Kuda	111	116	118	120	63
7.	Ayam Buras	1.161.292	1.223.813	1.340.271	878.873	626.127
8.	Ayam Ras Petelur	40.732	30.000	55.670	69.361	37.384
9.	Ayam Ras Pedaging	3.317.562	4.657.525	6.538.699	6.593.416	3.476.952
10.	Itik	325.357	606.303	696.521	13.368.337	3.112.676
	JUMLAH	6.613.493	8.883.100	11.787.479	13.170.844	9.444.676

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta

Gambar 2.9
Populasi Ternak Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017
(dalam Ekor)



Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta

Dari grafik di atas terlihat bahwa trend populasi peternakan secara keseluruhan sampai dengan tahun 2017 mengalami

peningkatan, akan tetapi populasi ternak untuk tahun 2017 diprediksi mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2016.

b. Kehutanan

Dalam sektor kehutanan kebijakan prioritas pembangunan RPJMD dalam Pengembangan Kabupaten Purwakarta sebagai Kabupaten Pariwisata juga memberikan peluang bagi pengembangan pariwisata berbasis hutan dan air di Kecamatan Jatiluhur, Sukasari, Tegalwaru dan Sukatani, serta penataan kawasan Hutan Cirende, Wanawali dan Cibukamanah. Dalam hal ini Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan menjadi stakeholder terkait untuk mendukung tercapainya prioritas pembangunan tersebut. Urusan Kehutanan menjadi kewenangan Kabupaten Purwakarta sampai Tahun 2016. Karena sejak Tahun 2017 urusan Kehutanan dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Data produksi hasil hutan kayu Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 - 2016, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.59
Produksi Hasil Hutan Kayu di Kabupaten Purwakarta
Tahun 2013-2016

No.	Asal / Jenis Kayu	Volume (M ³) 2013	Volume (M ³) 2014	Volume (M ³) 2015	Volume (M ³) 2016
I.	Hutan Rakyat				
1.	Jati	0,45	1.863,594	1.047	3.849
2.	Mahoni	3.070,750	64,83	1.623	3.441
3.	Rimba Campuran	2.834,35	284,76	7.420	8.920
4.	Albazia/Sengon	24.007,5	2.277,1	15.041	14.875
	Jumlah I.	29.913,200	4.490,284	25.131	31.085
II.	Hutan Negara (Perum Perhutani KPH Purwakarta)				
1.	Jati	4.712,128	4.249,496	1.022	1.000
2.	Mahoni	1.489,33	879,81	410	677
3.	<i>Accacia mangium</i>	1.366,97	1.880,12	501	774
4.	Rimba Campuran	104,8	467,620	285	199
	Jumlah II.	7.673,228	7.477,046	2.219	2.651
	JUMLAH TOTAL	37.586,278	11.972,33	27.350	33.736

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta

Selain produksi hasil hutan kayu juga dikembangkan komoditi produktif potensi hasil hutan bukan kayu, antara lain jamur kayu, madu, dan sarang burung walet. Data komoditi produktif potensi hasil hutan bukan kayu Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2016, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.60
Komoditi Produktif Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu
Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2016

No.	Komoditi	Produksi 2013	Produksi 2014	Produksi 2015	Produksi 2016
1.	Jamur (Kg)	242.610	7.055	2.800	72.343
2.	Madu (Liter)	13,30	13,30	12	16
3.	Sarang Burung Walet (Kg)	42,30	35,75	31	30,25

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta

Untuk kegiatan rehabilitasi lahan kritis dan pembuatan bangunan konservasi tanah sejak tahun 2013 – 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.61
Rehabilitasi Lahan Kritis
di Kabupaten Purwakarta 2013 – 2016

Kegiatan	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Rehabilitasi Lahan Kritis (Ha)	940	1.119,14	670	490
Bangunan konservasi tanah (unit)	50	0	11	115

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta

c. Energi dan Sumber Daya Mineral

Pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral adalah upaya yang ditujukan untuk pengelolaan sumber dan pemanfaatan bahan dasar yang diperlukan untuk mendukung proses pembangunan itu sendiri, yaitu energi, bahan tambang, dan air tanah. Selain itu, pembangunan urusan ini mempunyai fungsi tambahan yang tidak kalah penting, yaitu memitigasi bencana alam. Sebagaimana diketahui, bencana alam adalah fenomena yang sulit dihindari namun dapat diminimalisir

dampaknya. Selaras dengan hal tersebut, fokus utama pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral pada tahun 2013 sampai dengan 2018 adalah meningkatkan rasio elektrifikasi serta pengendalian pemanfaatan bahan tambang dan air tanah.

Sasaran pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral Kabupaten Purwakarta adalah meningkatnya pengelolaan bahan tambang dan air tanah serta daerah rawan bencana, dengan langkah-langkah strategis berupa optimalisasi pengendalian pemanfaatan bahan tambang, air tanah dan daerah rawan bencana. Sedangkan arah kebijakannya adalah dengan mengembangkan basis data dan pengkajian geologi tata lingkungan/SDA, mengintensifkan pemantauan kegiatan pemanfaatan bahan tambang dan air tanah, mengintensifkan penertiban kegiatan pemanfaatan lahan tambang dan air tanah tidak berijin. Data perkembangan pertambangan dan data Kecukupan Energi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.62
Data Pertambangan di Kabupaten Purwakarta
Tahun 2013-2016

No.	Jenis	Satuan	Tahun /(Jumlah)				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kerusakan lingkungan eks lokasi tambang	Lokasi	-	-	-	-	
2.	Penertiban Tambang tidak Berijin	Lokasi/ M ²	17/80.000	9/109.000	8/144.000	-	
3.	Total area penambangan	Ha	10.148,26	635,68	475,03	342,3	
4.	Penambangan liar/tak berijin	M ²	139.000	109.000	144.000	-	

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Purwakarta

Kecukupan Energi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017

No.	Jenis	Tahun /Jumlah (Kwh)			
		2013	2014	2015	2016
1.	Sosial	7.765.110	10.930.908	7.786.807	8.176.147
2.	Rumah Tangga	173.386.618	217.115.864	197.052.511	206.905.137
3.	Bisnis	38.045.221	53.161.400	41.637.353	43.719.221
4.	Industri	520.359.576	782.598.998	782.598.998	821.728.948
5.	Pemerintah	6.423.837	9.679.266	8.786.807	9.226.147
6.	Multiguna	6.777.957	10.543.632	11.453.720	12.026.406
Jumlah		752.794.319	1.084.030.068	1.049.316.196	1.101.782.006

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Purwakarta

Data pemanfaatan air tanah di Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2016, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.64
Data Pemanfaatan Air Tanah di Kabupaten Purwakarta
Tahun 2013-2016

No.	Jenis	Satuan	Tahun /(Jumlah)			
			2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah ijin SIPA (ABT)	Ijin/Titik sumur	26	98/161	121/198	121/198
2.	Jumlah ijin SIPAM	Ijin	7	5	6	6

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Purwakarta

Sementara itu, capaian kinerja urusan energi sumber daya mineral bidang kelistrikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.65
Jumlah KK Miskin Penerima Bantuan Listrik Pedesaan
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2016

No.	Tahun	Kk Miskin Yang Belum Berlistrik	Realisasi Kk Miskin Berlistrik
1.	2013	9.025	8.401
2.	2014	12.041	11.252
3.	2015	4.339	2.814
4.	2016	4.621	4.325
Jumlah		30.026	26.792

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Purwakarta

d. Pariwisata

Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor perekonomian yang mempunyai keterkaitan dan efek multiplier yang signifikan di tingkat lokal. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang mendiami kawasan yang telah menjadi daerah tujuan wisata pada umumnya relatif cukup baik. Sebagai daerah yang memiliki posisi geografis yang strategis serta objek dan daya tarik wisata yang cukup beragam, wilayah Kabupaten Purwakarta mempunyai potensi untuk menjadi daerah tujuan wisata. Jumlah potensi objek dan daya tarik wisata di wilayah Kabupaten Purwakarta tidak kurang 23 lokasi, baik berupa wisata alam, minat khusus maupun budaya.

Kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2016 diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata. Upaya pengembangan pemasaran pariwisata di wilayah Kabupaten Purwakarta dilaksanakan melalui kegiatan penghargaan aplikasi sapta pesona usaha jasa pariwisata, pengembangan duta wisata, event pameran produk wisata, pemutahiran data pariwisata, pengadaan sarana atraksi Situ Wanayasa, serta pementasan kreasi seni luar daerah. Kabupaten Purwakarta mempunyai berbagai potensi bidang pariwisata, antara lain: wisata alam, wisata budaya dan wisata minat khusus, yang diperkaya dengan seni dan budaya pertunjukan, antara lain tari buncis, calung, pencak silat, wayang golek, kasidah, jaipong dan degung. Data potensi Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) di Kabupaten Purwakarta hingga tahun 2013-2017, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Data Potensi Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW)
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017**

No	Kecamatan	Nama Obyek/ Kawasan Wisata	Jenis/Klasifikasi	Daya Tarik
1	Purwakarta	Air Mancur Taman Sri Baduga (Situ Buleud)	pariwisata alam	Situ/Alam,Taman kota, arena jogging
		Pabrik kain songket	pariwisata buatan	Kerajinan/cinderamata
		Gedung Negara	pariwisata budaya	Bangunan sejarah
		Gedung Karesidenan	pariwisata budaya	Bangunan sejarah
		Makam Baing Yusuf	pariwisata budaya	Ziarah religius
		Mesjid Agung	pariwisata budaya	Ziarah religius
		Rumah Kuno Citalang	pariwisata budaya	Bangunan kuno
		Sanggar Seni	pariwisata budaya	Kesenian Daerah; Atraksi wisata
		Taman Surawisesa	Pariwisata buatan	Taman Bertema/Taman kota
		Taman Maya Datar	Pariwisata buatan	Taman Bertema/Taman kota
		Taman Panca Warna	Pariwisata buatan	Taman Bertema/Taman kota
		Diorama Bale Panyawangan	Museum Digital	Wisata Edukasi
		Taman Cita Resmi	Pariwisata buatan	Taman Bertema/Taman kota
		Taman Pembaharuan	Pariwisata buatan	Taman Bertema/Taman kota
		Taman Pancaniti	Pariwisata buatan	Taman Bertema/Taman kota
		Bale Indung Rahayu	Museum Digital	Wisata Edukasi
		Galeri Wayang	Museum Digital	Wisata Edukasi
		Pusat Bisnis dan Rekreasi (Trans Studio Mini)	Pariwisata buatan	Pusat Bisnis dan Rekreasi
		Kawasan Wisata Alam dan Waterpark	Pariwisata buatan	Wisata Air/Kolam Renang
		Pasanggrahan Padjajaran (Alun-Alun Kian Santang)	Pariwisata buatan	Taman Bertema/Taman kota
2	Jatiluhur	Pariwisata Jatiluhur	pariwisata alam	Danau/PLTA
		Bumi Satelit Indosat	pariwisata buatan	Teknologi; Satelit komunikasi
		Agro Wisata Ubrug	pariwisata alam	Perikanan
		Makam Wali Kuning	pariwisata budaya	Ziarah religius
		Grama Tirta	Pariwisata buatan	Wisata Air/Kolam Renang

No	Kecamatan	Nama Obyek/ Kawasan Wisata	Jenis/Klasifikasi	Daya Tarik
		Jatiluhur		
		Mata Air Cisaladah	pariwisata alam	Wisata Air/Kolam Renang
		Nearbo Forest	Pariwisata buatan	Wisata Edukasi
		Sarana Wisata Tirta dan Kegiatan Usaha Kawasan Pariwisata	Pariwisata buatan	Wisata Air/Kolam Renang
3	Sukasari	Makam Mbah Panyingkiran	pariwisata budaya	Ziarah religius
		Makam Mbah Guha Pangatikan	pariwisata budaya	Ziarah religius
		Makam Mbah Kota Kembang	pariwisata budaya	Ziarah religius
		Parang Gombong	pariwisata alam	Pemandangan alam
		Curug Tilu	pariwisata alam	Wisata Air
		Waduk Jatiluhur	Pariwisata buatan	Danau
		Taman Wisata Alam Sukasari	pariwisata alam	Wisata Alam
4	Campaka	Situ Cikumpay	pariwisata alam	Situ/Perkebunan
		Makam Panembahan Gunung Jatiwangi	pariwisata budaya	Ziarah religius
		Makam Cakrabuana	pariwisata budaya	Ziarah religius
		Wisata Kampung Air Cibayawak	Pariwisata buatan	Wisata Air
		Agrowisata Campaka	pariwisata buatan	Agrowisata
5	Cibatu	Makam Mbah Cakrayuda	pariwisata budaya	Ziarah religius
		Makam Mbah Parung	pariwisata budaya	Ziarah religius
		Taman Wisata Pendidikan Kampung Kahuripan	Pariwisata Alam dan buatan	Wisata Edukasi
6	Bungursari	Situ Kamojing	pariwisata alam	Situ
		Bukit Indah Purwakarta	pariwisata buatan	Kota Industri
		Kawasan Wisata Alam dan Waterpark	Pariwisata alam	Wisata Alam
		Kuya Maranggi Water Park	pariwisata buatan	Kolam Renang
7	Babakan Cikao	Makam Ibu Cikao	pariwisata budaya	Ziarah religius
		Kampung Sadang	pariwisata buatan	Wisata Alam dan Budaya
8	Plered	Sentra Keramik Plered	pariwisata buatan	Kerajinan cinderamata
		Makam Mbah Sumadhita Anggatuda	pariwisata budaya	Ziarah religius

No	Kecamatan	Nama Obyek/ Kawasan Wisata	Jenis/Klasifikasi	Daya Tarik
		Makam Balung Tunggal	pariwisata budaya	Ziarah religius
		Makam Dalem Kuwa	pariwisata budaya	Ziarah religius
		Makam Mama Sempur	pariwisata budaya	Ziarah religius
		Curug Gandasoli	pariwisata alam	Air terjun
		Kampung Budaya Andir	Pariwisata buatan	Wisata budaya
		Makam Dalem Gandasoli	Pariwisata budaya	Wisata ziarah
		Workshop Litbang Keramik	Pariwisata budaya	Wisata edukasi dan cendramata
9	Tegalwaru	Panorama Galumpit	pariwisata alam	Panorama alam; rekreasi air
		Gunung Parang	pariwisata alam	Gunung/Alam ; Panjat Tebing
		Waduk Jatiluhur	pariwisata alam	Danau/PLTA
		Gunung Bongkok	Parawisata alam	Gunung/Alam ; Mendaki
10	Sukatani	Gunung Lembu	Parawisata alam	Gunung/Alam ; Mendaki
		Gunung Cupu	pariwisata alam	Gunung/Alam; Mendaki
		Pusat Penjualan Makanan Khas	pariwisata buatan	Cinderamata/kerajinan
		Waduk Jatiluhur	pariwisata alam	Danau/PLTA
11	Maniis	Waduk Cirata	pariwisata alam	Danau/PLTA
		Agro Wisata Maniis	pariwisata alam	Agro wisata/Alam; Jaring terbung
12	Darangdan	Makam Cotak	pariwisata budaya	Ziarah religius
		Kawasan Kota Hijau	Pariwisata buatan	Wisata Kota berinfrastruktur hijau
		Kawasan Agro Wisata Darangdan	Pariwisata buatan	Agro Wisata
		Adventure Point Alam Sari Wates	Pariwisata buatan	Wisata buatan
13	Wanayasa	Situ Wanayasa	pariwisata alam	Situ/panorama alam
		Curug Cipurut	pariwisata alam	Air Terjun/panorama
		Agro Wisata Manggis	pariwisata alam	Agro Wisata; Perkebunan Manggis
		Makam Dalem Santri	pariwisata budaya	Ziarah religius
		Giri Tirta Kahuripan	pariwisata buatan	Agro Wisata dan Rekreasi
		Goa Jepang	pariwisata buatan	Wisata Sejarah
		River Tubing	Pariwisata alam	Wisata Air
		Kolam Tjek Tse Long	pariwisata buatan	Wisata Air/kolam Renang
		Kawasan Kota Hijau	pariwisata buatan	Wisata Kota berinfrastruktur hijau
14	Kiarapedess	Makam Serpong	pariwisata budaya	Ziarah religius
		Makam Eyang Parta Kusuma	pariwisata budaya	Ziarah religius
		Agro Wisata Golden Melon	pariwisata alam	Agro wisata; Perkebunan Manggis
		Air Panas	pariwisata alam	Sumber Air Panas/

No	Kecamatan	Nama Obyek/ Kawasan Wisata	Jenis/Klasifikasi	Daya Tarik
		Ciracas		Panorama
		Guha Garacina	pariwisata alam	Guha/sejarah
		Pasir Panyawangan	pariwisata alam	Pemandangan
		Curug Pamoyanan	pariwisata alam	Air Terjun
		Leuwi Cidomas	pariwisata alam	Wisata Air
		Saung Manglid	pariwisata alam	Perkebunan, Agro Wisata
15	Bojong	Agro Wisata Perkebunan Teh	pariwisata alam	Perkebunan Teh; Agro Wisata/Alam
		Kampung Cikeris	pariwisata budaya	Desa wisata
		Kolam Jaya Tirta Abadi	Pariwisata buatan	Wisata Air /Kolam Renang
		Kolam Renang Cihanjavar	Pariwisata buatan	Wisata Air /Kolam Renang
		Wisata Pedesaan Lembur Kahuripan	pariwisata budaya	Wisata Edukasi
		Taman Batu Mata Air Cijanun	pariwisata alam dan buatan	Wisata air
		Panenjoan	Wisata Alam	Pemandangan/Panorama Alam
		Makam Eyang Pandita	pariwisata budaya	Ziarah religius
		Kawasan Kota Hijau	pariwisata buatan	Wisata Kota berinfrastruktur hijau
16	Pondoksalam	Makam Mbah Garda	pariwisata budaya	Ziarah religius
		Ranca Darah	pariwisata alam	Perkemahan
		Agropolitan Pondoksalam	pariwisata buatan	Agrowisata

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan

e. Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, pasal 1 ayat 2, perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Pasal 2 mengemukakan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan. Pasal 6

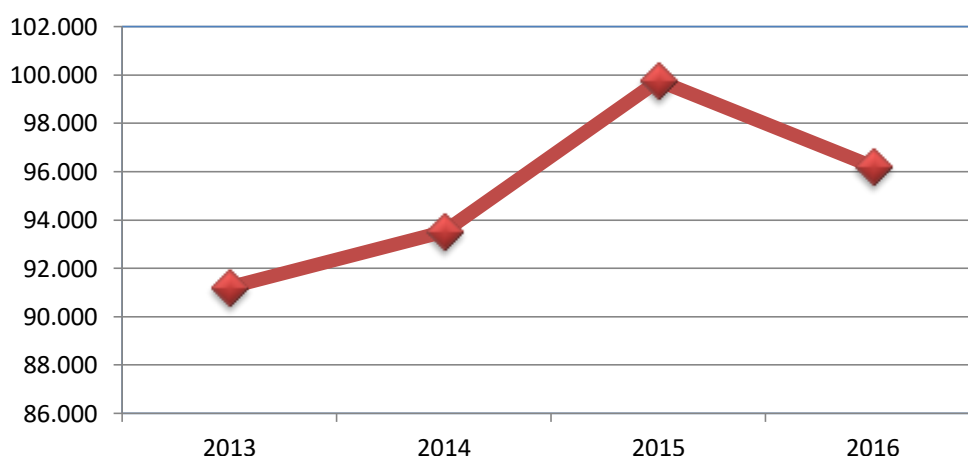
menerangkan bahwa pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan. Data produksi perikanan Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2017, dapat dilihat pada tabel berikut dan grafik berikut ini:

Tabel 2.67
Produksi Perikanan Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017

No.	Jenis Ikan	Produksi (Ton)				
		2013	2014	2015	2016	2017*)
1.	Mas	37.336,18	38.147,02	41.620,77	43.411,20	35.700,4
2.	Nila	34.472,39	35.782,91	37.853,56	35.226,80	29.885,7
3.	Gurame	6,10	7,5	6,93	11,00	5,85
4.	Tawes	0,62	0,89	14,35	12,70	6,35
5.	Sepat Siam	4,40	6,43	7,87	6,00	3,25
6.	Lele	303,29	320,62	318,14	323,35	157,95
7.	Patin	11.239,79	11.321,94	10.210,76	9.851,55	8.182,32
8.	Bawal	7.779,10	7.905,02	9.636,93	7.212,75	7.025,4
9.	Ikan Lainnya	68,96	31,35	102,85	159,95	81,7
	JUMLAH	112.265,82	93.523,37	99.772,16	96.215,30	80.960,87

Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta 2017) Data sampai dengan triwulan I*

Gambar 2.10
Produksi Perikanan Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017
(dalam Ton)



Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta

Dari tabel di atas terlihat produksi perikanan secara keseluruhan sampai dengan tahun 2017 semester I di Kabupaten Purwakarta cenderung fluktuatif, pada tahun 2016 mengalami penurunan produksi sebesar 3,56%. Khusus untuk produksi ikan gurame mengalami peningkatan sebesar 58,735, ikan mas 4,30% dan ikan lele 1,64%.

f. Perdagangan

Kewenangan Pemerintah untuk Urusan Perdagangan di Kabupaten Purwakarta menjadi kewenangan dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta. Dalam rangka pencapaian strategi pembangunan daerah di bidang perdagangan, Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan telah menetapkan arah kebijakan pembangunan. Adapun arah kebijakan pembangunan untuk urusan perdagangan adalah meningkatnya daya saing komoditas perdagangan serta meningkatnya perlindungan konsumen, dengan indikator sasaran sebagai berikut: Terciptanya pasar tradisional yang modern sebanyak 4 unit; Terbangunnya kantor pengelola/pelayanan pasar tradisional yang representatif sebanyak 3 unit; Terbentuknya Peraturan (regulasi) tentang Penataan dan pemetaan lokasi Pasar Modern sebanyak 1 aturan; Tertatanya sarana dan prasarana yang representatif untuk Pedagang Kaki Lima dan Asongan di 1 lokasi; Pengawasan barang/ jasa terhadap 300 pelaku usaha; dan Penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen.

Dalam bidang perdagangan, pasar merupakan salah satu tempat dimana pertukaran terjadi, sehingga roda perekonomian meningkat. Pasar di Kabupaten Purwakarta dikelompokkan kedalam tiga jenis pasar, yaitu Pasar Modern (*hypermarket, departemen store, super market dan mini market*), Pasar Tradisional

(pasar milik pemerintah kabupaten maupun yang dikelola oleh pihak swasta) dan Pasar Desa (pasar milik pemerintah desa). Data jumlah pasar di Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2017, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.68
Jumlah Pasar di Kabupaten Purwakarta
sampai dengan Tahun 2013-2017

No.	Jenis Pasar	Jumlah				
		2013	2014	2015	2016	2017*)
1.	Pasar Modern	5	5	8	14	15
2.	Mini Market	90	100	100	112	115
3.	Pasar Tradisional	5	5	5	5	5
4.	Pasar Desa	12	12	12	12	12
	JUMLAH	112	122	125	143	147

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta, 2017) Data sampai dengan triwulan I*

Sementara itu, berdasarkan data ekspor Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2017, terlihat ekspor pada tahun 2013-2016 mengalami peningkatan, begitu juga untuk nilai ekspor cenderung meningkat, dengan negara tujuan ekspor sebanyak 80 negara. Hal ini seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.69
Ekspor Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017

No.	Jenis Pasar	Jumlah				
		2013	2014	2015	2016	2017*)
1	Eksportir (perusahaan)	55	56	56	60	63
2	Nilai Ekspor (USD)	664.209.800	686.786.440	681.500.420	749.650.462	383.546.371
3	Negara Tujuan Ekspor (negara)	114	114	114	78	80
4	Jumlah Komoditas (jenis)	26	42	42	48	50

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta 2017) Data sampai dengan triwulan I*

g. **Industri**

Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. Sedangkan industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan: Mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional; Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri; Mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau; Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau poenguasaan Industri oleh satu Kelompok atau Perseorangan yang merugikan masyarakat; Membuka kesempatan berusaha dan peluasan kesempatan kerja; Mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional; dan Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Industri khususnya industri kecil dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu: Industri Agro dan Hasil Hutan (IAHH), Industri Kimia, Pulp dan Kertas (IKPK) serta Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA). Banyaknya unit usaha tenaga kerja industri kecil menurut kelompok di Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2017, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.70
Banyaknya Unit Usaha Tenaga Kerja Industri Kecil Menurut
Kelompok di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017

No.	Jenis Industri Kecil	Jumlah				
		2013	2014	2015	2016	2017*)
I.	IAHH					
1.	Unit Usaha (UU)	2.516	2.516	2.528	2.506	2.528
2.	Tenaga Kerja (TK)	8.722	8.722	8.789	8.762	8.789
II.	ILMEA					
1.	Unit Usaha (UU)	761	761	769	696	769
2.	Tenaga Kerja (TK)	9.299	9.299	9.303	9.303	9.311

No.	Jenis Industri Kecil	Jumlah				
		2013	2014	2015	2016	2017*)
III.	IKPK					
1.	Unit Usaha (UU)	631	631	638	638	640
2.	Tenaga Kerja (TK)	3.213	3.213	3.243	3.240	3.243
	Jumlah Unit Usaha	3.908	3.908	3.935	3.840	3.937
	Jumlah Tenaga Kerja	21.234	21.234	21.335	21.305	21.343

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta 2017*) Data sampai dengan triwulan I

Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah industri kecil di Kabupaten Purwakarta tahun 2017 semester I sebanyak 3.937 unit dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 21.343 orang.

h. Ketransmigrasian

Kebijakan Urusan Ketransmigrasian di Kabupaten Purwakarta diarahkan pada pembinaan, penyuluhan dan penempatan transmigran serta pembinaan pasca transmigrasi. Transmigrasi regional dilaksanakan melalui rekrutmen dan pembekalan calon transmigran dan penjajagan kerjasama transmigrasi regional antar daerah. Transmigrasi tidak lagi hanya merupakan program pemindahan penduduk, melainkan upaya untuk pengembangan suatu wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan top down dari pusat, melainkan berdasarkan kerjasama antar daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi.

Dalam pengelolaan urusan bidang ketransmigrasian menitikberatkan pada pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penjajagan daerah transmigrasi dan kerjasama antar daerah serta perekrutan dan pembekalan bagi calon transmigran. Capaian pembangunan di bidang ketransmigrasian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Soaial dan Transmigrasi tahun 2013 sampai dengan 2017 telah melaksanakan penjajagan dan kerjasama transmigrasi antar daerah sebanyak 8 daerah atau lokasi transmigrasi, sedangkan jumlah kepala keluarga yang telah diberangkatkan sampai dengan tahun 2016 sebanyak 60 KK dan 224 jiwa. Adapun

jumlah KK yang diberangkatkan tahun 2016 sebanyak 13 KK/47 orang dengan lokasi transmigrasi ke Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kolaka Timur – Sulawesi Tenggara. Lokasi atau tujuan para transmigran yang paling banyak adalah Pulau Kalimantan kemudian Pulau Sulawesi dan Sumatera, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.71
Capaian Perkembangan jumlah Transmigrasi dan Lokasi Pemukiman Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2016

No.	Uraian	Jumlah Transmigrasi			
		2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
1	UPT Hyangbana Kabupaten Kelingan, Kalimantan Tengah		20 KK/ 82 orang		
2	UPT Sebruga Kabupaten sambas, Kalimantan Barat		5 KK/ 23 orang		
3	UPT Buaya Cecer Mas SP.10 Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan		3 KK/10 orang		
4	UPT Tumbang Jatuh SP.1 Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah	10 KK/ 36 orang			
5	KabupatenKonawe Utara, Sulawesi Tenggara		4KK/6 orang		
6	Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah			5 KK/ 20 orang	
7	Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah				4 KK/ 15 orang
8	Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara				9 KK/ 32 orang
	Jumlah	10 KK/ 36 orang	32 KK/ 121 orang	5 KK/ 177 orang	13 KK/ 47 orang

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta.

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, provinsi, nasional atau internasional. Kondisi daya saing dapat digambarkan melalui Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan. Data Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan untuk Makanan dan Bukan Makanan Tahun 2016 dan Tahun 2017. Dari tabel tersebut terlihat bahwa selama periode Tahun 2016 - 2017 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Penduduk Kabupaten Purwakarta mengalami peningkatan dari sebesar Rp. 911.551,00 pada Tahun 2016 menjadi Rp. 1.102.997,00 di Tahun 2017:

Tabel 2.72
Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 – 2017

JENIS PENGELUARAN	TAHUN 2016		TAHUN 2017	
	Rp	%	Rp	%
Padi- Padian	66.322	7,28	56.591	5.13
Umbi-Umbian	4.407	0,48	5.540	0.50
Ikan	24.115	2,65	35.756	3.24
Daging	25.543	2,80	33.335	3.02
Telur dan Susu	30.859	3,39	30.445	2.76
Sayur-Sayuran	26.358	2,89	38.699	3.51
Kacang-Kacangan	11.614	1,27	13.345	1,21
Buah-Buahan	20.130	2,21	26.893	2,44
Minyak dan Lemak	10.788	1,18	11.336	1.03
Bahan Minuman	15.701	1,72	17.176	1.56
Bumbu-Bumbuan	11.479	1,26	12.110	1.09
Konsumsi Lainnya	14.279	1,57	16.145	1.46
Makanan dan Minuman Jadi	155.560	17,07	219.477	19.90
Tembakau dan Sirih	75.600	8,29	84.769	7.68
Jumlah Makanan	492.754	54,06	601.617	54.54
Perumahan dan Fasilitas Rumah	222.589	24,42	239.798	21.74
Barang dan Jasa	103.416	11,35	100.424	9.10
Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala	29.558	3,24	35.476	3.22
Barang-Barang Yang Tahan Lama	41.517	4,55	74.203	6.73

JENIS PENGELUARAN	TAHUN 2016		TAHUN 2017	
	Rp	%	Rp	%
Pajak dan Asuransi	13.518	1,48	28.121	2.55
Keperluan Pesta dan Upacara	8.199	0,90	23.358	2.12
Jumlah Bukan Makanan	418.797	45,94	501.380	45.46
Total	911.551	100	1.102.997	100

Berikut adalah Tabel Capaian Indikator Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2017:

Tabel 2.73
Tabel Capaian Indikator Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2017

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Milyar	40.609	45.491	50.141	54.358	58.886
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	Milyar	34.216	36.172	37.892	47.107	52.137
3	PDRB Per kapita Atas Dasar Harga Berlaku	Milyar	45.222	49.990	54.407	58.700	63.177
4	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	Milyar	38.103	39.750	41.116	47.144	50.627
5	Laju Inflasi	%	9,32	08,51	4,16	6,16	3,58
6	Penduduk Miskin	RTS-PM KK	48.354	48.354	48.354	48.354	46.582
7	IKK Pendidikan Anak Usia Dini	%	22,62	35,76	37,64	38,13	45,64
8	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	%	11,22	11,33	11,44	11,82	11,89
9	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	%	7,11	7,17	7,35	7,42	7,74
10	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	99,29	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Angka Kelulusan (AL) SMP	%	98,99	99,75	100,00	100,00	100,00
12	Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI/Paket A Sederajat	%	98,35	99,34	99,48	99,50	99,53
13	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Sederajat	%	96,93	99,18	99,50	99,69	99,70
14	Bayi	Bayi	123,00	138,00	130,00	115,00	52,00
15	Jumlah Kasus Kematian ibu	Ibu	18,00	28,00	30,00	25,00	9,00
16	Angka Harapan Hidup (AHH)	Pertahun	69,95	69,96	70,26	70,34	70,42
17	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	67,09	67,32	67,84	68,56	69,28
18	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kali	-	3,00	3,00	4,00	4,00
19	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Buah	4,00	4,00	5,00	5,00	6,00
20	Benda, Situs, Dan Kawasan	Buah	11,00	11,00	12,00	13,00	14,00

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
	Cagar Budaya Yang Dilestarikan						
B	ASPEK PELAYANAN UMUM						
1	IKK Pendidikan Anak Usia Dini	%	22,62	35,76	37,64	38,13	45,64
2	IKK Penduduk Yang Berusia Dibawah 15 Tahun Melek Huruf	%	96,50	97,17	97,27	99,55	99,57
3	IKK Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Sederajat	%	98,35	99,34	99,48	99,50	99,53
4	IKK Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts Sederajat	%	96,93	99,18	99,50	99,69	99,70
5	IKK Angka Kelulusan (AL) SD/MI Sederajat	%	-	-	-	-	-
6	IKK Angka Putus Sekolah (APS) SMP/Mts Sederajat	%	-	-	-	-	-
7	IKK Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	IKK Angka Kelulusan (AL) SMP	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	IKK Angka Melanjutkan dari SD/MI/Paket A Sederajat ke SMP/Mts Sederajat	%	100,00	99,98	100,00	100,00	100,00
10	IKK Angka Melanjutkan dari SMP/Mts Sederajat ke SMA/SMK/MA Sederajat	%	100,00	99,53	99,54	100,00	100,00
11	IKK Guru-Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV	%	79,60	89,62	91,05	92,27	92,27
12	Jumlah Rumah Sakit						
	a. Rumah Sakit Negeri (Daerah)	Buah	1,00	1,00	1,00	-	-
	b. Rumah Sakit Negeri (TNI)	Buah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	c. Rumah Sakit Umum Swasta	Buah	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	d. Rumah Sakit Khusus Swasta	Buah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	e. Rumah Sakit Ibu dan Anak Swasta	Buah	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00
	f. Rumah Bersalin	Buah	14,00	14,00	15,00	15,00	15,00
13	Jumlah Puskesmas						
	a. Jumlah Puskesmas	Buah	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	b. Jumlah Puskesmas dengan Tempat Perawatan (DTP)	Buah	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00
	c. Jumlah Puskesmas Pembantu	Buah	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
	d. Jumlah Klinik Kesehatan	Buah	79,00	79,00	77,00	77,00	77,00
	e. Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi	Buah	-	-	-	5,00	5,00
	f. Jumlah Poned	Buah	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	g. Jumlah Posyandu	Buah	992,00	1.000,00	1.010,00	1.014,00	1.014,00
	h. Jumlah Poskesdes	Buah	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
14	Persentasi Imunisasi						
	a. BCG	%	95,00	98,46	93,01	96,66	52,52
	b. DPT (DPT 3)	%	97,10	96,10	100,30	100,85	49,04
	c. Polio (Polio 4)	%	91,80	96,14	100,65	98,38	47,55
	d. Campak	%	91,60	94,61	99,82	101,09	48,42
15	Permohonan Register Obat dan Makanan (PIRT)	Kali	98,00	272,00	266,00	291,00	73,00
16	Operasi Pengawasan Obat dan	Kali	98,00	272,00	266,00	291,00	73,00

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
	Makanan (Survei ke PIRT)						
17	Penemuan dan Penanganan Balita Gizi Buruk	Kasus	70,00	85,00	69,00	100,00	43,00
18	Penemuan dan Penanganan Penderita TBC	Kasus	113,68	84,25	84	83,64	75,52
19	Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	Kasus	282	236	518	772	78
20	Jumlah Masyarakat Yang Memanfaatkan Jamkesmas (JKN)	Orang	68,052	142,878	137,562	138,058	42,281
21	Jumlah Masyarakat Yang Memanfaatkan Program Jampi	Orang	21.928	25.357	27.980	138.879	13.571
22	Jumlah Tenaga Kesehatan						
	Tenaga Medis (dr. drg)	Orang	73,00	72,00	63,00	65,00	62,00
	Tenaga Keperawatan (Perawat, Perawat Gigi)	Orang	201,00	237,00	230,00	221,00	203,00
	Bidan	Orang	317,00	340,00	336,00	344,00	333,00
	Sanitarian	Orang	14,00	25,00	33,00	27,00	20,00
	Kesehatan Masyarakat	Orang	2,00	18,00	29,00	26,00	33,00
	Nutrisiionist/ Gizi	Orang	20,00	26,00	25,00	24,00	22,00
	Apoteker	Orang	4,00	10,00	16,00	13,00	10,00
	Farmasi	Orang	20,00	23,00	23,00	24,00	23,00
	Analisis Kesehatan	Orang	23,00	28,00	27,00	28,00	30,00
	Perekam Medis	Unit	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
23	Jumlah Persalinan dengan Bantuan Tenaga Kesehatan	Kali	21.366,00	22.775,00	19.205,00	10.102,00	9.592,00
24	Persentase Ibu Yang Mendapatkan Pelayanan Kehamilan dan Kunjungan Pertama (K1)	%	100,03	101,05	104,08	106,20	53,64
25	Persentase Ibu Yang Mendapatkan Pelayanan Kehamilan dan Kunjungan 4 kali (K4)	%	92,20	95,05	99,62	99,67	48,82
26	Persentase Stimulasi Deteksi Intervei Dini Tumbuh Kembang Anak Balita	%	59,20	56,71	54,53	61,89	52,48
27	Cakupan Pemberian Vitamin A	%	97,70	98,89	96,92	96,13	97,80
28	Cakupan Penjarangan Anak Sekolah	%	94,64	100,00	100,00	100,00	100,00
29	Cakupan Pemeriksaan Lansia	%	50,50	7,19	88,87	101,75	13,99
30	Jumlah Kasus Kematian						
	a. Neonatal	Orang	95,00	108,00	107,00	95,00	45,00
	b. Bayi	Bayi	123,00	138,00	130,00	115,00	52,00
31	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Ibu	18,00	28,00	30,00	25,00	9,00
32	Komposisi Jenis Permukaan Jalan Kabupaten						
	Jalan Aspal (hotmix)	Km	479,43	511,99	533,50	504,58	-
	Jalan Aspal (Lapen)	Km	125,76	99,90	72,24	85,78	-
	Jalan Beton	Km	46,14	55,97	66,33	79,61	-
	Jalan Batu/Kerikil	Km	71,77	55,41	52,48	57,33	-

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
	Jalan Tanah	Km	1,90	4,35	4,38	1,62	-
33	Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta						
	Baik	Km	440,30	456,63	467,53	491,87	-
	Sedang	Km	133,31	141,64	146,88	143,22	-
	Rusak	Km	75,06	85,00	90,17	60,19	-
	Rusak Berat	Km	76,33	44,29	24,35	33,65	-
34	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten						
	Mantap	Km	554,84	572,80	583,50	596,48	-
	Kurang Mantap	Km	93,83	110,46	121,07	98,80	-
	Kritis	Km	76,33	44,29	24,35	33,65	-
35	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi						
	Saluran	M	1.446,20	1.446,20	674,90	110,00	-
	Rehabilitasi Lining	M	30,00	816,50	1.115,00	-	-
	Talang PVC Rangka Baja	M	86,70	-	2,00	-	-
	Tembok Penahan Tanah (TPT)	M	86,30	241,95	386,10	-	-
	Rehabilitasi Bendung	Buah	2,00	2,00	2,00	-	-
	Free Intake	M	-	1,00	-	-	-
	Terjunan	M	1,00	3,00	-	-	-
	Bangunan Pengambilan	M	2,00	-	3,00	-	-
	Bangunan Bagi	M	-	1,00	2,00	-	-
	Pintu Air	M	-	2,00	-	-	-
	Pasangan Bronjong	M	-	18,00	-	-	-
	Normalisasi Saluran	M	30,00	-	1.218,60	-	-
36	Banyaknya Kendaraan yang Diuji	Kendaraan	9.493	13.455	14.349	14.189	6354
37	Lingkungan Hidup						
	Meningkatnya aparatur yang professional dan memiliki kompetensi dalam bidang LH	%	16,00	16,00	16,00	16,00	78,00
	Mewujudkan laboratorium lingkungan yang terakreditasi	%	-	1,00	1,00	1,00	2,00
	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati	%	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00
	Meningkatkan pengamanan sumber mata air	%	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00
	Meningkatnya kualitas pelayanan bidang LH	%	72,00	69,00	66,00	63,00	60,00
	Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan meningkatkan baku mutu lingkungan	%	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00
	Meningkatnya penataan dan penegakan hukum lingkungan	%	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00
38	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil						
	Jumlah Dokumen Kartu Tanda Penduduk Yang Diterbitkan	Dokumen	417.280,00	513.260,00	610.906,00	665.575,00	689.205,00

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
	Jumlah Dokumen Kartu Keluarga Yang Diterbitkan	Dokumen	136.905,00	173.389,00	240.427,00	230.808,00	250.584,00
	Jumlah Dokumen Akta Kelahiran Yang Diterbitkan	Dokumen	16.998,00	22.723,00	28.688,00	45.505,00	17.157,00
	Jumlah Dokumen Angka Kematian Yang Diterbitkan	Dokumen	10,00	27,00	17,00	51,00	205,00
	Jumlah Dokumen Akta Perceraian Yang Diterbitkan	Dokumen	53,00	52,00	54,00	48,00	102,00
	Jumlah Dokumen Perceraian Yang Diterbitkan	Dokumen	5,00	1,00	2,00	1,00	2,00
	Jumlah Dokumen SKTT Yang Diterbitkan	Dokumen	232,00	650,00	591,00	623,00	333,00
	Jumlah Dokumen KIK WNA Yang Diterbitkan	Dokumen	242,00	75,00	80,00	64,00	42,00
	Jumlah Dokumen SK Pindah Datang Yang Diterbitkan	Dokumen	-	1.688,00	3.635,00	6.011,00	4.482,00
39	Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ibu dan Anak						
	Presentase Partisipasi PNS Perempuan Pemkab Per Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	-	-	-	9,30	10,70
	Jumlah KDRT Yang Dilaporkan (Kasus)	Kasus	-	-	3,00	5,00	5,00
	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Orang	-	-	-	46.161,00	43.325,00
	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan (Kasus)	Kasus	-	-	3,00	5,00	5,00
40	Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Keluarga Berencana						
	Total Fertility Rate (TFR) (Point)	Poin	-	-	178.355,00	174.822,00	177.358,00
	Rasio Akseptor KB (%) / PUS	%	124.312,00	135.573,00	146.778,00	152.287,00	169.242,00
	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	%	-	74.78	3,92	3,29	3,67
	Capaian Akseptor KB Jenis IUD	Jenis	9.690,00	10.322,00	12.277,00	14.370,00	17.873,00
	Capaian Akseptor KB Jenis Implant	Jenis	5.323,00	5.465,00	6.188,00	6.906,00	8.812,00
	Capaian Akseptor KB Jenis Suntik	Jenis	62.903,00	68.917,00	75.331,00	77.427,00	94.905,00
	Capaian Akseptor KB Jenis Pil	Jenis	41.508,00	45.703,00	47.595,00	46.922,00	58.354,00
	Capaian Akseptor KB Jenis Lainnya	Jenis	4.888,00	5.166,00	5.752,00	6.622,00	8.039,00
41	Perkembangan Kondisi Penyandang Masalah Sosial						
	Anak Balita Terlantar	Anak	62,00	3,00	3,00	35,00	-
	Anak Terlantar	Anak	527,00	751,00	751,00	199,00	-
	Anak Berhadapan dengan Hukum	Anak	40,00	34,00	34,00	34,00	-

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
	Anak Bermasalah Sosial Psikologis	Anak	-	-	-	-	-
	Anak Jalanan	Anak	62,00	59,00	74,00	76,00	-
	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Wanita	1.478,00	1.480,00	1.480,00	3.098,00	-
	Wanita Korban Tindak Kekerasan	Wanita	1,00	-	3,00	4,00	-
	Wanita Tuna Susila	Wanita	215,00	14,00	16,00	13,00	-
	Lansia Terlantar	Orang	1.987,00	1.778,00	1.778,00	960,00	-
	Pengemis	Orang	1.495,00	13,00	13,00	11,00	-
	Lansia Korban Kekerasan	Orang	-	-	-	-	-
	Gelandangan	Orang	389,00	1,00	1,00	1,00	-
	Penyandang Cacat	Orang	1.689,00	1.425,00	1.425,00	1.520,00	-
	Waria	Orang	12,00	-	-	43,00	-
	Penyandang Cacat Eks Penyakit Kronis	Orang	-	-	-	-	-
	Bekas Warga Binaan LK	Orang	181,00	136,00	136,00	110,00	-
	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Orang	52,00	3,00	3,00	21,00	-
	Keluarga Fakir Miskin	Keluarga	27.653,00	34.314,00	34.314,00	46.241,00	-
	Jumlah Perkembangan Rumah Tidak Layak Huni	Unit	3.093,00	9.326,00	9.326,00	9.326,00	-
	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	Keluarga	5.227,00	296,00	206,00	104,00	-
	Komunitas Adat Terpencil		-	-	-	-	-
	Masyarakat Tinggal Pada Daerah Rawan Bencana	KK	-	-	-	-	-
	Korban Bencana Alam	Orang	99,00	209,00	209,00	95,00	-
	Korban Bencana Sosial	Orang	122,00	111,00	111,00	149,00	-
	Pekerja Migran Bermasalah	Orang	2,00	10,00	17,00	15,00	-
	Orang dengan HIV/AIDS	Orang	-	-	-	-	-
	Keluarga Rentan	Orang	-	-	-	-	-
42	Jumlah Pengangguran						
	SD dan sederajat	Orang	1.992,00	1.628,00	1.295,00	921,00	743,00
	SLTP	Orang	5.852,00	5.484,00	5.188,00	4.692,00	1.530,00
	SLTA	Orang	11.677,00	11.562,00	12.911,00	12.681,00	5.360,00
	Akademi	Orang	486,00	482,00	375,00	437,00	138,00
	Universitas	Orang	1.104,00	794,00	602,00	593,00	208,00
43	Jumlah Tenaga Kerja						
	Angkatan Kerja		1.507,00	1.444,00	1.481,00	1.045,00	1.035,00
	Kesempatan Kerja		1.432,00	879,00	1.557,00	1.099,00	510,00
	Pencari Kerja (IPM)		21.111,00	19.950,00	20.371,00	19.324,00	7.969,00
44	Jumlah Izin dan Non Perizinan di Kabupaten Purwakarta	Perijinan	8131	6252	5785	5978	2365
45	Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Purwakarta						
	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Buah	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00
	Jumlah Posyandu	Buah	992,00	1.006,00	1.010,00	1.014,00	1.014,00

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
	Jumlah Poskedes	Buah	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
46	Jumlah Perpustakaan/layanan Baca Binaan dan Titik Layanan Pusling di Kabupaten Purwakarta						
	Perpustakaan Desa	Buah	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00
	Perpustakaan SD	Buah	4,00	7,00	9,00	11,00	15,00
	Perpustakaan SMP	Buah	6,00	8,00	8,00	8,00	9,00
	Perpustakaan Pontren	Buah	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
	Perpustakaan Mesjid	Buah	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Taman Bacaan Masyarakat	Buah	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Perpustakaan Lapas	Buah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Perpustakaan Keliling	Buah	93,00	96,00	96,00	96,00	84,00
47	Penanaman Komoditas Strategis dan Unggulan Pertanian						
	Padi sawah (Ha)	Ha	35.754	36.851	36.207	44.324	23.390
	Manggis (pohon)	Pohon	-	1.157	2.640	1.746	157
	Teh (Ha)	Ha	-	15,6	157,5	100	52,1
	Cengkeh (Ha)	Ha	-	8,39	9,37	3	2,3
	Ubi kayu (Ha)	Ha	-	3.683	2.121	2.423	1.137
	Pala (Ha)	Ha	-	5,08	19,7	6	12,3
48	Produksi Tanaman Pangan dan Sayuran serta buah-buahan di Kabupaten Purwakarta						
	Padi	Ton	225.197,00	238.927,00	234.089,00	271.896,00	-
	Palawija	Ton	128.325,00	104.265,00	71.850,00	69.579,00	-
	Sayuran dan buah-buahan	Ton	166.164,00	213.124,00	265.997,00	164.903,00	-
49	Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Purwakarta						
	Teh	Ton	5.584,00	5.522,94	5.482,00	6.070,86	-
	Cengkeh	Ton	431,00	446,74	465,00	411,63	-
	Pala	Ton	36,00	32,81	36,00	42,56	-
50	Ketersediaan Pangan di Kabupaten Purwakarta						
	Beras	Ton	148.817,00	155.302,00	149.816,00	169.130,00	-
	Umbi – umbian	Ton	113.478,00	97.980,00	66.902,00	61.207,00	-
	Sayuran dan buah-buahan	Ton	166.164,00	213.124,00	265.997,00	164.903,00	-
51	Produksi Daging Berdasarkan Jenis Ternak						
	Sapi Potong	Ekor	890.102,00	933.273,00	939.309,00	847.115,00	350,37
	Kerbau	Ekor	16.493,00	18.521,00	7.546,00	3.430,00	1,42
	Kambing	Ekor	106.916,00	79.493,00	164.764,00	92.339,00	38,19
	Domba	Ekor	312.190,00	115.028,00	20.438,00	22.903,00	9,47
	Ayam Buras	Ekor	1.016.040,00	1.074.914,00	1.132.785,00	813.502,00	336,46
	Ayam Ras Pedaging	Ekor	21.121,00	15.984.014,00	22.439.995,00	31.767.076,00	13,138,851
	Ayam Ras Petelur	Ekor	14.145.147,00	21.476,00	69.324,00	36.571,00	15,13
	Itik	Ekor	194.090,00	203.784,00	379.752,00	857.044,00	298,77

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
52	Produksi Hasil Ternak Kabupaten Purwakarta						
	Telur Ayam Buras	Kg	673.193	712.202	750.545	538.999	225.641
	Telur Ayam Ras Petelur	Kg	371.938	374.393	1.208.540	637.539	266.893
	Telur Itik	Kg	2.025.975	2.127.273	3.964.172	8.946.561	3.163.768
53	Populasi Ternak Kabupaten Purwakarta Tahun						
	Sapi Potong	Ekor	11.465,00	11.591,00	11.617,00	11.728,00	6.807,00
	Sapi Perah	Ekor	18,00	18,00	-	-	-
	Kerbau	Ekor	10.772,00	11.331,00	11.733,00	12.352,00	6.671,00
	Domba	Ekor	1.623.715,0 0	2.193.502,0 0	2.971.152,00	4.034.777,00	2.075.432,0 0
	Kambing	Ekor	122.469,00	148.901,00	161.698,00	201.881,00	102.564,00
	Kuda	Ekor	111,00	116,00	118,00	120,00	63,00
	Ayam Buras	Ekor	1.161.292,0 0	1.223.813,0 0	1.340.271,00	878.873,00	626.127,00
	Ayam Ras Petelur	Ekor	40.732,00	30.000,00	55.670,00	69.361,00	37.384,00
	Ayam Ras Pedaging	Ekor	3.317.562,0 0	4.657.525,0 0	6.538.699,00	6.593.416,00	3.476.952,0 0
	Itik	Ekor	325.357,00	606.303,00	696.521,00	13.368.337,0 0	3.112.676,0 0
51	Komoditi Produktif Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu						
	Jamur	Kg	242.610,00	7.055,00	2.800,00	72.343,00	-
	Madu	Liter	13,30	13,30	12,00	16,00	-
	Sarang Burung Walet	Kg	42,30	35,75	31,00	30,25	-
52	Rehabilitasi Lahan Kritis						
	Rehabilitasi Lahan Kritis	Ha	940,00	1.119,14	670,00	490,00	-
	Bangunan konservasi tanah	Unit	50,00	-	11,00	115,00	-
53	Data Pertambangan di Kabupaten Purwakarta						
	Kerusakan lingkungan eks lokasi tambang	Lokasi	-	-	-	-	-
	Penertiban Tambang tidak Berijin	Lokasi/ M2	17/80.000	9/109.000	8/144.000	-	-
	Total area penambangan	Ha	10.148,26	635,68	475,03	342,30	-
	Penambangan liar/tak berijin	M2	139.000,00	109.000,00	144.000,00	-	-
54	Kecukupan Energi di Kabupaten Purwakarta						
	Sosial		7.765.110,0 0	10.930.908, 00	7.786.807,00	8.176.147,00	-
	Rumah Tangga		173.386.61 8,00	217.115.864 ,00	197.052.511,0 0	206.905.137, 00	-
	Bisnis		38.045.221, 00	53.161.400, 00	41.637.353,00	43.719.221,0 0	-
	Industri		520.359.57 6,00	782.598.998 ,00	782.598.998,0 0	821.728.948, 00	-

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
	Pemerintah		6.423.837,0 0	9.679.266,0 0	8.786.807,00	9.226.147,00	-
	Multiguna		6.777.957,0 0	10.543.632, 00	11.453.720,00	12.026.406,0 0	-
55	Data Pemanfaatan Air Tanah di Kabupaten Purwakarta						
	Jumlah ijin SIPA (ABT)	Ijin/Titik sumur	26,00	98/161	121/198	121/198	-
	Jumlah ijin SIPAM	Ijin	7,00	5,00	6,00	6,00	-
56	Produksi Perikanan Kabupaten Purwakarta						
	Mas	Ekor	37.336,18	38.147,02	41.620,77	43.411,20	35.700,40
	Nila	Ekor	34.472,39	35.782,91	37.853,56	35.226,80	29.885,70
	Gurame	Ekor	6,10	7,50	6,93	11,00	5,85
	Tawes	Ekor	0,62	0,89	14,35	12,70	6,35
	Sepat Siam	Ekor	4,40	6,43	7,87	6,00	3,25
	Lele	Ekor	303,29	320,62	318,14	323,35	157,95
	Patin	Ekor	11.239,79	11.321,94	10.210,76	9.851,55	8.182,32
	Bawal	Ekor	7.779,10	7.905,02	9.636,93	7.212,75	7.025,40
	Ikan Lainnya	Ekor	68,96	31,35	102,85	159,95	81,70
57	Jumlah Pasar di Kabupaten Purwakarta	Buah					
	Pasar Modern	Buah	5,00	5,00	8,00	14,00	15,00
	Mini Market	Buah	90,00	100,00	100,00	112,00	115,00
	Pasar Tradisional	Buah	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Pasar Desa	Buah	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
58	Ekspor Kabupaten Purwakarta						
	Ekspertir	Perusahaan	55,00	56,00	56,00	60,00	63,00
	Nilai Ekspor	\$	664.209.80 0,00	686.786.440 ,00	681.500.420,0 0	749.650.462, 00	383.546.37 1,00
	Negara Tujuan Ekspor	Negara	114,00	114,00	114,00	78,00	80,00

2.5 PENCAPAIAN SASARAN RPJMD KAB. PURWAKARTA TAHUN 2013-2018

Pencapaian sasaran pembangunan di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2018, sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan RPJMD 2013 - 2018 dapat dinilai melalui upaya pengukuran kinerja. Dari 37 sasaran (awalnya berjumlah 40 sasaran, 3 sasaran dengan 7 indikator kinerja sasaran berpindah wewenangnya ke Provinsi Jawa Barat) telah ditetapkan pada tahun anggaran 2018 lalu, sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Kabupaten Purwakarta. 37 sasaran tersebut memiliki 103 indikator sasaran yang terdiri dari 17 sasaran dengan 49 indikator kinerja sasaran untuk Misi I, 9 sasaran dengan 29 indikator kinerja sasaran untuk Misi II dan 11 sasaran dengan 25 indikator kinerja sasaran untuk Misi III.

Pada tahun anggaran 2018, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 40 sasaran dengan menggunakan 110 indikator kinerja, yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018. Dari 103 indikator kinerja sasaran yang diukur, sebanyak 88 indikator kinerja sasaran (80,00%) mencapai atau melebihi target, sebanyak 15 indikator kinerja sasaran (13,64%) tidak mencapai target serta 7 indikator (6,36%) wewenangnya dialihkan ke Provinsi Jawa Barat.

Untuk lebih jelasnya mengenai pencapaian kinerja sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut dimana Capaian Misi 1 memberikan kontribusi sebesar 81,63% indikator kinerja sasaran mencapai bahkan melebihi target. Misi 2 memberikan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 93,10% indikator kinerja sasaran yang mencapai target bahkan melebihi target, sedangkan pada Misi 3 memberikan kontribusi yaitu sebesar 84,00% indikator kinerja sasaran mencapai bahkan melebihi target.

Tabel 2.74
Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Jenis
Purwakarta Tahun 2013-2018

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD 2018	REALISASI S.D 2018	TINGKAT PENCAPAIAN (%)	EVALUASI CAPAIAN AKHIR TAHUN 2018
1	3	4	5	6	8	8
A	Misi 1. Mengembangkan pembangunan berbasis kearifan lokal yang bernilai religiusitas, berorientasi pada keunggulan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, sosial dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat					
	Sasaran 1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat					
1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.00	7.81	97.63	Tidak Tercapai
2	Angka Melek Huruf	Persen	97.64	99.55	101.96	Tercapai
	Sasaran 2. Meningkatnya prasarana dan sarana perpustakaan dan minat baca masyarakat					
3	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	39,500	75,013	189.91	Tercapai
4	Jumlah anggota perpustakaan per tahun	Orang	8,000	11,844	148.05	Tercapai
5	Jumlah titik layanan perpustakaan keliling	Titik	103	156	151.46	Tercapai
6	Jumlah perpustakaan binaan	Unit	215	367	170.70	Tercapai
7	Jumlah buku perpustakaan	Buku	38,000	38,000	100.00	Tercapai
	Sasaran 3. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya daerah dan berkembangnya nilai-nilai tradisi dan budaya					
8	Jumlah kelompok seni budaya lokal yang dibina	Kelompok	6	30	500.00	Tercapai
9	jumlah event pagelaran seni budaya yang diikuti dan diselenggarakan	Event	5	75	1500.00	Tercapai
	Sasaran 4. Berkembangnya potensi generasi muda dan prestasi keolahragaan					
10	Jumlah pembinaan kepemudaan	Kegiatan	15	57	380.00	Tercapai
11	Jumlah kegiatan pembinaan/kompetensi olahraga	Kegiatan	13	63	484.62	Tercapai
12	Prasarana olahraga yang direvitalisasi/ dibangun	Buah	7	24	342.86	Tercapai
13	Cabang Olahraga yang sarannya disediakan	Buah	35	57	162.86	Tercapai

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD 2018	REALISASI S.D 2018	TINGKAT PENCAPAIAN (%)	EVALUASI CAPAIAN AKHIR TAHUN 2018
Sasaran 5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat						
14	Jumlah kematian bayi	Kasus	35	57	162.86	Tercapai
15	Jumlah kematian ibu	Kasus	16	32	200.00	Tercapai
16	Persentase bayi dan balita gizi buruk	Persen	0.012	0.012	100.00	Tercapai
Sasaran 6. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial						
17	Jumlah penyandang penyakit sosial yang dibina	Orang	382	722	189.01	Tercapai
Sasaran 7. Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan, anak dan remaja						
18	Indeks pemberdayaan gender	Angka	23	72.5	315.22	Tercapai
19	Indeks Pembangunan gender	Angka	25	87.75	351.00	Tercapai
20	Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kasus	10	2	20.00	Tercapai
Sasaran 8. Meningkatnya keluarga berencana dalam pengendalian pertumbuhan penduduk						
21	Cakupan sasaran pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	Persen	63.8	79.84	125.14	Tercapai
Sasaran 9. Meningkatnya kualitas dan iklim ketenagakerjaan						
22	Banyaknya pelatihan yang diselenggarakan	Kegiatan	8	91	1137.50	Tercapai
23	Peningkatan kesempatan kerja yang tersedia	Persen	78.6	90.56	115.22	Tercapai
24	Jumlah transmigran yang diberangkatkan	KK	15	63	420.00	Tercapai
25	Penyelesaian perselisihan antara buruh dan pengusaha	Persen	100	100	100.00	Tercapai
Sasaran 10. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat						
26	Ketersediaan energi protein per kapita	Persen	100	96	96.00	Tidak Tercapai
27	Penganekaragaman konsumsi pangan	Skor PPH	100	87.4	87.40	Tidak Tercapai
Sasaran 11. Meningkatnya produksi berbagai komoditas pertanian dan perkebunan						
28	Produksi padi	Ton	226.424	265.700	117.35	Tercapai
29	Produksi palawija	Ton	133,294	40,609.00	30.47	Tidak Tercapai
30	Produksi perkebunan (teh dan cengkeh)	Ton	5,501	6,348.49	115.41	Tercapai
31	Produksi hortikultura (sayuran dan	Ton	160,927	174,866.7	108.66	Tercapai

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD 2018	REALISASI S.D 2018	TINGKAT PENCAPAIAN (%)	EVALUASI CAPAIAN AKHIR TAHUN 2018
	buah-buahan)					
	Sasaran 12. Meningkatnya produksi pangan hasil peternakan dan perikanan					
32	Peningkatan produksi peternakan	Persen	5	6.14	122.80	Tercapai
33	Peningkatan produksi perikanan	Persen	2	-7.53	-376.50	Tidak Tercapai
	Sasaran 13. Meningkatnya fungsi ekologi dan ekonomi sumberdaya hutan sebagai sistem penyangga kehidupan					
34	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Ha	1.002	0	100	Wewenang Beralih ke Provinsi Jawa Barat
35	Produksi hasil hutan (kayu)	M3	4.504	0	100	
	Sasaran 14. Meningkatnya pertumbuhan investasi PMA dan PMDN					
36	Peningkatan nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	Persen	3	12.65	421.67	Tercapai
37	Peningkatan proses pengolahan pelayanan administrasi perijinan	Persen	95	96.33	101.40	Tercapai
38	Berperan serta pada kegiatan pameran investasi dalam negeri	Even	20	19	95.00	Tidak Tercapai
	Sasaran 15. Terwujudnya koperasi yang sehat dan UMKM yang tangguh					
39	Koperasi yang memenuhi kriteria koperasi sehat	Persen	25	54.00	216.00	Tercapai
40	Jumlah pelaku UMKM terbina menjadi wiraswasta yang profesional	Orang	150	205	136.67	Tercapai
	Sasaran 16. Terwujudnya industri kecil dan menengah yang produktif, memiliki mutu produk kompetitif dan mengembangkan persaingan usaha industri yang sehat					
41	Jumlah UMKM yang difasilitasi yntuk mendapatkan kredit perbankan dan non perbankan	UMKM	380	461	121.32	Tercapai
42	Jumlah industri kecil yang memiliki SNI, P-IRT, dan GKM	Unit	230	312	135.65	Tercapai
43	Luas lahan kawasan IKM yang disediakan Pemda	Ha	6	1.2	20.00	Tidak Tercapai
44	Lokasi Sarana/ Prasarana Promosi/ Penjualan Produk Industri Kecil	Titik	5	3	60.00	Tidak Tercapai
	Sasaran 17. Meningkatnya daya saing komoditas perdagangan serta meningkatkan perlindungan konsumen					
45	Jumlah pasar tradisional yang modern	Unit	9	9	100.00	Tercapai

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD 2018	REALISASI S.D 2018	TINGKAT PENCAPAIAN (%)	EVALUASI CAPAIAN AKHIR TAHUN 2018
46	Terbangunnya kantor pengelola/pelayanan pasar tradisional yang refresentatif	Unit	6	6	100.00	Tercapai
47	Terbentuknya peraturan (regulasi) tentang penataan dan pemetaan lokasi pasar modern	Buah	1	1	100.00	Tercapai
48	Tertatanya sarana dan prasarana yang refresentatif untuk penataan pedagang kaki lima dan asongan	Lokasi	1	1	100.00	Tercapai
49	Pengawasan barang/jasa terhadap pelaku usaha	Pelaku usaha	300	550	183.33	Tercapai
50	Penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Persen	100	80	80.00	Tidak Tercapai
Sasaran 18. Meningkatnya tingkat kunjungan wisatawan						
51	Jumlah wisatawan asing dan domestik	Orang	700,000	2,260,698	322.96	Tercapai
B	Misi 2. Pengembangan struktur wilayah dan tata ruang yang berorientasi pada keutuhan lingkungan baik hulu maupun hilir serta unsur tanah, air, udara dan matahari					
Sasaran 19. Tersedianya jaringan jalan yang mendukung kemudahan interaksi antar kawasan dan antar daerah						
52	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Orang	77.50	84.10	108.52	Tercapai
53	Persentase daerah terisolir	Persen	1.56	0.00	100.00	Tercapai
Sasaran 20. Tersedianya sistem transportasi yang mendukung kelancaran dan keamanan lalu lintas						
54	Rasio kelengkapan pengatur dan pengaman lalu lintas	Persen	456.3	574	125.79	Tercapai
55	Persentase angkutan umum laik jalan	Persen	80.00	80.39	100.49	Tercapai
56	Rasio terminal	(M2/Unit)	2.12	4	188.68	Tercapai
Sasaran 21. Terpenuhinya kebutuhan energi masyarakat						
57	Rasio elektrifikasi masyarakat	Persen	100.00	0	0.00	Wewenang Beralih ke Provinsi Jawa Barat
58	Jenis potensi energi daerah yang termanfaatkan	Jenis	7	0	0.00	
Sasaran 22. Terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat						
59	Persentase desa rawan air bersih	Persen	5.23	1.04	19.89	Tercapai
60	Persentase mata air yang diamankan	Persen	55	60	109.09	Tercapai
Sasaran 23. Terpenuhinya kebutuhan air areal persawahan						

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD 2018	REALISASI S.D 2018	TINGKAT PENCAPAIAN (%)	EVALUASI CAPAIAN AKHIR TAHUN 2018
61	Rasio luas daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	6.9	30.06	435.65	Tercapai
Sasaran 24. Meningkatnya kualitas ruang dan fasilitas publik						
62	Jumlah RTH, fasilitas publik dan ornamen kota yang dibangun/direvitalisasi	Titik	5	10	200.00	Tercapai
63	Persentase RTH yang terpelihara	Persen	100	100	100.00	Tercapai
64	Persentase ornamen kota yang terpelihara	Persen	100	100	100.00	Tercapai
Sasaran 25. Meningkatnya pelayanan sarana prasarana lingkungan						
65	Rasio lampu hias yang terpasang	Persen	2.00	2	100.00	Tercapai
66	Persentase RW yang jalan lingkungannya di bangun/ diperbaiki	Persen/RW	8.00	11	137.50	Tercapai
67	Persentase daerah genangan yang tertangani	Persen	10.00	15	150.00	Tercapai
68	Jumlah unit pengelolaan limbah komunal yang dibangun (unit)	Unit	2	0	0.00	Tidak Tercapai
69	Persentase panggilan kebutuhan penyedotan tinja yang terpakai (%)	Persen	100	100	100.00	Tercapai
70	Persentase Volume sampah yang terangkat menuju TPA (%)	Persen	30	73.03	243.43	Tercapai
71	Tingkat waktu tanggap wilayah manajemen kebakaran (WMK)	Persen	70	71.68	102.40	Tercapai
72	Rasio ketersediaan TPU milik Pemda	Persen	7.6	1.6	21.05	Tidak Tercapai
73	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina	Kelompok	192	192	100.00	Tercapai
Sasaran 26. Tersediaanya hunian yang layak bagi seluruh masyarakat						
74	Rasio rumah layak huni	Persen	94.04	99.67	105.99	Tercapai
Sasaran 27. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup						
75	Jenis layanan pengujian Lingkungan Hidup yang Terakreditasi	Jenis	2	5	250.00	Tercapai
76	Waktu penyelesaian perijinan lingkungan hidup	Hari	60	60	100.00	Tercapai

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD 2018	REALISASI S.D 2018	TINGKAT PENCAPAIAN (%)	EVALUASI CAPAIAN AKHIR TAHUN 2018
77	Jenis kualitas lingkungan yang dipantau	Jenis	3	4	133.33	Tercapai
78	Jumlah dokumen lingkungan hidup yang disusun	Dokumen	26	96	369.23	Tercapai
79	Persentase pengaduan dan sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan	Persen	85.00	100	117.65	Tercapai
	Sasaran 28. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata ruang daerah					
80	Lama proses pengesahan rencana tapak/penertiban rekomendasi IMB	Hari	9	1	100.00	Tercapai
81	Persentase pemegang izin pemanfaatan ruang yang dipantau	Persen	60.00	100	166.67	Tercapai
82	Persentase pengaduan dan sengketa pemanfaatan ruang yang diselesaikan	Persen	100	100	100.00	Tercapai
	Sasaran 29. Meningkatnya pengelolaan bahan tambang dan air tanah serta daerah rawan bencana					
83	Persentase kegiatan pertambangan dan pemanfaatan air tanah berijin yang di tinjau dan di bina	Persen	100	0	0.00	Wewenang Beralih ke Provinsi Jawa Barat
84	Sistem Informasi Geologi Tata Lingkungan/SDA	Unit	1	0	0.00	
85	Persentase kegiatan pertambangan dan pemanfaatan air tanah tidak berijin yang ditertibkan	Persen	75.00	0	0.00	
C	Misi 3. Mengembangkan struktur pemerintahan yang berorientasi kepuasan pelayanan publik berbasis perdesaan yang berorientasi kemakmuran rakyat					
	Sasaran 30. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dasar kependudukan					
86	Cakupan penerbitan KK	Persen	100.00	100	100.00	Tercapai
87	Cakupan penerbitan akte kelahiran	Persen	90.00	78.03	86.70	Tidak Tercapai
88	Cakupan penerbitan KTP	Persen	100.00	98.03	98.03	Tidak Tercapai
89	Cakupan penerbitan akte kematian	Persen	70.00	74	105.71	Tercapai
90	Sistem informasi kependudukan	Paket	1	1	100.00	Tercapai
	Sasaran 31. Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan					
91	Persentase konsistensi antar dokumen	Persen	95	95	100.00	Tercapai

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD 2018	REALISASI S.D 2018	TINGKAT PENCAPAIAN (%)	EVALUASI CAPAIAN AKHIR TAHUN 2018
	perencanaan daerah					
92	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang tepat waktu	Dokumen	8	8	100.00	Tercapai
93	Ketersediaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Perangkat Lunak	1	2	200.00	Tercapai
94	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persen	100	93	93.00	Tidak Tercapai
Sasaran 32. Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah secara aman dan tertib						
95	Jumlah dokumen arsip yang dapat diselamatkan	Box	1000	1,500	150.00	Tercapai
Sasaran 33. Meningkatnya sistem komunikasi dan informasi pembangunan daerah						
96	Jumlah Aplikasi layanan Public yang dapat diakses secara online	Unit	59	59	100.00	Tercapai
97	OPD yang melaksanakan layanan berbasis elektronik	OPD	46	18	39.13	Tidak Tercapai
Sasaran 34. Optimalisasi tata kelola pertanahan						
98	Persentase pemenuhan kebutuhan tanah untuk pembangunan	Persen	100.00	100.00	100.00	Tercapai
Sasaran 35. Meningkatnya tata kelola keuangan daerah secara efektif dan akuntabel						
99	Rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	Persen	15	18.26	121.73	Tercapai
100	Jumlah persentase capaian temuan hasil pemeriksaan	Orang	97	97.7	100.72	Tercapai
101	Persentase inventarisasi aset daerah	Persen	90	90	100.00	Tercapai
102	Jumlah Asset Daerah yang Tersertifikasi	Unit	20	48	240.00	Tercapai
Sasaran 36. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan kapasitas aparatur sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan						
103	Jumlah standar pelayanan minimal (SPM) di setiap OPD	SPM	15	17	113.33	Tercapai
104	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek	Orang	150	163	108.67	Tercapai

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD 2018	REALISASI S.D 2018	TINGKAT PENCAPAIAN (%)	EVALUASI CAPAIAN AKHIR TAHUN 2018
105	Jumlah MoU/ Perjanjian kerjasama yang ditandatangani pimpinan daerah	Buah	14	37	264.29	Tercapai
Sasaran 37. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan						
106	Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	Kelompok	680	1,583	232.79	Tercapai
Sasaran 38. Meningkatnya sistem peraturan perundang-undangan						
107	Fasilitasi penetapan Perda dan Perbup	Persen	100	105.79	105.79	Tercapai
Sasaran 39. Meningkatnya Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat						
108	Forum partisipasi masyarakat dalam Sishankamrata	Forum	6	13	216.67	Tercapai
109	Frekuensi pengendalian, pengamanan dan penertiban penegakan Perda	Kegiatan	120	312	260.00	Tercapai
Sasaran 40. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat						
110	Persentase jumlah partisipasi aktif masyarakat dalam Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkadaes	Persen	76.00	79.00	103.95	Tercapai

2.6 PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

Isu strategis internasional yang relevan pada sebagian besar perencanaan pembangunan daerah adalah pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang setelah berakhir periode kegiatannya akan dilanjutkan pada laporan panel tingkat tinggi (High-Level Panel of Eminent Persons/HLPEP) dengan lima pergeseran transformatif seperti:

- a) Mengakhiri kelaparan dan extreme poverty;
- b) Melaksanakan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yang berbasis sosial, ekonomi, dan lingkungan;
- c) Menciptakan kesempatan pekerjaan dan penghidupan serta mengaitkan growth dengan pembangunan berkelanjutan;
- d) Bebas dari konflik dan kekerasan, transparansi dan institusi public yang efektif dan akuntabel; dan
- e) Visi dan semangat baru kemitraan global. Peran spesifik bagi setiap aktor (pemerintah, akademisi, bisnis, CSO, dan lain-lain).

Konsep *Sustainable Development Goals (SDG's)* merupakan kelanjutan dari konsep *Millenium Development Goals (MDG's)*. SDG's adalah sebuah kesepakatan pembangunan baru dengan sasaran jangka panjang bagi komunitas dunia dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar melalui keseimbangan pembangunan di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam konsep ini, pertumbuhan, stabilitas dan efisiensi ekonomi tetap harus diimbangi dengan kesetaraan sosial, partisipasi masyarakat, serta terjaganya kelestarian lingkungan dalam jangka panjang untuk kembali menunjang pembangunan ekonomi di masa mendatang. SDG's berisikan 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan yang diharapkan mampu menjawab

ketertinggalan pembangunan Negara-negara diseluruh dunia, baik Negara maju dan Negara berkembang.

Tujuan dan sasaran dalam SDG's sebagai berikut:

1. Mengentaskan kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana.
2. Mengatasi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan mengembangkan pertanian berkelanjutan.
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua pada segala usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan.
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan atas air dan sanitasi untuk semua.
7. Menjamin akses ke energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan secara berkelanjutan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif serta meningkatkan secara berkelanjutan pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan menggiatkan inovasi.
10. Mengurangi ketimpangan di dalam suatu dan di antara negara-negara.
11. Membuat kota dan permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
12. Memastikan pola konsumsi dan pola produksi yang berkelanjutan.

13. Mengambil tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Konservasi dan penggunaan berkelanjutan sumberdaya samudera dan kepebisiran untuk pembangunan yang berkelanjutan.
15. Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem darat, pengelolaan hutan secara lestari, memerangi dan menghentikan proses penggurunan, memulihkan degradasi lahan dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Meningkatkan ketenteraman masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberi akses keadilan bagi semua dan dibangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan.

Secara garis besar, 17 (tujuh belas) tujuan SDG's di atas dapat dikelompokkan dalam empat pilar, yakni **pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan hidup, dan governance**. Pilar pembangunan manusia menjadi isu penting pemerintah daerah, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan mencapai kesetaraan gender, serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Upaya pencapaian SDG's di pilar ekonomi yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, mendorong investasi, mendukung pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan industri dengan komoditas unggulan, memastikan ketahanan pangan sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan. Dari sisi infrastruktur akan mewujudkan kota

aman, nyaman, dan layak huni serta pengurangan kawasan kumuh.

Membangun infrastruktur pada kawasan strategis dan pusat pertumbuhan. Upaya pencapaian SDGs pada pilar pembangunan lingkungan hidup antara lain mengambil tindakan untuk

memerangi perubahan iklim dan dampaknya, mengelola aset sumber daya alam secara berkelanjutan, konservasi sumberdaya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati; mengelola ekosistem yang berkelanjutan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Sedangkan tujuan dalam bidang *governance*, upaya mencapai tujuan SDG's antara lain memastikan masyarakat dalam kondisi yang aman, tertib dan tenteram, dan membangun organisasi/tata kelola pemerintah daerah yang efektif dan akuntabel.

Pelaksanaan SDGs Kabupaten Purwakarta disajikan pada tabel dibawah. Penyajian berdasarkan 45 indikator SDGs dengan data yang tersedia, sebagai berikut:

Tabel 2.75
Capaian Indikator SDGs Kabupaten Purwakarta

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN (%)	TAHUN
1	Penduduk Miskin dengan Garis \$ 1,90 per hari	%	2,19	2015
2	Penduduk Miskin dengan Garis Kemiskinan Nasional)	%	9,14	2015
3	Balita Dengan Tinggi Badan Pendek dan Sangat Pendek	%	33,9	2013
4	Balita Dengan Berat Badan Kurus dan Sangat Kurus	%	7,1	2013
5	Produktivitas Tanaman Pangan	(t/ha)	5,50	2014
6	Angka Kematian di bawah 5 Tahun	per1000 kelahiran hidup	6,40	2015
7	Angka Kematian Nasional	per1000 kelahiran hidup	4,68	2014
8	Angka Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	70,26	2014
9	Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas	per 100.000 penduduk	83	2015
10	Penduduk dengan Kebiasaan merokok diatas usia 15 tahun	%	37,51	2015

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN (%)	TAHUN
11	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,29	2015
12	Angka Partisipasi Murni Tingkat Sekolah Dasar	%	99,09	2015
13	Penduduk Usia 25-64 tahun dengan Pendidikan Menengah Atas	%	24,70	2015
14	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	%	11,33	2015
15	Gap T10B40 Penduduk Usia 25-64 dengan Pendidikan Tersier	%	19,28	2015
16	Gap T10B40 Partisipasi Murni SMA	%	12,16	2015
17	Gap T10B40 Penduduk Usia 25-64 Tahun SMA	%	31,22	2015
18	Gender Gap Penduduk Usia 25-64 Tahun SMA	%	7,84	2015
19	Gender Gap Penduduk Usia 25-64 Tahun dengan Pendidikan Tersier	%	7,84	2015
20	Angka Melek Huruf Usia 15-24	%	99,64	2015
21	Tingkat Kesuburan wanita	kelahiran per 1000 wanita usia 15-19 tahun	60	2010
22	Tingkat partisipasi angkatan Kerja Wanita	%	45,75	2015
23	Proporsi perempuan dalam parlemen	%	24,44	2015
24	Rumah Tangga dengan Air Minum Layak	%	53,28	2015
25	Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak	%	55,32	2015
26	Rumah Tangga dengan Akses Listrik	%	100	2015
27	PDRB per Kapita (Harga Konstan 2000)	Juta Rupiah	56	2015
28	Tingkat Pengangguran dengan Kriteria Jam Kerja < 35	%	7,95	2015
29	Penduduk Usia Muda Yang Tidak Bekerja, Tidak Sekolah dan Tidak Pelatihan	%	28,03	2015
30	Penduduk Usia 5-14 tahun Yang Termasuk Kedalam Kategori Pekerja Anak	%	2,70	2015
31	Kondisi Jalan dengan Kualitas Baik dan Sedang	% dari total panjang Jalan	84,29	2015
32	Rumah Tangga yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir	%	48,00	2015
33	Rasio Gini		0,35	2015
34	Rasio Palma		1,43	2015
35	Persentase Pengeluaran Kelompok Penduduk 40% Terendah	%	19,42	2015
36	Rumah Tangga Yang Memenuhi Spesifikasi Rumah Sederhana	%	71,23	2015

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN (%)	TAHUN
	Sehat			
37	Rumah Tangga Kota Dengan Jaringan Air Ledeng	%	30,69	2015
38	Rumah Tangga Dengan Perilaku Memilah Sampah	%	19,99	2015
39	Emisi CO2 BBM + Listrik Rumah Tangga	t CO2/kapita	0,48	2015
40	Proporsi Luas Area Hutan Terhadap Luas Daratan	%	61,20	2015
41	Area Konnservasi yang Dilindungi	% Luas Wilayah	1,45	2015
42	Persentase Lahan Kritis (Kriteria+Sangat Kritis) terhadap Luas Wilayah	%	3,6	2004
43	Kejadian Pembunuhan	per 100.000 Penduduk	0,65	2015
44	Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana / Crime Rate	per 100.000 Penduduk	1,059	2015
45	Anak Dibawah 15 Tahun Yang Sudah Memiliki Akte Kelahiran	%	69,43	2015

Sumber: Menyongsong SDGs Kesiapan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, SDGs Center Universitas Padjajaran dengan Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2018

2.7 ANALISIS DAYA TAMPUNG DAN DAYA DUKUNG KLHS

Keterbatasan sumber daya alam serta potensi penurunannya baik secara kuantitas maupun kualitas mewajibkan pemanfaatan sumber daya alam agar dilakukan secara bijaksana, yaitu memperhatikan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Perlu diperhatikan pula hubungan antar wilayah, untuk kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh suatu wilayah tertentu, sehingga dapat dipenuhi dengan penyediaan dari wilayah lainnya (prinsip ekspor-impor). Hal lain yang menjadi tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah mempertahankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dalam jangka pendek dengan keberlanjutan pemanfaatannya untuk menunjang kehidupan yang keberlanjutan dalam pembangunan serta memperhatikan kesejahteraan sosial, ekonomi dan kelestarian fungsi lingkungan hidup hingga masa yang akan datang. Oleh karena itu kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lainnya dan keseimbangan antar keduanya (daya dukung lingkungan hidup) serta kemampuan lingkungan hidup

untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (daya tampung lingkungan hidup) penting untuk diketahui, dipahami dan dijadikan dasar dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam, perencanaan pembangunan dan perencanaan pemanfaatan ruang.

Identifikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Indonesia yang diukur dengan pendekatan jasa ekosistem (*ecosystem services*) sebagaimana yang dilakukan dalam *Millenium Ecosystem Assessment – United Nation*. Manusia mendapat manfaat dari berbagai sumber daya dan proses yang disediakan oleh ekosistem alam. Secara menyeluruh, manfaat ini dikenal dengan istilah jasa ekosistem dan meliputi produk seperti air minum dan proses seperti pemecahan (dekomposisi) sampah. Jasa ekosistem adalah barang atau jasa yang disediakan oleh ekosistem untuk manusia dan menjadi dasar untuk penilaian (*valuation*) suatu ekosistem (Hein *et al.* 2006). Ketersediaan jasa ekosistem sering bervariasi dengan berjalannya waktu, seperti tercantum dalam Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 mengenai Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ketersediaan baik kuantitas dan kualitas jasa ekosistem akan berpengaruh dan mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai panduan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Daya dukung merupakan indikasi kemampuan mendukung penggunaan tertentu, sedangkan daya tampung adalah indikasi toleransi mendukung perubahan penggunaan tertentu (atau pengelolaan tertentu) pada unit spasial tertentu. Untuk menghitung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perlu beberapa pertimbangan. Adapun pertimbangan tersebut adalah (a) ruang dan sifatnya, (b) tipe pemanfaatan ruang, (c) ukuran produk lingkungan hidup utama (udara dan air), (d) penggunaan/penutupan lahan mendukung publik (hutan), (e) penggunaan tertentu untuk keperluan pribadi.

2.7.1 Daya Dukung Lingkungan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian tentang Daya Dukung Lingkungan Hidup yaitu: *“Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya”*. Salah satu hasil kajian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem ini juga menghasilkan distribusi luasan dari jasa ekosistem tersebut. Berdasarkan hasil analisis data distribusi luasan jasa ekosistem yang tersaji pada data terkait jasa ekosistem yang berada dalam kelas tertinggi dengan luasan terluas adalah jasa ekosistem penyedia air bersih yaitu 57,48%. Tingginya persentase luasan jasa ekosistem tersebut berkaitan dengan luasan satuan ekoregion yang mendominasi Kabupaten Purwakarta yaitu Dataran Fluvio Vulkanik.

Kondisi hidrologi pada ekosistem dataran fluvio vulkanik umumnya mempunyai akuifer yang sangat baik. Hal tersebut karena material penyusunnya berupa material piroklastik dengan komposisi pasir, kerikil, dan kerakal yang merupakan komposisi material yang mampu mengalirkan air dengan baik (permeabilitas tinggi) sehingga membentuk akuifer yang sangat potensial. Ekosistem dataran fluvio vulkanik merupakan wilayah bertopografi berupa dataran, dengan morfologi atau relief datar hingga landai dengan kemiringan lereng secara umum 0-3% dan pada beberapa lokasi mempunyai kemiringan lereng 3-8%. Dukungan morfologi yang datar hingga cekung menjadikan satuan ini sebagai daerah cadangan air tanah sangat potensial sehingga membentuk reservoir air tanah atau cekungan hidrogeologi.

Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Jenis Distribusi Kelas dan Luasan Daya Dukung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Purwakarta

Jenis Jasa Ekosistem	Distribusi Kelas dan Luasan Daya Dukung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem									
	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Penyedia Pangan	0,81	0,002	387,48	1,082	3.536,74	9,877	4.239,97	11,841	4.412,92	12,324
Penyedia Air Bersih	-	-	6544,68	7,407	65.881,57	74,564	15.928,53	18,027	0,86	0,0009
Pendukung Biodiversitas	-	-	46,59	1,599	173,20	5,946	1.131,70	38,856	1.561,00	53,596

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

2.7.2 Daya Tampung Lingkungan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian tentang Daya Dukung Lingkungan Hidup yaitu: *“Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya”* Salah satu hasil kajian daya tampung lingkungan berbasis jasa ekosistem ini juga menghasilkan distribusi luasan dari jasa ekosistem tersebut yang tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.77
Distribusi Kelas dan Luasan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem

Jenis Jasa Ekosistem	Distribusi Kelas dan Luasan Daya Dukung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem									
	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Pengaturan Iklim	298.08	0,29	14409.11	15,23	4125.34	6,10	54371.78	57,92	32029.40	19,97
Pengaturan tataaliran air dan banjir	8994.72	7,89	7869.19	6,32	11493.36	8,95	49791.42	62,11	19887.93	19,79
Pencegahan Dan perlindungan dari bencana	17154.30	14,92	501.23	0,67	21997.31	22,01	64767.02	60,07	7233.09	7,09
Pemeliharaan kualitas udara	9097.11	7,98	15994.32	14,87	26114.	21,88	42332.06	35,27	20009.1	17,84

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Berdasarkan hasil analisis data distribusi luasan jasa ekosistem yang tersaji pada Tabel jasa ekosistem yang berada dalam kelas tertinggi dengan luasan terluas adalah jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir yaitu 19,79%. Tingginya persentase luasan jasa ekosistem tersebut berkaitan dengan luasan kawasan non terbangun yang meliputi kawasan hutan, kawasan pertanian dan ruang terbuka hijau yang masih cukup besar. Keberadaan hutan, sawah, dan ruang terbuka hijau akan mampu menginfiltrasi air ke dalam tanah sehingga larian air (*run off*) akan semakin kecil sehingga siklus hidrologi dalam kondisi yang stabil.

2.7.3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan juga dapat diukur dan didekati dengan menggunakan parameter Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dengan asumsi semakin tinggi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, semakin terjaga kemampuan lingkungan sehingga daya dukungnya juga semakin meningkat. Indeks kualitas lingkungan hidup daerah dapat dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan program-program pengelolaan lingkungan. Selain sebagai sarana untuk mengevaluasi efektivitas program-program pengelolaan lingkungan, indeks kualitas lingkungan mempunyai peranan dalam hal:

1. Membantu perumusan kebijakan;
2. Membantu dalam mendesain program lingkungan; dan
3. Mempermudah komunikasi dengan publik sehubungan dengan kondisi lingkungan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah antara lain mengamanatkan bahwa urusan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Dengan adanya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pengambil keputusan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menentukan arah kebijakan pengelolaan lingkungan di masa depan. Dalam perhitungannya, masing-masing

parameter diberikan bobot yang berbeda. Pemberian bobot berbeda dari ketiga indeks kualitas berdasarkan dampak serius dari kelangkaan yang meliputi Indeks Kualitas Air dengan bobot 30%, Indeks Kualitas Udara dengan bobot 30% dan Indeks Tutupan Lahan dengan bobot 40%.

Berdasarkan Dokumen Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2017, pengukuran masing-masing parameter IKLHD Kabupaten Purwakarta ialah sebagai berikut.

a. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Pengukuran kualitas udara di Kabupaten Purwakarta dilakukan di 10 (sepuluh) titik pemantauan pada dua periode yaitu bulan Juli dan Oktober Tahun 2017. Hasil pengukuran kualitas udara tersebut disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.78
Kualitas Udara Ambien Kabupaten Purwakarta Tahun 2017

Lokasi	Lama Pengukuran	Tanggal Pengukuran	SO² (µg/Nm³)	NO² (µg/Nm³)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kantor Pemda Kabupaten Purwakarta	24 Jam	18/07/2017	2	8
Kantor DPMPTSP Kab. Purwakarta	24 Jam	18/07/2017	< 1,4	12
Kantor Pemda Kabupaten Purwakarta	24 Jam	14/08/2017	15	16
Kantor DPMPTSP Kab. Purwakarta	24 Jam	14/08/2017	2	37
Kantor Pemda Kabupaten Purwakarta	24 Jam	23/08/2017	6	14
Kantor DPMPTSP Kab. Purwakarta	24 Jam	23/08/2017	15	39
Kantor Pemda Kabupaten Purwakarta	24 Jam	3/10/2017	< 1,4	17
Kantor DPMPTSP Kab. Purwakarta	24 Jam	3/10/2017	< 1,4	43
Kantor Pemda Kabupaten Purwakarta	24 Jam	26/10/2017	26	16
Kantor DPMPTSP Kab. Purwakarta	24 Jam	26/10/2017	24	48

Keterangan: Berdasarkan Hasil Sampling Passive Sampler

*Tanda (-) menunjukkan parameter tersebut tidak dianalisa Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada periode waktu pengukuran bulan Agustus tahun 2017, kadar SO₂ tertinggi berada di kawasan Kantor Pemkab Purwakarta dan kadar NO₂ tertinggi berada di Kantor DPMPTSP Kab. Purwakarta. Sedangkan pada periode bulan Oktober tahun 2017, kadar SO₂ tertinggi berada di lokasi Kantor Pemkab Purwakarta dan kadar NO₂ tertinggi berada di Kantor DPMPTSP Kab. Purwakarta. Atas dasar hasil perhitungan tersebut, maka dihitung Indeks Kualitas Udara Kabupaten Purwakarta. Parameter uji kualitas udara ambien jalan raya yang diukur mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Parameter yang diukur dengan menggunakan passive sampler yang tersebar di wilayah kota dan wilayah yang berpotensi sumber pencemar lebih tinggi dengan rentang waktu pengukuran dimulai dari bulan Juli – Oktober 2017 terdiri dari parameter Nitrogen Dioksida (NO₂), Sulfur Dioksida (SO₂), dilakukan dengan waktu pengukuran 24 Jam.

Berdasarkan hasil pengamatan semua parameter yang dipantau masih berada dibawah baku mutu yang ditetapkan sesuai dengan PP RI No. 41 Tahun 1999 Baku Mutu Udara Ambien Nasional. Terlihat semua parameter SO₂, NO₂ yang dipantau masih berada dibawah baku mutu yang ditetapkan sesuai dengan PPRI No. 41 Tahun 1999 Baku Mutu Udara Ambien Nasional. Semua parameter yang dipantau masih berada dibawah baku mutu yang telah ditetapkan debu dari lalu lintas pada daerah titik sampling. Keberadaan konsentrasi dari parameter yang terukur di lokasi ini lebih disebabkan oleh aktifitas jalan raya yang pada saat ini bila melihat data faktual terjadi peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor serta penambahan ruas jalan alternatif yang ada di Kabupaten Purwakarta, dan aktifitas mobilisasi kendaraan angkut industri dimana pesatnya perkembangan industry baru ditambah dengan berubahnya pola penggunaan energy bagi

kalangan industri dari penggunaan bahan bakar minyak berubah menjadi bahan bakar batubara, kadar dari parameter tersebut merupakan disversi dari kegiatan ekonomi yang cukup tinggi, sehingga parameter yang terjadi di jalan akan menyebarkan dalam radius yang cukup luas, hal ini juga diiringi oleh keadaan iklim setempat.

Tindakan pemerintah Kabupaten Purwakarta yang telah dilakukan untuk dapat meminimalkan dampak tersebut antara lain melakukan pengawasan dan pembinaan secara simultan terhadap pelaku industri khususnya mengenai pengelolaan pencemaran udara serta melakukan kegiatan operasi KIR untuk kendaraan bermotor khusus niaga. Sedangkan untuk wilayah perkotaan pemerintah daerah telah menambah dan merevitalisasi ruang terbuka hijau dengan menambah jenis tanaman yang dapat menyerap sumber polutan yang ada.

b. Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks kualitas air dihitung berdasarkan analisis air sungai untuk parameter TSS, DO, dan COD. Pengambilan sampel air dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta terhadap aliran sungai selama tahun 2017 dengan jumlah sampel sebanyak 5 Sungai sebagai berikut:

1) Sungai Cikao

Diantara parameter yang diukur hanya parameter khususnya Zat Terlarut dan sulfat (SO_4) yang tinggi diantara parameter lainnya. Materi yang terlarut mempunyai dampak buruk terhadap kualitas air karena mengurangi penetrasi matahari ke dalam badan air, kekeruhan air meningkat yang menyebabkan gangguan pertumbuhan bagi organisme produsen. Dari hasil pemantauan tahun 2017, parameter tersebut diatas di sungai Cikao umumnya masih memenuhi kriteria mutu air kelas I PP. 82 tahun 2001 dengan nilai baku mutu untuk zat padat terlarut sebesar 1000 mg/l dan sulfat sebesar 400 mg/l .

2) Sungai Citarum

Pengukuran air sungai khususnya di sungai Citarum dilakukan pada lokasi sebelum dan sesudah PT. Indo Bharat Rayon. Diantara parameter yang diukur hanya parameter zat terlarut dan sulfat (SO_4) yang tinggi diantara parameter lainnya. Materi yang terlarut mempunyai dampak buruk terhadap kualitas air karena mengurangi penetrasi matahari ke dalam badan air, kekeruhan air meningkat yang menyebabkan gangguan pertumbuhan bagi organisme produsen. Sedangkan parameter fosfat dalam bentuk organik menyebabkan suburnya algae dan organisme lain, merupakan nutrisi penting untuk tumbuhan dan binatang. Dapat ditemukan di alam dalam air, tanah dan sedimen, umumnya tidak terdapat di udara dalam kondisi gas (dapat dalam bentuk partikel debu). Peningkatan konsentrasi fosfat akan meningkatkan pertumbuhan alga dan tumbuhan air lainnya dan menutupi cahaya matahari sehingga air tidak dapat digunakan sebagai tempat hidup organisme lain, dengan cepat akan turun ke dasar laut sebagai endapan organik. Dari hasil pemantauan tahun 2017, parameter tersebut diatas di sungai Citarum umumnya masih memenuhi kriteria mutu air kelas I PP. 82 tahun 2001 dengan nilai baku mutu untuk zat padat terlarut sebesar 1000 mg/l dan sulfat sebesar 400 mg/l

3) Sungai Ciherang

Pengukuran air sungai khususnya di sungai Ciherang dilakukan pada lokasi sekitar wilayah Kecamatan Bungursari. Diantara parameter yang diukur hanya parameter zat terlarut, COD dan sulfat (SO_4) yang tinggi diantara parameter lainnya. Materi yang terlarut mempunyai dampak buruk terhadap kualitas air karena mengurangi penetrasi matahari ke dalam badan air, kekeruhan air meningkat yang menyebabkan gangguan pertumbuhan bagi organisme produsen. Sedangkan parameter fosfat dalam bentuk organik menyebabkan suburnya alge dan organisme lain, merupakan nutrisi penting untuk tumbuhan dan binatang. Dapat ditemukan di alam

dalam air, tanah dan sedimen, umumnya tidak terdapat di udara dalam kondisi gas (dapat dalam bentuk partikel debu). Peningkatan konsentrasi fosfat akan meningkatkan pertumbuhan alga dan tumbuhan air lainnya dan menutupi cahaya matahari sehingga air tidak dapat digunakan sebagai tempat hidup organisme lain, dengan cepat akan turun ke dasar laut sebagai endapan organik. Parameter COD menunjukkan jumlah oksigen total yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan secara kimiawi, baik yang dapat didegradasi secara biologis maupun yang sukar didegradasi. Nilai COD dapat digunakan sebagai ukuran bagi pencemaran air oleh zat-zat organik yang secara alamiah dapat dioksidasikan melalui proses mikrobiologis dan mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut didalam air. Dari hasil pemantauan tahun 2017, parameter tersebut diatas di sungai Ciherang umumnya masih memenuhi kriteria mutu air namun untuk parameter COD berada diatas ambang baku mutu berdasarkan PP. 82 tahun 2001 dengan ruang kelas 1 dengan nilai baku mutu untuk zat padat terlarut sebesar 1000 mg/l COD sebesar 10 mg/l dan sulfat sebesar 400 mg/l.

4) Sungai Cilamaya

Pengukuran air sungai khususnya di sungai Cilamaya yang melintas di Kabupaten Purwakarta dilakukan pada lokasi sesudah PT. San Fu. Diantara parameter yang diukur hanya parameter Zat Terlarut, COD, BOD dan sulfat (SO_4) yang tinggi diantara parameter lainnya. Materi yang terlarut mempunyai dampak buruk terhadap kualitas air karena mengurangi penetrasi matahari ke dalam badan air, kekeruhan air meningkat yang menyebabkan gangguan pertumbuhan bagi organisme produsen. Parameter fosfat dalam bentuk organik menyebabkan suburnya alge dan organisme lain, merupakan nutrisi penting untuk tumbuhan dan binatang. Dapat ditemukan di alam dalam air, tanah dan sedimen, umumnya tidak terdapat di udara dalam kondisi gas (dapat dalam bentuk partikel debu). Peningkatan konsentrasi fosfat akan meningkatkan

pertumbuhan alga dan tumbuhan air lainnya dan menutupi cahaya matahari sehingga air tidak dapat digunakan sebagai tempat hidup organisme lain, dengan cepat akan turun ke dasar laut sebagai endapan organik. Nilai BOD yang tinggi mencerminkan tingginya kegiatan mikroorganisme di dalam air akibat pencemaran baik limbah penduduk, industri maupun sumber pencemaran lainnya yang masuk ke badan air, Sedangkan parameter COD menunjukkan jumlah oksigen total yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan secara kimiawi, baik yang dapat didegradasi secara biologis maupun yang sukar didegradasi. Nilai COD dapat digunakan sebagai ukuran bagi pencemaran air oleh zat-zat organik yang secara alamiah dapat dioksidasikan melalui proses mikrobiologis dan mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut di dalam air. Dari hasil pemantauan tahun 2017, parameter tersebut di atas di sungai Cilamaya umumnya masih memenuhi kriteria mutu air namun untuk parameter BOD dan COD berada di atas ambang baku mutu berdasarkan PP. 82 tahun 2001 dengan ruang kelas 1 dengan nilai baku mutu kelas II PP. 82/2001 dengan nilai baku mutu untuk zat padat terlarut sebesar 1000 mg/l, COD sebesar 10 mg/l, bod sebesar 2 mg/l dan sulfat sebesar 400 mg/l.

5) Sungai Cikembang

Pengukuran air sungai khususnya di sungai Cikembang yang melintas di Kabupaten Purwakarta dilakukan pada lokasi kampung Cikembang. Diantara parameter yang diukur hanya parameter Zat Terlarut dan Klorida yang tinggi diantara parameter lainnya. Materi yang terlarut mempunyai dampak buruk terhadap kualitas air karena mengurangi penetrasi matahari ke dalam badan air, kekeruhan air meningkat yang menyebabkan gangguan pertumbuhan bagi organisme produsen. parameter tersebut di atas di sungai Cikembang umumnya masih memenuhi kriteria mutu air kelas II PP. 82/2001 dengan nilai baku mutu untuk zat padat terlarut sebesar 1000 mg/l dan sulfat sebesar 400 mg/l. Di

Kabupaten Purwakarta terdapat sekitar 2 Waduk, 18 embung. Waduk Juanda atau Jatiluhur, waduk Cirata merupakan waduk utama di Kabupaten Purwakarta. Secara administratif waduk Juanda berada di Kecamatan Jatiluhur, Sukatani dan Sukasari dan merupakan waduk terbesar. Utamanya kedua waduk tersebut dimanfaatkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan cakupan distribusi Pulau Jawa dan Bali.

Berdasarkan sumber laporan analisis kualitas air sungai periode Januari – Desember 2017 Perum Jasa Tirta II, menyatakan hasil pantau kualitas air pada bulan Januari – Desember 2017 dengan melihat data seri waduk Ir. H. Djuanda ada parameter yang melebihi baku mutu lingkungan dan bila dianalisa dengan menggunakan metode pengujian yang ada keadaan atau status Ir. H. Djuanda ada indikasi parameter parameter yang diatas nilai baku mutu yang ditetapkan dan diupayakan ada tindakan yang lebih komprehensif lintas sektor. Sedangkan kondisi danau, waduk , situ, embung lainnya yang berada di Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada gambar selanjutnya. Alasan dilakukan pengukuran terhadap sungai dan danau, situ tersebut dikarenakan sebagai fungsi badan air penerima dari segala kegiatan yang potensial misalnya sebagai penerima outfall dari segala kegiatan antara lain industri, permukiman dan lain-lain . Gambaran tersebut menunjukkan tingkat kesadaran pelaku usaha ekonomi yang masih kecil dimana untuk setiap buangan limbah cairnya masih ada yang tidak mengolahnya ataupun tindakan pengolahannya masih belum optimal, sedangkan untuk tekanan yang menimbulkan keadaan sungai tersebut tercemar adalah dari banyaknya permukiman disekitar bantaran sungai tersebut bila dilihat dari cakupan sarana air bersih untuk fasilitas tempat buang air besar dari lingkup kecamatan masih didominasi dilakukan secara sendiri - sendiri langsung membuang buangan rumah tangga kedalam badan air penerima.

c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)

Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, adapun Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Purwakarta tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.79
Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2017

Luas Wilayah	Luas utupan Hutan (km ²)	Persentase Luas Tutupan Hutan	Indeks utupan Hutan
971,72 km ² .	681,86 km ²	70,17%	85

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap indeks kualitas udara, indeks kualitas air, dan indeks tutupan lahan Kabupaten Purwakarta , selanjutnya dilakukan pembobotan terhadap masing-masing indeks sehingga didapatkan hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Purwakarta seperti yang tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.80
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017

Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Air	Indeks Tutupan Lahan	IKLHD
70,56	52,15	85	69,23

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Indeks Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 adalah 69,23 sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Purwakarta termasuk dalam kategori **CUKUP**. Nilai IKLH mencerminkan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup

yang dilakukan oleh pemerintah dan tekanan lingkungan hidup oleh penduduk. Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Purwakarta yang dilakukan pemerintah cukup baik sehingga nilai IKLH Kabupaten Purwakarta juga Cukup. Selain itu, nilai IKLH ini juga dapat mencerminkan daya dukung lingkungan hidup Kabupaten Purwakarta masih cukup tinggi.

2.8 KERJASAMA DAERAH

Kabupaten Purwakarta merupakan bagian dari kerjasama daerah Metropolitan Bodebekkarpur. Wilayah Metropolitan Bodebekkarpur meliputi:

1. Pada Tahun 2010 mencakup 82 kecamatan, yaitu: 11 (sebelas) kecamatan di Kota Depok yakni Kecamatan Beji, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cilodong, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Cinere, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Limo, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Sukmajaya, dan Kecamatan Tapos; 6 (enam) kecamatan di Kota Bogor yakni Kecamatan Tanahsareal, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Selatan, dan Kecamatan Bogor Timur; 12 (dua belas) kecamatan di Kota Bekasi yakni Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Medan Satria, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Jatisampurna, Kecamatan Jatiasih, Kecamatan Pondok Melati, Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Bantargebang, Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Pondok Gede dan Kecamatan Mustikajaya; 17 (tujuh belas) kecamatan di Kabupaten Bogor yakni Kecamatan Bojonggede, Kecamatan Tajurhalang, Kecamatan Parung, Kecamatan Gunung Sindur, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Kemang,

Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Dramaga, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Ciampea, dan Kecamatan Jonggol; 19 (sembilan belas) kecamatan di Kabupaten Bekasi yakni Kecamatan Sukawangi, Kecamatan Babelan, Kecamatan Tambun Utara, Kecamatan Tambelang, Kecamatan Tarumajaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Setu, Kecamatan Serang Baru, Kecamatan Cikarang Selatan, Kecamatan Cikarang Barat, Kecamatan Kedungwaringin, Kecamatan Cikarang Timur, Kecamatan Bojongmangu, Kecamatan Cikarang Pusat, Kecamatan Cibirusah, Kecamatan Karangbahagia, Kecamatan Sukatani, dan Kecamatan Cikarang Utara; 11 (sebelas) kecamatan di Kabupaten Karawang yakni Kecamatan Rengasdengklok, Kecamatan Tirtamulya, Kecamatan Kotabaru, Kecamatan Klari, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Majalaya, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Purwasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, dan Kecamatan Cikampek; 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Purwakarta yakni Kecamatan Bungursari, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Jatiluhur, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Plered, dan Kecamatan Babakancikao;

2. Pada Tahun 2015 mencakup 83 kecamatan, yaitu: 82 (delapan puluh dua) kecamatan cakupan pada tahun 2010 ditambah dengan 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Purwakarta, yakni Kecamatan Sukatani;
3. Pada Tahun 2020 mencakup 105 kecamatan, yaitu: 83 (delapan puluh tiga) kecamatan cakupan pada tahun 2015 ditambah dengan 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Bekasi yakni Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Cabangbungin, Kecamatan Sukakarya, dan Kecamatan Pebayuran; 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Bogor yakni Kecamatan Rancabungur, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Tamansari,

Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Sukamakmur dan Kecamatan Cariu; 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Karawang yakni Kecamatan Jayakarta, Kecamatan Kutawaluya, Kecamatan Rawamerta, Kecamatan Jatisari, Kecamatan Ciampel, Kecamatan Pangkalan, Kecamatan Talagasari, dan Kecamatan Lemahabang; 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Purwakarta yakni Kecamatan Campaka, Kecamatan Cibatu, Kecamatan Pondok Salam, dan Kecamatan Sukasari;

4. Pada Tahun 2025 mencakup 112 kecamatan, yaitu: 105 (seratus lima) kecamatan cakupan pada tahun 2020 ditambah dengan 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Bogor yakni Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Tenjolaya, Kecamatan Cibungbulang; 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Karawang yakni Kecamatan Banyusari; 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Purwakarta yakni Kecamatan Maniis, Kecamatan Darangdan, dan Kecamatan Tegalwaru;
5. Pada Tahun 2030 mencakup 112 kecamatan yang sama dengan cakupan wilayah pada tahun 2025;
6. Pada Tahun 2035 mencakup 112 kecamatan yang sama dengan cakupan wilayah pada tahun 2025;
7. Pada Tahun 2040 mencakup 112 kecamatan yang sama dengan cakupan wilayah pada tahun 2025;
8. Pada Tahun 2045 mencakup 112 kecamatan yang sama dengan cakupan wilayah pada tahun 2025; dan
9. Pada Tahun 2050 mencakup 112 kecamatan yang sama dengan cakupan wilayah pada tahun 2025.

2.9 CAPAIAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

a. SPM Bidang Pendidikan

Capaian dari SPM bidang Pendidikan Tahun 2018 di Kabupaten Purwakarta disajikan pada tabel dibawah.

Tabel 2.81
Capaian SPM Bidang Pendidikan
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018

No.	Indikator Standar Pelayanan Minimal:	Jenjang	Target	Satuan	Realisasi SPM	Tingkat Capaian (%)
1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	SD	1	Permukiman	1	100%
		SMP	1	Permukiman	1	100%
2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.	SD	408	Sekolah	275	67%
		SMP	108	Sekolah	77	72%
3	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 siswa dan minimal 1 (satu) set peralatan praltek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.	SMP	108	Sekolah	12	11%
4	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu	SD	408	Sekolah	134	33%
		SMP	108	Sekolah	42	39%

No.	Indikator Standar Pelayanan Minimal:	Jenjang	Target	Satuan	Realisasi SPM	Tingkat Capaian (%)
	ruang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP dan MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.					
5	Di setiap SD dan MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.	SD	408	Sekolah	350	86%
6	Di setiap SMP dan MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.	SMP	108	Sekolah	96	89%
7	Di setiap SD dan MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.	SD	408	Sekolah	393	96%
8	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.	SMP	108	Sekolah	88	81%
9	Di setiap SMP dan MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.	SMP	108	Sekolah	55	51%

No.	Indikator Standar Pelayanan Minimal:	Jenjang	Target	Satuan	Realisasi SPM	Tingkat Capaian (%)
10	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD dan MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	SD	408	Sekolah	341	84%
11	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SMP dan MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	SMP	108	Sekolah	72	67%
12	Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.		1	Kab/Kota	1	100%
13	Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.		1	Kab/Kota	1	100%
14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.	SD	408	Sekolah	252	62%
		SMP	108	Sekolah	81	75%
15	Setiap SD dan MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bhs. Indonesia, IPA, IPS dan Pkn dengan perbandingan 1 (satu) set untuk setiap peserta didik.	SD	408	Sekolah	248	61%
16	Setiap SMP dan MTS menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup	SMP	108	Sekolah	37	34%

No.	Indikator Standar Pelayanan Minimal:	Jenjang	Target	Satuan	Realisasi SPM	Tingkat Capaian (%)
	semua mata pelajaran dengan perbandingan 1 (satu) set untuk setiap peserta didik.					
17	Setiap SD dan MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, KIT IPA untuk eksperimen dasar dan poster/carta IPA	SD	408	Sekolah	203	50%
18	Setiap SD dan MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP dan MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.	SD	408	Sekolah	186	46%
		SMP	108	Sekolah	45	42%
19	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan.	SD	408	Sekolah	321	79%
		SMP	108	Sekolah	74	69%
20	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :	SD	408	Sekolah	408	100%
	Kelas 1-2 : 18 Jam per minggu Kelas 3 : 24 Jam per minggu Kelas 4-6 : 27 Jam per minggu Kelas 7-9 : 27 Jam per minggu	SMP	108	Sekolah	108	100%
21	Satuan pendidikan menerapkan Kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku	SD	408	Sekolah	408	100%
		SMP	108	Sekolah	108	100%

No.	Indikator Standar Pelayanan Minimal:	Jenjang	Target	Satuan	Realisasi SPM	Tingkat Capaian (%)
22	Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.	SD	408	Sekolah	397	97%
		SMP	108	Sekolah	101	93%
23	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	SD	408	Sekolah	395	97%
		SMP	108	Sekolah	100	92%
24	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali setiap semester	SD	408	Sekolah	329	81%
		SMP	108	Sekolah	24	23%
25	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil belajar	SD	408	Sekolah	394	97%
		SMP	108	Sekolah	99	92%
26	Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil UAS, UKK serta Ujian Akhir (US/UN).	SD	408	Sekolah	405	99%
		SMP	108	Sekolah	107	99%
27	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).	SD	408	Sekolah	404	99%
		SMP	108	Sekolah	104	97%

Sumber: Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah, 2019

b. SPM Bidang Kesehatan

Capaian dari SPM bidang Kesehatan Tahun 2018 di Kabupaten Purwakarta disajikan pada tabel dibawah.

**Capaian SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018**

NO	URAIAN	R/S	JUMLAH	%	Target (%)	Masalah
I	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
1	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	R	19.218	97,74	100	- sistem pencatatan belum terintegrasi dengan fasyankes swasta
	Jumlah semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	S	19.662			
II	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
2	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	R	18.518	98,66	100	Kepercayaan masyarakat untuk melahirkan oleh bidan/nakes belum menyeluruh
	Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun	S	18.769			
III	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
3	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	R	18.576	103,92	100	Pemantauan BBL sudah optimal
	Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun	S	17.875			
IV	Pelayanan Kesehatan Balita					
4	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	R	33600	47,55	100	Sasaran tidak datang ke sarana/ posyandu terutama anak diatas 1 tahun
	Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama	S	70657			
V	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					

NO	URAIAN	R/S	JUMLAH	%	Target (%)	Masalah
5	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	R	33.173	86,74	100	Sasaran tidak di tempat saat pelaksanaan
	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kerja di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran	S	38.243			Belum optimalnya kerjasama Lintas Sektor
VI	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					
6	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	R	1463	1,05	100	Skrining tidak maksimal, SDM kurang, dana dan peralatan kurang maksimal
	Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama	S	139178			
VII	Data SPM Sasaran - Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
7	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	R	35.896	42,00	100	Skrining tidak maksimal, SDM kurang, dana dan peralatan kurang maksimal
	Jumlah semua penduduk berusia usia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun perhitungan	S	85.459			
VIII	Data SPM Sasaran - Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					
8	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	R	14.607	6,18	100	Skrining tidak maksimal, SDM kurang, dana dan peralatan kurang maksimal
	Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka	S	236.408			

NO	URAIAN	R/S	JUMLAH	%	Target (%)	Masalah
	prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama					
IX	Data SPM Sasaran - Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)					
9	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	R	5.130	2,17	100	Skrining tidak maksimal, SDM kurang , dana dan peralatan kurang maksimal
	Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama	S	236.408			
X	Data SPM Sasaran - Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					
10	Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	R	1.730	118,25	100	Adanya ODG lanjutan yang ditemukan tahun lalu masih dalam pengobatan
	Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	S	1.463			
XI	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)					
11	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	R	1.179	93,57	100	Pencatatan dan Pelaporan belum optimal (online), sumber daya kurang
	Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama	S	1.260			
XII	Data SPM Sasaran - Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					
12	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai	R	8.467	83,30	100	Pencatatan dan Pelaporan belum optimal (online), sumber

NO	URAIAN	R/S	JUMLAH	%	Target (%)	Masalah
	standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun					daya kurang
	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama	S	10.165			

Sumber: Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah, 2019

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum

Capaian dari SPM bidang Pekerjaan Umum Tahun 2018 di Kabupaten Purwakarta disajikan pada tabel dibawah.

Tabel 2.83
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018

No	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET DAERAH 2018 (%)	REALISASI 2018 (%)
		INDIKATOR			
1	Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat	1	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	100	74,03
2	Penyediaan air minum	2	Persentase penduduk yang mendapatkan Akses air minum yang aman	81,77	27,39
3	Penyediaan sanitasi	3	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	60	76,56
		4	Persentase penduduk yang terlayani sistem Jaringan drainase skala kota sehingga tidak Terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	50	50
				50	50
4	Penataan Bangunan dan Lingkungan	5	Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan	100	78,96
5	Penangan Pemukiman Kumuh Perkotaan	6	Persentase berkurangnya luasan permukiman Kumuh di kawasan perkotaan	10	57,95
6	Pengembangan sistem informasi jasa	7	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi Jasa konstruksi tingkat	60	0

No	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET DAERAH 2018 (%)	REALISASI 2018 (%)
		INDIKATOR			
	konstruksi		Kabupaten/kota pada sistem Informasi pembina jasa Konstruksi (sipjaki)		
7	Izin Usaha Jasa konstruksi	8	Persentase tersedianya Layanan izin usaha jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu penerbitan paling Lama 10 (sepuluh) hari kerja Setelah persyaratan lengkap	60	0
8	Informasi Penataan Ruang	9	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rincinya melalui peta analog dan peta digital	100	95
9	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	10	Persentase tersedianya luasan RTH publik Sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan Perkotaan	50	96,70

Sumber: Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah, 2019

d. SPM Bidang Perumahan Rakyat

Capaian dari SPM bidang Perumahan Rakyat Tahun 2018 di Kabupaten Purwakarta disajikan pada tabel dibawah.

Tabel 2.84
Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018

No	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET DAERAH 2018 (%)	REALISASI 2018 (%)
		INDIKATOR			
1	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100	35,8
		2	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70	50
2	Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung Dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	3	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU	100	30

Sumber: Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah, 2019

e. SPM Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi Pencapaian SPM Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat lebih mengacu kepada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah guna menciptakan Purwakarta yang lebih aman, tertib dan tenteram.

1) Kontribusi Pemerintahan Daerah

Penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Wilayah Kabupaten Purwakarta berupa: pembangunan gedung kantor, pembangunan pos jaga operasional, pengadaan Pakaian Dinas Lapangan, pengadaan kendaraan dinas roda 4 dan 2, pengadaan perlengkapan keamanan personil dan tersedianya anggaran kegiatan dan Tunjangan Beban Kerja/Prestasi Kerja.

2) Kontribusi Swasta/Masyarakat

Tersedianya petugas keamanan (Satpam) pada perusahaan dan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) pada masing-masing Desa/Kelurahan yang dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan Satpol. PP.

f. SPM Bidang Sosial

Capaian dari SPM bidang Sosial Tahun 2018 di Kabupaten Purwakarta disajikan pada tabel dibawah.

**Capaian SPM Bidang Sosial
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET DAERAH 2018 (%)	REALISASI 2018 (%)
		INDIKATOR			
1	Pelayanan Jaminan Sosial dan Pelayanan Sosial	1	Persentase masyarakat purwakarta yang menerima pelayanan Kebutuhan untuk disabilitas, ODGJ dan PMKS Lainnya	100	85
2	Perlindungan Sosial	2	Persentase masyarakat Purwakarta yang menerima layanan disabilitas atas penghidupan yang layak	100	90
3	Pemberdayaan Sosial	3	Persentase masyarakat purwakarta yang termasuk dalam kaum disabilitas yang dibantu dalam peningkatan keterampilannya guna meningkatkan taraf hidupnya.	100	90
4	Pelayanan PMKS	4	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Lemah dalam meningkatkan kualitas hidupnya guna mengurangi kesenjangan sosial	100	75
		5	Persentase masyarakat Purwakarta yang dibantu dalam menyelesaikan persoalan sosial yang berkaitan dengan PMKS	100	75
5	Pengaduan Terhadap Kekerasan kepada Perempuan dan Anak	6	Persentase masyarakat purwakarta yang mengalami kekerasan terutama perempuan dan anak dalam kehidupan sosial	100	80
		7	Persentase masyarakat purwakarta yang masuk kedalam Konseling dan tauma hilling kepada anak korban kekerasan	100	80
7	Pelayanan Kesehatan terhadap perempuan dan anak	8	Persentase masyarakat purwakarta (Perempuan dan Anak yang menjalani Visum karena korban kekerasan	100	20
8	Pendampingan kepada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	9	Persentase pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan bila kasus sampai ke ranah hukum	100	30
9	Pendampingan Pasca Rehab	10	Persentase pendampingan terhadap korban kekerasan pasca rehab baik itu	100	20

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET DAERAH 2018 (%)	REALISASI 2018 (%)
		INDIKATOR			
			kekerasan fisik, narkoba atau narapidan untuk perempuan dan anak		
10	Pemberdayaan Terhadap Perempuan Kepala Keluarga	11	Persentase Perempuan kepala keluarga yang dibina dan dibimbing dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya	100	95
11	P2WKSS	12	Persentase Meningkatnya Wawasan Perempuan Keluarga Binaan	100	95
12	Pembinaan Organisasi Perempuan	13	Persentase wanita di Purwakarta yang menduduki Legislatif, bekerja di Pemerintahan dan sektor swasta	100	83
13	Pembinaan Usia Produktif	14	Persentasi wanita di Purwakarta usia 18 s/d 60 yaitu usia produktif untuk meningkatkan keterampilan guna meningkatkan taraf hidupnya	100	83

Sumber: Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah, 2019

2.10 KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta memiliki beberapa Perusahaan Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu terdiri dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan Perusahaan Daerah Perkreditan. Sebagian dari APBD Kabupaten Purwakarta dialokasikan untuk penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah atau BUMD. Adapun target dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari BUMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 disajikan pada tabel dibawah.

**Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan Bersumber dari BUMD
Kabupaten Purwakarta Tahun 2017**

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PDAM	100.000.000,00	150.000.000,00	150,00%
2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. LKM Mekar Asih	28.000.000,00	0,00	0,00%
3	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PD. BPR Raharja Wanayasa	200.000.000,00	100.565.378,00	50,28%

Sumber: LKPJ Kabupaten Purwakarta Tahun 2018

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang berhubungan dengan kebijakan fiskal, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan penerimaan sumber-sumber pendapatan daerah yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis keuangan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. Selanjutnya sebagai dasar dalam perumusan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang mencakup kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta capaian kinerja program dan kegiatan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat digunakan analisis keuangan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan pada upaya peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah sebagai upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu aspek dari Pemerintahan Daerah yang harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh adalah pengelolaan keuangan daerah

yang dalam wujud konkritnya berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan arahan/pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk perencanaan pendanaan dan program kerja untuk periode satu tahun anggaran.

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Purwakarta diawali dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), yang selanjutnya diusulkan menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dari Pemerintah Daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama-sama untuk menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kerangka anggaran pembangunan daerah akan memberikan gambaran arah pembangunan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Anggaran pembangunan daerah tersebut pendanaannya bersumber antara lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan pendanaan dari masyarakat. Secara umum komponen Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah ini dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu:

- 1) Penerimaan daerah, terdiri dari pendapatan daerah yang merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, dan penerimaan pembiayaan daerah yang merupakan semua penerimaan yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- 2) Pengeluaran daerah, terdiri dari belanja daerah yang merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat, khususnya dalam memberikan pelayanan umum.
- 3) Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah merupakan semua pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun berikutnya.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pemerintah Kabupaten Purwakarta terus mengupayakan berbagai upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, peningkatan koordinasi dengan SKPD penghasil PAD, peningkatan pengendalian dan pengawasan pengelolaan asset daerah, peningkatan dan pengembangan manajemen BUMD, peningkatan profesionalisme SDM pengelola Pendapatan Daerah, pengembangan sarana prasarana pengelolaan Pendapatan Daerah dan perbaikan sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah yang berkesinambungan. Sementara itu pengelolaan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil dilakukan melalui 3 (tiga) kebijakan, yaitu pengelolaan DAU untuk membiayai Belanja Pegawai dan Urusan Wajib dalam rangka pelayanan

dasar dan pelayanan umum; peningkatan DAK melalui penyusunan program unggulan strategis daerah dan peningkatan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak melalui intensifikasi dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Sumber Penerimaan Daerah (Kabupaten), terdiri atas:

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- b) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK); dan
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Sedangkan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Purwakarta dapat diukur dari kontribusi masing-masing unsur pendapatan terhadap total Pendapatan Daerah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta selama kurun waktu Tahun 2013–2017 mengalami peningkatan dari sebesar Rp1.371.139.969.587,00 pada Tahun

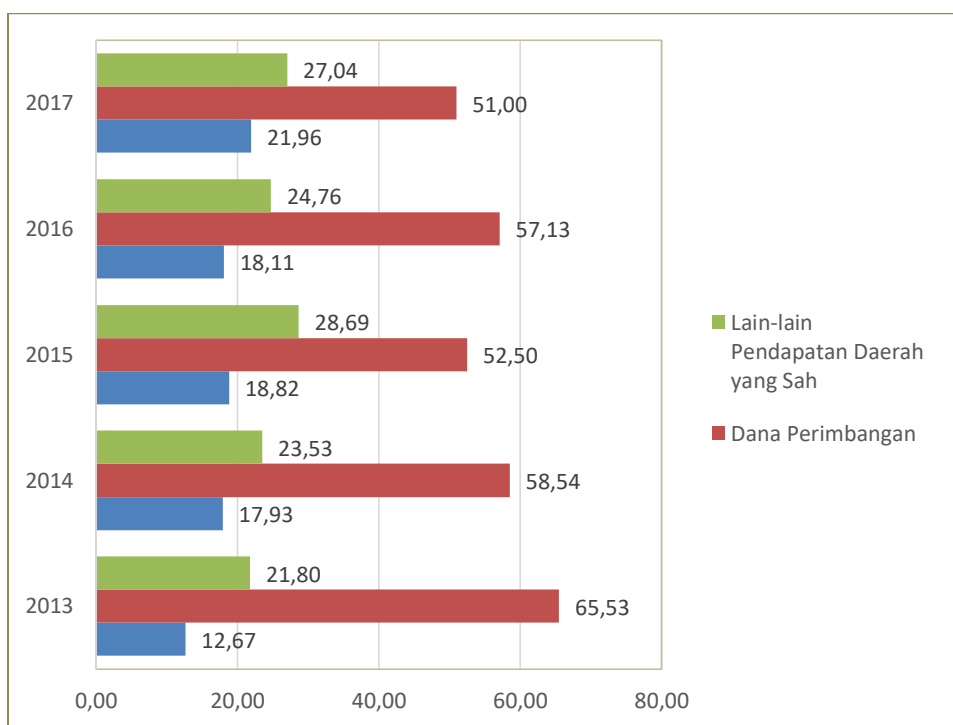
2013 menjadi sebesar Rp2.151.598.579.948,00 pada Tahun 2017 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai sebesar 11,98%. Komponen Pendapatan Daerah ini terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Adapun realisasi pertumbuhan Pendapatan Daerah di Kabupaten Purwakarta dari Tahun 2013 sd 2017 adalah sebagai berikut:

- a) Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purwakarta fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari sebesar Rp173.764.159.823,00 pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp472.480.560.976,00 pada Tahun 2017 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai sebesar 30,51%.
- b) Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Purwakarta cenderung meningkat dari sebesar Rp898.515.275.234,00 pada Tahun 2013 menjadi sebesar Rp1.097.350.002.986,00 pada Tahun 2017 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai sebesar 5,33%.
- c) Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah di Kabupaten Purwakarta cenderung meningkat dari sebesar Rp298.860.534.530,00 pada Tahun 2013 menjadi sebesar Rp581.768.015.986,00 pada Tahun 2017 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai sebesar 19,30%.

Dilihat dari proporsinya, Perkembangan Keuangan Daerah di Kabupaten Purwakarta selama kurun waktu Tahun 2013 – 2017 masih bertumpu pada Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan, baik Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan proporsi sebesar 56,94%. Sedangkan proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Pendapatan Daerah sebesar 25,16% dan proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah hanya sebesar 17,90%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Purwakarta masih dalam kategori rendah, artinya tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi masih sangat tinggi. Berikut ini disajikan Grafik Proporsi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2013–2017.

Gambar 3.1
Proporsi Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah
Yang Sah di Kab.Purwakarta Tahun 2013–2017



Sumber : Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Purwakarta

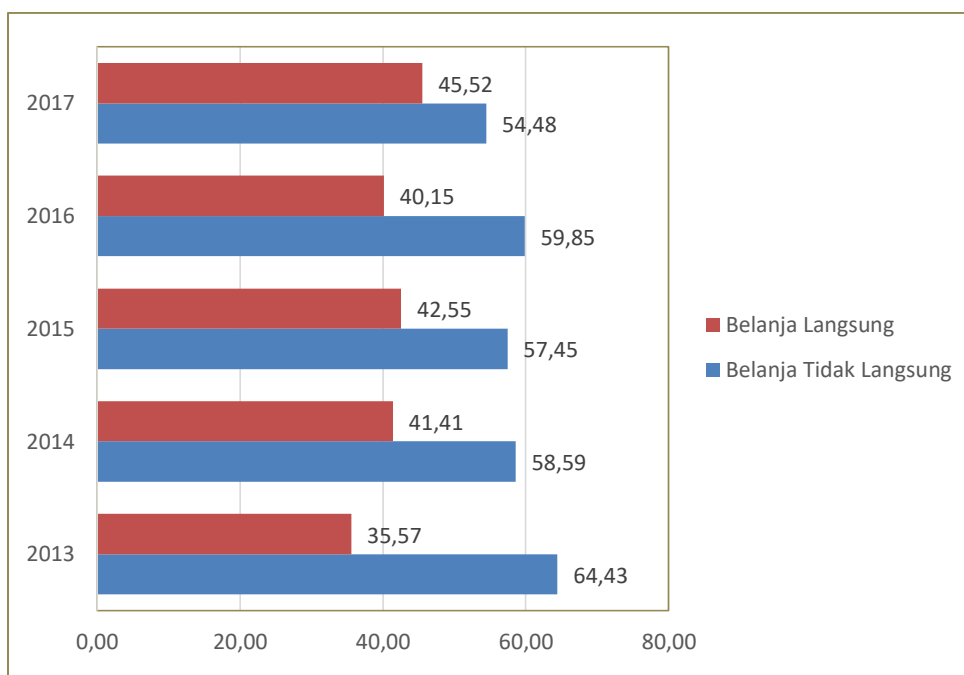
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah di Kabupaten Purwakarta selama kurun waktu Tahun 2013-2017 menunjukkan peningkatan seiring dengan peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta, yaitu dari sebesar Rp1.378.994.209.607,00 pada Tahun 2013 menjadi sebesar Rp2.023.895.829.777,00 pada Tahun 2017 dengan rata-rata

pertumbuhan mencapai sebesar 10,27%. Belanja Tidak Langsung mengalami peningkatan dari sebesar Rp888.520.160.292,00 pada Tahun 2013 menjadi sebesar Rp1.102.540.891.877,00 pada Tahun 2017 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai sebesar 5,67%, dimana sebagian besar dipergunakan untuk Belanja Pegawai. Realisasi Belanja Langsung juga mengalami peningkatan dari sebesar Rp490.474.049.315,00 pada Tahun 2013 menjadi sebesar Rp921.354.937.900,00 pada Tahun 2017 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 18,03%.

Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta lebih didominasi oleh Belanja Tidak Langsung. Proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap total Belanja Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2013-2017 secara umum berfluktuasi dari sebesar 64,43% pada Tahun 2013, kemudian menurun pada Tahun 2014 mencapai sebesar 58,59%. Pada Tahun 2015 proporsi Belanja Tidak Langsung mencapai sebesar 57,45% dan mengalami peningkatan kembali pada Tahun 2016 yaitu sebesar 59,85% dan menurun pada Tahun 2017 menjadi sebesar 54,48%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa alokasi dana untuk belanja pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat lebih kecil dibandingkan dengan Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan), Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Belanja Tidak Terduga. Perkembangan proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terhadap total Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 3.2
Proporsi Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja
Langsung Terhadap Belanja Daerah
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017



Sumber: Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Purwakarta

Sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Purwakarta selama kurun waktu Tahun 2013-2017 mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif yaitu dari sebesar Rp43.511.237.674,00 di Tahun 2013 menjadi sebesar Rp16.745.224.776,00 di Tahun 2017. Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kabupaten Purwakarta sebagian besar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun yang lalu. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Purwakarta tergolong fluktuatif dimana pada Tahun 2013 mencapai sebesar Rp13.080.280.014,00 dan di Tahun 2017 mengalami peningkatan cukup besar menjadi sebesar Rp128.236.501.019,00 dimana penggunaannya secara umum untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang. Dilihat perkembangannya setiap tahun, pelaksanaan pembangunan daerah setiap tahunnya

menyisakan SILPA dalam jumlah yang tergolong besar yang selanjutnya dijadikan sebagai sumber penerimaan daerah untuk penyelenggaraan pembangunan tahun berikutnya. Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Purwakarta. Perkembangan rata-rata pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Purwakarta dari Tahun 2013–2017 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan APBD
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017

No.	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	1.371.139.969.587	1.599.303.021.481	1.759.356.611.741	1.883.533.939.269	2.151.598.579.948	11.98
1 1	Pendapatan Asli Daerah	173.764.159.823	286.797.722.805	331.073.426.247	341.116.103.330	472.480.560.976	30.51
1 1 1	Pajak Daerah	98.455.068.941	162.459.499.090	184.745.870.520	203.685.892.137	222.161.931.097	
1 1 2	Retribusi Daerah	27.904.064.672	38.635.807.656	32.020.538.321	24.111.253.110	22.574.628.435	
1 1 3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	5.564.174.780	5.269.781.428	4.225.737.486	5.000.890.759	5.356.910.109	
1 1 4	Lain-lain PAD Yang Sah	41.840.851.430	80.432.634.631	110.081.279.920	108.318.067.324	222.387.091.335	
1 2	Dana Perimbangan	898.515.275.234	936.214.866.948	923.601.621.411	1.076.034.722.218	1.097.350.002.986	5.33
1 2 1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	120.215.154.234	108.572.324.948	71.531.807.411	101.114.908.215	106.413.113.159	
1 2 2	Dana Alokasi Umum	722.162.721.000	786.592.072.000	808.114.494.000	857.566.481.000	850.227.151.000	
1 2 3	Dana Alokasi Khusus	56.137.400.000	41.050.470.000	43.955.320.000	117.353.333.003	140.709.738.827	
1 3	Lain-lain Pendapatan Daerah	298.860.534.530	376.290.431.728	504.681.564.083	466.383.113.721	581.768.015.986	19.30
1 3 1	Hibah	958.463.600	8.781.702.871	812.837.700	1.018.431.596	1.061.119.891	
1 3 2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	
1 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	85.520.160.470	119.442.801.647	143.494.478.212	137.011.123.698	145.832.795.775	
1 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	159.016.739.500	192.934.091.000	283.077.767.000	299.330.075.427	315.199.337.970	
1 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	53.365.170.960	55.131.836.210	77.296.481.171	29.023.483.000	119.674.762.350	

No.	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2	Belanja	1.378.994.209.607	1.541.016.179.823	1.803.281.187.378	1.794.157.784.624	2.023.895.829.777	10.27
2 1	Belanja Tidak Langsung	888.520.160.292	902.862.469.208	1.035.908.139.150	1.073.733.530.769	1.102.540.891.877	5.67
2 1 1	Belanja Pegawai	716.658.341.842	780.091.948.658	826.640.334.738	814.934.581.584	808.002.586.389	
2 1 2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	
2 1 3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	
2 1 4	Belanja Hibah	135.115.412.030	86.326.783.100	49.721.218.000	18.646.696.500	32.833.600.000	
2 1 5	Belanja Bantuan Sosial	5.899.475.000	4.426.590.000	3.320.275.000	4.085.807.635	2.016.125.055	
2 1 6	Belanja Bagi Hasil	24.609.176.945	29.685.190.000	4.791.079.622	-	-	
2 1 7	Belanja Bantuan Keuangan	6.237.754.475	2.331.957.450	151.420.089.590	236.066.445.050	259.616.124.133	
2 1 8	Belanja Tidak Terduga	-	-	15.142.200	-	72.456.300	
2 2	Belanja Langsung	490.474.049.315	638.153.710.615	767.373.048.228	720.424.253.855	921.354.937.900	18.03
2 2 1	Belanja Pegawai	55.251.382.247	78.886.589.748	116.970.634.280	97.378.761.631	127.605.960.378	
2 2 2	Belanja Barang dan Jasa	203.460.334.896	229.027.667.694	292.512.031.074	338.249.368.206	377.160.071.862	
2 2 3	Belanja Modal	231.762.332.172	330.239.453.173	357.890.382.874	284.796.124.018	416.588.905.660	
3	Pembiayaan	30.430.957.660	2.369.383.218	56.824.673.751	(72.630.929.869)	(111.491.276.243)	507.94
3 1	Penerimaan Pembiayaan	43.511.237.674	22.664.817.640	60.656.224.876	12.900.098.114	16.745.224.776	
3 2	Pengeluaran Pembiayaan	13.080.280.014	20.295.434.422	3.831.551.125	85.531.027.983	128.236.501.019	

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan pemerintah daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Laporan Neraca Daerah memberikan informasi penting kepada seluruh *stakeholders* (Pemerintah Daerah, DPRD, pemberi pinjaman, investor dan masyarakat luas lainnya) tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Laporan Neraca Daerah ini terdiri atas:

1. **Aset** memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa yang akan datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Investasi jangka panjang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang ini di dominasi oleh investasi permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak

lain. Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

3. **Ekuitas Dana** adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana meliputi (i) ekuitas dana lancar, (ii) ekuitas dana investasi, dan (iii) ekuitas dana cadangan.

Berikut adalah tabel rata-rata pertumbuhan Neraca Daerah di Kabupaten Purwakarta:

Tabel 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
di Kabupaten Purwakarta

No.	Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	2	3
1.	ASET	
1.1.	ASET LANCAR	19,01
1.1.1	Kas di Kas Daerah	33,41
1.1.2	Kas di bendahara pengeluaran	88,46
1.1.3	Kas di BLUD	681,91
1.1.4	Kas Dana JKN	38,93
1.1.5	Kas Dana BOS	-
1.1.6	Kas Lainnya	(7,53)
1.1.7	Piutang Pajak	1.070,32
1.1.8	Penyisihan Piutang Pajak	7,19
1.1.9	Piutang Pajak netto	1.053,77
1.1.10	Piutang Retribusi	21,34
1.1.11	Penyisihan Piutang Retribusi	20,16
1.1.12	Piutang Retribusi netto	(13,21)
1.1.13	Belanja Dibayar di Muka (Uang muka)	132,71
1.1.14	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	(31,71)
1.1.15	Penyisihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	(35,95)
1.1.16	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	(29,43)
1.1.17	Piutang Lainnya	59,67
1.1.18	Penyisihan Piutang Lainnya	15,16
1.1.19	Piutang Lainnya Netto	63,03
1.1.20	Persediaan	48,57
1.2	ASET TETAP	10,42
1.2.1	Tanah	8,83

No.	Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1.2.2	Peralatan dan Mesin	23,17
1.2.3	Gedung dan Bangunan	20,70
1.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	17,67
1.2.5	Aset Tetap Lainnya	21,67
1.2.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	135,47
1.2.7	Akumulasi Penyusutan	9,82
1.3	ASET LAINNYA	(15,70)
1.3.1	Tagihan Penjualan Angsuran	-
1.3.2	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran	-
1.3.3	Tagihan Penjualan Angsuran Netto	-
1.3.4	Tuntutan Ganti Rugi	7,76
1.3.5	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	11,93
1.3.6	Tuntutan Ganti Rugi Netto	0,71
1.3.7	Kemitraan dengan pihak ketiga	5,33
1.3.8	Aset Tak Berwujud	(22,75)
1.3.9	Amortisasi Aset Tidak berwujud	-
1.3.10	Aset Tak Berwujud Netto	(22,75)
1.3.11	Aset Lain-lain	(24,37)
1.3.12	Dana Talangan	(30,32)
	JUMLAH ASET DAERAH	10,34
2	KEWAJIBAN	401,39
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	463,61
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	30,67
2.1.2	Utang Bunga	(25,00)
2.1.3	Pendapatan diterima dimuka	1,57
2.1.4	Utang Beban	383,76
2.1.5	Utang jangka pendek lainnya	472,57
2.2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	12,86
2.2.1	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	(42,64)
2.2.2	Utang Jangka panjang lainnya	40,39
3	EKUITAS DANA	(18,76)
3.1.	JUMLAH EKUITAS	9,06
3.1.1	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	10,34

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu mencakup penggunaan anggaran (Belanja Daerah) dan Pembiayaan Daerah. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah sangat menentukan hasil pembangunan yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu, sehingga perlu mengedepankan efesiensi, efektifitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap program-program strategis daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan di Kabupaten Purwakarta, dilakukan berbagai upaya dan terobosan, antara lain:

- a) Pengkajian dan penyesuaian regulasi (*regulation impact assesment*) terhadap sektor-sektor potensial yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.
- b) Pengkajian terhadap sistem, mekanisme dan prosedur pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- c) Kemudahan dan percepatan proses pelayanan perijinan.
- d) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah, serta sarana dan prasarana pendukungnya.
- e) Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemungutan pajak dan retribusi.
- f) Upaya koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat/provinsi guna meningkatkan rasionalisasi, efektivitas dan efisiensi anggaran program/kegiatan.

Perkembangan target maupun realisasi PAD menunjukkan disparitas yang tinggi pada pertumbuhannya, yang berarti tingkat kepastiannya masih rendah. Kondisi ini terjadi, disebabkan oleh belum optimalnya strategi dan kebijakan yang dijalankan serta ketergantungan yang tinggi penerimaan daerah

terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan Pemerintah Pusat, karena memang sumber utama pendapatan daerah diperoleh dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Oleh karena itu, perlu segera dicari terobosan untuk mendapatkan sumber pendapatan lain yang prospektif.

Belanja daerah dipergunakan untuk melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten, baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja tersebut diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan layanan jaminan sosial. Kebijakan pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Purwakarta yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengacu kepada arah dan kebijakan umum serta strategi prioritas pembangunan yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Strategi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam mengelola Belanja Daerah, antara lain:

- a) Belanja disertai tolok ukur yang jelas untuk setiap indikator belanjanya.
- b) Belanja dititikberatkan pada upaya pencapaian tema dan prioritas pembangunan.
- c) Alokasi belanja diupayakan dapat mendorong dan memberikan stimulus terhadap masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan.

- d) Alokasi belanja dilaksanakan secara rasional, efektif, efisien dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Komponen Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang masing-masing kelompok dirinci kedalam berbagai jenis belanja. Belanja Tidak Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Sementara untuk Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Struktur APBD memperlihatkan bahwa komponen pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus/(defisit) anggaran. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah. Dalam menyusun komponen pembiayaan daerah, diperlukan beberapa strategi sebagai berikut:

- a) Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan Kas dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
- b) Apabila APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, dan melakukan efisiensi dan penghematan belanja.
- c) Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi Penggunaan Anggaran khususnya untuk Belanja Pemenuhan Aparatur di Kabupaten Purwakarta selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan rata -rata pertumbuhan pemenuhan belanja kebutuhan aparatur terhadap belanja menurun sebesar 9.1%, dimana untuk tahun 2013 sebesar 55,45%, tahun 2014 sebesar 55,02%, Tahun 2015 mencapai sebesar 45,74%, Tahun 2016 mencapai sebesar 43,35% dan Tahun 2017 mencapai sebesar 37,54%. Berdasarkan kondisi tersebut dapat di katakan bahwa alokasi belanja untuk Belanja langsung semakin meningkat. Berikut adalah tabel analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Purwakarta.

Tabel 3.3
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur di Kabupaten Purwakarta

No.	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase (a) / (b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2013	771,909,724,089	1,392,074,489,621	55.45
2	Tahun Anggaran 2014	858,978,538,406	1,561,311,614,245	55.02
3	Tahun Anggaran 2015	826,640,334,738	1,807,112,738,503	45,74
4	Tahun Anggaran 2016	814,934,581,584	1,879,688,812,607	43,35
5	Tahun Anggaran 2017	808,002,586,389	2,152,132,330,796	37,54

Sumber: Hasil analisis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta

3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; Transfer dari Dana Cadangan; Penerimaan Pinjaman dan

Obligasi; dan Hasil Penjualan Asset Daerah Yang Dipisahkan. Sementara itu Pengeluaran Pembiayaan mencakup: Transfer ke Dana Cadangan; Investasi/Penyertaan Modal Daerah; Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo; dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan. Penghitungan defisit riil anggaran di Kabupaten Purwakarta dihitung melalui Realisasi Pendapatan Daerah dikurangi dengan Total Kebutuhan Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Dengan menghitung ini akan terlihat berapa besaran defisit sesuai dengan kemampuan Pendapatan Daerah.

Tabel 3.4
Defisit Riil Anggaran di Kabupaten Purwakarta
Tahun 2015-2017

No.	Uraian	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah Dikurangi Realisasi	1.759.356.611.741	1.883.533.939.269	2.151.598.579.948
2	Belanja Daerah	1.803.281.187.378	1.794.157.784.624	2.023.895.829.777
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.831.551.125	85.531.027.983	128.236.501.019
Defisit Riil		(47.756.126.762)	3.845.126.662	(533.750.848)

Sumber: Hasil analisis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta

Dalam upaya mengatasi defisit ini salah satunya adalah melalui pemanfaatan anggaran dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya. Dimana dalam menghitung komponen penutup defisit riil ini adalah dengan membagi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya dengan Total Defisit Riil setiap tahunnya. Berikut adalah tabel komposisi penutup definisi riil anggaran dan realisasi SILPA di Kabupaten Purwakarta selama 3 (tiga) tahun terakhir:

**Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2015-2017**

No.	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil		
		Tahun 2015 (%)	Tahun 2016 (%)	Tahun 2017 (%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	(27,01)	435,49	(3.037,27)
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-

Sumber: Hasil analisis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta

**Tabel 3.6
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2015-2017**

No.	Uraian	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
1	Jumlah SILPA	12.900.098.114		16.745.224.776		16.211.473.928	
2	Pelampauan Penerimaan PAD	-	-	-	-	-	-
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-	-	-	-	-	-
4	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-	-	-	-
5	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	-	-	-	-	-	-
6	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Sebelum terselesaikan	-	-	-	-	-	-
7	Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-	-

Sumber: Hasil analisis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta

3.3 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan disusun untuk memberikan gambaran proyeksi kinerja pendapatan yang akan berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan yang akan diambil pemerintah daerah selama kurun waktu lima tahun mendatang. Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Purwakarta untuk mendanai pembangunan daerah pada lima tahun mendatang diprediksikan mengalami peningkatan. Pendapatan Daerah diproyeksikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,12%.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan Dan Belanja

Dengan memperhatikan kinerja selama lima tahun yang lalu, rencana pengeluaran Belanja Tidak Langsung yang bersifat wajib dan mengikat di Kabupaten Purwakarta yang paling besar adalah pada Belanja Pegawai, dengan proyeksi rata-rata tumbuh sebesar 10% setiap tahunnya. Peningkatan Belanja Pegawai tersebut dipengaruhi oleh Peningkatan Gaji Berkala, Gaji ke 13 dan penambahan dana cadangan sekitar 2,5%. Belanja Tidak Langsung lainnya adalah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5% dengan harapan dapat meningkatkan pembangunan di wilayah perdesaan, sedangkan Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa diprediksikan akan mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan mencapai sebesar 6,85%.

Selanjutnya Belanja Hibah diproyeksikan akan mengalami peningkatan sebesar 4,66% setiap tahunnya. Proyeksi Belanja Hibah termasuk untuk alokasi Bantuan keuangan kepada Partai Politik secara proporsional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Belanja Bantuan Sosial diasumsikan akan

mengalami peningkatan sebesar 5%. Untuk Belanja Tidak Terduga diasumsikan sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Belanja Langsung di Kabupaten Purwakarta ditargetkan komposisinya akan mengalami peningkatan setiap tahunnya rata-rata sebesar 1,99%, dimana untuk Belanja Langsung ini terbagi atas dua kategori yaitu Rencana Alokasi Belanja Langsung Program Prioritas I (Belanja Langsung Wajib dan Mengikat serta Pemenuhan Penerapan Pelayanan Dasar) dan Rencana Alokasi Belanja Langsung Program Prioritas II (Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah) dan Rencana Alokasi Belanja Langsung Program Prioritas III (Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lainnya).

Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah yang diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) Tahun Lalu diproyeksikan akan mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 5%, dengan harapan agar penyerapan anggaran dapat berjalan sesuai dengan rencana setiap tahunnya.

Sedangkan untuk Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti Pembayaran Pokok Utang dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang tidak bersifat wajib dan mengikat seperti Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah diasumsikan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,04%. Proyeksi kerangka pendanaan pembangunan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7
Proyeksi APBD Tahun 2019-2023
Kabupaten Purwakarta

No.			Uraian	Pertumbuhan (%)	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1			PENDAPATAN	6,12	2.187.742.367.009	2.320.970.993.816	2.449.789.312.216	2.600.030.039.072	2.774.915.914.069
1	1		Pendapatan Asli Daerah	3,38	464.858.007.826	472.202.913.730	490.587.963.619	511.398.222.985	530.914.289.784
1	1	1	Pajak Daerah	4,6%	270.102.995.000	282.484.798.645	295.434.197.112	308.977.209.542	323.141.047.819
1	1	2	Retribusi Daerah	10,98	29.175.230.560	31.895.422.136	36.148.571.806	40.183.566.815	44.243.318.217
1	1	3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	7,70	5.998.000.000	6.425.000.000	7.010.000.000	7.540.000.000	8.070.000.000
1	1	4	Lain-lain PAD Yang Sah	(0,62)	159.581.782.266	151.397.692.949	151.995.194.701	154.697.446.628	155.459.923.748
1	2		Dana Perimbangan	3,85	1.283.185.821.000	1.331.767.877.244	1.382.776.883.139	1.436.374.910.321	1.492.737.283.867
1	2	1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	10,00	110.694.089.000	121.763.497.900	133.939.847.690	147.333.832.459	162.067.215.705
1	2	2	Dana Alokasi Umum	2,6%	891.475.462.000	914.937.295.844	939.016.597.774	963.729.618.303	989.093.035.625
1	2	3	Dana Alokasi Khusus	5,00	281.016.270.000	295.067.083.500	309.820.437.675	325.311.459.559	341.577.032.537
1	3		Lain-lain Pendapatan Daerah	14,35	439.698.538.183	517.000.202.842	576.424.465.458	652.256.905.766	751.264.340.418
1	3	1	Hibah	-	-	-	-	-	-
1	3	2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
1	3	3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	7,84	161.235.783.183	169.297.572.342	184.057.971.908	200.260.162.861	217.924.323.222
1	3	4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	8,19	278.462.755.000	302.702.630.500	324.866.493.550	350.746.742.905	381.465.017.196

No.			Uraian	Pertumbuhan (%)	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	3	5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	37,50	-	45.000.000.000	67.500.000.000	101.250.000.000	151.875.000.000
2			Belanja	5,86	2.243.742.367.009	2.373.520.993.816	2.499.046.812.216	2.646.143.164.072	2.818.023.732.819
2	1		Belanja Tidak Langsung	8,29	1.332.319.944.790	1.442.849.466.778	1.540.835.149.476	1.679.775.197.433	1.831.854.576.835
2	1	1	Belanja Pegawai	10,00	978.770.494.982	1.076.647.544.480	1.184.312.298.928	1.302.743.528.821	1.433.017.881.703
2	1	2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
2	1	3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
2	1	4	Belanja Hibah	4,66	30.581.650.000	27.110.732.500	29.821.805.750	32.803.986.325	36.084.384.958
2	1	5	Belanja Bantuan Sosial	5,00	5.000.000.000	5.250.000.000	5.512.500.000	5.788.125.000	6.077.531.250
2	1	6	Belanja Bagi Hasil	- 6,85	48.663.409.941	51.096.580.438	24.331.704.970	26.764.875.468	29.441.363.014
2	1	7	Belanja Bantuan Keuangan	5,00	268.804.389.867	282.244.609.360	296.356.839.828	311.174.681.819	326.733.415.910
2	1	8	Belanja Tidak Terduga	-	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
2	2		Belanja Langsung	1,99	911.422.422.219	930.671.527.038	958.211.662.740	966.367.966.639	986.169.155.984
2	2	1	Belanja Pegawai	1,53	46.346.687.650	47.325.522.740	48.725.964.550	49.140.720.277	50.147.629.385
2	2	2	Belanja Barang dan Jasa	1,53	514.238.611.095	525.099.253.411	540.637.823.440	545.239.736.105	556.411.873.041
2	2	3	Belanja Modal	1,53	350.837.123.474	358.246.750.887	368.847.874.750	371.987.510.257	379.609.653.559
3			Pembiayaan	(6,38)	56.000.000.000	52.550.000.000	49.257.500.000	46.113.125.000	43.107.818.750
3	1		Penerimaan Pembiayaan	(5,00)	67.000.000.000	63.650.000.000	60.467.500.000	57.444.125.000	54.571.918.750
3	2		Pengeluaran Pembiayaan	1,04	11.000.000.000	11.100.000.000	11.210.000.000	11.331.000.000	11.464.100.000

Sumber: Hasil proyeksi Bapenda, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Bappeda dan Litbang

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan dimaksudkan untuk mengetahui besaran kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Dalam menentukan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah terdapat penentuan Proyeksi SILPA, Proyeksi SiLPA berdasarkan analisis pertumbuhan realisasi besaran SiLPA pada periode sebelumnya yaitu Tahun 2013-2017. Pada periode tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 diproyeksikan menurun sebesar 5%. Penurunan SiLPA tersebut diharapkan penggunaan anggaran semakin efektif serta sesuai dengan perencanaan. Berikut adalah proyeksi tabel SiLPA, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019–2023:

Tabel 3.8
Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023

Uraian	Proyeksi				
	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	67.000.000.000	63.650.000.000	60.467.500.000	57.444.125.000	54.571.918.750

Sumber: hasil proyeksi Bapenda, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Bappeda dan Litbang

Tabel 3.9
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2019-2023
Untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Purwakarta

No.	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Pendapatan	2.187.742.367.009	2.320.970.993.816	2.449.789.312.216	2.600.030.039.072	2.774.915.914.069
2	Pencairan Dana Cadangan Sesuai Perda	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	67.000.000.000	63.650.000.000	60.467.500.000	57.444.125.000	54.571.918.750
	Total Penerimaan	2.254.742.367.009	2.384.620.993.816	2.510.256.812.216	2.657.474.164.072	2.829.487.832.819
	Dikurangi:					
4	Belanja Tidak Langsung	1.332.319.944.790	1.442.849.466.778	1.540.835.149.476	1.679.775.197.433	1.831.854.576.835
5	Pengeluaran Pembiayaan	11.000.000.000	11.100.000.000	11.210.000.000	11.331.000.000	11.464.100.000
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	911.422.422.219	930.671.527.038	958.211.662.740	966.367.966.639	986.169.155.984

Sumber: hasil proyeksi Bapenda, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Bappeda dan Litbang

Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya dalam rangka pencapaian efektifitas program dan keterbatasan anggaran serta pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow program prioritas*).

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Purwakarta selama 5 (lima) tahun dikelompokkan menjadi 3 (tiga). Adapun penjelasan masing-masing prioritas, sebagai berikut:

- a. **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat.
- b. **Prioritas II**, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah, termasuk belanja pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
- c. **Prioritas III**, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Proyeksi Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2019-2023
Kabupaten Purwakarta

No.	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	911.422.422.219	930.671.527.038	958.211.662.740	966.367.966.639	986.169.155.984
1	Prioritas I (Belanja Langsung Wajib dan Mengikat)	59.000.824.915	59.370.465.228	59.745.747.571	60.126.758.063	60.513.584.134
2	Prioritas II (Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah, termasuk serta Pemenuhan Penerapan Pelayanan Dasar)	425.672.972.732	428.216.827.803	441.834.277.505	446.256.242.056	455.655.196.910
3	Prioritas III (Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lainnya)	426.748.624.572	443.084.234.007	456.631.637.664	906.241.208.576	925.655.571.850

Sumber: hasil analisis, 2019

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan daerah adalah merupakan kondisi yang terjadi antara kinerja pembangunan yang telah dicapai pada saat ini dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya dimana hasilnya belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Permasalahan pembangunan daerah muncul diantaranya sebagai akibat dari masih adanya potensi yang belum diberdayakan secara optimal serta adanya beberapa kelemahan-kelemahan yang belum teratasi dengan baik.

Permasalahan pembangunan daerah dalam RPJMD ini diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah.

4.1.1. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah

Permasalahan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana wilayah terdiri atas beberapa hal, sebagai berikut:

❖ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

1. Pertumbuhan antar bagian wilayah masih belum berimbang.
2. Migrasi penduduk desa ke kawasan perkotaan masih tinggi.

3. Fasilitas sosial ekonomi masih cenderung terkonsentrasi di ibukota kabupaten.
4. Kawasan rawan bencana belum terkelola dengan baik.
5. Layanan jaringan irigasi masih belum optimal.
6. Masih banyak daerah rawan air bersih terutama pada musim kemarau.
7. Kapasitas air baku dan pelayanan air bersih perpipaan masih terbatas.
8. Masih belum optimalnya peran serta/partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian sistem irigasi.

❖ **Perhubungan:**

1. Masih ada desa yang sulit/tidak bisa dilalui kendaraan roda 4.
2. Titik rawan kemacetan masih belum sepenuhnya terkendali.
3. Belum seluruh bagian wilayah dilayani oleh angkutan umum.
4. Sebagian terminal tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

❖ **Lingkungan Hidup:**

1. Belum terinventarisasinya potensi sumber daya alam daerah.
2. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian pemanfaatan SDA.
3. Jumlah penduduk yang belum dapat menggunakan listrik masih besar.
4. Pemanfaatan potensi sumber energi alternatif dan terbarukan belum maksimal.

❖ **Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman:**

1. Masih tingginya harga rumah/tempat tinggal.
2. Relatif kurangnya ketersediaan ruang publik dan pelayanannya belum optimal.

4.1.2. Bidang Ekonomi

Permasalahan pembangunan daerah di bidang ekonomi terdiri atas beberapa hal, sebagai berikut:

❖ **Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:**

1. Kinerja koperasi masih relatif rendah, meliputi:
 - a. Rendahnya tingkat pemahaman anggota tentang perkoperasian.
 - b. Kualitas sumberdaya manusia pengelola koperasi masih rendah.
 - c. Iklim usaha yang belum sepenuhnya memberikan dukungan terhadap pemberdayaan koperasi.
2. Pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, meliputi:
 - a. Masih terbatasnya akses usaha mikro, kecil dan menengah terhadap sumberdaya produktif terutama permodalan, teknologi, informasi dan pasar.
 - b. Era perdagangan bebas, menyebabkan lemahnya daya saing produk usaha mikro, kecil dan menengah dibandingkan dengan produk-produk impor.

❖ **Penanaman Modal:**

1. Belum optimalnya pelayanan perijinan.
2. Belum optimalnya pelaporan realisasi investasi sehingga nilai realisasi investasi belum meningkat sesuai target yang diharapkan.
3. Masih adanya perijinan yang belum dilimpahkan dari Dinas Teknis ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

❖ **Pangan:**

1. Masih tingginya ketergantungan terhadap pangan beras.
2. Ketahanan pangan meliputi ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan, namun saat ini masih terfokus pada penanganan aspek ketersediaan pangan.

❖ **Pertanian:**

1. Pertambahan jumlah penduduk dan perkembangan industri dapat menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman, perindustrian dan perdagangan.
2. Minat generasi muda terhadap bidang pertanian sangat kurang sehingga regenerasi petani berjalan lambat.
3. Tenaga penyuluhan semakin berkurang.
4. Penerapan teknologi pertanian on farm dan off farm di tingkat petani masih rendah dan kurang merata.
5. Masih terbatasnya penyediaan produksi hasil peternakan (daging, telur dan susu) untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
6. Belum berkembangnya sentra pembibitan ternak pedesaan.
7. Masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan peternak dalam memanfaatkan teknologi tepat guna dan pengelolaan usaha peternakan.
8. Sarana dan prasarana peternakan perlu ditingkatkan dalam rangka menunjang usaha dan pemasaran hasil produksi peternakan.

❖ **Kelautan dan Perikanan:**

1. Potensi dan sumberdaya perikanan belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produksi perikanan.
2. Masih terbatasnya penyediaan benih ikan untuk memenuhi kebutuhan usaha budidaya perikanan.

3. Sarana dan prasarana peternakan perlu ditingkatkan dalam rangka pengembangan usaha perikanan.

❖ **Perdagangan:**

1. Perdagangan skala mikro dan desa belum sepenuhnya berjalan dan mampu mencerminkan ekonomi masyarakat.
2. Rendahnya kualitas dan pelabelan kemasan produk, terutama untuk barang-barang dalam keadaan terbungkus (BDKT).
3. Rendahnya kualitas produk perdagangan (barang yang beredar), terutama masih beredarnya barang-barang yang tidak memenuhi standar, kadaluwarsa dan masih ada yang mengandung zat-zat berbahaya.
4. Rendahnya kesadaran para pelaku usaha dalam kewajibannya menera dan menera ulang alat UTPP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya), serta mengukur ulang BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus).

❖ **Perindustrian:**

1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, terutama dalam keterampilan yang terkait dengan produktivitas industri kecil.
2. Rendahnya kualitas produk industri kecil, terutama dalam hal desain, ragam produk, kehalusan dan citra rasa.
3. Terbatasnya akses industri kecil terhadap sumber daya produktif (pasar, permodalan, teknologi dan informasi).
4. Sebagian besar perusahaan industri besar belum memiliki standar mutu yang mengacu kepada ISO-9000/seri 2000 dan *Quality System* – 9000.

❖ **Pariwisata:**

1. Belum optimalnya pengelolaan Sektor Pariwisata Unggulan, baik pariwisata berbasis alam, buatan dan budaya yang berwawasan lingkungan.
2. Masih rendahnya kualitas SDM pengelola pariwisata (Kompepar) yang tersedia.

4.1.3. Bidang Sosial Dan Budaya

Permasalahan pembangunan daerah di bidang sosial dan budaya terdiri atas beberapa hal sebagai berikut:

❖ **Pendidikan:**

1. Belum meratanya aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat khususnya pendidikan menengah.
2. Belum optimalnya mutu layanan pendidikan serta masih rendahnya relevansi pendidikan dengan dunia kerja.
3. Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas di semua jenjang.
4. Belum meratanya distribusi pendidik dan tenaga kependidikan serta kompetensi yang masih perlu ditingkatkan pada semua jenjang pendidikan.
5. Makin maraknya tawuran di kalangan pelajar.

❖ **Kesehatan:**

1. Belum meratanya aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
2. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan baik tingkat dasar maupun di tingkat rujukan.
3. Tingginya tuntutan masyarakat untuk bisa berobat secara gratis baik di tingkat pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
4. Masih tingginya kasus Kematian Bayi dan Ibu Melahirkan.

5. Belum meratanya distribusi tenaga kesehatan dan relatif kurangnya ketersediaan dokter spesialis di RSUD Bayu Asih.
6. Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat masih relatif rendah.

❖ **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:**

1. Masih terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan dan penguasaan terhadap sumber daya.
2. Kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan belum optimal.
3. Relatif rendahnya fasilitasi, penjabaran, penetapan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten.

❖ **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:**

1. Usia kawin muda dan jumlah pasangan usia subur yang tidak ingin menunda kehamilan masih tinggi.
2. Kesadaran akan pemakaian alat kontrasepsi masih rendah.
3. Kurangnya tenaga penyuluh KB di lapangan.
4. Masih rendahnya pemahaman dan pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga di tengah masyarakat.

❖ **Sosial:**

1. Tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Cakupan bantuan sosial bagi PMKS masih rendah dan tumpang tindih.

3. Upaya pemberdayaan sosial sebagai upaya membangun kapasitas individu dan kelembagaan PMKS masih belum berjalan optimal.
4. Pergeseran sistem nilai dan berkurangnya kultur sistem gotong royong.

❖ **Tenaga Kerja:**

1. Rendahnya kesempatan dan lapangan kerja.
2. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
3. Tingginya pengangguran terbuka.
4. Masih kurangnya sosialisasi peraturan perlindungan tenaga kerja.

❖ **Kebudayaan:**

1. Relatif rendahnya Pengembangan Nilai-Nilai Budaya.
2. Masih rendahnya apresiasi terhadap budaya daerah.
3. Optimalisasi obyek dan destinasi wisata budaya.

❖ **Kepemudaan dan Olahraga:**

1. Makin sempitnya lingkungan serta prasarana dan sarana publik untuk memperluas budaya olahraga di kalangan masyarakat.
2. Prestasi olahraga masih rendah khususnya di tingkat provinsi dan nasional.
3. Belum optimalnya partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan.
4. Makin besarnya dampak negatif dan ancaman globalisasi bagi pemuda.

❖ **Transmigrasi:**

Semakin berkurangnya daerah tujuan transmigrasi seiring dengan berjalannya alih fungsi lahan dan telah ditetapkannya RTRW sesuai rencana masing-masing daerah.

4.1.4. BIDANG PEMERINTAHAN

Permasalahan pembangunan daerah di bidang pemerintahan terdiri atas beberapa hal, sebagai berikut:

❖ **Komunikasi dan Informatika:**

1. Belum optimalnya ketersediaan jaringan internet yang memadai.
2. Rendahnya tingkat pemanfaatan layanan data.

❖ **Statistik:**

1. Belum tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus bidang statistika untuk melaksanakan tanggungjawab pengolahan dan penyajian data secara akurat dan real time.

❖ **Persandian:**

1. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus bidang persandian.

❖ **Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil:**

1. Masih ditemukan permasalahan dalam akurasi data kependudukan, yang disebabkan oleh data ganda, data invalid dan data kependudukan yang belum diupdate.
2. Masih belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan untuk semua keperluan.

❖ **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:**

1. Belum optimalnya peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan untuk turut berperan serta dalam proses pembangunan.
2. Desa masih belum mandiri, dan masih bergantung pada pemerintahan di atasnya akibat rendahnya Pendapatan Asli Desa.

3. Relatif masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pedesaan.

❖ **Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat:**

1. Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan dan ketentuan daerah atau nasional yang dapat mendorong terciptanya ketertiban dan keamanan, kesadaran politik masyarakat, wawasan kebangsaan, maupun toleransi bermasyarakat.
2. Belum berjalannya penanganan bencana alam yang lebih responsif baik melalui mitigasi (pengurangan dampak) bencana dan penanganan bencana yang lebih responsif dan terpadu.

❖ **Kearsipan:**

1. Optimalisasi penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.
2. Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana kearsipan.
3. Peningkatan pengembangan kapasitas penyimpanan arsip daerah.
4. Peningkatan pelayanan arsip khususnya kepada OPD lingkup pemerintah Kabupaten Purwakarta.

❖ **Perpustakaan:**

1. Relatif masih rendahnya minat baca masyarakat.
2. Relatif rendahnya koleksi bahan, referensi dan sumber bacaan.
3. Belum optimalnya aksesibilitas sumber bacaan ke khalayak.

❖ **Administrasi Pemerintahan:**

1. Pelayanan publik belum sesuai dengan tuntutan masyarakat.
2. Terbaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi sehingga melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan produktivitas kerja.
3. Belum optimalnya mekanisme *meritocracy* dalam birokrasi.
4. Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efisien dan rasional, sehingga struktur organisasi kurang proporsional.
5. Menurunnya kewibawaan pemerintah akibat krisis kepercayaan.

❖ **Perencanaan:**

1. Belum optimalnya ketersediaan basis dan validasi data capaian pembangunan.
2. Koordinasi dan monitoring yang relatif masih belum optimal.
3. Belum optimalnya sistem perencanaan pembangunan yang aspiratif, partisipatif, demokratis dan akuntabel.

❖ **Pengawasan:**

1. Masih adanya praktek penyimpangan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang.

❖ **Keuangan:**

1. Belum optimalnya penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD;
2. Relatif masih minimnya kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Purwakarta.

❖ **Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan:**

1. Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan mekanisme *reward and punishment* yang adil.

❖ **Penelitian dan Pengembangan:**

1. Masih belum optimalnya produk penelitian yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan di Kabupaten Purwakarta.

4.2 ISU STRATEGIS

Isu Strategis dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dirumuskan terlebih dahulu dengan menggali dan mengidentifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Purwakarta lalu dikaitkan dengan isu global, nasional, regional dan lokal. Isu Strategis RPJMD tersebut akan menjadi salah satu dasar penentuan prioritas pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Mengingat permasalahan pembangunan di Kabupaten Purwakarta masih dirasakan sangat banyak dan kompleks seperti yang telah diuraikan diatas, maka untuk menentukan permasalahan yang akan dijadikan bahan isu strategis perlu diidentifikasi terlebih dahulu isu global, nasional, regional dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini. Adapun isu strategis yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

4.2.1 Isu Strategis Internasional

Isu-Isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan selama lima tahun masa perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Purwakarta antara lain:

1) Revolusi Industri 4.0

Industri 4.0 menghasilkan "pabrik cerdas". Di dalam pabrik cerdas berstruktur moduler, sistem siber-fisik mengawasi proses fisik, menciptakan salinan dunia fisik secara virtual, dan membuat keputusan yang tidak terpusat. Lewat Internet untuk segala/ Internet Of Things (IoT), sistem siber-fisik berkomunikasi dan bekerja sama dengan satu sama lain dan manusia secara bersamaan. Lewat komputasi awan, layanan

internal dan lintas organisasi disediakan dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak di dalam rantai nilai.

Sebagaimana revolusi terdahulu, revolusi industri keempat berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh dunia. Namun, kemajuan di bidang otomatisasi dan kecerdasan buatan telah menimbulkan kekhawatiran bahwa mesin-mesin suatu hari akan mengambil alih pekerjaan manusia. Selain itu, revolusi-revolusi sebelumnya masih dapat menghasilkan lapangan kerja baru untuk menggantikan pekerjaan yang diambilalih oleh mesin, sementara kali ini kemajuan kecerdasan buatan dan otomatisasi dapat menggantikan tenaga kerja manusia secara keseluruhan yang digantikan oleh teknologi dan robotik.

2) *Society 5.0*

Society 5.0, didefinisikan sebagai sebuah masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik. Di Society 5.0, itu bukan lagi modal, tetapi data yang menghubungkan dan menggerakkan segalanya, membantu mengisi kesenjangan antara yang kaya dan yang kurang beruntung.

3) Penerapan *Green Economic Global* (Ekonomi Ramah Lingkungan)

Telah diselenggarakan konferensi tingkat internasional mengenai *Green Economic Global* yang dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur mengusung tema *The Role of Lokal Government on Blue Economy*. Pemrakarsa konferensi internasional ini adalah Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Universitas Khon Kaen Thailand, dan Yayasan Damandiri dengan didukung oleh Pemerintah Daerah Surabaya. Sekitar 400 peserta termasuk para tokoh dari

berbagai negara hadir dalam konferensi itu, antara lain dari Afrika Selatan dan beberapa negara di Afrika, Asia, Australia, dan Selandia Baru.

Dalam forum berskala internasional tersebut, sejumlah pakar terkait baik dari kalangan akademisi maupun pemerintah telah menyajikan berbagai persoalan berkaitan dengan pengembangan ekonomi bersifat ramah lingkungan yang dapat diterapkan di beberapa wilayah di Tanah Air. Hal ini dilakukan sebagai penerapan *Green Economy* yang telah menjadi pembicaraan hangat di sejumlah negara di dunia karena degradasi lingkungan semakin lama semakin meluas dengan tingkat keparahan yang semakin tinggi. Indonesia memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi pengalihan pembangunan internasional ke pola pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pencegahan pembalakan liar hutan sehingga Indonesia dapat menciptakan sumber pendapatan dan lapangan kerja ramah lingkungan baru, menjaga keanekaragaman hayati, ketersediaan air bersih, dan obat-obatan alami bagi masyarakat.

Menurut PBB, apabila dunia berhasil mengurangi kerusakan hutan hingga separuh pada 2030, dunia akan bisa mencegah kerugian senilai US\$ 3,7 triliun akibat kenaikan emisi gas rumah kaca global. Tentunya beberapa tahun belakangan ini, negara-negara maju yang telah mulai menerapkan berbagai produk hijau juga telah mendorong negara-negara berkembang untuk segera saling mengupayakan langkah-langkah menuju pengembangan ekonomi ramah lingkungan agar masyarakat dapat hidup lebih sehat kedepan.

4) Penerapan Sumber Energi Alternatif Sebagai Antisipasi Sumber Energi Tak Terbaharukan

Keberlanjutan sumber energi di masa depan semakin menipis, selain khawatir akan kapasitasnya yang semakin berkurang, masyarakat dunia juga khawatir akan isu global warming yang diakibatkan oleh hasil pembakaran energi fosil sehingga membuat lapisan ozon semakin tipis. Indonesia sendiri masih sangat tergantung dengan pasokan energi yang berasal dari energi fosil untuk digunakan sebagai bahan bakar minyak (BBM).

Tingginya konsumsi BBM di Indonesia cukup memprihatinkan sehingga perlu adanya pembaharuan dalam menyikapi krisis energi dengan penggunaan energi alternatif. Energi alternatif ini sangat mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dengan kondisi geografis Indonesia yang beriklim tropis dan kesuburan tanah yang berpotensi. Sumber energi alternatif dapat berasal dari sampah yang kita hasilkan baik organik maupun an-organik serta berasal dari sumber energi terbarukan seperti biomassa, matahari, angin, dan sebagainya. Diharapkan ke depannya, Indonesia memiliki sumber energi yang akan mencukupi kebutuhan energi dalam negeri tanpa khawatir dengan peningkatan pemanasan global. Menanggapi isu energi baru terbarukan ini, Pemerintah menetapkan kebijakan pengembangan energi baru terbarukan antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan energi terbarukan difokuskan pada panas bumi (*geothermal*), energi biomass, surya (solar) dan Bahan Bakar Nabati (BBN).
2. Penyediaan dana khusus untuk penelitian dan pengembangan energi terbarukan guna menurunkan biaya produksi.

3. Pengaturan dan pemberlakuan harga khusus untuk energi terbarukan.
4. Peningkatan pengembangan industri peralatan produksi energi terbarukan dalam negeri (peralatan penyulingan BBN, *solar cell* dan panel harus menggunakan produksi dalam negeri).
5. Pengalokasian dana dengan skema khusus (*smart funding*) untuk pengembangan energi terbarukan diluar BBN, khususnya untuk skala kecil.
6. Pemerintah melakukan pengaturan dan pengalokasian dana dari program *Clean Development Mechanism* (CDM), sehingga insentif karbon kredit dapat memberi manfaat pada publik.

5) Antisipasi Perubahan Iklim Global (*Global Warming/ Climate Change*)

Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman *global warming*. *Global warming* merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam. Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi *global warming*. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

4.2.2 Isu Strategis Nasional

4.2.2.1 Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019

Visi RPJMN Tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini melalui 7 (tujuh) misi pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Secara umum Strategi Pembangunan Nasional sebagai berikut:

1. Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:
 - a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.

- b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Perhatian khusus kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

2. Tiga Dimensi Pembangunan

a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat.

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut diharapkan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko; pekerja yang berdedikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan dan paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja; serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama.

b. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas:

- Kedaulatan pangan. Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara berlebihan kepada negara lain.
- Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan. Dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batu-bara, dan tenaga air) dalam negeri.
- Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
- Pariwisata dan industri. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasiskan penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.

c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan.

Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah. Karena itu pembangunan harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antarkelompok pendapatan, maupun kesenjangan antarwilayah, dengan prioritas:

- Wilayah desa, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, karena penduduk miskin sebagian besar tinggal di desa;
- Wilayah pinggiran;
- Luar Jawa; dan
- Kawasan Timur.

3. Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas. Kondisi perlu tersebut antara lain:
- a. Kepastian dan penegakan hukum;
 - b. Keamanan dan ketertiban;
 - c. Politik dan demokrasi; dan
 - d. Tetakelola dan reformasi birokrasi.
4. *Quickwins* (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya). Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

4.2.2.2 Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024

Tema Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 adalah: “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan”. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Berpenghasilan Menengah-Tinggi

- Transformasi struktural berjalan.
- Produktivitas tenaga kerja meningkat.
- Iklim investasi kondusif.
- GNI perkapita USD 3.896–USD 12.055

b. Adil

- Ketimpangan menurun.
- Redistribusi berjalan baik.

c. Sejahtera

- Kualitas hidup meningkat.
- Perilaku disiplin dan beradab.
- SDM berkualitas dan berdaya saing.

- Indeks kebahagiaan meningkat.

d. Berkesinambungan

- Memperhatikan daya dukung dan daya tampung (*Low Carbon Development*).
- Selaras dengan agenda pembangunan global dan nasional.

Isu Strategis Kewilayahan Nasional dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, sebagai berikut:

a. Penurunan Ketimpangan Antar Wilayah Pengelolaan Urbanisasi

- Kemiskinan di KTI (18,01%)*, KBI (10,33%)*, perdesaan (13,47%)* dan perkotaan (7,20%)* yang tinggi.
- Ketimpangan Pendapatan Perdesaan (0,324)-Perkotaan (0,4).
- Konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa.
- Penduduk perkotaan yang akan mencapai 60% dan bonus demografi 2030.
- Kontribusi urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang rendah (1% urbanisasi menghasilkan hanya 4% PDB, di India 13% PDB).

b. Penguatan Pusat Pertumbuhan Wilayah Pemanfaatan Ruang

- Tingkat keberhasilan Pusat Pertumbuhan Baru yang rendah (1 dari 12 KEK, 4 dari 14 KI, 2 dari 4 KPBPB, dan 10 Destinasi Wisata).
- Konektivitas dari dan menuju Pusat-Pusat Pertumbuhan yang lemah.
- Kawasan Strategis Kabupaten yang belum berkembang.
- Konflik ruang yang semakin meningkat (15.525 kasus periode 2015-2018).

- Desa-desa dalam kawasan hutan dan perkebunan besar tidak dapat melaksanakan kewenangannya terutama untuk pembangunan infrastruktur (20.000 desa).
- Kejadian Bencana akibat pemanfaatan ruang yang belum sesuai semakin meningkat (sekitar 2.000 kasus kejadian Banjir, Longsor, Kebakaran Hutan, dan sebagainya).

c. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Peningkatan Daya Saing Daerah

- Akses dan kualitas pelayanan dasar yang terbatas (perumahan layak baru 37,8%*, air minum 72%*, sanitasi layak 67,5%*, dsb).
- Ketergantungan APBD terhadap Dana Transfer yang tinggi (rata-rata >70% APBD Kab/Kota dan >50% APBD Provinsi dari Pusat) serta sumber Pendanaan Non APBN yang kurang optimal.
- Peraturan Perundangan yang belum harmonis serta Kerjasama dan Inovasi Daerah yang belum berkembang.
- Proses perizinan yang lama dan berbiaya tinggi.

4.2.3 Isu Strategis Regional

4.2.3.1. RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023

Pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah: “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan

Kolaborasi”Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut: Jabar Juara Lahir Batin: pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri. Inovasi: pembangunan yang dilaksanakan diberbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan. Kolaborasi: perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antarwilayah, dan antarpelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan. Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat merupakan janji-janji kampanye gubernur dan strategis untuk dilaksanakan pada tahun 2018–2023. Program unggulan ini salah satu pendukung terhadap pencapaian visi dan misi. Program unggulan 2018-2023, meliputi:

1. Akses pendidikan untuk semua, meliputi:
 - a. Kelas pintar untuk semua

- b. Satu Universitas di setiap kabupaten/kota
- 2. Desentralisasi pelayanan kesehatan, meliputi:
 - a. Layad rawat
 - b. Pembangunan dan perbaikan rumah sakit
 - c. Posyandu Juara
- 3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi, meliputi:
 - a. Ekonomi digital
 - b. Inkubator bisnis
 - c. *Creative/Start-up hub*
 - d. Gudang tani dan ikan Juara
 - e. Kredit 0%
- 4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata, meliputi:
 - a. Satu kabupaten/kota satu destinasi wisata unggul
 - b. Infrastruktur pariwisata
 - c. Pengembangan SDM pariwisata
- 5. Pesantren juara, meliputi:
 - a. Modernisasi dana umat
 - b. Tunjangan santri dan ulama
 - c. Modernisasi manajemen pesantren
 - d. Satu pesantren satu produk (tren market)
- 6. Insfrastruktur konektivitas wilayah, meliputi:
 - a. 100% jalan mulus di Jawa Barat
 - b. Pembangunan dan perbaikan jalan kereta antar kota
 - c. Pengembangan transportasi massal perkotaan
 - d. Pembangunan pelabuhan dan transportasi sungai
- 7. Gerakan bangun desa (Gerbang desa), meliputi:
 - a. Satu desa satu Bumdes (OVOP)
 - b. Tunjangan desa
 - c. Irigasi pertanian desa
 - d. Internet masuk desa
- 8. Subsidi gratis golek mah, meliputi:
 - a. Rumah gratis
 - b. Transportasi gratis

- c. Layanan kesehatan gratis
 - d. Pendidikan gratis
 - e. Sembako gratis
9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah, meliputi:
- a. Provinsi pintar (*e-planning, e-budgeting, e-monev, e-remunerasi kinerja, dll*)
 - b. Kota/desa pintar
 - c. Pemekaran wilayah

4.2.3.2. RTRW Provinsi Jawa Barat 2010-2030

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 Tentang RTRW Provinsi Jawa Barat memuat arahan kebijakan penataan ruang yang terkait dengan wilayah Kabupaten Purwakarta, antara lain sebagai berikut:

A. Rencana Sistem Perkotaan Provinsi

Kota Cikopo-Cikampek ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Kota Purwakarta ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Perkotaan dan Kota Wanayasa serta Plered ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Perdesaan.

- a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
- b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Perkotaan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan atau kawasan perkotaan dengan kegiatan-kegiatan yang berciri perkotaan, seperti industri, permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa, dan lainnya.
- c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Perdesaan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat koleksi dan

distribusi lokal yang menghubungkan desa sentra produksi dengan PKL perkotaan.

- d. PKL pedesaan diarahkan untuk menjadi pusat kegiatan koleksi dan distribusi bagi wilayah-wilayah belakangnya dan ditetapkan sebagai kawasan yang dapat dikembangkan secara terbatas untuk kegiatan industri berbasis pertanian.

B. Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Arahan RTRWP Jawa Barat dalam pengembangan infrastruktur jalan dan perhubungan yang terkait dengan wilayah Kabupaten Purwakarta, antara lain:

- Pembangunan jalan kolektor primer lintas utara.
- Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis.
- Pengembangan infrastruktur jalan mencakup peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis.
- Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cikopo/Cikampek-Palimanan (Cikapali).
- Pembangunan *Shortcut* Jalur Kereta Api Cibungur-Tanjungrasa di Kabupaten Purwakarta.
- Peningkatan fasilitas dan prasarana lalu lintas jalan.

Rencana pengembangan transportasi dan perhubungan yang dilakukan untuk mendukung keberadaan PKN dan PKW di Jawa Barat yang terkait dengan wilayah Kabupaten Purwakarta meliputi:

1. Pembangunan Jembatan Timbang untuk mengurangi tingkat kerusakan jalan, pada beberapa ruas jalan yang telah rusak kondisinya serta memiliki pembebanan jalan yang tinggi pada jalur Subang-Purwakarta.

2. Peningkatan fasilitas dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada jaringan jalan arteri dan kolektor primer serta pada ruas-ruas jalan strategis di perbatasan.

C. Arahan Pengembangan Antar Wilayah Pengembangan

Keterkaitan fungsional antar wilayah pengembangan (WP) dan pusat-pusat pengembangan wilayah (PKN dan PKW) dengan Kabupaten Purwakarta, yaitu: Segitiga 1, wilayah Bodebepunjur-Cekungan Bandung-Purwasuka-Ciayumajakuning. Sarana prasarana wilayah pendukung keterkaitan fungsional antar WP dalam segitiga di Kabupaten Purwakarta meliputi:

- Pembangunan jalan bebas hambatan Cikopo/Cikampek-Palimanan.
- Pembangunan jalan Kolektor Primer Lintas Utara Jawa Barat.
- Peningkatan status dan fungsi ruas jalan strategis.
- Pembangunan Jalur Ganda KA Purwakarta-Padalarang.
- Peningkatan kondisi jaringan irigasi di Wilayah Utara Jawa Barat.

D. Arahan Pengembangan Kawasan Andalan Purwasuka

Arahan Pengembangan WP Purwasuka yang terkait dengan wilayah Kabupaten Purwakarta, sebagai berikut:

4.1 Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di WP Purwasuka mencakup pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, bisnis kelautan, industri pengolahan, pariwisata dan pertambangan.

4.2 Fokus pengembangan WP Purwasuka, meliputi:

- a. PKW Cikampek-Cikopo, diarahkan untuk memenuhi fungsinya sebagai PKW dengan melengkapi sarana dan

prasarana yang terintegrasi dengan wilayah pengaruhnya (*hinterland*).

- b. Kabupaten Purwakarta, diarahkan untuk kegiatan industri non-polutif dan non-ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air, industri kreatif, pariwisata dan agroindustri, serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non-logam.

4.3 Rencana pengembangan infrastruktur wilayah di WP Purwasuka, terdiri atas:

- a. Pengembangan infrastruktur jalan, yaitu Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis.
- b. Pengembangan infrastruktur perhubungan, meliputi:
 - Pembangunan *Shortcut* Jalur Kereta Api Cibungur (Kabupaten Purwakarta)-Tanjungrasa (Kabupaten Subang); dan
 - Peningkatan fasilitas dan prasarana lalu lintas jalan.
- c. Pengembangan infrastruktur energi, meliputi:
 - Pengembangan jaringan pipanisasi gas (gas pipeline) dan gas kota di Kabupaten Karawang, Purwakarta, dan Subang;
 - Pengembangan pemanfaatan energi terbarukan berupa energi air skala kecil, energi surya, energi angin dan bioenergi;
 - Pengembangan pemanfaatan batubara untuk industri;
 - Pengembangan desa mandiri energi.
- d. Pengembangan infrastruktur sumberdaya air, meliputi:
 - Revitalisasi dan optimalisasi fungsi waduk dan danau/situ;
 - Pengembangan infrastruktur pengendali banjir; dan
 - Peningkatan kondisi jaringan irigasi.

e. Pengembangan infrastruktur permukiman, meliputi:

1) Pengembangan permukiman perkotaan, meliputi:

- Pengembangan hunian vertikal terutama di kawasan industri Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta;
- Pengembangan kawasan siap bangun/ lingkungan siap bangun;
- Penataan permukiman kumuh;
- Peningkatan pelayanan air bersih berupa pembangunan IPA/WTP dan jaringan pipa distribusi;
- Pengembangan pengolahan air limbah;
- Penataan jaringan drainase perkotaan;
- Peningkatan pengelolaan persampahan;
- Pembangunan kawasan olahraga di PKW dan sarana olahraga di PKL;
- Pembangunan Rumah Sakit Tipe B di PKW dan Rumah Sakit Tipe C di PKL;
- Pembangunan pusat kebudayaan di PKW; dan
- Pembangunan Pasar Induk Regional di PKW Cikampek-Cikopo.

2) Pengembangan permukiman perdesaan, meliputi:

- Peningkatan infrastruktur dasar permukiman di desa tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan dan kawasan rawan bencana;
- Penataan kawasan permukiman perdesaan dengan prinsip konservasi dan pengelolaan bencana;
- Pembangunan sarana olahraga dan pusat kegiatan belajar; dan
- Pembangunan Puskesmas;

3) Optimalisasi kawasan industri, meliputi:

- Kawasan Industri Indotaisei Kota Bukit Indah, terletak di Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang;
- Kawasan Industri Kujang Cikampek, terletak di Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang;
- Kawasan Industri Mandalapratama Permai, terletak di Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang;
- Kawasan Industri Kota Bukit Indah-Industrial City, terletak di Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta; dan
- Kawasan Industri Lion, terletak di Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta.

E. Rencana Kawasan Budidaya

- 1) Mengembangkan permukiman horisontal yang dikendalikan dan diarahkan agar dikembangkan pada PKW Cikampek-Cikopo.
- 2) Mengembangkan kawasan lainnya yang masih memiliki fungsi sebagai kawasan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi seperti kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- 3) Pengembangan kawasan pariwisata diarahkan kepada tiga jalur wisata unggulan, yaitu kawasan wisata unggulan jalur utara, tengah dan selatan. Kawasan wisata unggulan yang terletak pada jalur utara adalah Kawasan Wisata Agro Purwakarta-Subang.
- 4) Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang termasuk dalam kawasan budidaya meliputi: hutan kota; taman kota; taman lingkungan; tempat pemakaman umum; pulau jalan; lapangan olahraga/lapangan terbuka dan taman rekreasi.

- 5) Mengembangkan kawasan permukiman perdesaan masih diarahkan pada pengembangan ruang permukiman yang bersifat horisontal.
- 6) Pengembangan Kawasan Agribisnis melalui: (1) penataan agribisnis yang ada, (2) perbaikan subsistem agribisnis yang bermasalah, (3) revitalisasi agribisnis untuk pembangunan ekonomi, (4) mengubah proporsi peran agribisnis dalam struktur PDRB Provinsi Jawa Barat, dan (5) realokasi sumber daya, pendanaan, dan wilayah pertumbuhan agribisnis.
- 7) Pengembangan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan keunggulan daya tarik wisata di wilayah perdesaan, dan pariwisata berbasis masyarakat (*community based development*) serta kualitas sarana dan prasarana pariwisata dengan standar internasional.

F. Rencana Kawasan Strategis Provinsi (KSP)

Penetapan KSP Jawa Barat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan, kriteria, dan arahan penanganan di masing-masing KSP yang ditetapkan. KSP Jawa Barat ditetapkan sebanyak 24 KSP yang memiliki sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Dari 24 KSP tersebut, 2 diantaranya terkait dengan wilayah Kabupaten Purwakarta, yaitu:

- 1) KSP Koridor Bekasi-Cikampek
- 2) KSP Koridor Purwakarta-Padalarang

4.2.4 Isu Strategis Lokal

4.2.4.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025

Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan RPJMD karena tahun 2018-2023 merupakan tahapan keempat pelaksanaan pembangunan dari RPJPD Kabupaten Purwakarta. Alur tahapan dan penetapan skala prioritas yang ditetapkan ini mencerminkan pentingnya permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan yang lain. Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2005–2025 adalah **Purwakarta Cerdas, Sehat, dan Berakhlakul Karimah**.

Purwakarta cerdas, sehat dan berakhlakul karimah merupakan unsur kesejahteraan dari aspek pendidikan, kesehatan dan agama. Dengan demikian apabila Purwakarta menjadi lebih cerdas, sehat, dan berakhlak karimah maka setidaknya hal tersebut dapat menunjukkan arah kesejahteraan masyarakat, yang dilandasi iman dan takwa serta tata nilai budaya lokal.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka disusun **5 Misi Pembangunan Purwakarta Tahun 2005-2025**, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas SDM yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah.
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup.
3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal.
4. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah.

5. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-3, **RPJMD tahap ke-4** ditujukan untuk mencapai keunggulan masyarakat Purwakarta dalam segala bidang dalam konteks pembangunan regional dan nasional. Pencapaian keunggulan tersebut berarti masyarakat Kabupaten Purwakarta memiliki daya saing yang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lain dan pembangunan Kabupaten Purwakarta relatif lebih maju dibandingkan dengan daerah lain. Kontribusi Purwakarta terhadap pembangunan regional Jawa Barat juga relatif lebih tinggi daripada kabupaten/kota lain.

Perhatian bidang pendidikan pada periode 2018-2023 adalah target akselerasi penuntasan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun yang telah dicanangkan pada periode sebelumnya memasuki saat-saat menentukan pada periode ini. Upaya-upaya yang terus dilakukan dalam rangka penuntasan akselerasi tersebut yaitu peningkatan akses pelayanan pendidikan menengah di daerah-daerah terpencil dan terus ditingkatkannya bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Selain itu mulai dirintis Program Wajib Belajar lima belas Tahun dan upaya peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi, melalui peningkatan bantuan beasiswa bagi lulusan SMA/SMK yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Adapun pengembangan pendidikan menengah kejuruan diupayakan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis industri jasa berskala regional dan nasional. Upaya tersebut dapat didukung melalui pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dipadukan dengan muatan-muatan kurikulum nasional dan internasional.

Pada periode ini juga upaya pendidikan keterampilan dan penguasaan multimedia bagi masyarakat, khususnya masyarakat perdesaan yang telah dikembangkan pada periode sebelumnya, mulai diarahkan untuk membantu meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat melalui kegiatan kewirausahaan melalui penerapan keterampilan dan penguasaan multi media yang telah diperoleh. Fokus pembangunan kurun 2018-2023 pada aspek kesehatan diutamakan pada peran serta dan partisipasi masyarakat dan penguatan institusi dalam peningkatan kesehatan, yaitu peningkatan fungsi institusi kesehatan, peningkatan peran serta masyarakat dalam menentukan pelayanan kesehatan yang terjangkau, peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan lingkungan, dan peningkatan pendidikan kesehatan yang memadai bagi seluruh penduduk.

Pembangunan bidang keagamaan pada tahapan ini diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran forum-forum keagamaan sebagai wadah kerukunan hidup baik inter umat beragama maupun antarumat beragama. Selain itu dalam kurun waktu tersebut pembangunan keagamaan diprioritaskan kepada upaya-upaya untuk mengimplementasikan dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam berbagi segi kehidupan. Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan keagamaan tersebut, antara lain dengan meningkatkan fungsi dan peran forum keagamaan sebagai wadah bagi para tokoh agama, masyarakat dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kerukunan hidup umat beragama. Selain itu dilakukan upaya untuk mengimplementasikan dan mengaktualisasikan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan berpolitik, agar penyelenggaraan kehidupan berpolitik tersebut dilandasi oleh nilai-nilai dan etika agama.

Pembangunan aspek ketenagakerjaan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing, diarahkan untuk perluasan sarana, prasarana dan kurikulum berbasis peluang kerja dan potensi lokal pada pelatihan peningkatan ketrampilan serta membangun jiwa wirausaha dibarengi kemampuan manajemen pengelolaan usaha calon tenaga kerja. Dalam upaya menciptakan produktivitas, kualitas, peningkatan kesejahteraan pekerja dan harmonisasi dalam lingkungan kerja, ditumbuhkembangkan pelaksanaan hubungan industrial berdasarkan norma yang berlaku.

Dari segi pengendalian jumlah penduduk secara alamiah diarahkan pada pemberdayaan keluarga, sedangkan upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk secara migrasi adalah melalui peningkatan kualitas data penduduk berdasarkan sistem administrasi kependudukan yang terintegarsi. Dalam upaya mewujudkan Kabupaten Purwakarta pada periode tahapan ini unggul dibandingkan dengan kabupaten/kota di Jawa Barat, pada aspek pengembangan kesadaran dan peran masyarakat perlu terus dioptimumkan, tidak hanya terbatas kepada kepedulian terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang sedang di hadapi pemerintah daerah. Pada tahapan ini perlu pula dikembangkan kesadaran dan peran masyarakat untuk turut serta memikirkan dan melakukan hal-hal lain dalam pembangunan daerah.

Dalam rangka pendayagunaan sumber daya lokal, pada periode ini perhatian lebih diupayakan melalui penguatan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Purwakarta. Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan kebudayaan tersebut, antara lain dengan aktualisasi nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sebagai unsur utama identitas dan jatidiri masyarakat Purwakarta.

Dalam rangka semakin memantapkan daya dukung lingkungan daerah, terus dijaga dan dipertahankan secara konsisten berbagai upaya untuk melestarikan kualitas dan fungsi lingkungan, perbaikan menerus pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan memberikan nilai tambah terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta selalu mendorong perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat. Berbagai upaya tersebut dicerminkan melalui meningkatnya perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat, semakin mantapnya sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, semakin terpeliharanya kualitas lingkungan dengan memberikan nilai tambah terhadap potensi sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup serta mengembangkan substitusi pemanfaatan sumber daya alam.

Pada tahap ini, pengembangan agribisnis harus sudah menguasai jaringan bisnis yang luas, terutama pada wilayah regional Jawa Barat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya integrasi vertikal dan integrasi horizontal dalam sistem agribisnis. Untuk itu diperlukan: (1).Perusahaan induk (*Holding Company*) dan integrasi vertikal tingkat lokal, regional, dan internasional, (2).Kolaborasi bisnis, dan (3).Jejaring bisnis. Pada tahap ini agribisnis Kabupaten Purwakarta sudah berkembang menembus batas-batas wilayah, sehingga sebagai konsekuensinya adalah pada tahap ini persaingan global di bidang agribisnis akan semakin kuat.

Berdasarkan potensi yang ada, daerah-daerah yang berada dalam lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta secara umum merupakan penghasil produk agro. Pada RPJMD tahap ke-4, komoditi-komoditi agro unggulan spesifik lokal yang dihasilkan oleh daerah-daerah di Kabupaten Purwakarta harus terus dikembangkan, dikemas dan ditata aspek pemasaran dan distribusinya. Diharapkan Kabupaten Purwakarta memiliki

produk unggulan lokal yang berstandar nasional dan internasional. Pada aspek industri dan perdagangan, diarahkan pada pemantapan industri dan perdagangan, melalui perkuatan potensi industri, penciptaan kesempatan kerja dalam jumlah besar dan pengoptimalan pendayagunaan potensi serta perluasan jaringan perdagangan daerah.

Sementara itu, pada aspek pariwisata, diarahkan pada pemantapan kinerja pemangku kepentingan pariwisata, pengembangan kelembagaan pariwisata dan penataan destinasi pariwisata serta penciptaan daya tarik wisata. Pada tahapan ini, pengembangan KUKM diarahkan pada pengembangan jaringan kelembagaan KUKM untuk mengatasi persaingan global dilakukan melalui pola kemitraan yang tersinergi, kebersamaan, kesetiakawanan yang harus dilakukan oleh semua komponen yang terkait dalam pengembangan KUKM. Pada tahap ini KUKM diharapkan dapat menjadi andalan perekonomian dan mampu berkiprah dalam persaingan regional, nasional dan internasional.

Pada aspek infrastruktur wilayah diarahkan pada pemantapan pengelolaan infrastruktur wilayah dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat. Pada tahap ini akan ditandai dengan lebih mantapnya pengelolaan infrastruktur transportasi, terpenuhinya ketersediaan air baku untuk berbagai keperluan, optimalnya pengelolaan jaringan irigasi, meningkatnya ketersediaan air bersih dan sanitasi serta terpenuhinya kebutuhan perumahan bagi masyarakat. Pembangunan wilayah di seluruh pelosok Kabupaten Purwakarta semakin merata karena telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhannya sehingga kegiatan perekonomian akan semakin tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi wilayahnya. Pada tahapan ini, kegiatan pembangunan di Kabupaten Purwakarta telah

sesuai dengan rencana tata ruang sehingga keseimbangan lingkungan dapat terjaga bahkan dapat meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sehingga keberlanjutan pembangunan dapat terwujud.

Hal ini ditandai dengan tercapainya alokasi ruang kawasan lindung dan terjaminnya lahan untuk sawah serta tersedianya alokasi ruang di kawasan perkotaan untuk tumbuh dan berkembangnya aktivitas perkotaan tanpa mengganggu kelestarian lingkungan hidup. Aspek Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat diarahkan pada pemantapan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat yang didukung oleh penegakan hukum dan partisipasi masyarakat. Sedangkan aspek hukum pada tahapan ini diarahkan guna pemantapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan harmonisasi produk hukum dari sisi substansi, pelaksanaan, dan penegakkan.

Pada tahap ini pembangunan bidang pemerintahan diarahkan pada pemantapan capaian pada tahap ketiga. Aspek politik diarahkan pada pemantapan praktik demokrasi, memperkuat kemitraan dan pengawasan (*check and balances*) antarlembaga di daerah dan masyarakat madani (*civil society*) serta pemantapan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Aspek Aparatur diarahkan pada pemantapan profesionalitas aparatur dalam pelayanan publik yang didukung oleh sistem dan standar pelayanan yang teruji.

4.2.4.2 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan, potensi dan permasalahan serta isu strategis

wilayahnya maka penataan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta bertujuan mewujudkan Kabupaten Purwakarta sebagai pusat pengembangan industri, pertanian, dan pariwisata yang terpadu, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan. Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, maka dirumuskan kebijakan sebagai langkah pencapaian tujuan, yaitu:

- a. Pengembangan kegiatan industri secara teraglomerasi terutama di bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (*interchange*);
- b. Pengembangan sentra produksi pertanian yang terintegrasi dalam sistem kawasan agropolitan dan atau minapolitan di bagian selatan wilayah kabupaten;
- c. Pengembangan kawasan wisata yang bersinergi dengan kegiatan pertanian dan industri;
- d. Pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara berhierarki, didukung infrastruktur wilayah yang terpadu, serta bersinergi dengan sistem perkotaan dan kawasan strategis;
- e. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung guna mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan resiko bencana dan efek pemanasan global; dan
- f. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- a. Sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis Kabupaten Purwakarta;
- b. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten Purwakarta;
- c. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta.

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta terdiri atas:

- a. Strategi pengembangan kegiatan industri secara teraglomerasi terutama di bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (*interchange*) meliputi:
 - 1) Menyediakan ruang kawasan peruntukan industri yang memadai di sekitar bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (*interchange*);
 - 2) Mendorong investasi pembangunan kawasan industri di kawasan peruntukan industri;
 - 3) Mendorong penyediaan/pemanfaatan fasilitas dan utilitas pendukung bersama untuk kegiatan-kegiatan industri di luar kawasan industri; dan
 - 4) Merelokasi secara bertahap kegiatan industri ke lokasi kawasan peruntukan industri/kawasan industri.
- b. Strategi pengembangan sentra produksi pertanian yang terintegrasi dalam sistem agropolitan dan/atau minapolitan di bagian selatan wilayah kabupaten meliputi:
 - 1) Menata dan mengembangkan kegiatan budidaya perikanan air tawar di perairan waduk yang berada di wilayah kabupaten dan bagian tenggara wilayah kabupaten;

- 2) Meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura unggulan di bagian tenggara wilayah kabupaten;
 - 3) Mencegah alih fungsi kawasan lahan pertanian berkelanjutan;
 - 4) Meningkatkan kapasitas usaha peternakan rakyat di bagian barat daya wilayah kabupaten; dan
 - 5) Mengembangkan ketersediaan sarana penyimpanan, pengolahan, pemasaran dan perangkutan produk pertanian.
- c. Strategi pengembangan kawasan wisata yang bersinergi dengan kegiatan pertanian dan industri meliputi:
- 1) Mengembangkan kawasan wisata agro dan ekologi di bagian tenggara wilayah kabupaten;
 - 2) Mengembangkan kawasan wisata belanja dan budaya di kawasan industri kecil unggulan;
 - 3) Mengembangkan kawasan wisata air dan petualangan di sekitar waduk yang ada di wilayah kabupaten purwakarta;
 - 4) Mengembangkan taman wisata di kawasan perkotaan;
 - 5) Mengembangkan jalur wisata dan sistem transportasi ke kawasan wisata; dan
 - 6) Membangun etalase hasil produksi pertanian dan industri kecil unggulan di kawasan wisata dan kawasan perkotaan.
- d. Strategi pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara berhirarki, didukung infrastruktur wilayah yang terpadu, serta bersinergi dengan sistem perkotaan dan kawasan strategis meliputi:

- 1) Mengembangkan PKW, PKL, pklp, PPK, PPL terintegrasi dengan pusat pengembangan kegiatan industri, pertanian, dan pariwisata;
 - 2) Mengarahkan perkembangan kawasan permukiman sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - 3) Mengembangkan sistem transportasi antar pusat kegiatan secara terpadu;
 - 4) Meningkatkan ketersediaan dan tingkat pelayanan fasilitas ekonomi dan sosial sesuai dengan lingkup pelayanan setiap kawasan perkotaan; dan
 - 5) Meningkatkan pelayanan jaringan air bersih, drainase, energi, persampahan, limbah, dan telekomunikasi secara terpadu.
- e. Strategi pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung dalam rangka mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan resiko bencana dan efek pemanasan global meliputi:
- 1) Memantapkan perlindungan kawasan hutan lindung;
 - 2) Meningkatkan luasan ruang terbuka hijau dan sumur resapan di kawasan perkotaan;
 - 3) Mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di kawasan lindung dan kawasan rawan bencana;
 - 4) Meningkatkan pengelolaan limbah industri dan domestik dengan prinsip teknologi bersih dan tuntas di tempat secara mandiri dan berkelanjutan;
 - 5) Meningkatkan ketertiban penggunaan lahan di sekitar garis sempadan sungai dan danau/waduk/situ; dan
 - 6) Merehabilitasi kawasan bekas pertambangan;

- f. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi:
- 1) Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
 - 2) Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun;
 - 3) Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara; dan
 - 4) Menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

4.2.5 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan perumusan isu

pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/atau program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penyusunan KLHS juga mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pelaksanaan program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan pembangunan dalam jangka menengah. Pembangunan dilaksanakan harus memperhatikan keseimbangan antara pencapaian target ekonomi, keseimbangan sosial dan lingkungan. Terkait dengan lingkungan, pelaksanaan program harus mengutamakan bentuk pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip meminimalkan resiko kerusakan lingkungan. Pelaksanaan program yang perlu mendapatkan perhatian terhadap keseimbangan lingkungan dijabarkan sebagai berikut, antara lain:

a. Dimensi Sosial

Rekomendasi yang dimaksud merupakan arahan rekomendasi program dan sasaran yang perlu dimuat dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Rekomendasi dan pengintegrasian pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dikhususkan pada target-target tujuan pembangunan berkelanjutan yang hanya termuat dalam salah satu prioritas unggulan yaitu isu

strategis atau visi misi bupati Purwakarta terpilih. Dengan kata lain rekomendasi dan pengintegrasian ini untuk target-target yang termasuk dalam skenario “ditambahkan”. Rekomendasi dan pengintegrasian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam dimensi sosial disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1.
Rekomendasi Program dan Sasaran Dimensi Sosial

Tujuan	Target	Rekomendasi		Pengintegrasian Ke Dalam Dokumen RPJMD
		Program	Sasaran	
Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan.	2.1 Menghilangkan segala bentuk Kekurangan gizi, dan memenuhi kebutuhan gizi	Program Pencegahan dan Penanggulangan Stunting	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/ baduta.	Sebagian rekomendasi telah diintegrasikan kedalam RPJMD dan/atau Renstra PD, dan sebagian lagi diintegrasikan dengan penyesuaian.
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Malnutrisi	Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 (lima) tahun, berdasarkan tipe.	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	
			Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) Bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	
	Menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Pangan	Kualitas konsumsi Pangan yang diindikasikan oleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	
			Rata-rata pendapatan Produsen pertanian skala kecil, menurut jenis dan status adat.	
	Menjamin system produksi pangan yang berkelanjutan	Program Pemetaan Kawasan LP2B	Penetapan kawasan pertanianpangan berkelanjutan.	

Tujuan	Target	Rekomendasi		Pengintegrasian Ke Dalam Dokumen RPJMD
		Program	Sasaran	
	Mengelola keragaman genetic benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Holtikultura, dan Perikanan	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.	
		Program Pengembangan Data Proporsi Hewan Ternak	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.	
Tujuan 3: Menjamin Kehidupan Yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.1 Mengurangi Rasio angka kematian ibu	Program Bimbingan Ibu Hamil	Angka Kematian Ibu (AKI).	
		Program Bimdal Kesehatan	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	
			Persentase Perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	
	3.2 Mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita	Program Bimdal Kesehatan Bagi Ibu Menyusui	Angka Kematian Balita (AKBa) 1000 kelahiran hidup.	
			Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	

Tujuan	Target	Rekomendasi		Pengintegrasian Ke Dalam Dokumen RPJMD
		Program	Sasaran	
		Program Imunisasi Kepada Bayi	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasidasar lengkap pada bayi.	
	3.3 Mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV	Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.	
			Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TB	Kejadian TB per 1000 orang.	
			Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Malaria	Kejadian Malaria per 1000 orang. Jumlah kecamatan yang mencapai eliminasi malaria.	
			Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hepatitis	Persentase Kecamatan yang Melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	
			Jumlah orang yang memerlukan Intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tropis	Jumlah Kecamatan dengan eliminasi Kusta.	

Tujuan	Target	Rekomendasi		Pengintegrasian Ke Dalam Dokumen RPJMD
		Program	Sasaran	
			Jumlah Kecamatan dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	
Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua	4.7 Menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pengarusutaman pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaandunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, pendidikan guru, (d) penilaian siswa.	

Sumber: Tim KLHS Kab Purwakarta, 2018

b. Dimensi Ekonomi

Rekomendasi pada subbab ini disusun dengan harapan dilakukan pengintegrasian ke dalam RPJMD demi terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Purwakarta. Program-program yang direkomendasikan ialah program yang dalam targetnya telah terskenariokan untuk ditambahkan. Setelah dilakukan identifikasi, maka diketahui beberapa target yang perlu ditambahkan dalam bentuk program dengan uraian seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2.
Rekomendasi Program dan Sasaran Dimensi Ekonomi

TUJUAN	TARGET	REKOMENDASI		Pengintegrasian Ke dalam Dokumen RPJMD
		PROGRAM	SASARAN	
Tujuan 7: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	7.2. Meningkatkan secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	Program Diversifikasi Energi Dengan Mengoptimalkan Potensi Energi Terbarukan Seperti Limbah Kotoran Hewan dan Panas Bumi.	Konsumsi energi terbarukan meningkat	Sebagian rekomendasi telah diintegrasikan kedalam RPJMD dan/atau Renstra PD, dan sebagian lagi diintegrasikan dengan penyesuaian.
		Program Pelatihan Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Terkait Pemanfaatan Energi Terbarukan Yang Lebih Optimal		
	7.a. 7.3. Melakukan perbaikan efisiensi energi sebanyak dua kali lipat.	Program Pengoptimalan Konservasi Energi Dalam Berbagai Sektor	Intensitas energi primer	
	7.b. Memperkuat Kerjasama dan mempromosikan investasi terkait infrastruktur dan teknologi dalam hal energi bersih.	Program Perluasan Jaringan dan Upaya Pemanfaatan Sister City Promosi Secara Aktif Dalam Hal Investasi Infrastruktur	Peningkatan kerjasama dan pendanaan untuk infrastruktur dan teknologi dalam energi bersih	
	7.c. Memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan	Program Perluasan Infrastruktur Peningkatan Kerjasama Bidang Energi	Dana investasi untuk infrastruktur dan teknologi pelayanan energi	
Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh,	8.b. Mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda.	Program Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda	Tersedianya anggaran untuk program terkait ketenagakerjaan dan meningkatnya keterampilan pemuda	
		Program Pengoptimalan Sumber Dana Untuk Pelatihan Keterampilan		

TUJUAN	TARGET	REKOMENDASI		Pengintegrasian Ke dalam Dokumen RPJMD
		PROGRAM	SASARAN	
serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	9.2.Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto.	Program Peningkatan Infrastruktur Industri	Peningkatan nilai tambah sektor industri	
		Program Peningkatan Kualitas SDM Dalam Sektor Industri		
		Program Peningkatan Daya Saing Industri		
Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi	9.b. Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas	Program Pengembangan Riset Industri	Meningkatnya diversifikasi industri dan nilai tambah komoditas	
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif		
	9.c. Secara signifikan meningkatkan akses TIK dan internet untuk semua.	Program Perluasan Jaringan Akses Internet	Peningkatan penduduk yang memanfaatkan internet	
		Program Pelatihan Penggunaan Internet		
Tujuan 10: Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarneagra	10.b Mendorong bantuan pembangunan dan arus keuangan yang resmi, ke negara-negara yang paling membutuhkan sesuai dengan rencana dan program nasional mereka.	Program Peningkatan Kerjasama Dengan Pihak-Pihak Terkait Baik Didalam Maupun Luar Negeri	Total aliran sumber daya yang masuk untuk pembangunan	
Tujuan 17: Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.1. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan Internasional untuk Meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	Program Peningkatan Inovasi Daerah	Total pendapatan pemerintah	
	17.3. Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.	Program Peningkatan Kerjasama Dengan Pihak-Pihak Terkait Baik didalam Maupun Luar Negeri	Bantuan biaya pembangunan	

TUJUAN	TARGET	REKOMENDASI		Pengintegrasian Ke dalam Dokumen RPJMD
		PROGRAM	SASARAN	
	17.8. Mengoperasionalkan Secara penuh bank Teknologi dan sains, Mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk Negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan Penggunaan teknologi Yang memungkinkan, Khususnya teknologi Informasi dan komunikasi.	Program Perluasan Jaringan Akses Internet	Proporsi individu yang menggunakan internet	
	17.14. Meningkatkan Keterpaduan kebijakan Untuk pembangunan berkelanjutan	Program Fasilitasi Untuk Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	Keterpaduan Kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan	
	17.17. Meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	Program Fasilitasi Untuk Menunjang Kemitraan Publik Antara Pemerintah, Swasta dan	Proyek atau kegiatan yang dilaksanakan dengan skema kerjasama	

Sumber: Tim KLHS Kab Purwakarta 2018

c. Dimensi Lingkungan

Rekomendasi dan pengintegrasian tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya dimensi lingkungan didasarkan pada hasil analisis. Rekomendasi yang dimaksud merupakan arahan rekomendasi program dan sasaran yang perlu dimuat dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta. Rekomendasi dan pengintegrasian pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dikhususkan pada target-target tujuan pembangunan berkelanjutan yang hanya termuat dalam salah satu prioritas unggulan yaitu isu strategis atau visi misi bupati Purwakarta terpilih. Dengan kata lain rekomendasi dan pengintegrasian ini untuk target-target yang termasuk dalam skenario “ditambahkan”. Rekomendasi dan pengintegrasian

tujuan pembangunan berkelanjutan dalam dimensi lingkungan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3.
Rekomendasi Program dan Sasaran Dimensi Lingkungan

TUJUAN	TARGET	REKOMENDASI		Pengintegrasian Ke dalam Dokumen RPJMD	
		PROGRAM	SASARAN		
Tujuan 6: Menjamin Keterseediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak yang Berkelanjutan untuk Semua	Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan menghentikan praktik buang air besa di tempat terbuka	Pembangunan dan peningkatan jumlah fasilitas cuci tangan dengan sabun pada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas umum masyarakat	Meningkatnya Proporsi fasilitas umum yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Sebagian rekomendasi telah diintegrasikan kedalam RPJMD dan/atau Renstra PD, dan sebagian lagi diintegrasikan dengan	
		Program sanitasi berbasis masyarakat melalui penyediaanMCK dan pemipaan IPAL	Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak		
		Pembangunan Infrastruktur air limbah sistem terpusat	Meningkatnya jumlah Infrastruktur air limbah sistem terpusat skla kota, kawasan, dan komunal.		
		Pemeliharaan Infrastruktur air limbah sistem terpusat			
		Peningkatan saluran rumah (SR) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	Meningkatnya proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat		
	6.3.Meningkatkan kualitas air dan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang.	Pembangunan instalasi	Tersedianya instalasi		
		pengelolaan lumpur tinja (IPLT)	Pengelolaan lumpur tinja (IPLT)		
		Pemeliharaan instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT)			
		Penetapan tata ruang lahan sempadansungai dan waduk	Meningkatnya kualitas air sungai dan waduk		
		Penentuan baku Mutu kelas air sungai dan waduk			

TUJUAN	TARGET	REKOMENDASI		Pengintegrasian Ke dalam Dokumen RPJMD
		PROGRAM	SASARAN	
		Penentuan daya tampung beban pencemaran air		
		Pengembangan program pembinaan dan percontohan perikanan ramah lingkungan		
		Peningkatan sanitasi penduduk		
		Pengelolaan limbah peternakan, pertanian, pertambangan, dan industri		
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai dan waduk		
Tujuan 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.4. Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dan warisan alam.	Penetapan warisan budaya dan warisan alam sebagai kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya	Meningkatnya Jumlah warisan Budaya dan warisan alam yang dilestarikan	
	11.6. Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	Pembangunan System pemilahan Sampah secara terpadu	Meningkatnya persentase sampah yang tertangani	
		Penerapan sistem pemilahan sampah secara terpadu		
		Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah		
		Peningkatan nilai tambah ekonomi hasil pengolahan sampah		
		Penambahan luasan RTH	Meningkatnya Indeks kualitas udara	
		Penambahan dan peningkatan kualitas transportasi umum massal		
		Pengujian secara Berkala emisi		

TUJUAN	TARGET	REKOMENDASI		Pengintegrasian Ke dalam Dokumen RPJMD
		PROGRAM	SASARAN	
		kendaraan Pengujian emisi/polusi aktivitas industri Evaluasi Kualitas Udara perkotaan		
	11.7 Menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau	Penetapan kawasan Yang tidak boleh dibangun Pembangunan lahan hijau baru melalui pembebasan lahan Pembangunan koridor ruang hijau kota	Meningkatnya Persentase RTH Terhadap luas wilayah	
Tujuan 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12.2. Mencapai Pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber Daya alam secara efisien.	Pembuatan dan Updating neraca Sumberdaya alam dan lingkungan	Tercapainya keseimbangan antara kebutuhan, Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien dan berkelanjutan	
	12.3.Mengurangi limbah pangan per kapita dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.	Penurunan susut Hasil dan mempertahankan mutu tanaman pangan		
		Penanganan pasca Panen melalui penerapan Good Handling Practices (GHP) dalam penyediaan pangan dan pasokan bahan baku untuk industri Peningkatan kapasitas sumberdaya masia dan kelembagaan pascapanen		

TUJUAN	TARGET	REKOMENDASI		Pengintegrasian Ke dalam Dokumen RPJMD
		PROGRAM	SASARAN	
	12.4.Mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan dan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah.	Pembuatan e-manifest dokumen limbah B3, data Base pengawasan dan penataan industri, dan database perizinan dan registrasi B3 online	Meningkatnya Jumlah izin pengelolaan limbah B3 yang dimiliki oleh usaha dan/ atau kegiatan	
		Pengawasan kinerja Perusahaan yang ramah lingkungan	Meningkatnya Peserta proper yang mencapai minimal ranking biru	
	12.5.Mengurangi produksi limbah Melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	Sosialisasi Pendirian bank sampah	Meningkatnya Jumlah bank sampah tiap RW	
		Pembinaan dan Pelatihan SDM Pengelola bank sampah		
		Pemberian insentif Dan penghargaan pada bank sampah yang aktif		
		Pembangunan TPS 3R	Meningkatnya Jumlah sampah yang dikelola secara 3R	
	12.6. Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar untuk mengadopsi praktek-praktek	Pembuatan Database dan melakukan updating terhadap izin lingkungan yang telah dikeluarkan	Meningkatnya Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan	

TUJUAN	TARGET	REKOMENDASI		Pengintegrasian Ke dalam Dokumen RPJMD
		PROGRAM	SASARAN	
	berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	Peningkatan pelayanan Pembuatan izin lingkungan secara online maupun offline		
		Penerapan sanksi Bagi usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan		
		Pengawasan dan pemantauan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh usah dan/atau kegiatan sesuai dengan pelaporan dokumen pengelolaan lingkungan yang mereka miliki	Meningkatnya usaha dan /atau kegiatan yang melaporkan upaya pengelolaan lingkungan	
	12.8. Menjamin bahwa masyarakat memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	Pengembangan Kurikulum dan Metode belajar berbasis lingkungan hidup	Terciptanya sekolah adiwiyata yang berwawasan lingkungan	
		Pengelolaan dan Pengembangan sarana pendidikan Untuk pendidikan Lingkungan		
		Penghargaan sekolah adiwiyata terbaik		
		Peningkatan system Pelayan publik Sesuai dengan standar pelayanan	Meningkatnya Fasilitas publik yang menerapkan Standar	

TUJUAN	TARGET	REKOMENDASI		Pengintegrasian Ke dalam Dokumen RPJMD
		PROGRAM	SASARAN	
		Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dalam Pemberian pelayanan sesuai standar pelayanan	Pelayanan Masyarakat	
	12.a. Memperkuat Kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi menuju arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.	Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam Pola produksi pertanian, peternakan, pertambangan, dan industri		
	Mengembangkan dan menerapkan Perangkat untuk memantau dampak Pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Penyusunan rencana induk pembangunan pariwisata daerah	Meningkatnya strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan	
		Pengembangan destinasi wisata		
		Peningkatan promosi pariwisata		
		Peningkatan Kemitraan dengan Pelaku usaha pariwisata		
Tujuan 15: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan	15.3. Menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai bebas dari lahan terdegradasi.	Pembuatan database lahan kritis	Meningkatnya luas lahan kritis yang direhabilitasi	
Penggurunan, Memulihkan		Pengadaan bibit pohon		

TUJUAN	TARGET	REKOMENDASI		Pengintegrasian Ke dalam Dokumen RPJMD
		PROGRAM	SASARAN	
n Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati		Penanaman pohon pada lahan kritis yang berpartisipasi dengan masyarakat		
	15.6. Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut.	Pembentukan dan penetapan kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumberdaya genetika	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumberdaya genetika	
	15.8. Memperkenalkan langkah-langkah Untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasive pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau Memberantas jenis asing invasif prioritas.	Pembuatan dan pengembangan basisdata atau system Dalam rangka menyebarkan informasi tentang jenis asing invasif Yang meliputi penyebaran, pengendalian maupun pencegahannya terutama pada kawasan konservasi	Terkendalinya jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air	
		Penetapan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan serta keanekaragaman hayati hewani dan		

Sumber: Tim KLHS Kab Purwakarta 2018

d. Dimensi Kelembagaan

Rekomendasi dan pengintegrasian tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya dimensi kelembagaan merupakan arahan rekomendasi program dan sasaran yang perlu dimuat dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta. Rekomendasi dan pengintegrasian pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dikhususkan pada target-target tujuan

pembangunan berkelanjutan yang hanya termuat dalam salah satu prioritas unggulan yaitu isu strategis atau visi misi Bupati Purwakarta terpilih. Dengan kata lain rekomendasi dan pengintegrasian ini untuk target-target yang termasuk dalam skenario “ditambahkan”. Rekomendasi dan pengintegrasian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam dimensi kelembagaan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4.
Rekomendasi Program dan Sasaran Dimensi Kelembagaan

TUJUAN	TARGET	REKOMENDASI	
		PROGRAM	SASARAN
Tujuan 16: Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.	16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak criminal	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.
			Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.
			Kematian disebabkan konflik berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.
			Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk
			Penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual
			Penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan
		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Penduduk yang merasa aman berjalansendirian di area tempat tinggalnya.

TUJUAN	TARGET	REKOMENDASI	
		PROGRAM	SASARAN
	16.2. Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh
			Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh
		Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.
			Korban perdagangan manusia
	16.3. Menggalakkan Negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang	Program Jaminan Sosial	Perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.
			Perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.
			Korban kekerasan yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang dalam mekanisme resolusi konflik.

TUJUAN	TARGET	REKOMENDASI	
		PROGRAM	SASARAN
	samar terhadap keadilan bagi semua.	Program Kemitraan Bina Ideologi Negara dan Wawasan Kebangsaan	Proporsi korban kekerasan yang melaporkan kepada polisi Kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.
			Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.
			Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.
			Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.
	16.9. Memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan pencatatan kelahiran	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, E28 menurut umur.
			Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.

TUJUAN	TARGET	REKOMENDASI	
		PROGRAM	SASARAN
	Menjamin akses public terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	Program Kerjasama Informasi Kriminal	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.
		Program Peningkatan Sarana dan Komunkasi Serta Media Masa	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)
			Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.
			Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
			Persentase penyelesaian sengketa informasi public melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.

TUJUAN	TARGET	REKOMENDASI	
		PROGRAM	SASARAN
			Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
	16.a. Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.	Program pembentukan lembaga hak asasi manusia dan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan <i>Paris E6 Principles</i> .

Sumber: KLHS RPJMD Kab Purwakarta Tahun 2018-2023

Beberapa rekomendasi bagi program yang akan diterapkan dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta, sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

Rekomendasinya adalah:

- 1) Optimalisasi sistem pendidikan 12 tahun dengan kebijakan yang tepat akurat melalui proses kajian yang komprehensif.
- 2) Melaksanakan implementasi sistem hidrologi kawasan berdasarkan hasil kajian.
- 3) Implementasi teknologi pengolahan air sesuai karakteristik air baku dan daya dukung (debit air) sungai.

b. Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Rekomendasinya:

- 1) Kawasan pengembangan berada pada wilayah dengan risiko bencana yang kecil.

- 2) Pemanfaatan lahan sesuai RTRW.
- 3) Teknologi yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik lahan.
- 4) Menetapkan kebijakan tentang mekanisme Pembebasan lahan dan Penetapan harga pasar lahan untuk menghindari spekulasi penguasaan tanah.

c. Program Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup

Rekomendasinya:

- 1) Kawasan pengembangan berada pada wilayah dengan risiko bencana yang kecil.
- 2) Pemanfaatan lahan sesuai RTRW.
- 3) Teknologi yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik lahan.
- 4) Menetapkan kebijakan tentang pengawasan orang dan barang dari luar daerah.
- 5) Menetapkan kebijakan tentang mekanisme Pembebasan lahan dan Penetapan harga pasar lahan untuk menghindari spekulasi penguasaan tanah.

d. Program peningkatan perekonomian rakyat

Rekomendasinya:

- 1) Menetapkan kebijakan program Kehati.
- 2) Kawasan pengembangan berada pada wilayah dengan risiko bencana yang kecil.
- 3) Pemanfaatan lahan sesuai RTRW.
- 4) Teknologi yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik lahan.

4.2.6 Telaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs

Pembangunan berkelanjutan mengandung makna pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekarang, namun tidak mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya, telah berkembang melalui berbagai interpretasi skema tujuan yang ingin dicapai. Setelah *Millenium Development Goals* menjadi tujuan pembangunan yang dikembangkan sepanjang tahun 2000 sampai dengan 2015, sekarang ini diterapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan tujuan yang lebih komprehensif dan beragam.

Berdasarkan Analisis Kesiapan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat seperti yang tersaji dalam buku Menyongsong SDGs Kesiapan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang diterbitkan bersama antara SDGs Center Universitas Padjajaran dengan Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, dapat digambarkan pencapaian indikator TPB Kabupaten Purwakarta. Hal ini tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5.
Pencapaian Indikator SDGs Kabupaten Purwakarta

TARGET	INDIKATOR	SKOR	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.1	Penduduk Miskin dengan Garis \$ 1,90 per hari	4	A	Mencapai hampir mencapai target SDGs
1.2	Penduduk Miskin dengan Garis Kemiskinan Nasional)	4	A	
2.2	Balita Dengan Berat Badan Kurus dan Sangat Kurus	4	A	
3.1	Angka Kematian di bawah 5 Tahun	4	A	
3.2	Angka Kematian Neonatal	4	A	
4.1	Angka Partisipasi Murni Tingkat Sekolah Dasar	4	A	
4.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	4	A	
4.6	Angka Melek Huruf Usia 15-24	4	A	

TARGET	INDIKATOR	SKOR	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
6.2	Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak	4	A	
7.1	Rumah Tangga dengan Akses Listrik	4	A	
8.1	PDRB per Kapita (Harga Konstan 2000)	4	A	
8.5	Tingkat Pengangguran dengan Kriteria Jam Kerja < 35	4	A	
16.3	Anak Dibawah 5 Tahun Yang Sudah Memiliki Akte Kelahiran	4	A	
3.4	Angka Harapan Hidup Saat Lahir	3	B	Mendekati target SDGs
4.5	Gap T10B40 Penduduk Usia 25-64 dengan Pendidikan Tersier	3	B	
4.5	Gender Gap Penduduk Usia 25-64 Tahun SMA	3	B	
4.6	Gap T10B40 Partisipasi Murni SMA	3	B	
8.6	Penduduk Usia Muda Yang Tidak Bekerja, Tidak Sekolah dan Tidak Pelatihan	3	B	
8.7	Penduduk Usia 5-14 tahun Yang Termasuk Kedalam Kateggori Pekerja Anak	3	B	
9.1	Kondisi Jalan dengan Kualitas Baik dan Sedang	3	B	
9.2	Rumah Tangga yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir	3	B	
15.1	Proporsi Luas Area Hutan Terhadap Luas Daratan	3	B	Masih Seperempat jalan lagi menuju target SDGs
2.1	Balita Dengan Tinggi Badan Pendek dan Sangat Pendek	2	C	
2.3	Produktivitas Tanaman Pangan	2	C	
4.1	Rata-rata Lama Sekolah	2	C	
11.1	Rumah Tangga Yang Memenuhi Spesifikasi Rumah Sederhana Sehat	2	C	
3.5	Penduduk dengan Kebiasaan merokok diatas usia 15 tahun	1	D	Baru Setengah Jalan Menuju Target SDGs
4.1	Penduduk Usia 25-64 tahun dengan Pendidikan Menengah Atas	1	D	
4.5	Gender Gap Penduduk Usia 25-64 Tahun dengan Pendidikan Tersier	1	D	
4.7	Gap T10B40 Penduduk Usia 25-64 Tahun SMA	1	D	
5.2	Tingkat partisipsi angkatan Kerja Wanita	1	D	
6.1	Rumah Tangga dengan Air Minum Layak	1	D	
10.1	Rasio Gini	1	D	
10.2	Rasio Palma	1	D	
10.3	Persentase Pengeluaran Kelompok Penduduk 40% Terbawah	1	D	
15.2	Area Konservasi yang Dilindungi	1	D	
3.6	Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas	0	E	Masih Cukup Jauh Mencapai target SDGs
5.1	Tingkat Kesuburan wanita	0	E	
5.3	Proporsi perempuan dalam parlemen	0	E	

TARGET	INDIKATOR	SKOR	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
11.2	Rumah Tangga Kota Dengan Jaringan Air Ledeng	0	E	
12.1	Rumah Tangga Dengan Perilaku Memilah Sampah	0	E	
13.1	Emisi CO2 BBM + Listrik Rumah Tangga	0	E	
15.3	Persentase Lahan Kritis (Kriteria+Sangat Kritis) terhadap Luas Wilayah	0	E	
16.1	Kejadian Pembunuhan	0	E	
16.2	Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana / Crime Rate	0	E	
Rata-Rata		2,16		

Sumber: Menyongsong SDGs Kesiapan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, SDGs Center Universitas Padjajaran dengan Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2018

Kabupaten Purwakarta secara umum mendapatkan skor 2.16 dan dengan demikian mendapatkan nilai C dalam pencapaian SDGs tahun 2030. Meskipun artinya masih cukup banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Kabupaten Purwakarta, angka ini sama dengan angka skor rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang bernilai 2.16 (C).

Tantangan paling besar diantaranya adalah indikator jumlah korban akibat kecelakaan lalu lintas (tujuan 3 kehidupan sehat dan sejahtera) dan rumah tangga kota dengan jaringan air ledeng (tujuan 6 air bersih dan sanitasi layak). Jumlah kematian akibat kecelakaan diproyeksikan akan mencapai 117 atau 3 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan targetnya sebanyak 41 untuk setiap 100.000 penduduk dan dengan demikian mendapatkan nilai E. Sedangkan untuk rumah tangga dengan jaringan air ledeng Kabupaten Purwakarta diproyeksikan hanya akan mampu mencapai setengah dari target dan karena mendapatkan nilai E.

Meskipun demikian, banyak indikator akan mengalami kemajuan, diantaranya indikator balita dengan berat badan kurus dan sangat kurus (tujuan 2 tanpa kelaparan) dan rumah tangga dengan sanitasi layak (tujuan 6 air bersih dan sanitasi layak). Keduanya diproyeksikan akan mencapai target SDGs pada tahun 2030 dimana keduanya

bernilai tinggi dan memperoleh nilai A. Indikator lainnya yang juga akan mengalami kemajuan pesat adalah tingkat pengangguran dengan kriteria jam kerja kurang dari 35 persen dan, PDRB perkapita (tujuan ke 8 pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi). Tingkat pengangguran dengan kriteria jam kerja kurang dari 35 persen diproyeksikan menurun ke angka 2,2 persen melampaui target SDGs yang berada pada angka 3,9 persen yang artinya untuk indikator tersebut kabupaten Purwakarta memperoleh nilai A. PDRB perkapita (harga konstan 2016) juga mendapatkan nilai A yang diproyeksikan akan mencapai angka \$9891 per tahun jauh melampaui target SDGs sebesar \$3956 per tahun.

Indikator pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Purwakarta secara umum memiliki progress yang baik bernilai rata-rata A. Artinya, secara keseluruhan indikator pendidikan dan kesehatan Kabupaten Purwakarta memiliki arah yang baik untuk mencapai target SDGs. Indikator pendidikan yang bernilai baik atau A adalah angka partisipasi murni tingkat SD, angka partisipasi kasar perguruan tinggi, dan angka melek huruf usia muda 15- 24 tahun. Sedangkan angka rata-rata lama sekolah masih perlu untuk mendapat perhatian khusus karena diproyeksikan hanya akan mampu mencapai setengah dari target SDGs. Indikator kesehatan yang bernilai A adalah angka kematian balita dan angka kematian neonatal, keduanya diproyeksikan akan mencapai target SDGs tahun 2030.

4.2.7 Penetapan Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan dan identifikasi isu-isu strategis yang terjadi di tingkat global, nasional, regional dan lokal maka isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Purwakarta dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Kualitas layanan pendidikan di semua jenjang masih belum optimal dan belum secara merata dapat memenuhi standar pelayanan nasional pendidikan. Oleh karenanya kedepan perlu di prioritaskan upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan pendidikan pada semua jenjang yang sesuai dengan tuntutan Standar Nasional Pendidikan. Masih rendahnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada mulai dari ruang kelas dan ruang penunjang lain seperti perpustakaan, laboratorium, sarana olahraga, ketersediaan MCK/sanitasi belum bisa sesuai dengan ratio jumlah siswa. Oleh karenanya kedepan perlu dilakukan langkah-langkah untuk memenuhi ketersediaan ruang kelas yang mampu menampung anak usia sekolah pada semua jenjang yang sesuai dengan standar pelayanan.

Pemenuhan kebutuhan ruang penunjang lain serta ketersediaan sarana sanitasi/MCK yang sesuai dengan ratio siswa mutlak diperlukan untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat dan bermutu.

2. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat perlu dilakukan melalui peningkatan kualitas layanan di tingkat dasar dan di tingkat rujukan. Revitalisasi Posyandu, Pengembangan Pukesmas Pembantu dan Puskesmas Rawat Inap kedepan masih perlu dilakukan disamping penyediaan obat-obatan

dan peralatan kesehatan yang memadai. Peningkatan pelayanan kesehatan ditingkat rujukan juga akan menjadi prioritas melalui pemenuhan ruang perawatan yang baik dan layak, penyediaan peralatan kesehatan yang memadai di rumah sakit, ketersediaan obat-obatan yang cukup, serta kesiapan tenaga kesehatan yang cukup dan memiliki kompetensi. Hal lain yang juga perlu mendapatkan prioritas adalah upaya untuk menyadarkan masyarakat agar terbiasa dengan pola hidup bersih dan sehat untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Purwakarta.

3. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

Berdasarkan data dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta perkembangan jumlah pengangguran (pencari kerja yang terdaftar) di Kabupaten Purwakarta masih cukup tinggi. Kondisi ini memerlukan penanganan serius dari pemerintah. Upaya penanggulangan kemiskinan kedepan perlu dilakukan secara sistemik mulai dari pembenahan mental dan karakter masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar mereka mulai dari kesehatan, pendidikan dan tempat tinggalnya serta pemenuhan akses ekonomi serta ketersediaan infrastruktur yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi semua masyarakat.

4. Penataan Infrastruktur di Perkotaan dan Perdesaan

Penataan infrastruktur di perdesaan sampai dengan saat ini belum memadai dan merata ke seluruh wilayah di Kabupaten Purwakarta, termasuk dalam hal ini tingkat kemantapan jaringan dan kualitas jalan, kurangnya saluran drainase, kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah dan air limbah, infrastruktur air bersih dan infrastruktur irigasi yang belum dimanfaatkan secara optimal.

5. Pengembangan Potensi Pariwisata

Pengembangan potensi wisata perlu menjadi perhatian dan posisi yang strategis dalam kerangka penggalan potensi pendapatan asli daerah. Adapun kebijakan pengembangan potensi wisata terdiri dari penggalan potensi obyek, daya tarik dan atraksi wisata beserta pengembangan obyek, daya tarik dan atraksi wisata yang telah ada. disamping itu yang juga perlu mendapat perhatian adalah aspek promosi dan pemasaran, pasar wisata (masyarakat pengirim wisata), transportasi dan masyarakat penerima wisatawan yang menyediakan akomodasi dan pelayanan jasa pendukung wisata (fasilitas dan pelayanan).

6. Pengembangan Perekonomian Rakyat Berbasis Desa

Pengembangan perekonomian rakyat berbasis desa dapat dilakukan melalui beberapa agenda kebijakan lintas perangkat daerah yaitu peningkatan pemilikan asset produksi khususnya tanah dan modal, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan teknologi, bantuan pemasaran dan bahan baku (penataan sistem bapak angkat, mendirikan pusat-pusat pemasaran, menyelenggarakan pameran produk, mendirikan atau menetapkan perusahaan pengolah dan pemakai produk yang bersangkutan, meningkatkan kerjasama dengan badan usaha atau koperasi, adanya kebijaksanaan yang berupa aturan atau himbauan untuk menggunakan produk yang bersangkutan dan mencari pasar baru termasuk memasarkan keluar negeri dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan dipedesaan (dengan cara mendirikan pusat-pusat perdagangan, terminal ataupun perusahaan dapat dipandang sebagai sarana pusat pertumbuhan).

Disamping itu, perihal penggunaan dan pengalokasian dana desa perlu juga lebih dioptimalkan lagi dengan koordinasi,

fasilitasi, evaluasi, sinkronisasi antara OPD terkait misalnya DPMD, Inspektorat, Bappedalitbang, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Koperasi dan UMKM Perdagangan dan Perindustrian, masyarakat serta institusi pendidikan, dengan desa serta kecamatan dalam upaya pemberdayaan ekonomi desa dalam upaya mengawal kebijakan pengembangan perekonomian rakyat berbasis desa yang berkelanjutan. Oleh karenanya kedepan perlu dilakukan penguatan dan revitalisasi Sektor-Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan sebagai potensi domestik yang menjanjikan untuk menyerap tenaga kerja, sehingga intervensi pemerintah pada Sektor Peternakan, Pertanian dan Perikanan mutlak diperlukan. Hal yang tidak kalah penting adalah upaya penyiapan tenaga kerja terampil dan kompeten untuk menjawab kebutuhan Sektor Industri serta Perdagangan Barang dan Jasa.

7. Peningkatan Penerapan Reformasi Birokrasi Menuju *Good Governance*

Kunci keberhasilan reformasi birokrasi berada pada kesediaan pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam hal peningkatan kualitas birokrasi dan terlibat dalam mekanisme pengawasan eksternal setiap jenjang.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 VISI

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa yang dimaksud dengan Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Defisini Visi juga bisa diartikan sebagai suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin di capai oleh suatu lembaga dimasa yang akan datang. Banyak intepretasi yang dapat keluar dari pernyataan keadaan ideal yang ingin dicapai lembaga tersebut. Visi itu sendiri tidak dapat dituliskan secara lebih jelas menerangkan detail gambaran sistem yang ditujunya, oleh kemungkinan kemajuan dan perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi selama masa yang panjang tersebut. Pernyataan Visi tersebut harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga suatu Visi hendaknya mempunyai sifat/fleksibel.

Dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis daerah yang telah diuraikan pada Bab IV dan mengacu pada arah pembangunan tahap keempat pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 serta memperhatikan Visi Misi Kepala Daerah terpilih yang dikampanyekan pada saat pemilihan umum Kepala Daerah, juga sebagai antisipasi untuk menjawab permasalahan umum daerah di masa mendatang, maka Visi Pembangunan Jangka Menengah Periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

"MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA"

Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 ini menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Adapun Penjelasan dari Visi **"MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA"** ini adalah mengerahkan segala potensi yang ada guna mencapai suatu kondisi wilayah dengan tatanan Purwakarta Istimewa dalam nilai-nilai yang bersifat realitas, bukan hanya dari sisi tekstual, tetapi harus lebih bersifat aplikatif-kontektual mewujudkan Purwakarta Istimewa menjadi semangat yang nyata dengan semangat 5 Sila dari Pancasila. Semangat itu adalah dalam mewujudkan Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang sangat bersifat individual pada keyakinan kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Perwujudan nyatanya ada pada semangat menjalankan tata syariat agama masing-masing berdasarkan keyakinan yang kita miliki dalam tindakan aplikatif di kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai semangat kemanusiaan yang perwujudannya diwujudkan pada semangat toleransi terhadap berbagai problem-

problem kemanusiaan, mulai dari problem bencana di berbagai daerah, toleransi kemanusiaan pada kehidupan bertetangga kita, persoalan kemiskinan, persoalan kebodohan, persoalan ketertinggalan, jurang pemisah antara yang kaya dan miskin, semangat solidaritas sosial dan perasaan terenyuh oleh berbagai penderitaan yang dialami orang lain. Semangat itulah yang kita miliki. Nilai-nilai persatuan perwujudannya ada pada semangat membangun kebersamaan nilai dalam bekerja setiap saat. Nilai semangat kerakyatan perwujudannya ada pada tatanan kehidupan demokrasi yang semakin terbuka. Demikian juga dengan nilai semangat keadilan. Semangat keadilan harus ada perwujudannya dalam bangunan sistem penggarapan yang adil merata di seluruh daerah di Indonesia, yaitu dengan membangun sistem pembangunan antar kota dengan pedesaan secara adil, sehingga tidak ada lagi daerah yang jauh tertinggal, tetapi ada daerah yang sangat maju. Membangun sistem keadilan antar pusat dan daerah, membangun sistem keadilan antar provinsi dengan daerah, dan membangun sistem antara kabupaten dengan desa-desa yang kita wujudkan dengan semangat pembangunan otonomisasi pedesaan, otonomisasi daerah kabupaten. Seiring dengan semangat keadilan pembangunan, distribusi ekonomi yang merata, sistem pembangunan yang berbasis pada kewilayahan dan sistem pembangunan yang berbasis pada nilai-nilai lokal, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terwujud.

5.2 MISI

Secara harfiah Misi berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan visi. Dengan merujuk ketentuan yang sama seperti di awal Bab ini, Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Kalimat misi mengandung makna yang menggambarkan kebutuhan, keinginan dan harapan prioritas masyarakat dalam rangka pencapaian visi. Pernyataan misi disampaikan agar tidak terjadi multi tafsir atau salah tafsir mengenai maksud dan tujuan yang terkandung didalamnya, berkaitan dengan batas dan maksud realistis yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat. Pernyataan misi bertujuan untuk mengkomunikasikan eksistensi dan arah yang ingin dituju.

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Pengertian dari Misi ini adalah dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Purwakarta seluruhnya mencakup pembangunan manusia, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pembangunan manusia sebagai insan, menekankan harkat, martabat, hak dan kewajiban manusia, yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia, baik etika, estetika maupun logika, yang meliputi nilai-nilai rohaniah, kepribadian, dan kejuangan. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama dan ilmunya, bersikap amanah, sadar akan harga diri pribadi dan bangsanya, memiliki kepercayaan diri, cerdas, terbuka, demokratis, dan memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang sebelumnya tertuang dalam 7 Poe Atikan Istimewa. Selain itu, pembangunan manusia sebagai insan meliputi juga aspek jasmaniah, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan keadaan gizinya.

Manusia sebagai insan menjadi perhatian utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia karena menjadi dasar dari kehidupan dirinya. Keberhasilan membangun manusia sebagai insan seutuhnya akan menentukan keberhasilan membangun manusia pada sisi lainnya, yakni pelaku yang tangguh dalam membangun diri dan lingkungannya. Pengetahuan, keterampilan, dan keahlian harus ditegakkan di atas dasar etika moral dan akhlak yang baik. Pembangunan manusia sebagai insan tidak terbatas pada kelompok umur tertentu, tetapi berlangsung dalam seluruh kehidupan manusia sejak janin sampai usia lanjut. Setiap tahap dari pertumbuhan tersebut terutama tahap awal sangat mempengaruhi kualitasnya sehingga perhatian yang sungguh-sungguh akan membentuk manusia yang tangguh, baik dalam sikap mental, daya pikir maupun daya ciptanya, serta sehat jasmani dan rohaninya.

Upaya pemerintah daerah Purwakarta dalam meningkatkan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan juga bertujuan menunjang upaya mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan andal, serta mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang akan berimbas pada pemerataan dalam skala pembangunan lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta dan nasional. Keberhasilan dalam pemerataan pembangunan wilayah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan modal utama dalam upaya meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat, memperkuat kesetiakawanan sosial, menanggulangi kemiskinan, dan mencegah proses munculnya kemiskinan baru yang mungkin timbul.

Pada masa pembangunan sekarang ini fungsi dan peran pemuda sangat strategis yaitu sebagai kekuatan moral, agen perubahan dan kontrol sosial dalam proses pembangunan sehingga perlu

dikembangkan potensi dan perannya. Namun seiring perkembangan jaman, membangun pemuda bukanlah hal yang mudah dalam era globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Kemudahan akses informasi dalam segala bidang kehidupan telah mengubah gaya hidup dan pola pikir pemuda menjadi generasi yang malas berpikir, ingin serba instant dan tidak ingin bekerja keras karena dimanjakan oleh teknologi, apatis terhadap lingkungan bahkan yang lebih parah lagi adalah maraknya pergaulan bebas dan penyalahgunaan Narkoba. Jika kondisi ini terus “dibiarkan dan dibenarkan” pemuda Indonesia akan kehilangan jati dirinya sendiri yang berimplikasi pada semakin kaburnya arah pembangunan bangsa dimasa depan.

Oleh itu karakter pemuda di Kabupaten Purwakarta harus terus dikuatkan dan diberdayakan agar mampu memiliki karakter kepemimpinan yang kuat serta memiliki daya saing guna menghadapi segala tantangan, kebutuhan, tuntutan di era global seperti saat ini. Salah satu upaya pembentukan generasi yang tangguh adalah olahraga yang merupakan salah satu media strategis bagi pembentukan karakter bangsa, karena dalam olahraga selalu ditanamkan semangat kerjasama dan sportifitas. Dua karakter inilah yang menjadi dasar utama dalam menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan olahraga dapat membentuk karakter bangsa karena bangsa yang sehat adalah bangsa yang kuat dan produktif. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menyebutkan bahwa untuk membangun pemuda diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara berdasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam undang-undang itu pula mengamanatkan Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda

berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

Misi 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional.

Pengertian dari Misi ini adalah pembangunan daerah dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah daerah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan wilayah kita sendiri dan saling bersinergi dengan provinsi dan nasional.

Sistem perencanaan penyusunan program dan anggaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan dikembangkan secara terpadu dan efisien, sejalan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan serta kemampuan keuangan daerah. Kemampuan aparatur pemerintah daerah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan pembangunan perlu makin ditingkatkan yang disesuaikan dengan tuntutan perkembangan sistem akuntabilitas.

Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.

Pengertian dari Misi ini adalah terwujudnya interkoneksi antara infrastruktur yang telah terbangun dengan masing-masing kawasan dan wilayah dengan beberapa titik fokus pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan

pengembangan konsep pembangunan perumahan permukiman, kelembagaan, perbaikan kampung, peremajaan permukiman kota, pemugaran perumahan desa/rutilahu, penataan bangunan, penyehatan lingkungan permukiman, dan penyediaan dan pengelolaan air bersih secara merata di perkotaan dan perdesaan. Pengembangan kepariwisataan meliputi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan wisata, pengusaha, objek dan daya tarik wisata, serta usaha lainnya yang terkait. Pembangunan kepariwisataan pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek dan daya tarik wisata, yang terwujud antara lain dalam bentuk kekayaan alam yang indah, keragaman flora dan fauna, kemajemukan tradisi dan seni budaya, serta peninggalan sejarah dan purbakala. Pengembangan objek dan daya tarik wisata tersebut apabila dipadukan dengan pengembangan usaha jasa dan sarana pariwisata, seperti biro perjalanan, jasa konvensi, penyediaan akomodasi dan penyediaan transportasi wisata, akan berfungsi di samping meningkatkan daya tarik bagi berkembangnya jumlah wisatawan juga mendukung pengembangan objek dan daya tarik wisata baru.

Hasil yang optimal akan diperoleh apabila upaya pengembangan tersebut didukung oleh pembangunan prasarana yang memadai. Dengan memperhatikan ciri tersebut, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta dilakukan secara terpadu antara berbagai komponen yang menentukan dan menunjang keberhasilannya, seperti objek dan daya tarik wisata, akomodasi, transportasi, telekomunikasi, listrik, air bersih, dan industri cenderamata, serta melibatkan koperasi, swasta, dan masyarakat luas. Selain itu, sumber daya manusia yang merupakan pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan sangat penting untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

Pembangunan kepariwisataan yang dilaksanakan melalui pengembangan kekayaan alam Purwakarta serta kekayaan budaya sunda dan suku bangsa yang beraneka ragam, juga harus mampu menjadi sarana untuk mengefektifkan cita-cita bangsa dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melestarikan dan memperkuat jati diri dan kemandirian daerah, serta dapat menjadi peranti untuk ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial guna mewujudkan perdamaian yang abadi antar suku dalam tatanan kebhinekaan lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta dan pergaulan dengan bangsa-bangsa di dunia. Pembangunan lingkungan hidup mencakup berbagai aspek pembangunan, baik ekonomi, teknologi, sosial maupun budaya, dan amat erat kaitannya dengan pembangunan berbagai sektor seperti industri, pertanian, kehutanan, pertambangan dan energi, perhubungan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, perdagangan dan hubungan luar negeri, teknologi, dunia usaha, dan pembangunan daerah.

Misi 4 : Mewujudkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa.

Pengertian dari Misi ini adalah pembangunan perekonomian rakyat yang kokoh berbasis perdesaan perlu dilakukan secara terpadu, dengan meningkatkan peran serta, pengembangan prakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakatnya. Sesuai dengan amanat undang-undang dimana pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Selanjutnya, sebagai perwujudan perekonomian rakyat yang berimbang dan seimbang serta proporsional, pembangunan

perkotaan dan perdesaan diselenggarakan dengan memperhatikan tingkat pengembangan dan penyerasian laju pertumbuhan antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, provinsi dan nasional, perkotaan dan perdesaan saling melengkapi dan membentuk satu sistem yang saling terkait. Keterkaitan antara perdesaan dan perkotaan terlihat dalam penyediaan bahan pokok, fasilitas dan pelayanan dasar, penyediaan bahan baku, serta bahan setengah jadi dan sumber daya manusia untuk industri dan kegiatan ekonomi lainnya. Hubungan timbal balik yang saling menguntungkan ini merupakan dasar bagi pertumbuhan yang serasi antara desa dan kota lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta.

Dengan memperhatikan karakteristik kota dan desa, setiap pelaksanaan pembangunan di daerah perkotaan dan perdesaan akan berbeda sesuai dengan ciri dan permasalahan yang ada. Keragaman ini membutuhkan cara pengelolaan pembangunan yang lebih terkoordinasi dan lebih terpadu berdasarkan karakteristiknya. Kedua hal ini akan menjadi ciri yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di perkotaan dan perdesaan. Keserasian dan keterpaduan dalam pembangunan sektor di daerah perkotaan dan perdesaan diperlukan untuk menjamin efektivitas usaha pencapaian sasaran pembangunan daerah yang akan dituangkan dalam dokumen ini.

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah penjabaran dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan diwujudkan dari aktifitas pembangunan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Purwakarta harus didasarkan pada tujuan pembangunan sebagai gambaran indikasi yang lebih konkrit dari

pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan pembangunan Kabupaten Purwakarta dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut:

**MISI
PERTAMA : MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN,
KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL**

**Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya
Manusia Yang Profesional dan Berbudaya**

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia
Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga

Sasaran 3 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

**Tujuan 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Sosial
Masyarakat**

Sasaran 1 : Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan

Sasaran 2 : Meningkatnya Aksesibilitas Kesempatan Kerja

Sasaran 3 : Meningkatnya Pemberdayaan dan
Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja

MISI KEDUA : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESIONAL.

Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif.

Sasaran 1 : Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern

Tujuan 2 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berintegritas

Sasaran 1 : Meningkatnya Pengawasan dan Integritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

MISI KETIGA : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN

Tujuan 1 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup

Sasaran 1 : Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah

Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tujuan 2 : Mengembangkan Pariwisata Berwawasan Lingkungan

Sasaran 1 : Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

MISI : MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN RAKYAT KEEMPAT YANG KOKOH BERBASIS DESA

Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta Daya Beli Masyarakat

Sasaran 1 : Meningkatnya Usaha Kecil Menengah dan Koperasi

Sasaran 2 : Berkembangnya Sentra Industri Unggulan dan Perdagangan

Sasaran 3 : Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif

Sasaran 4 : Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Saing Pertanian, Perikanan dan Peternakan

Sasaran 5 : Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keterkaitan antara visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023 dengan 9 Langkah Melanjutkan Purwakarta Istimewa diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial terdapat pada **Langkah Ke 1+2+7 Dalam “9 Langkah Melanjutkan Purwakarta Istimewa”**.
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Profesional terdapat pada **Langkah Ke 1+2+8+9 Dalam “9 Langkah Melanjutkan Purwakarta Istimewa”**.
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan terdapat pada **Langkah Ke 3+5+6 Dalam “9 Langkah Melanjutkan Purwakarta Istimewa”**.

4. Mengembangkan Perekonomian Rakyat Berbasis Desa terdapat pada **Langkah Ke 4+6+8+9** Dalam **“9 Langkah Melanjutkan Purwakarta Istimewa”**

Berikut disajikan keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Jangka Menengah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023 yang dilengkapi dengan indikator kinerja serta target setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Tabel 5.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial										
1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional dan Berbudaya	1 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa	Indeks Pembangunan Manusia	69,28	69,84	70,40	70,97	71,54	72,12	72,70	72,70
		1 Rata-Rata Lama Sekolah	7,74	7,91	8,08	8,25	8,43	8,62	8,80	8,80
		2 Angka Harapan Lama Sekolah	11,89	12,06	12,24	12,42	12,60	12,78	12,97	12,97
		3 Persentase Seni dan Budaya Yang Dibina dan Dilestarikan	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00
		4 Indeks Kerukunan Umat Beragama	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00
	2 Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga	1 Persentase Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	55,00	55,00

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1 Angka Harapan Hidup	70,42	70,54	70,65	70,77	70,89	71,01	71,13	71,13
2 Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		1 Angka Kemiskinan (%)	9,06	8,88	8,7	8,53	8,36	8,19	8,03	8,03
		2 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,11	8,93	8,75	8,57	8,40	8,23	8,07	8,07
	1 Meningkatkan Penanggulang an Kemiskinan	1 Angka Kemiskinan (%)	9,06	8,88	8,7	8,53	8,36	8,19	8,03	8,03
	2 Meningkatkan Aksesibilitas Kesempatan Kerja	1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	45,81	46,11	46,54	46,95	47,35	47,75	48,14	48,14
		2 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,11	8,93	8,75	8,57	8,40	8,23	8,07	8,07
	3 Meningkatkan Pemberdayaa n dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja	1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,40	87,86	88,32	88,79	89,25	89,71	90,18	90,18
		2 Indeks Perberdayaa n Gender (IDG)	71,51	72,50	73,49	74,48	75,48	76,47	77,46	77,46

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Misi 2: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional										
1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif	1 Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	0	0	45	50	55	55	60	60
		1 Indeks Reformasi Birokrasi	0	0	45	50	55	55	60	60
		2 Nilai SAKIP Kab. Purwakarta	CC	B	B	B	BB	BB	A	A
		3 Nilai LPPD Kab. Purwakarta	31,3	35	35	35	35	35	35	35
	2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern	1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	73	75	75	76	77	78	79	79
		2 Persentase aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikembangkan (%)	88	98	100	100	100	100	100	100
2 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan		1 Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah	0	0	2	4	6	8	10	10

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Berintegritas		Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)								
	1 Meningkatnya Pengawasan dan Integritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1 Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	0	0	2	4	6	8	10	10
	2 Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	1 Indeks Profesionalitas ASN	Sangat Rendah (0-60)	Sangat Rendah (0-60)	Sangat Rendah (0-60)	Sangat Rendah (0-60)	Sangat Rendah (0-60)	Rendah (61-70)	Rendah (61-70)	Rendah (61-70)
Misi 3: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan										
1 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap (%)	83,63	84,63	85,63	86,63	87,63	88,63	89,63	89,63
		2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	69,81	70,31	70,81	71,31	71,81	72,31	72,81	72,81
	1 Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam	1 Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi	83,63	84,63	85,63	86,63	87,63	88,63	89,63	89,63

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah	Mantap (%)								
		2 Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	82,60	84,00	85,40	85,52	85,66	85,82	86,00	86,00
		3 Cakupan Layanan Persampahan (%)	46,00	49,00	52,00	55,00	58,00	61,00	64,00	64,00
		4 Cakupan Layanan Air Limbah Domestik (%)	2,00	9,00	16,00	20,00	25,00	32,00	40,00	40,00
		5 Cakupan Layanan Air Bersih (%)	15,52	25,52	35,52	45,52	55,52	65,52	75,52	75,52
	2 Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	69,81	70,31	70,81	71,31	71,81	72,31	72,81	72,81
		2 Persentase Rencana Rinci Tata Ruang Yang Ditetapkan (%)	0,00	0,00	18,52	18,52	7,41	11,11	18,52	18,52
	2 Mengembangkan Pariwisata Berwawasan Lingkungan	1 Kontribusi Pariwisata Terhadap PAD (%)	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	55,00
		1 Meningkatkan Kunjungan	4.500	5.000	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	9.000

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wisatawan	(Orang)								
Misi 4: Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa										
1 Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta Daya Beli Masyarakat		1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,12	5,22	5,33	5,43	5,54	5,65	5,77	5,77
		2 Indeks Gini (Poin)	0,39	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36
		3 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Rp)	10.941.000	11.056.000	11.173.000	11.291.000	11.410.000	11.531.000	11.652.000	11.652.000
	1 Meningkatnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi	1 Laju UMKM Yang Dibina (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2 Laju Koperasi Aktif (%)	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00
	2 Berkembangnya Sentra Industri Unggulan dan Perdagangan	1 Laju Pertumbuhan IKM (%)	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00
		2 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	4,51	4,60	4,69	4,74	4,83	4,92	5,00	5,00
	3 Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif	1 Laju Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (%)	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00
	4 Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Peningkatan	1 Skor Pola pangan Harapan	86,25	87,40	88,55	89,70	90,85	92,00	93,15	93,15
		2 Laju	1,08	1,15	1,22	1,22	1,22	1,08	1,10	1,10

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Daya Saing Pertanian, Perikanan dan Peternakan	Produksi Pertanian (%)								
		3 Laju Produksi Peternakan (%)	3	3	3	3	3	3	3	3
		4 Laju Produksi Perikanan (%)	14	14	14	14	14	14	14	14
	5 Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Status Indeks Desa Membangun	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang

Sumber: hasil proyeksi, 2019

5.4 PROGRAM PRIORITAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Adapun program pembangunan yang menjadi prioritas Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018-2023 dirumuskan ke dalam **“9 LANGKAH MELANJUTKAN PURWAKARTA ISTIMEWA”**, sebagai berikut:

1. Pelayanan pendidikan terintegrasi dengan pemerintah provinsi dan pusat melalui program satu desa satu smp dan satu sma/smk berbasis pemahaman Al-Qur'an dan Kitab Kuning, serta penambahan layanan angkutan sekolah gratis untuk daerah prioritas yang disesuaikan dengan rasio jumlah siswa pada setiap desa/kelurahan;
2. Pola pengembangan pelayanan kesehatan gratis dan terintegrasi dengan penyiapan satu desa/kelurahan minimal satu ambulance, satu perawat, satu dokter dan satu bidan berbasis online serta jaminan perawatan kesehatan di sembilan rumah sakit pemerintah dan swasta bagi seluruh warganya;
3. Pengembangan pola infrastruktur pertanian primer, sekunder dan tersier secara terintegrasi berupa pembangunan irigasi, bendungan kecil dan bendungan besar serta pengembangan produk asuransi produk pertanian, peternakan dan perikanan;
4. Pengembangan desa berbasis teknologi dengan mendorong tumbuhnya produk unggulan melalui program satu desa satu produk unggulan, serta pengembangan kelembagaan usaha desa melalui program investasi desa, baik yang dikelola oleh badan usaha milik desa maupun lembaga usaha lainnya;
5. Optimalisasi pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan berbasis industri dan pariwisata melalui penambahan lebar jalan kabupaten dari 6 meter menjadi 9–12 meter dan dilengkapi dengan penerangan jalan umum

(PJU) yang berestetika serta penataan seluruh jalan lingkungan dengan pengelolaan teknologi jalan yang ramah lingkungan, pengembangan bangunan pemerintah, mesjid, mushola, madrasah, majelis taklim dan rumah ibadah, rumah rakyat miskin, penambahan ruang terbuka hijau dan pusat kebugaran publik seperti *sport center*, lapang sepakbola dan sarana olahraga lainnya di setiap desa/kelurahan, serta penataan dan pengembangan jaringan listrik dan air bersih perkotaan dan perdesaan;

6. Pengembangan pariwisata berbasis pedesaan melalui program pengembangan kampung budaya, pendidikan pariwisata berbasis alam dan penyiapan sawah-sawah abadi dan sumber air abadi oleh pemerintah daerah yang dikelola oleh masyarakat serta jaminan kesejahteraan publik melalui pembagian beras premium bagi warga miskin melalui program atm beras;
7. Pengembangan pendidikan profesional bagi siswa di sekitar industri melalui program sekolah manager setingkat Diploma dan Srata 1, serta pengembangan beasiswa bagi para calon doktor di bidang studi agama;
8. Peningkatan kesejahteraan aparatur desa, RT, RW, linmas, guru ngaji, karang taruna, bpd, bamusdes, imam masjid, muadzin, bilal, khotib, melalui program asuransi kesehatan, kecelakaan kerja dan hari tua; dan
9. Pengembangan iklim investasi melalui pembangunan pusat pelayanan perijinan terpadu dengan pembangunan mall layanan perijinan yang berstandar nasional untuk layanan dasar publik seperti penerbitan izin investasi, IMB, KTP, akte kelahiran, surat nikah dan layanan publik lainnya serta menumbuhkembangkan umkm melalui program stimulus permodalan, pengembangan inovasi produk, pemasaran dan revitalisasi pasar tradisional yang ramah lingkungan.

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Visi dan misi, serta tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Purwakarta akan dicapai melalui serangkaian strategi pembangunan daerah dan arah kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi juga digunakan sebagai sarana melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Strategi adalah serangkaian langkah-langkah yang memuat program-program indikatif yang bertujuan mewujudkan visi dan misi, baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang sesuai dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan kuat bagaimana Pemerintah Kabupaten Purwakarta menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan.

Untuk mengetahui seberapa jauh strategi menciptakan nilai tambah diperlukan parameter utama, sehingga dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus menciptakan budaya “berpikir strategik” untuk menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, oleh sebab itu strategi harus dikendalikan dan dievaluasi. Pemahaman strategis dan berpikir strategik timbul sebagai konsekuensi logis arsitektur perencanaan pembangunan daerah yang dipisahkan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, sekaligus menerjemahkan visi dan misi kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih kedalam rencana kerja yang dapat diaplikasikan.
2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional.

Urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif mengenai bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dapat mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

Berikut disajikan tabel uraian visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023:

Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Kabupaten Purwakarta

Tujuan		Sasaran		Strategi	
Visi: Mewujudkan Purwakarta Istimewa					
Misi I: Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial					
Tujuan 1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional dan Berbudaya	Sasaran 1.1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa	Strategi 1.1.1	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan
				Strategi 1.1.2	Meningkatkan Budaya Baca Masyarakat
				Strategi 1.1.3	Meningkatkan Apresiasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal
				Strategi 1.1.4	Meningkatkan Kerukunan Serta Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
		Sasaran 1.2	Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga	Strategi 1.2.1	Meningkatkan Peran Serta Pemuda dan Pemasyarakatan Olah Raga Pada Masyarakat
		Sasaran 1.3	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Strategi 1.3.1	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
Tujuan 2	Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Sasaran 2.1	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	Strategi 2.1.1	Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan
		Sasaran 2.2	Meningkatnya Aksesibilitas Kesempatan Kerja	Strategi 2.2.1	Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja
		Sasaran 2.3	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja	Strategi 2.3.1	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Yang Berafirmasi Gender
Misi II: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional					
Tujuan 1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif	Sasaran 1.1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Strategi 1.1.1	Meningkatkan Sistem Manajemen Urusan Pemerintahan

Tujuan		Sasaran		Strategi	
		Sasaran 1.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern	Strategi 1.2.1	Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi
Tujuan 2	Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berintegritas	Sasaran 2.1	Meningkatnya Pengawasan dan Integritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Strategi 2.1.1	Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
		Sasaran 2.2	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Strategi 2.2.1	Meningkatkan Potensi dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Misi III: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan					
Tujuan 1	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup	Sasaran 3.1	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah	Strategi 3.1.1	Meningkatkan Pemenuhan Layanan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan
		Sasaran 3.2	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup		
Tujuan 2	Mengembangkan Pariwisata Berwawasan Lingkungan	Sasaran 3.2	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Strategi 3.2.1	Mengembangkan Pariwisata Unggulan
Misi IV: Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa					
Tujuan 1	Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi, serta Daya Beli Masyarakat	Sasaran 4.1	Meningkatnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi	Strategi 4.1.1	Memperkuat Kelembagaan Usaha dan Meningkatkan Nilai Tambah Produk Serta Jangkauan Pemasaran
		Sasaran 4.2	Berkembangnya Sentra Industri Unggulan dan Perdagangan		
		Sasaran 4.3	Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif	Strategi 4.3.1	Meningkatkan Daya Tarik Investasi
		Sasaran 4.4	Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Daya Saing Pertanian, Perikanan dan Peternakan	Strategi 4.4.1	Meningkatkan Ketersediaan dan Distribusi Pangan
		Sasaran 4.5	Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Strategi 4.5.1	Mengembangkan Perekonomian Desa

Sumber: hasil analisis, 2019

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai pengaturan pelaksanaannya. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya.

Pada tabel dibawah memuat arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023. Arah kebijakan tersebut selaras dengan tema atau fokus pembangunan tahunan sebagaimana disajikan pada gambar berikut:

Gambar 6.1
Tema/Fokus Pembangunan 5 (Lima) Tahunan
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023



Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Purwakarta, 2018

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023

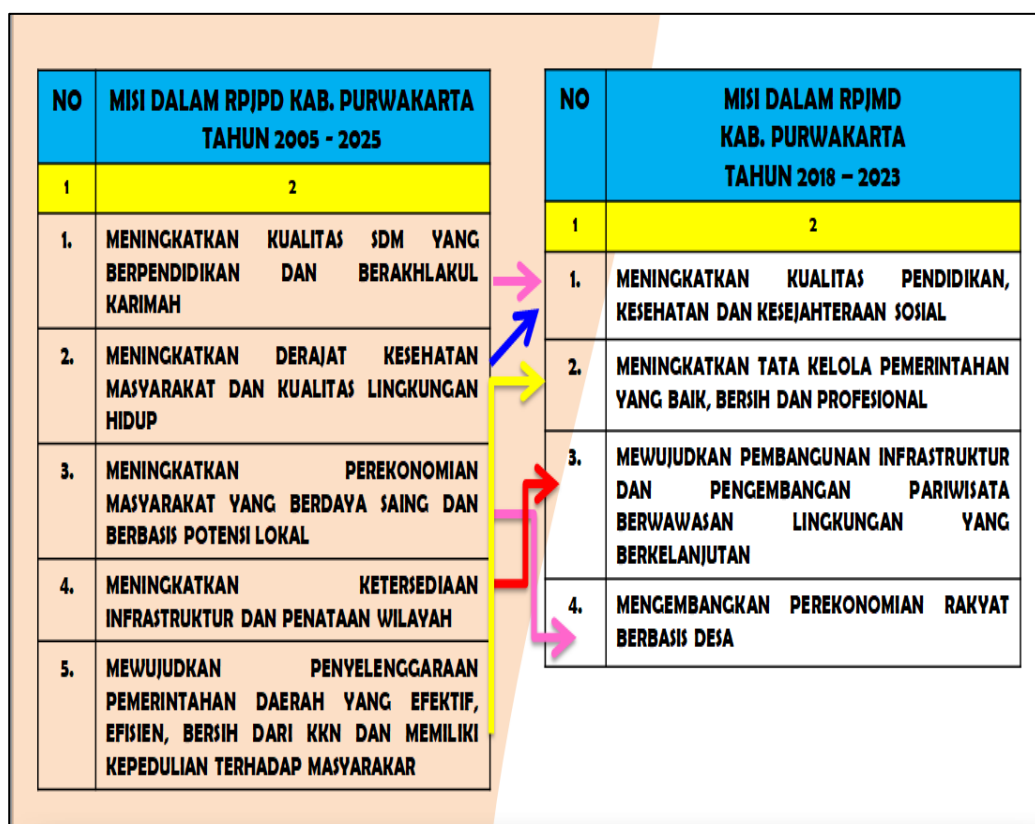
Arah Kebijakan				
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1 Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pendidikan Kesetaraan	1 Penyediaan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	1 Peningkatan Produksi Pertanian, Perikanan dan Peternakan	1 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1 Peningkatan Pelayanan dan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Sarana Bacaan
2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar	2 Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Bagi Masyarakat Miskin	2 Peningkatan Akses Ketersediaan Pangan dan Penganekaragaman Pangan Masyarakat	2 Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Purwakarta
3 Peningkatan Kualitas Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	3 Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik Yang Modern	3 Peningkatan Penerapan Standarisasi dan Sertifikasi Produk	3 Peningkatan Perlindungan Sosial dan Ekonomi Bagi Masyarakat Miskin	3 Peningkatan Pembinaan Keagamaan
4 Penguatan Kewirausahaan dan Peningkatan Akses Permodalan Usaha	4 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	4 Penguatan Peran Koperasi dalam Sistem Bisnis Pertanian	4 Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Sesuai Dengan Kebutuhan Pasar dan Perlindungan Ketenagakerjaan	4 Peningkatan Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan
5 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	5 Peningkatan Pengelolaan Air Bersih	5 Penguatan Kewirausahaan dan Peningkatan Akses Permodalan Usaha	5 Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa Dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Iptek	5 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang

Arah Kebijakan					
Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
6	Pembangunan, Pengembangan, dan Perbaikan Ruas-Ruas Jalan Strategis	6	Peningkatan dan Penguatan Destinasi Pariwisata Berbasis Alam, Buatan dan Budaya	6	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah
7	Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi Berbasis Partisipasi Masyarakat	7	Peningkatan Pengelolaan Persampahan	7	Penataan Jalan Lingkungan
8	Meningkatkan dan Memeratakan Pelayanan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	8	Pengembangan Penggunaan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Untuk Pelayanan Publik	8	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
9	Pengintensifan Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	9	Penataan Sistem Regulasi Perundang-Undangan Secara Tertib dan Efektif		
10	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	10	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan		
		11	Penguatan Kebijakan dan Implementasi Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara		

Sumber: hasil analisis, 2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Purwakarta. Gambar dibawah menunjukkan bahwa 4 (empat) misi RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 memiliki keterkaitan dengan 5 (lima) misi dalam RPJPD Kabupaten Purwakarta.

Gambar 6.2
Keterkaitan Janji Kepala Daerah
Dengan Program Prioritas Pembangunan
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023



Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Purwakarta, 2018

Selanjutnya, dalam melaksanakan keempat misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 maka ditetapkan beberapa program prioritas kepala daerah. Program prioritas kepala daerah tersebut dimanifestasikan dalam bentuk belanja tidak langsung maupun belanja langsung yaitu berupa program perangkat daerah. Keterkaitan antara Program Prioritas Pembangunan yang telah

dirumuskan dalam Janji Bupati dan Wakil Bupati yaitu 9 Langkah Melanjutkan Purwakarta Istimewa dengan program perangkat daerah, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.3
Keterkaitan Janji Kepala Daerah
Dengan Program Prioritas Pembangunan
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

9 LANGKAH MELANJUTKAN PURWAKARTA ISTIMEWA		PENJABARAN 9 LANGKAH MELANJUTKAN PURWAKARTA ISTIMEWA		PROGRAM PERANGKAT DAERAH		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	
LANGKAH 1:							
1	Pelayanan pendidikan terintegrasi dengan pemerintah provinsi dan pusat melalui program satu desa satu smp dan satu SMA/SMK berbasis pemahaman Al-Qur'an dan Kitab Kuning, serta penambahan layanan angkutan sekolah gratis untuk daerah prioritas yang disesuaikan dengan rasio jumlah siswa pada setiap desa/kelurahan	1	Pelayanan pendidikan terintegrasi dengan pemerintah provinsi dan pusat melalui program satu desa satu smp berbasis pemahaman Al-Qur'an dan Kitab Kuning, serta penambahan layanan angkutan sekolah gratis untuk daerah prioritas yang disesuaikan dengan rasio jumlah siswa pada setiap desa/kelurahan (SMA/SMK sudah menjadi kewenangan provinsi)	1	Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	1	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
LANGKAH 2:							
2	Pola pengembangan pelayanan kesehatan gratis dan terintegrasi dengan penyiapan satu desa/kelurahan minimal satu ambulance, satu perawat, satu dokter dan satu bidan berbasis online serta jaminan perawatan kesehatan di sembilan rumah sakit pemerintah dan swasta bagi seluruh warganya	1	Pola pengembangan pelayanan kesehatan gratis dan terintegrasi	1	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	1	Cakupan pelayanan kesehatan dasar penduduk miskin (%)
		2	Jaminan perawatan kesehatan di sembilan rumah sakit pemerintah dan swasta bagi seluruh warganya			2	Persentase penduduk miskin memiliki jaminan kesehatan (%)
		3	Penyiapan satu desa/kelurahan minimal satu ambulance	2	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana	1	Persentase sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

9 LANGKAH MELANJUTKAN PURWAKARTA ISTIMEWA		PENJABARAN 9 LANGKAH MELANJUTKAN PURWAKARTA ISTIMEWA		PROGRAM PERANGKAT DAERAH		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	
					puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya		dengan kondisi baik (%)
		4	Satu perawat, satu dokter dan satu bidan berbasis online	3	Program pengembangan sumber daya kesehatan	1	Persentase sumber daya kesehatan yang teregistrasi (%)
LANGKAH 3:							
3	Pengembangan pola infrastruktur pertanian primer, sekunder dan tersier secara terintegrasi berupa pembangunan irigasi, bendungan kecil dan bendungan besar serta pengembangan produk asuransi produk pertanian, peternakan dan perikanan	1	Pengembangan pola infrastruktur pertanian primer, sekunder dan tersier secara terintegrasi berupa pembangunan irigasi, bendungan kecil dan bendungan besar	1	Program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian	1	Pembangunan /rehabilitasi jaringan irigasi tersier (unit)
						2	Pembangunan sumber-sumber air (unit)
						3	Jalan usaha tani yang akan terbangun (unit)
						4	Bantuan alat dan mesin pertanian (unit)
		2	Pengembangan produk asuransi produk pertanian, peternakan dan perikanan	2	Program pengembangan, pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	1	Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik (km)
						1	Kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian (kelompok)
				1	Program peningkatan kesejahteraan petani	2	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan pemerintah (kelompok)
						1	Jumlah kelompok usaha peternakan (kelompok)
						2	Jumlah kelompok peternakan yang mengikuti lomba (kelompok)
				2	Program kesejahteraan peternakan	1	Jumlah kelompok usaha peternakan (kelompok)
						2	Jumlah kelompok peternakan yang mengikuti lomba (kelompok)

9 LANGKAH MELANJUTKAN PURWAKARTA ISTIMEWA		PENJABARAN 9 LANGKAH MELANJUTKAN PURWAKARTA ISTIMEWA		PROGRAM PERANGKAT DAERAH		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	
						3	Jumlah peternak yang mengikuti magang/study banding/kursus/pelatihan (orang)
LANGKAH 4:							
4	Pengembangan desa berbasis teknologi dengan mendorong tumbuhnya produk unggulan melalui program satu desa satu produk unggulan, serta pengembangan kelembagaan usaha desa melalui program investasi desa, baik yang dikelola oleh badan usaha milik desa maupun lembaga usaha lainnya	1	Pengembangan desa berbasis teknologi dengan mendorong tumbuhnya produk unggulan melalui program satu desa satu produk unggulan	1	Program penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan menengah	1	Terbinanya P2WKSS (desa)
						2	Keikutsertaan dalam pameran kerajinan daerah (kegiatan)
						3	GKM industri kecil yang terbina (unit)
						4	Tersedianya lokasi sarana /prasarana promosi dan penjualan produk industri kecil (unit)
						5	Terciptanya desain kemasan produksi (desain)
						6	Terciptanya desain produk keramik yang standar/spesifik (berkarakter) (desain)
						7	Tersedianya data potensi dan informasi industri (buku)
						8	Jumlah pengrajin sentra industri keramik yang terbina (pengrajin)
						9	Jumlah pengunjung ke sentra industri keramik dan gerabah
		2	Pengembangan kelembagaan usaha desa melalui program investasi desa, baik yang dikelola oleh badan usaha milik desa	2	Program pemberdayaan ekonomi desa	1	Persentase bumdesa/bumdesa bersama yang dibina (%)
						2	Persentase bumdesa/bumdesa bersama yang

9 LANGKAH MELANJUTKAN PURWAKARTA ISTIMEWA		PENJABARAN 9 LANGKAH MELANJUTKAN PURWAKARTA ISTIMEWA		PROGRAM PERANGKAT DAERAH		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	
			maupun lembaga usaha lainnya				mendapatkan pendampingan /penyertaan modal usaha (%)
						3	Persentase potensi ekonomi desa yang dikembangkan (%)
LANGKAH 5:							
5	Optimalisasi pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan berbasis industri dan pariwisata melalui penambahan lebar jalan kabupaten dari 6 meter menjadi 9-12 meter dan dilengkapi dengan penerangan jalan umum (pju) yang berestetika serta penataan seluruh jalan lingkungan dengan pengelolaan teknologi jalan yang ramah lingkungan, pengembangan bangunan pemerintah, mesjid, mushola, madrasah, majelis taklim dan rumah ibadah, rumah rakyat miskin, penambahan ruang terbuka hijau dan pusat kebugaran publik seperti sport center, lapang sepakbola dan sarana olahraga lainnya di setiap desa/kelurahan, serta penataan dan pengembangan jaringan listrik dan air bersih perkotaan dan perdesaan	1	Optimalisasi pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan berbasis industri dan pariwisata melalui penambahan lebar jalan kabupaten dari 6 meter menjadi 9-12 meter dilengkapi dengan penerangan jalan umum (PJU) yang berestetika	1	Program pembangunan jalan dan jembatan	1	Panjang ruas jalan baru (km)
						2	Jumlah jembatan baru (titik)
						1	Persentase panjang jalan yang direhabilitasi (%)
						2	Persentase jembatan rusak yang diperbaiki (%)
						1	Persentase PJU dalam kondisi baik (%)
						1	Persentase lampu hias dalam kondisi baik (%)
						2	Persentase ruang publik yang direvitalisasi/dibangun (%)
						1	Persentase rumah tidak layak huni yang diperbaiki (%)
						2	Persentase rusunawa yang difasilitasi pembangunannya (%)

9 LANGKAH MELANJUTKAN PURWAKARTA ISTIMEWA		PENJABARAN 9 LANGKAH MELANJUTKAN PURWAKARTA ISTIMEWA		PROGRAM PERANGKAT DAERAH		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	
		4	Pusat kebugaran publik seperti sport center, lapang sepakbola dan sarana olahraga lainnya di setiap desa/kelurahan		Program pembangunan dan/ peningkatan sarana prasarana olahraga		Persentase sarana prasarana olahraga yang dibangun/ ditingkatkan (%)
		5	Penataan dan pengembangan jaringan listrik dan air bersih perkotaan dan perdesaan (jaringan listrik sudah menjadi kewenangan provinsi)	1	Program penyediaan dan pengolahan air baku		Persentase unit pengolahan air baku yang terbangun (%)
				2	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum	1	Persentase sarana prasarana air bersih komunal yang dibangun (%)
						2	Persentase saluran air bersih perpipaan yang dibangun (%)
LANGKAH 6:							
6	Pengembangan pariwisata berbasis pedesaan melalui program pengembangan kampung budaya, pendidikan pariwisata berbasis alam dan penyiapan sawah-sawah abadi dan sumber air abadi oleh pemerintah daerah yang dikelola oleh masyarakat serta jaminan kesejahteraan publik melalui pembagian beras premium bagi warga miskin melalui program atm beras	1	Pengembangan pariwisata berbasis pedesaan melalui program pengembangan kampung budaya, pendidikan pariwisata berbasis alam	1	Program pengembangan kepariwisataan	1	Persentase daya tarik wisata yang dikembangkan
						2	Persentase jasa usaha pariwisata berstandar baik/tersertifikasi jasa usaha (%)
						3	Persentase lembaga dan sdm pariwisata meningkat tersertifikasi (%)
			2	Program promosi wisata daerah		Jumlah event promosi yang diikuti/ diselenggarakan (jumlah event)	
			3	Program pengembangan ekonomi kreatif		Jumlah komunitas ekonomi kreatif (komunitas)	
		2	Penyiapan sawah-sawah abadi dan sumber air abadi oleh pemerintah daerah yang dikelola oleh masyarakat	1	Program peningkatan produksi dan mutu hasil tanaman pangan	1	Produksi padi (ton)
						2	Produksi kacang-kacangan (ton)

9 LANGKAH MELANJUTKAN PURWAKARTA ISTIMEWA		PENJABARAN 9 LANGKAH MELANJUTKAN PURWAKARTA ISTIMEWA		PROGRAM PERANGKAT DAERAH		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	
					3	Produksi umbi-umbian (ton)	
					4	Penerapan sawah organik (ha)	
					5	Kehilangan hasil (%)	
		2	Program pembangunan jaringan irigasi	1	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik		
		3	Jaminan kesejahteraan publik melalui pembagian beras premium bagi warga miskin melalui program ATM beras	1	Program fasilitasi kemasyarakatan dan keagamaan	1	Persentase pelaksanaan fasilitasi kemasyarakatan dan keagamaan (%)
LANGKAH 7:							
7	Pengembangan pendidikan profesional bagi siswa di sekitar industri melalui program sekolah manager setingkat diploma dan S1, serta pengembangan beasiswa bagi para calon doktor di bidang studi agama	1	Pengembangan pendidikan profesional bagi siswa di sekitar industri melalui program sekolah manager setingkat diploma dan S1	1	Program pendidikan non formal	1	Meningkatnya kualitas pendidikan non formal
		2	Pengembangan beasiswa bagi para calon doktor di bidang studi agama	1	Program fasilitasi kemasyarakatan dan keagamaan	1	Persentase pelaksanaan fasilitasi kemasyarakatan dan keagamaan (%)
LANGKAH 8:							
8	Peningkatan kesejahteraan melalui Belanja aparatur desa, RT, RW, linmas, guru ngaji, karang taruna, BPD, bamusdes, imam masjid, muadzin, bilal, khotib, melalui program asuransi kesehatan, kecelakaan kerja dan hari tua	1	Pembiayaannya melalui Belanja Tidak Langsung (belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa)		-		-
LANGKAH 9:							
9	Pengembangan iklim investasi melalui pembangunan pusat pelayanan perijinan terpadu dengan pembangunan mall layanan perijinan yang	1	Pengembangan iklim investasi melalui pembangunan pusat pelayanan perijinan terpadu dengan	1	Program pengembangan layanan perizinan terpadu	1	Persentase jumlah ijin yang dapat diselesaikan (%)
						2	Persentase jumlah ijin yang divalidasi (%)

9 LANGKAH MELANJUTKAN PURWAKARTA ISTIMEWA		PENJABARAN 9 LANGKAH MELANJUTKAN PURWAKARTA ISTIMEWA		PROGRAM PERANGKAT DAERAH		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	
berstandar nasional untuk layanan dasar publik seperti penerbitan izin investasi, imb, ktp, akte kelahiran, surat nikah dan layanan publik lainnya serta menumbuhkembangkan umkm melalui program stimulus permodalan, pengembangan inovasi produk, pemasaran dan revitalisasi pasar tradisional yang ramah lingkungan		pembangunan mall layanan perijinan yang berstandar nasional untuk layanan dasar publik seperti penerbitan izin investasi, imb, ktp, akte kelahiran, surat nikah dan layanan publik lainnya	2	Program pembangunan dan penataan ruang publik		Jumlah ruang publik yang direvitalisasi / dibangun (unit)	
	2	Menumbuhkembangkan umkm melalui program stimulus permodalan, pengembangan inovasi produk, pemasaran dan revitalisasi pasar tradisional yang ramah lingkungan	1	Program peningkatan daya saing UMKM	1	Jumlah pameran yang diikuti oleh UMKM (<i>event</i>)	
					2	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas bantuan (unit)	
					3	Jumlah UMKM yang bermitra dengan perbankan, non perbankan dan lembaga lainnya (unit)	
					4	Jumlah UMKM yang teridentifikasi mengikuti sosialisasi dan pelatihan (unit)	
			2	Program pengembangan perdagangan dalam negeri	1	Jumlah pasar tradisional / rakyat yang direvitalisasi (unit)	
					2	Persentase capaian target retribusi pasar (%)	
					3	Jumlah pengunjung pasar tradisional (orang)	
					4	Tertatanya pedagang kaki lima dan asongan (lokasi)	

Sumber: hasil analisis, 2019

Dalam rangka menjabarkan sasaran pembangunan, maka telah ditetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Selanjutnya, dipilih program pembangunan daerah yang tepat untuk mencapai sasaran sesuai strategi dan arah kebijakan. Program pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Secara lebih jelasnya, program pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6.4
Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial							293.52 8.401.432		291.46 0.840.420		300.97 9.480.500		304.22 5.493.990		310.78 3.833.883		1.500.9 78.050.226		
Tujuan: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional dan Berbudaya			Indeks Pembangunan Manusia	Poin	69,28	69.84	70.40	286.05 4.526.432	70,97	282.37 0.677.920	71,54	291.61 6.613.125	72,12	294.79 2.745.879	72,70	301.16 2.430.810	71,70	1.455.9 96.994.166	
Sasaran: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa		1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,74	7,91	8,08	167.02 1.603.000	8,25	168.94 1.479.920	8,43	174.60 4.849.539	8,62	176.65 9.306.963	8,80	180.66 6.323.116	8,80	867.893 .562.538	
		2	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,89	12,06	12,24		12,42		12,60		12,78		12,97		12,97		
		3	Persentase Seni dan Budaya Yang Dibina dan Dilestarikan	Persen	70	75	80		85		90		95		100		100		
		4	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	70	75	80		85		90		95		100		100		
Program:																			
1.01.1.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun						114.380 .480.000		115.584 .580.800		119.543 .142.148		121.049 .665.535		123.944 .488.859		594.502. 357.341	Dinas Pendidikan	
		1	Persentase Sekolah Dasar yang terakreditasi	Persen	0,00	57,35	67,16		76,96		86,76		96,57		96,57		96,57		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2	Persentase Sekolah Menengah Pertama yang terakreditasi	Person	0,00	57,41	63,89		70,37		76,85		83,33		89,81		89,81		
1.01.1.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini		Persentase Lembaga PAUD yang terakreditasi	Person	10,40	24,56	35,62	746.400.000	46,68	850.000.000	57,74	877.200.000	68,81	885.972.000	79,87	903.691.440	79,87	4.263.263.440	Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga						9.757.846.000		9.818.300.000		10.132.485.600		10.233.810.456		10.438.486.665		50.380.928.721	Dinas Pendidikan	
		1	Persentase Guru yang berkualifikasi S1 (%)	Person	93,78	95,32	95,99		96,66		97,34		98,02		98,70		98,70		
		2	Persentase Guru yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan	Person			1,86		1,86		1,86		1,86		1,86		1,86		
1.01.1.01.01.18	Program Pendidikan Non Formal		Persentase Lembaga Dikmas yang terakreditasi	Person		8,14	16,28	725.000.000	24,42	798.750.000	32,56	824.310.000	40,70	832.553.100	48,84	849.204.162	48,84	4.029.817.262	Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan						40.811.877.000		41.367.349.120		42.691.104.292		43.118.015.335		43.980.375.641		211.968.721.388	Dinas Pendidikan	
		1	Angka Partisipasi Murni Pendidikan Anak Usia Dini (%)	Person	50,07	61,25	61,84		62,46		63,09		63,72		64,35		64,35		
		2	Angka Partisipasi Murni	Person	99,51	99,52	99,53		99,55		99,57		99,59		99,61		99,61		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			SD/MI/Paket A (%)																
		3	Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/Paket B (%)	Person	99,72	99,72	99,74		99,76		99,78		99,80		99,82		99,82		
		4	Persentase Kondisi Ruang Kelas SD dalam keadaan baik	Person	18,91	17,25	18,46		19,75		21,13		22,61		24,19		24,19		
		5	Persentase Kondisi Ruang Kelas SMP dalam keadaan baik	Person	31,47	32,00	34,24		36,64		39,20		41,95		44,88		44,88		
2.17.2.18.01.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan							600.000.000									600.000.000		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	8.000	8.000	8.000										8.000		
		2	Jumlah Anggota Perpustakaan Per Tahun	Orang	39.500	39.500	39.500										39.500		
		3	Jumlah Titik Layanan Perpustakaan Keliling	Titik	103	103	103										103		
		4	Jumlah Perpustakaan Binaan	Unit	215	215	215										215		
		5	Jumlah Buku Perpustakaan	Buah	38.000	38.000	38.000										38.000		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.16.2.13.01.19	Program Pelestarian Budaya									522.500.000		536.607.500		539.290.538		550.076.348		2.148.474.386	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
		1	Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	88,89	88,89	88,89		88,89		100		100		100		100		
		2	Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Persen			50		50		50		60		60		60		
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga			Persentase Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional	Persen	15	20	25	9.525.000.000	30	9.433.750.000	35	9.688.461.250	40	9.736.903.556	55	9.931.641.627	55	48.315.756.434	
Program:																			
2.13.2.13.01.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan		Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen			20	725.000.000	30	866.250.000	40	889.638.750	85	894.086.944	60	911.968.683	60	4.286.944.376	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2.13.2.13.01.20	Program Pembinaan dan Pemasaran Olahraga							8.800.000.000		8.375.000.000		8.601.125.000		8.644.130.625		8.817.013.238		43.237.268.863	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																			Kebudayaan
		1	Cakupan pembinaan olahraga	Person		19,61	19,61		20,00		19,61		23,53		23,53		23,53		
		2	Cakupan pembinaan atlet muda	Person		11	11		11		13		13		15		15		
2.13.2.13.01.22	Program Pembinaan Kepemudaan, Keolahragaan dan Keagamaan								192.500.000		197.697.500		198.685.988		202.659.707		791.543.195		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
		1	Cakupan pembinaan kepemudaan	Person		20	20		20		20		20		20		20		
		2	Cakupan pembinaan keagamaan	Person		20	20		20		20		20		20		20		
Sasaran: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat			Angka Harapan Hidup	Tahun	70,42	70,58	70,71	109.507.923.432	70,85	103.995.448.000	70,98	107.323.302.336	71,11	108.396.535.359	71,24	110.564.466.067	71,24	539.787.675.194	
Program:																			
1.02.1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase pencapaian target SPM sesuai wilayah kerja	Person	58,33	58,33	66,67	17.116.000.000	66,67	17.400.000.000	75,00	17.956.800.000	75,00	18.136.368.000	83,33	18.499.095.360	83,33	89.108.263.360	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat							1.225.485.000		1.020.999.000		1.053.670.968		1.064.207.678		1.085.491.831		5.449.854.477	Dinas Kesehatan
		1	Cakupan pelayanan anak balita	Person	68,72	70,13	71,54		74,35		78,57		83,03		85,99		85,99		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	Cakupan pelayanan bayi	Person	98,35	98,43	98,80		98,80		98,80		98,80		98,80		98,80		
1.02.1.02.01.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat							380.000.000		464.000.000		478.848.000		483.636.480		493.309.210		2.299.793.690	Dinas Kesehatan
		1	Cakupan Sarana Sanitasi dasar (air Bersih, Rumah Sehat, Jamban Keluarga dan SPAL)	Person	75,73	75,79	75,83		75,94		75,95		75,96		75,97		75,97		
		2	Cakupan TTU dan TPM Yang Memenuhi Syarat	Person	54,43	55,61	57,09		58,28		59,14		61,24		61,83		61,83		
1.02.1.02.01.28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan		Persentase fasilitas kesehatan yang dibina	Person	20,00	24,00	31,20	350.000.000	43,20	558.000.000	53,60	575.856.000	63,20	581.614.560	69,60	593.246.851	69,60	2.658.717.411	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak							3.491.000.000		2.300.064.000		2.373.666.048		2.397.402.708		2.445.350.763		13.007.483.519	Dinas Kesehatan
		1	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	Person	98,68	99,06	99,06		99,09		99,14		99,19		99,25		99,25		
		2	Cakupan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas Dengan Komplikasi Yang Ditangani	Person	94,95	70,13	70,14		72,69		75,23		77,77		82,86		82,86		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Bidan Atau Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	Person	98,68	98,66	98,88		99,04		99,14		99,57		99,62		99,62		
1.02.1.02.01.33	Program Promosi Kesehatan		Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Individu, Keluarga dan Masyarakat Dalam Menumbuhkan Perilaku Hidup Sehat dan Mengembangkan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat	Person	80	80	80	1.850.000.000								80	1.850.000.000	Dinas Kesehatan	
1.02.1.02.01.34	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC; dan Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	Person	80	80	80	3.182.224.000								80	3.182.224.000	Dinas Kesehatan	
1.02.1.02.01.35	Program Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan		Persentase puskesmas yang terakreditasi minimal madya	Person	75,00	80,00	90,00	3.273.240.000	90,00	2.297.385.000	95,00	2.370.901.320	100,00	2.394.610.333	100	2.442.502.540	100	12.778.639.193	Dinas Kesehatan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.02.1.02.01.39	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan		Persentase tenaga kesehatan yang memiliki SIP yang masih berlaku	Person	78,90	80,17	83,54		85,23	855.000.000	89,03	882.360.000	93,25	891.183.600	100	909.007.272	100	3.537.550.872	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya		Persentase sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya dengan kondisi baik	Person	38,46	46,15	46,15	8.717.299.000	53,85	8.900.000.000	63,08	9.184.800.000	69,23	9.276.648.000	75,38	9.462.180.960	75,38	45.540.927.960	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin							69.922.675.432		70.200.000.000		72.446.400.000		73.170.864.000		74.634.281.280		360.374.220.712	Dinas Kesehatan
		1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	Person	100	100	100		100		100		100		100		100		
		2	Persentase kepesertaan Penduduk Miskin yang memiliki Jaminan Kesehatan	Person	100	100	100		100		100		100		100		100		
Tujuan: Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		1	Angka Kemiskinan	Persen	9,06	8,88	8,70	7.473.875.000	8,53	9.090.162.500	8,36	9.362.867.375	8,19	9.432.748.111	8,03	9.621.403.073	8,03	44.981.056.060	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,11	8,93	8,75		8,57		8,40		8,23		8,07		8,07		
Sasaran: Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan			Angka Kemiskinan	Persen	9,06	8,88	8,70	3.303.875.000	8,53	4.478.912.500	8,36	4.613.279.875	8,19	4.659.412.674	8,03	4.752.600.927	8,03	21.808.080.976	
Program:																			
1.06.1.06.01.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		Persentase Fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya yang diberdayakan	Persen			85	125.000.000	90	126.912.500	90	130.719.875	90	132.027.074	100	134.667.615	100	649.327.064	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	Lembaga			30	311.375.000	30	500.000.000	30	515.000.000	30	520.150.000	30	530.553.000	30	2.377.078.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		Persentase Capaian Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persen			90	1.887.500.000	90	1.815.000.000	85	1.869.450.000	90	1.888.144.500	90	1.925.907.390	90	9.386.001.890	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.06.1.06.01.17	Program Pembinaan Anak Terlantar		Jumlah Anak terlantar yang dibina	Orang			20	30.000.000	20	50.000.000	20	51.500.000	20	52.015.000	20	53.055.300	20	236.570.300	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1.04.1.03.02.15	Program Pengembangan Perumahan							950.000.000		1.987.000.000		2.046.610.000		2.067.076.100		2.108.417.622		9.159.103.722	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
		1	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Diperbaiki	Unit	987	1345	1840		2000		2000		2000		2000		2000		
		2	Jumlah Pendirian Kawasan Rusunawa Yang Difasilitasi	Jumlah Mena	1	1	2		1		1		1		1		1		
Sasaran: Meningkatnya Aksesibilitas Kesempatan Kerja			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)		45,81	46,11	46,54	1.370.000.000	46,95	1.769.500.000	47,35	1.822.585.000	47,75	1.831.697.925	48,14	1.868.331.884	48,14	8.662.114.809	
Program:																			
2.01.2.01.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja		Persentase Calon Tenaga Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	Persen	42,56	40,38	50	160.000.000	60	259.500.000	70	267.285.000	80	268.621.425	90	273.993.854	90	1.229.400.279	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.01.2.01.01.19	Program Perluasan Kesempatan Kerja		Persentase Pelatihan Kewirausahaan	Persen	23,81	52,85	60	50.000.000	70	100.000.000	75	103.000.000	85	103.515.000	95	105.585.300	95	462.100.300	Dinas Ketenagakerjaan dan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																			Transmigrasi
2.01.2.01.01.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Person	100,00	42,86	50	290.000.000	65	360.000.000	80	370.800.000	95	372.654.000	100	380.107.080	100	1.773.561.080	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.01.2.01.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja							870.000.000		1.050.000.000		1.081.500.000		1.086.907.500		1.108.645.650		5.197.053.150	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
		1	Persentase Pelatihan Berbasis Kompetensi	Person	41,27	46,66	60,65		75,00		85,55		95		100		100		
		2	Persentase Pelatihan Berbasis Masyarakat	Person	34,92	47,15	50		60		70		80		90		90		
Sasaran: Meningkatnya PEMBERDAYAAN dan PERLINDUNGAN Perempuan, Anak dan Remaja			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		9,11	8,93	8,75	2.800.000.000	8,57	2.841.750.000	8,40	2.927.002.500	8,23	2.941.637.513	8,07	3.000.470.263	8,07	14.510.860.275	
Program:																			
1.06.1.06.01.23	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		Tingkat Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Person			90	675.000.000	90	742.500.000	90	764.775.000	90	768.598.875	90	783.970.853	90	3.734.844.728	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.06.1.06.01.25	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan		Persentase Peran serta Gender dalam Pembangunan	Persen			85	425.000.000	85	433.350.000	85	446.350.500	85	448.582.253	90	457.553.898	90	2.210.836.650	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.24	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persen			85	1.700.000.000	85	1.665.900.000	90	1.715.877.000	90	1.724.456.385	100	1.758.945.513	100	8.565.178.898	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Misi 2: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional								11.403.524.300		13.473.000.000		13.877.190.000		13.946.575.950		14.225.507.469		66.925.797.719	
Tujuan 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif			Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	0	0	45	4.115.524.300	50	5.727.000.000	55	5.898.810.000	55	5.928.304.050	60	6.046.870.131	60	27.716.508.481	
Sasaran: Meningkatkan Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	0	0	45	4.115.524.300	50	5.727.000.000	55	5.898.810.000	55	5.928.304.050	60	6.046.870.131	60	27.716.508.481	
		2	Nilai SAKIP Kab. Purwakarta	Poin	CC	B	B		B		BB		BB		A		A		
		3	Nilai LPPD Kab. Purwakarta	Poin	31,3	35	35		35		35		35		35		35		
Program:																			
4.01.4.01.03.38	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin			45		50	787.500.000	55	811.125.000	55	815.180.625	60	831.484.238	60	3.245.289.863	Sekretariat Daerah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi																		
4.01.4.01.03.09	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan							1.050.000.000										1.050.000.000	Sekretariat Daerah
		1	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan:																
			- Perda	Persen	100	100	100										100		
			- Perbup	Persen	100	100	100										100		
			- Kepbup	Persen	100	100	100										100		
		2	Persentase fasilitasi bantuan hukum	Persen	100	100	100										100		
		3	Persentase sosialisasi produk hukum	Persen	100	100	100										100		
4.01.4.01.03.43	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah									1.260.000.000		1.297.800.000		1.304.289.000		1.330.374.780		5.192.463.780	Sekretariat Daerah
		1	Capaian Nilai Laporan Penyelenggara n Pemerintahan Daerah (LPPD)	Poin	31271	3,5	3,5		3,5		3,5		3,5		3,5		3,5		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	Persentase kerjasama daerah yang sesuai dengan kebutuhan	Persen	100 MOU/PKS/100 %	100 MOU/PKS/100 %	100		100		100		100		100		100		
		3	Persentase fasilitasi naskah kerjasama daerah	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100		
		4	Persentase identifikasi dan inventarisasi wilayah perbatasan dan rupa bumi buatan dan alam yang terdokumentasikan	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100		
4.03.4.03.01.21	Program perencanaan pembangunan daerah		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan	Persen	100	100	100	3.065.524.300	100	1.762.500.000	1.815.375.000	100	1.824.451.875	100	1.860.940.913	100	10.328.792.088	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
4.03.4.03.01.27	Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Ekonomi		Persentase kesesuaian capaian program dan kegiatan PD terhadap capaian RPJMD dan Renstra OPD lingkup Bidang Ekonomi	Persen	80	80	80		83	735.000.000	757.050.000	85	760.835.250	87	776.051.955	89	3.028.937.205	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.03.4.03.01.28	Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah		Persentase kesesuaian capaian program dan kegiatan PD terhadap capaian RPJMD dan Renstra OPD lingkup Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah	Person	80	80	80		83	432.000.000	85	444.960.000	87	447.184.800	89	456.128.496	89	1.780.273.296	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.29	Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Sosial dan Budaya		Persentase kesesuaian capaian program dan kegiatan PD terhadap capaian RPJMD dan Renstra OPD lingkup Bidang Sosial dan Budaya	Person	80	80	80		83	405.000.000	85	417.150.000	87	419.235.750	89	427.620.465	89	1.669.006.215	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.30	Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat		Persentase kesesuaian capaian program dan kegiatan PD terhadap capaian RPJMD dan Renstra OPD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Person	80	80	80		83	345.000.000	85	355.350.000	87	357.126.750	89	364.269.285	89	1.421.746.035	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik		1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap	Poin	73	75	75		76		77		78		79		79		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
yang Efektif dan Modern			Pelayanan Publik																
		2	Persentase aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikembangkan	Persen	88	98	100		100		100		100		100		100		
Program:																			
2.12.2.12.01.18	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perijinan							600.000.000										600.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1	Persentase Kepastian dan Ketepatan Biaya Pelayanan Perzinan	Perse n	100	100	100										100		
		2	Persentase Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Perse n	79,50	80	80										80		
		3	Persentase Peningkatan Proses Pengolahan Pelayanan Administrasi Perijinan	Perse n	95	95	95										95		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4	Persentase Target Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perjinan	Person	100	100	100										100		
		5	Persentase Peningkatan Sistem Informasi dan Pengembangan Database Pelayanan Perjinan	Person	90	100	100										100		
2.12.2.12.01.21	Program Pengembangan Layanan Perijinan Terpadu		Persentase jumlah izin yang dapat diselesaikan	Person		61,24			80	450.000.000	85	462.150.000	90	464.460.750	95	473.749.965	95	1.850.360.715	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.17.2.18.01.17	Program Peningkatan Layanan Perpustakaan									400.000.000		410.800.000		412.854.000		421.111.080		1.644.765.080	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		1	Laju pengunjung perpustakaan	Person		81,5	4,9		4,70		4,50		4,30		4		4		
		2	Laju anggota perpustakaan	Person		57	22,9		18,6		15,70		13,50		12		12		
		3	Tingkat koleksi buku perpustakaan	Person		5	5		5		5		5		5		5		
		4	Persentase jumlah koleksi buku yang dibaca	Person		0	5		5		5		5		5		5		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		5	Persentase titik layanan perpustakaan keliling	Person	47	79	49		100		100		100		100		100		
		6	Tingkat koleksi buku perpustakaan digital	Person	0	100	0		16,5		14,5		12,4		11		11		
		7	Persentase jumlah koleksi buku perpustakaan digital yang dibaca	Person	0	0	19,8		16,5		14		12,4		11		11		
		8	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaan	Person	0	0	4		4		5		5		7		7		
2.18.2.18.01.19	Program Pembinaan, Pelestarian dan Pengembangan Kearsipan								510.000.000		523.770.000		526.388.850		536.916.627		2.097.075.477	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		1	Persentase pembinaan kearsipan OPD	Person	100	95,7	100		100		100		100		100		100		
		2	Tingkat penyelamatan arsip statis	Person	80,05	100	100		100		100		100		100		100		
		3	Tingkat pelestarian arsip statis	Person	1,15	1,75	1,75		1,75		1,75		1,75		1,75		1,75		
		4	Tingkat pemutakhiran Sistem Informasi Kearsipan	Person	0,6	0,05	22		27		27		27		27		27		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		5 Laju pengunjung diorama/museum kearsipan	Person	59,8	42,7	22,9		4,2		3,2		4,7		3,7		3,7		
2.10.2.10.01.25	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik								14.901.900.000		15.304.251.300		15.380.772.557		15.688.388.008		61.275.311.864	Dinas Komunikasi dan Informatika
		1 Persentase media informasi yang dimanfaatkan	Person	62	92			100		100		100		100		100		
		2 Persentase Publikasi program pembangunan daerah	Person	66	92			100		100		100		100		100		
		3 Persentase kegiatan Pemerintahan daerah yang didokumentasikan	Person	97	98			100		100		100		100		100		
		4 Persentase layanan Informasi dan pengaduan masyarakat yang tertangani	Person	79	93			100		100		100		100		100		
		5 Nilai Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Person	75	85			100		100		100		100		100		
2.06.2.06.01.15	Program Penataan Administrasi						4.025.607.000		65.000.000		66.755.000		67.088.775		68.430.551		4.292.881.326	Dinas Kependudukan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	si Kependudukan																		dan Pencatatan Sipil
		1	Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan :																
			- Tingkat Kepemilikan KTP Elektronik	Person	75	80	100		100		100		100		100		100		
			- Tingkat Kepemilikan Kartu Keluarga	Person	75	80	100		100		100		100		100		100		
		2	Tingkat Kesadaran Masyarakat	Person	20	25	50		100		100		100		100		100		
2.10.2.10.01.29	Program Pengembangan Aplikasi Informatika								1.538.903.520		1.580.453.915		1.588.356.185		1.620.123.308		6.327.836.928		Dinas Komunikasi dan Informatika
		1	Persentase layanan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikembangkan	Person	88	98			100		100		100		100		100		
		2	Persentase aplikasi SPBE yang sudah terintegrasi	Person	100	100			100		100		100		100		100		
		3	Persentase aplikasi SPBE yang dimanfaatkan masyarakat umum	Person	54	92			100		100		100		100		100		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.05.1.05.03.34	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi									337.500.000		347.625.000		351.101.250		358.123.275		1.394.349.525	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
		1	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan SDM sesuai kompetensi	Persen					100		100		100		100		100		
		2	Persentase tingkat pemenuhan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi	Persen					100		100		100		100		100		
1.05.1.05.03.36	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan									316.925.000		326.432.750		329.697.078		336.291.019		1.309.345.847	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
		1	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen					100		100		100		100		100		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	Persentase data / informasi tentang informasi dan resiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah / legal	Person					100		100		100		100		100		
		3	Persentase warga negara yang terlatih di kawasan rawan bencana	Person					9		22		35		48		48		
		4	Persentase tersedianya layanan Pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Person					100		100		100		100		100		
		5	Persentase peralatan perlindungan terhadap bencana dalam kondisi baik	Person					100		100		100		100		100		
		6	Persentase intansi terkait dalam penanggulangan bencana	Person					100		100		100		100		100		
1.05.1.05.03.37	Program Kedaruratan dan Logistik									240.000.000		247.200.000		249.672.000		254.665.440		991.537.440	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1	Persentase jumlah SDM yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Person					100		100		100		100		100		
		2	persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan di evakuasi terhadap kejadian bencana	Person					100		100		100		100		100		
		3	Persentase kecepatan response time kurang dari 24 jam untuk status darurat bencana	Person					100		100		100		100		100		
1.05.1.05.03.38	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1	Persentase dokumen penilaian kerusakan akibat bencana	Person					100	65.000.000	100	66.950.000	100	67.619.500	100	68.971.890	100	268.541.390	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
		2	Persentase bangunan yang di rehabilitasi pasca bencana	Person					100		100		100		100		100		
1.05.1.05.03.28	Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		Tingkat Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Person			100	1.025.000.000									100	1.025.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran / Program Pembangu nan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Satu an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangk ung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.05.1. 05.01. 23	Program Pemelihara an Trantibmas dan Penegakan Peraturan Daerah		Frekuensi Penertiban Trantibmas; Frekuensi Pengendalian Trantibmas dan Frekuensi Penertiban Trantibmas	Kali	10 Kali; 45 Kali dan 65 Kali	10 Kali; 45 Kali dan 65 Kali	10 Kali; 45 Kali dan 65 Kali	695.000 .000									10 Kali; 45 Kali dan 65 Kali	695.000. 000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1. 05.01. 42	Program Penegakan Perundang- undangan Daerah									450.000 .000		463.500 .000		468.135 .000		477.497 .700		1.859.13 2.700	Satuan Polisi Pamong Praja
		1	Persentase pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum	Perse n	100	100			100		100		100		100		100		
		2	Persentase kasus pelanggaran peraturan perundang- undangan daerah dan ketertiban umum yang tertangani	Perse n	80	100			100		100		100		100		100		
1.05.1. 05.01. 43	Program Peningkata n Ketertiban Umum dan Ketentrama n Masvarakat									165.000 .000		169.950 .000		171.649 .500		175.082 .490		681.681. 990	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran / Program Pembangu nan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Satu an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penang gung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1	Frekuensi pelaksanaan operasi dan pengendalian/ penertiban trantibmas	Kegia tan	33	34			34		34		40		40		40		
		2	Frekuensi pelaksanaan kerjasama, pengawasan, pencegahan dan penertiban terhadap asset daerah	Kegia tan	7	7			8		8		8		8		8		
1.05.1. 05.01. 44	Program Pelayanan Ketentrama n dan Ketertiban Umum		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	Perse n	0	48			48	285.000 .000	60	293.550 .000	60	296.485 .500	72	302.415 .210	72	1.177.45 0.710	Satuan Polisi Pamong Praja
Tujuan: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berintegritas			Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilaya h Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Poin	0	0	2	7.288.0 00.000	4	7.746.0 00.000	6	7.978.3 80.000	8	8.018.2 71.900	10	8.178.6 37.338	10	39.209. 289.238	
Sasaran: Meningkatkan Pengawasan dan Integritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan			Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilaya h Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Poin	0	0	2	2.953.0 00.000	4	3.280.0 00.000	6	3.378.4 00.000	8	3.395.2 92.000	10	3.463.1 97.840	10	16.469. 889.840	
Progra m:																			

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.02.4.02.01.07	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kepada SKPD Yang Telah Dilaksanakan	Kegiatan	43	43	43	2.953.000.000									43	2.953.000.000	Inspektorat
4.02.4.02.01.18	Program Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan								3.280.000.000		3.378.400.000		3.395.292.000		3.463.197.840		13.516.889.840	Inspektorat
		1 Opini penilaian SAKIP Kabupaten	Persen	CC	B	B		BB		BB		A		AA		AA		
		2 Opini penilaian LKPD Kabupaten	Persen	WTP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
		3 Persentase penurunan temuan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah)terhadap OPD	Persen	80	90	100		100		100		100		100		100		
Sasaran: Meningkatkan Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara		Indeks Profesionalitas ASN	Poin	Tinggi (81-90)	Tinggi (81-90)	Tinggi (81-90)	4.335.000.000	Tinggi (81-90)	4.466.000.000	Tinggi (81-90)	4.599.800.000	Tinggi (81-90)	4.622.799.900	Tinggi (81-90)	4.715.439.498	Tinggi (81-90)	22.739.399.398	
Program:																		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.05.4.05.01.17	Program peningkatan Potensi dan kompetensi SDM Aparatur Pemerintah							4.075.000.000		4.176.000.000		4.301.280.000		4.322.786.400		4.409.242.128		21.284.308.528	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		1	Persentase Calon ASN yang telah mengikuti Pelatihan Dasar	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100		
		2	Persentase ASN yang diklat fungsional/teknis//bimtek/seminar/lokakarya dan Tugas Belajar	Persen	0,12	0,12	0,28		1,53		1,53		1,53		1,53		1,53		
		3	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	6,49	12,52	4,01		12,15		8,02		8,02		7,9		7,9		
4.05.4.05.01.18	Program Peningkatan Kedisiplinan dan Kinerja Aparatur Pemerintah							260.000.000		290.000.000		298.700.000		300.193.500		306.197.370		1.455.090.870	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		1	Persentase penurunan Indisipliner pegawai	Persen	3,35	12,12	3,13		3,33		3,45		3,45		3,57		3,57		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	Persentase Peraturan Perundang-undangan dibidang kepegawaian yang disosialisasikan	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100		
		3	Persentase Sistem Aplikasi Kinerja	Persen	0	100	100		100		100		100		100		100		
Misi 3: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan								100.857.340.000		99.359.533.783		102.340.319.796		103.323.698.471		105.390.172.441		511.271.064.491	
Tujuan: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	Persen	83,63	84,63	85,63	98.202.340.000	86,63	96.470.781.783	87,63	99.364.905.236	88,63	100.333.406.839	89,63	102.340.074.975	89,63	496.711.508.833	
		2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69,81	70,31	70,81		71,31		71,81		72,31		72,81		72,81		
Sasaran: Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Infratraktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah		1	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	Persen	83,63	84,63	85,63	96.357.340.000	86,63	93.412.781.783	87,63	96.215.165.236	88,63	97.160.347.639	89,63	99.103.554.591	89,63	482.249.189.249	
		2	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	82,6	84	85,4		85,52		85,66		85,82		86		86		
		3	Cakupan Layanan Persampahan	Persen	46	49	52		55		58		61		64		64		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran / Program Pembangu nan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satu an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penang gung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4	Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	Pers en	2	9	16		20		25		32		40		40		
		5	Cakupan Layanan Air Bersih	Pers en	15,52	25,52	35,5 2		45,5 2		55,5 2		65,52		75,5 2		75,5 2		
Progra m:																			
1.03.1. 03.01. 34	Program Peningkata n Jalan dan Jembatan						37.463. 005.000										37.463.0 05.000	Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n	
		1	Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan	Km	0.40	0.40	0.40									0.40			
		2	Jumlah Jembatan Yang Ditingkatkan	Unit	1	1	1									1			
1.03.1. 03.01. 15	Program pembangun an jalan dan jembatan						17.494. 565.000		55.100. 000.000		56.753. 000.000		57.320. 530.000		58.466. 940.600		245.135. 035.600	Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n	
		1	Panjang Ruas Jalan Baru	Km	0,50	0,50	0,50									0,50			
		2	Jumlah Jembatan Baru	Titik	1,00	1,00	1,00									0,50			
		3	Persentase Jalan dan Jembatan yang dibangun	Perse n	13	15,89	15,79		15,69		15,48		15,30		15,16		15,16		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4	Persentase Jalan yang ditingkatkan	Persen	13	15,89	13,30		11,66		10,15		8,78		7,54		51,43		
		5	Persentase Jembatan yang ditingkatkan	Persen	46,35	46,35	0		1,43		1,43		1,43		1,43		5,72		
1.03.1.03.01.16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong		Persentase Saluran Drainase/Gorong-gorong yang berfungsi	Persen					25	945.000.000	25	973.350.000	25	983.083.500	25	1.002.745.170	100	3.904.178.670	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1.03.01.17	Program pembangunan turap/talud/bronjong		Persentase Turap/Talud/Bronjong yang berfungsi	Persen					6,25 (4/64 DI)	810.000.000	6,25 (4/64 DI)	834.300.000	6,25 (4/64 DI)	842.643.000	6,25 (4/64 DI)	859.495.860	6,25 (4/64 DI)	3.346.438.860	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1.03.01.18	Program rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan		Persentase jalan kondisi mantap (rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan)	Persen	83,66 (609,830 Km)	84,10 (613,052 Km)	85,40 (10,56) (76,98 Km)	16.114.400.000	85,52 (10,58) (77,12 Km)	15.260.000.000	85,66 (11,63) (84,76 Km)	15.717.800.000	85,52 (11,75) (85,65 Km)	15.874.978.000	86,82 (11,99) (87,39 Km)	16.192.477.560	86,82 (11,99) (87,39 Km)	79.159.655.560	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1.03.01.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya		Persentase Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Secara Partisipatif yang berfungsi	Persen	24,1	30,06		12.022.155.000	32,56 (18,75) (12/64 DI)	11.770.000.000	35,06 (18,75) (12/64 DI)	12.123.100.000	37,56 (18,75) (12/64 DI)	12.244.331.000	40,06 (18,75) (12/64 DI)	12.489.217.620	40,06 (18,75) (12/64 DI)	60.648.803.620	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.04.1.03.02.25	Program Pembangunan dan Pemelihara		Jumlah Panjang jalan Lingkungan	Km	47,81	55,61	11.39	6.425.899.600	4	2.405.554.783	4	2.477.721.426	4	2.502.498.640	4	2.552.548.613	83	16.364.223.063	Dinas Tata Ruang dan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	an Jalan Lingkungan		Dibangun/Diperbaiki															Permukiman	
2.05.2.05.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		Jumlah kendaraan operasional pengangkutan sampah	Unit	12	57 Unit kendaraan operasional pengangkutan sampah	63	3.150.000.000	69	3.295.000.000	76	3.393.850.000	84	3.410.819.250	92	3.479.035.635	92	16.728.704.885	Dinas Lingkungan Hidup
1.03.1.03.02.39	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum						107.315.400		679.727.000		700.118.810		707.119.998		721.262.398		2.915.543.606	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	
		1	Jumlah Sarana Prasarana Air Bersih Komunal Yang Dibangun	Unit	6	13	5		4		4		4		4		4		
		2	Panjang Saluran Air Bersih Perpipaan Yang Dibangun (Km)	Km	11,09	7,8	2		2		2		2		2		2		
1.03.1.03.02.47	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Lingkungan		Jumlah panjang saluran Drainase/ Gorong-gorong Lingkungan yang Dibangun / Diperbaiki	Meter	123	136	150	3.580.000.000	150	2.500.000.000	150	2.575.000.000	150	2.600.750.000	150	2.652.765.000	150	13.908.515.000	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
1.03.1.03.01.50	Program Pembangunan Jaringan Irigasi		Persentase Jaringan Irigasi yang dibangun	Perse					3,1	647.500.000	3,1	666.925.000	3,1	673.594.250	3,1	687.066.135	12,4	2.675.085.385	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																		Pengairan	
Sasaran: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup		1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69,81	70,31	70,81	1.845.000.000	71,31	3.058.000.000	71,81	3.149.740.000	72,31	3.173.059.200	72,81	3.236.520.384	72,81	14.462.319.584	
		2	Persentase Rencana Rinci Tata Ruang Yang Ditetapkan	Persen	0	0	18,52		18,52		7,41		11,11		18,52		18,52		
Program:																			
2.05.2.05.01.25	Program Pemantauan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan						150.000.000		220.000.000		226.600.000		227.733.000		232.287.660	-	1.056.620.660	Dinas Lingkungan Hidup	
		1	Jumlah perusahaan yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan lingkungan hidup (PROPERDA)	perusahaan	24	24	24		24		24		24		24		24		
		2	Jumlah titik lokasi pengelolaan DAS Citarum	Lokasi	2 titik	2	2		2		2		2		2				
		3	Jumlah titik pantau kualitas air	Titik	67 titik	20	20		20		20		20		20				
		4	Jumlah titik pantau kualitas udara	Titik	10 titik	2	2		2		2		2		2				
2.05.2.05.01.38	Program Pengendalian		Jumlah Peserta	Perusahaan	24	24	24		24	598.000.000	24	615.940.000	24	619.019.700		631.400.094	24	2.464.359.794	Dinas Lingkun

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Lingkungan Hidup		Kegiatan PROPERDA															gan Hidup	
1.03.1.03.02.31	Program Perencanaan Tata Ruang		Persentase RDTR/RTR KSK Yang Ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (%)	Perse	0	0	18,5	800.000.000	18,50	990.000.000	7,40	1.019.700.000	11,10	1.029.897.000	18,50	1.050.494.940	18,50	4.890.091.940	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
1.03.1.03.02.32	Program Pemanfaatan Ruang						325.000.000		480.000.000		494.400.000		499.344.000		509.330.880		2.308.074.880	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	
		1	Sistem Informasi Pemanfaatan Ruang Daerah	Jumlah Perangkat Lunak	0	0	1		1		1		1		1		1		
		2	Laporan Status Pemanfaatan Ruang Yang Diselesaikan (Laporan)	Laporan	0	0	1		1		1		1		1		1		
		3	Persentase Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Tata Ruang (%)	Perse	0	0	80		80		80		80		80		80		
		4	Persentase Perusahaan Pemegang izin Pemanfaatan Ruang yang dibina/ditinjau	Perse	0	0	100		100		100		100		100		100		
2.05.2.05.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan						275.000.000		280.000.000		288.400.000		289.842.000		295.638.840		1.428.880.840	Dinas Lingkungan Hidup	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Perusakan Lingkungan Hidup																		
		1	Jumlah Target pembinaan	perusahaan	30	30	30		30		30		30		30		30		
		2	Jumlah Dokumen Amdal	dokumen	16	16	16		16		16		16		16		16		
2.05.2.05.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		Persentase Sumber Daya Alam (Mata Air) yang terjaga dan terlindungi	Persen		25	25	145.000.000	180.000.000	75	185.400.000	75	186.327.000	100	190.053.540	100	886.780.540	Dinas Lingkungan Hidup	
2.05.2.05.01.26	Program Penyadaran dan Penegakkan Hukum Lingkungan							150.000.000	190.000.000		195.700.000		196.678.500		200.612.070		932.990.570	Dinas Lingkungan Hidup	
		1	Jumlah sosialisasi penegakan hukum lingkungan ke Perusahaan yang ada di Purwakarta			6	6		6	6		8		8		8			
		2	Penerimaan pengaduan	Kasus	4		4		1	1		1		1		1			
		3	Aplikasi SIPP	Buah		0	1		3	3		3		3		3			
		4	Adipura	Titik pantau (Kecamatan)	3		3		5	6		8		8		8			
		5	Jumlah sosialisasi pembinaan sekolah berbudaya	lokasi (sekolah)	11		3												

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat at Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			lingkungan dan Sekolah Adiwiyata																
2.05.2.05.01.37	Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim		Tingkat Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim	Persen			25		25	120.000.000	25	123.600.000	75	124.218.000	100	126.702.360	100	494.520.360	Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan: Mengembangkan Pariwisata Berwawasan Lingkungan			Kontribusi Pariwisata Terhadap PAD	Persen	25	30	35	265500000	40	2888752000	45	2975414560	50	2990291633	55	3050097465	55	14559555658	
Sasaran: Meningkatkan Kunjungan Wisatawan			Jumlah Wisatawan	Orang	4500	5000	5000	2.655.000.000	6000	2.888.752.000	7000	2.975.414.560	8000	2.990.291.633	9000	3.050.097.465	9000	14559555658	
Program:																			
3.02.2.13.01.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		Jumlah Event Promosi Yang Diikuti / Diselenggarakan	Event	8	8	8	1.755.000.000									8	1.755.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
3.02.2.13.01.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		Jumlah ODTW Yang Ditata	ODTW	4	4	4	900.000.000									4	900.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.02.2.13.01.18	Program Pengembangan kepariwisataan									1.158.750.000		1.193.512.500		1.199.480.063		1.223.469.664		4.775.212.226	Dinas Kepemudaan, Olahrag a, Pariwisataa dan Kebudayaan
		1	Persentase Daerah Tujuan Wisata (DTW) Dikembangkan	Person	11,11	11,11			11,11		13,33		15,56		17,78		17,78		
		2	Persentase Jasa Usaha Pariwisata Berstandar baik/ tersertifikasi	Person	0,00	0,00			2,22		4,44		4,44		6,67		6,67		
		3	Persentase Lembaga dan SDM Pariwisata Meningkatkan/ tersertifikasi	Person	0,00	0,00			2,22		4,44		4,44		6,67		6,67		
3.02.2.13.01.19	Program Promosi Wisata Daerah		Persentase Event Promosi yang diikuti/disenggarakan	Person	20,00	20,00			30	1.530.002.000	40	1.575.902.060	40	1.583.781.570	50	1.615.457.202	50	6.305.142.832	Dinas Kepemudaan, Olahrag a, Pariwisataa dan Kebudayaan
3.02.2.13.01.20	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif		Persentase komunitas ekonomi kreatif yang dibina	Person					40	200.000.000	40	206.000.000	40	207.030.000	40	211.170.600	40	824.200.600	Dinas Kepemudaan, Olahrag a, Pariwisataa dan Kebudayaan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Misi 4: Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa							19.883.707.000		23.923.453.600		24.637.287.208		24.760.473.644		25.255.683.117		118.460.604.569		
Tujuan: Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta Daya Beli Masyarakat		1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,12	5,22	5,33	19.883.707.000	5,43	23.923.453.600	5,54	24.637.287.208	5,65	24.760.473.644	5,77	25.255.683.117	5,77	118.460.604.569	
		2	Indeks Gini	Poin	0,389	0,368	0,366		0,365		0,364		0,363		0,362		0,362		
		3	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	Rp	10.941.000	11.056.000	11.173.000		11.291.000		11.410.000		11.531.000		11.652.000		11.652.000		
Sasaran: Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi		1	Laju UMKM Yang Dibina	Persen	100	100	100	1.950.000.000	100	2.306.943.200	100	2.376.151.496	100	2.388.032.253	100	2.435.792.899	100	11.456.919.848	
		2	Laju Koperasi Aktif	Persen	70	75	80		85		90		95		100		100		
Program:																			
2.11.3.06.01.19	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif		Jumlah UMKM Yang Termonitoring dan Terevaluasi	Unit	750	800	800	150.000.000								800	150.000.000	Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.11.3.06.01.20	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		Terbinanya Pelaku UMKM Menjadi Wiraswasta Yang Profesional	Unit	25	25	25	350.000.000								25	350.000.000	Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																			Perindustrian
2.11.3.06.01.21	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah							350.000.000										350.000.000	Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		1	Terfasilitasinya UMKM Dalam Mengakses Kredit Perbankan dan Non Perbankan	Unit	360	380	380										380		
		2	Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan Usaha Besar	Unit	15	15	15										15		
		3	Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan BUMN/BUMD	Unit	100	105	105										105		
2.11.3.06.01.22	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		Persentase Koperasi Yang Ada Memenuhi Kriteria Koperasi Sehat	Persen	20	25	25	650.000.000									25	650.000.000	Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																			dan Perindustrian
2.11.3.06.01.23	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi		Persentase Koperasi Yang Bermitra Dengan Lembaga Perbankan	Perse	24	30	30	450.000.000									30	450.000.000	Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2.11.3.06.01.20	Program Peningkatan Daya Saing Koperasi								405.000.000		417.150.000		419.235.750		427.620.465			1.669.006.215	Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		1	Jumlah Pameran yang diikuti oleh Koperasi	Even					5		5		5		5		5		
		2	Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitas bantuan	Unit		15			15		15		15		15		15		
		3	Jumlah Koperasi yang bermitra dengan perbankan,	Unit		30			30		30		30		30		30		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			non perbankan dan lembaga lainnya																
		4	Jumlah Koperasi yang teridentifikasi mengikuti sosialisasi dan pelatihan	Unit		50			50		50		50		50		50		
2.11.3.06.01.21	Program penguatan Kelembagaan Koperasi								526.943.200		542.751.496			545.465.253		556.374.559		2.171.534.508	Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		1	Laju peningkatan koperasi sehat	Person		20			5		5		5		5		5		
		2	Laju peningkatan koperasi aktif	Person		40			10		10		10		10		10		
		3	Laju peningkatan koperasi bersertifikat	Person		0			15		15		15		15		15		
		4	Laju peningkatan Koperasi melakukan audit melalui akuntan publik	Person		0			5		5		5		5		5		
		5	Laju peningkatan koperasi	Person		20			7		7		7		7		7		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			melaksanakan RAT																
2.11.3.06.01.22	Program peningkatan Daya saing UMKM									925.000.000		952.750.000		957.513.750		976.664.025		3.811.927.775	Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		1	Jumlah Pameran yang diikuti oleh UMKM	Even		10			8		8		8		8		8		
		2	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas bantuan	Unit		20			20		20		20		20		20		
		3	Jumlah UMKM yang bermitra dengan perbankan, non perbankan dan lembaga lainnya	Unit		15			20		20		20		20		20		
		4	Jumlah UMKM yang teridentifikasi mengikuti sosialisasi dan pelatihan	Unit		30			25		25		25		25		25		
2.11.3.06.01.23	Program Pengembangan Kewirausahaan									450.000.000		463.500.000		465.817.500		475.133.850		1.854.451.350	Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																			ngan dan Perindustrian
		1	Persentase UMKM yang terbina	Persen					10		10		10		15		15		
		2	Jumlah Wirausaha baru yang dibentuk	Unit					50		50		50		50		50		
		3	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan	Unit					150		150		150		150		150		
Sasaran: Berkembangnya Sentra Industri Unggulan dan Perdagangan		1	Laju Pertumbuhan IKM	Persen	45	50	55	4.260.000.000	60	4.006.000.000	65	4.126.180.000	70	4.146.810.900	75	4.229.747.118	75	20.768.738.018	
		2	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	4,51	4,6	4,69		4,74		4,83		4,92		5		5		
Program:																			
3.06.3.06.01.23	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri								2.076.000.000		2.138.280.000		2.148.971.400		2.191.950.828		8.555.202.228		Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		1	Jumlah Pasar tradisional yang direvitalisasi	Pasar					1		1		1		1		1		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	Persentase Capaian target retribusi pasar	Persen		70			100		100		100		100		100		
		3	Jumlah pengunjung Pasar tradisonal	Orang					200		250		275		300		300		
		4	Tertatanya pedagang kaki lima dan asongan	Kawasan					1		2		2		3		3		
3.06.3.06.01.21	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		Jumlah Peraturan (Regulasi) Tentang Pengelolaan, Penataan dan Pemetaan Lokasi Pasar Modern	Regulasi	1	1	1	195.000.000								1	195.000.000	Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
3.06.3.06.01.21	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri								200.000.000		206.000.000		207.030.000		211.170.600		824.200.600	Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
		1	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran Ekspor.	Even					2		2		2		2		2		
		2	Jumlah Pelayanan Ekspor	Dokumen SKA					13.000		135.000		14.500		16.000		16.000		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.06.3.06.01.22	Program Penataan Infrastruktur Perdagangan dan Usaha Serta Lembaga Perdagangan							2.560.000.000										2.560.000.000	Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		1	Terbangunnya Pasar Tradisional Yang Memiliki Fisik dan Sistem Pengelolaan Konsep Modern	Pasar	7	9	9										9		
		2	Tertatanya Penyempurnaan Pusat Perbelanjaan Pasar Jum'at	Pasar	1	1	1										1		
		3	Terbangunnya Kantor Pengelola / Pelayanan Pasar Tradisional Yang Representative	Unit	5	6	6										6		
		4	Tertatanya Sarana / Prasarana (Kios / Los / Jalan) Yang Representative di Pasar Tradisional	Unit	5	6	6										6		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.07.3.06.01.17	Perogram Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi							225.000.000										225.000.000	Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		1	Jumlah Industri Kecil Yang Memiliki SNI	Unit	80	100	100										100		
		2	Jumlah Desain Kemasan Produksi	Unit	96	120	120										120		
3.07.3.06.01.18	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah							530.000.000										530.000.000	Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		1	Jumlah Industri Kecil Pangan Memiliki P-IRT	Unit	96	120	120										120		
		2	Jumlah GKM Industri Kecil Yang Terbentuk	Unit	8	10	10										10		
		3	Jumlah Lokasi Sarana / Prasarana Promosi dan Penjualan	Unit	4	5	5										5		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Produk Industri Kecil																
3.07.3.06.01.21	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial							600.000.000										600.000.000	Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		1	Jumlah Bangunan Sarana dan Prasarana UPTD Litbang Keramik	Paket	1	1	1										1		
		2	Jumlah Desain Produk Keramik Yang Standar / Spesifik (Berkarakter)	Desain	80	100	100										100		
3.07.3.06.01.22	Program Pengembangan Teknologi dan kebijakan Industri							150.000.000		200.000.000		206.000.000		207.030.000		211.170.600		974.200.600	Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat at Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1	Jumlah kerjasama kemitraan dengan industri hulu/lembaga keuangan	IKM					1		1		1		1		1		
		2	Jumlah pemanfaatan potensi sumberdaya IKM	IKM					10		10		10		15		15		
		3	Jumlah bahan baku yang standar produk IKM	Unit					1		1		1		2		2		
3.07.3.06.01.21	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah									1.530.000.000		1.575.900.000		1.583.779.500		1.615.455.090		6.305.134.590	Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		1	Jumlah P2WKSS terbina.	desa					1		1		1		1		1		
		2	Jumlah Keikutsertaan dalam pameran kerajinan Daerah	Kegiatan					2		2		2		2		2		
		3	Jumlah GKM Industri yang terbina	unit					1		1		1		1		1		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4	Jumlah lokasi Sarana/Prasarana promosi dan Penjualan Produk Industri Kecil	unit				1		1		1		1		1			
		5	Jumlah desain kemasan produk Industri Keciln Menengah (IKM)	desain				5		5		5		5		5			
		6	Jumlah desain produk keramik yang standar/spesifik	desain				20		20		20		20		20			
		7	Jumlah data potensi dan informasi industri	buku				1		1		1		1		1			
		8	Jumlah pengrajin sentra industri keramik yang terbina	pengrajin				30		30		30		30		30			
		9	Jumlah pengunjung ke sentra industri keramik dan gerabah	Orang				8.000		9.000		10.000		10.000		10.000			
Sasaran: Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif			Laju Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Persen	65	70	75	1.410.000.000	80	1.290.000.000	85	1.324.830.000	90	1.331.454.150	95	1.358.083.233	95	6.714.367.383	
Program:																			
2.12.2.12.01.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1	Jumlah Buku Promosi Potensi Unggulan Daerah	Set	1	1	1	910.000.000						-		-	1	910.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																			Terpadu Satu Pintu
		2	Jumlah Buku Peluang Potensi Investasi	Set	1	1	1										1		
		3	Jumlah peran Serta Pada Kegiatan Pameran Investasi Dalam Negeri	Event	4	4	4										4		
2.12.2.12.01.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi							500.000.000										500.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1	Persentase Perusahaan PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Persen	80	90	90										90		
		2	Jumlah Dokumen Data dan Laporan Investasi Yang Akurat	Jumlah	1	1	1										1		
			Prosentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Persen	3	3	3										3		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.12.2.12.01.19	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal									750.000.000		770.250.000		774.101.250		789.583.275		3.083.934.525	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1	Jumlah buku promosi investasi	Buku	2	2			3		3		2		4		4		
		2	Jumlah keikutsertaan pada pameran investasi	Event	4	5			11		12		14		15		15		
2.12.2.12.01.20	Program Perbaikan Iklim Investasi									540.000.000		554.580.000		557.352.900		568.499.958		2.220.432.858	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1	Persentase perusahaan PMA dan PMDN yang dapat dimonitoring secara berkala	Persen	64,98	58,36			100		100		100		100		100		
		2	Persentase perusahaan yang mendapat pengawasan perizinan dan non perizinan	Persen		80			100		100		100		100		100		
		3	Persentase pengaduan perizinan	Persen		100			100		100		100		100		100		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4	Peningkatan nilai IKM	Persen		80			80,75		81		81,5		82		82		
Sasaran: Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Saing Pertanian, Perikanan dan Peternakan		1	Skor Pola pangan Harapan	Poin	86,25	87,4	88,55	12.263.707.000	89,7	13.607.185.000	90,85	14.015.400.550	92	14.085.477.553	93,15	14.367.187.104	93,15	68.338.957.207	
		2	Laju Produksi Pertanian (%)	Persen	1,08	1,15	1,22		1,22		1,22		1,08		1,1		1,1		
		3	Laju Produksi Peternakan (%)	Persen	3	3	3		3		3		3		3				
		4	Laju Produksi Perikanan (%)	Persen	14	14	14		14		14		14		14				
Program:																			
3.01.3.01.01.40	Program Peningkatan Ketahanan Pangan							365.000.000									365.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan	
		1	Jumlah Ternak Unggas Yang Disebarkan	Ekor	1.000	1.000	1.000									1.000			
		2	Jumlah Benih Ikan Yang Ditebarkan	Ekor	75.000	75.000	75.000									75.000			
		3	Kawasan Peternakan dan Perikanan Terpadu	Kegiatan	1	1	1									1			
2.03.3.03.01.21	Program Peningkatan Diversifikasi Pangan Hewani							120.000.000		550.000.000		566.500.000		569.332.500		580.719.150		2.386.551.650	Dinas Perikanan dan Peternakan
		1	Jumlah Ternak Unggas Yang Disebarkan (ekor)	Ekor	50	50	50		300		400		500		600		600		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	Jumlah Benih Ikan Yang Ditebarkan (ekor)	Ekor	200,000	200,000	200,000		200,000		200,000		200,000		200,000		200,000	
		3	Penyediaan daging, telur dan susu perbaikan gizi masyarakat															
			daging (ton)	Ton	2	2	2	2		2		2		2		2		
			telur (ton)	Ton	5	5	5	5		5		5		5		5		
			susu (liter)	Liter	1100	1100	1100	1100		1100		1100		1100		1100		
			susu (liter)	Liter	1100	1100	1100	1100		1100		1100		1100		1100		
3.01.3.01.01.21	Program pengembangan perikanan tangkap						498.150.000		642.195.000		661.460.850		664.768.154		678.063.517		3.144.637.522	Dinas Perikanan dan Peternakan
		1	Produksi Ikan Hasil Tangkapan (ton)	Ton	1.023,74	1.100,81		1.272		1.367		1.470		1.580		1.580		
		2	Jumlah Ikan yang ditebarkan	Ekor	225.000	375.000		450.000		500.000		550.000		600.000		600.000		
		3	Jumlah Kelompok Usaha Perikanan Tangkap	Kelompok	14	18		48		51		53		56		56		
3.01.3.01.01.24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar						50.000.000		150.000.000		154.500.000		155.272.500		158.377.950		668.150.450	Dinas Perikanan dan Peternakan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1	Jumlah kawasan Perairan Umum yang dikelola	Jenis	3	3	3		3		3	3		3		3		
		2	Jumlah kawasan perikanan budidaya yang dikelola	Kecamatan	17	17	17		17		17	17		17		17		
		3	Jumlah KJA	Petak	21.000	21.000	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
		4	Produksi Ikan KJA	Ton			12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000	
3.01.3.01.01.50	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan						95.000.000		227.500.000		234.325.000		235.496.625		240.206.558		1.032.528.183	Dinas Perikanan dan Peternakan
		1	Jumlah Unit Pengolahan Hasil Perikanan (Unit)	Unit	50	94	100		105		110		115		120		120	
		2	Produksi Olahan Produk Perikanan (ton)	Ton			85		90		95		100		105		105	
		3	Jumlah Kelompok Usaha pengolahan ikan (kelompok)	kelompok	11	12	13		14		15		16		17		17	
		4	Jumlah Unit Pemasaran Hasil Perikanan (unit)	Unit	1.160	1.161	1.170		1.172		1.174		1.176		1.178		1.178	
3.01.3.01.01.20	Program pengembangan						1.819.737.000		1.912.000.000		1.969.360.000		1.979.206.800		2.018.790.936		9.699.094.736	Dinas Perikanan dan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangu nan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Satu an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangk ang Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	budidaya perikanan																		Peterna kan
		1	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan	Kelo mpok	109	115			121		124		127		130		130		
		2	Produksi Benih Ikan UPR	Ekor	514.74 0.000	555.95 8.000			741.2 25.60 0		889.4 70.72 0		1.067. 364.8 64		190.8 37.83 7		190.8 37.83 7		
		3	Produksi Ikan Konsumsi	Ton	92.501	84.230			1.899		2.279		2.735		3.282		3.282		
		4	Produksi Ikan Hias	Ekor	94.000	117.01 0			135.3 60		162.4 32		194.9 18		233.9 03		233.9 03		
		5	Produksi Benih UPTD BBI	Ekor	5.000.0 00	5.075.0 00			5.880 .000		6.320 .000		6.740. .000		7.200 .000		7.200 .000		
		6	Jumlah Pelaku Usaha Budidaya Ikan	Oran g	9.635	9.190			9.190		9.190		9.190		9.190		9.190		
		7	Luas Lahan Budidaya yang Disertifikasi	Hekt ar	4	4			4		4		4		4		4		
3.03.3. 01.01. 23	Program peningkata n pemasaran hasil produksi peternakan							165.000 .000		225.000 .000		231.750 .000		232.908 .750		237.566 .925		1.092.22 5.675	Dinas Perikan an dan Peterna kan
		1	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Oran g	610	615			650		670		685		700		700		
		2	jumlah ternak yang diperjual belikan di Pasar Hewan	Ekor	33.060	34.060			36.81 7		38.19 5		39.57 4		40.95 2		40.95 2		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	Keikutsertaan dalam Pameran/expo produk hasil peternakan	Kegiatan	5	5			5		5		5		5		5		
3.03.3.01.01.24	Program peningkatan produksi peternakan							200.000.000		395.000.000		406.850.000		408.884.250		417.061.935		1.827.796.185	Dinas Perikanan dan Peternakan
		1	Budidaya Ternak Ruminansia Besar (lokasi)	Lokasi	2	1			1		1		1		1		1		
		2	Budidaya Ternak Ruminansia Kecil	lokasi	2	1			1		1		1		1		1		
		3	Budidaya Ternak Unggas	Lokasi	1	1			2		2		2		2		2		
		4	Produksi Hasil Ternak	Perse	3	3			3		3		3		3		3		
		5	Jumlah Akseptor IB (ekor)	Ekor		1.500			1.575		1.654		1.736		1.823		1.823		
		6	Jumlah Teknologi yang Diterapkan	Jenis	3	3			3		3		3		3		3		
		7	Jumlah kelahiran Sapi Potong hasil IB dan Kawin Alam (ekor)	Ekor	736	1197			1.224		1.248		1.273		1.299		1.299		
		8	Pengembangan Hijauan Makanan Ternak (lokasi)	Lokasi	1	1			1		1		1		1		1		
2.03.3.03.01.18	Program Peningkatan Ketahanan Pangan							2.000.000.000									12	2.000.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1	Jumlah Lumbung Pangan Yang Terbangun	Unit	12	12	12											
		2	Terpenuhinya Kebutuhan Beras	Ton	100496	103008	103008									103008		
		3	Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Umbi-Umbian	Ton	36544	37457	37457									37457		
		4	Terpenuhinya Kebutuhan Sayuran dan Buah	Ton	91360	93644	93644									93644		
2.03.3.03.01.19	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat								1.840.000.000		1.895.200.000		1.904.676.000		1.942.769.520		7.582.645.520	Dinas Pangan dan Pertanian
		1	Persentase ketersediaan beras terhadap kebutuhan beras daerah	Persen	150,86	152,00		151,64		151,47		151,29		151,11		151,11		
		2	Persentase ketersediaan Bahan Makanan	Persen	100	100		102		103		104		105		105		
2.03.3.03.01.20	Program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah		Persentase pengisian gudang cadangan pangan	Persen	53,48	53,48		100	520.000.000	100	535.600.000	100	538.278.000	100	549.043.560	100	2.142.921.560	Dinas Pangan dan Pertanian
3.03.3.03.01.28	Program peningkatan produksi dan mutu hasil tanaman pangan								3.300.490.000		3.399.504.700		3.416.502.224		3.484.832.268		13.601.329.191	Dinas Pangan dan Pertanian

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran / Program Pembangu nan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Satu an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penang gung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1	Laju produksi Padi	Perse n	2,627	2,657			2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		
		2	Laju produksi Kacang-kacangan	Perse n	-55,66	346,35			1		1		1		1		1		
		3	Laju produksi Umbi-umbian	Perse n	-34,39	-18,55			1		1		1		1		1		
		4	Persentase kehilangan hasil	Perse n	18	18			16,5		16		15,5		15		15		
3.03.3. 03.01. 19	Program peningkata n produksi pertanian/ perkebuna n							5.758.3 20.000									5.758.32 0.000	Dinas Pangan dan Pertania n	
		1	Produksi Padi	Ton	226.42 4	226.42 4	226.4 24										226.4 24		
		2	Produksi Palawija	Ton	133.29 4	133.29 4	133.2 94										133.2 94		
		3	Produksi Teh	Ton	5.164	5.164	5.164										5.164		
		4	Produksi Cengkeh	Ton	337	337	337										337		
		5	Produksi Sayuran	Ton	45.459	45.459	45.45 9										45.45 9		
		6	Produksi Buah-Buahan	Ton	115.46 8	115.46 8	115.4 68										115.4 68		
3.03.3. 03.01. 15	Program Peningkata n Kesejahtera an Petani							225.000 .000		367.500 .000		378.525 .000		380.417 .625		388.025 .978		1.739.46 8.603	Dinas Pangan dan Pertania n
		1	Persentase kelompok Tani yang Menerapkan Teknologi Pertanian	Perse n	100	100			100		100		100		100		100		
		2	Persentase kelompok Tani yang mendapat bantuan	Perse n	0	30,92			25		25		25		25		25		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.03.3.03.01.17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan		Jumlah Promosi Produk Pertanian /Perkebunan yang Dilaksanakan	Kegiatan	2	2	2	100.000.000										100.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
3.03.3.03.01.20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan							630.000.000										630.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
		1	Pendidikan Pelatihan dan Bimbingan Teknis yang Diikuti oleh Penyuluh	Kegiatan	25	30	30										30		
		2	Kelompok Tani yang Menerapkan Teknologi Pertanian	Kelompok	430	450	450										450		
3.03.3.03.01.25	Program Pengembangan Agribisnis							150.000.000										150.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
		1	Penanaman Manggis	Pohon	1.075	1.155	1.155										1.155		
		2	Penanaman /Rehabilitasi The	Ha	27	30	30										30		
		3	Penanaman Cengkeh	Ha	1,7	1,75	1,75										1,75		
		4	Penanaman Ubi Kayu	Ha	1460	1610	1610										1610		
		5	Penanaman Pala	Ha	1,50	1,50	1,50										1,50		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6	Penerapan Pertanian Organik	Ha	45	50	50										50		
3.03.3.03.01.29	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan							87.500.000										87.500.000	Dinas Pangan dan Pertanian
		1	Produktivitas Padi Sawah	Ku/ Ha	63,06	63,85	63,85										63,85		
		2	Produktivitas Padi Ladang		37,18	37,64	37,64										37,64		
		3	Produktivitas Jagung	Ku/ Ha	52,75	53,02	53,02										53,02		
		4	Produktivitas Ubi Kayu	Ku/ Ha	198,57	199,16	199,16										199,16		
		5	Produktivitas Cengkeh	Kg/ Ha	250,79	253,29	253,29										253,29		
		6	Produktivitas Teh	Kg/ Ha	1.106,16	1.117,22	1.117,22										1.117,22		
		7	Produktivitas Pala	Kg/ Ha	319,47	322,66	322,66										322,66		
3.03.3.03.01.29	Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian		Persentase penyediaan prasarana dan sarana pertanian	Persen	25	25			25	1.410.000.000	25	1.452.300.000	25	1.459.561.500	25	1.488.752.730	25	5.810.614.230	Dinas Pangan dan Pertanian
3.03.3.03.01.30	Program pengembangan perbenihan pertanian		Persentase produksi benih padi bersertifikat	Persen					100	300.000.000	100	309.000.000	100	310.545.000	100	316.755.900	100	1.236.300.900	Dinas Pangan dan Pertanian
3.03.3.03.01.31	Program perlindungan tanaman pangan, hortikultur									300.000.000		309.000.000		310.545.000		316.755.900		1.236.300.900	Dinas Pangan dan Pertanian

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	a dan perkebunan																		
		1	Persentase pengendalian serangan OPT	Persen	5	5			3		3		3		3		3		
		2	Persentase perlindungan lahan dari dampak perubahan iklim	Persen	5	5			3		3		3		3		3		
3.03.3.03.01.32	Program peningkatan penyuluhan dan pelatihan pertanian								687.500.000		708.125.000		711.665.625		725.898.938		2.833.189.563	Dinas Pangan dan Pertanian	
		1	Persentase ketersediaan program penyuluhan	Persen	100	100			100		100		100		100		100		
		2	Persentase pelaku pertanian yang terlatih	Persen	100	100			100		100		100		100		100		
3.03.3.03.01.33	Program produksi dan mutu hasil perkebunan dan hortikultura		Laju produksi Perkebunan dan hortikultura	Persen	-53,17	122,89			0,233	780.000.000	0,234	803.400.000	0,234	807.417.000	0,235	823.565.340	0,235	3.214.382.340	Dinas Pangan dan Pertanian
Sasaran: Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			Status Indeks Desa Membangun	Status	Berkebang	Berkebang	Berkembang	-	Berkembang	2.713.325.400	Berkembang	2.794.725.162	Berkembang	2.808.698.788	Berkembang	2.864.872.764	Berkembang	11.181.622.113	
Program:																			

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.07.2.07.01.20	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan		Persentase Kawasan Pedesaan yang dibina	Person	28	28	42		57	174.875.400	71	180.121.662	85	181.022.270	100	184.642.716	100	720.662.048	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.2.07.01.17	Program Pengembangan Kelembagaan dan Potensi Desa		Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa:							2.538.450.000		2.614.603.500		2.627.676.518		2.680.230.048		10.460.960.065	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1	Jumlah Bumdes yang dibina	Bumdes	172	172	175		177		179		181		183		183		
		2	Jumlah Potensi/Inovasi Desa yang dikembangkan	Jenis	50	50	230		410		590		770		900		900		
JUMLAH							425.672.972.732			428.216.827.803		441.834.277.505		446.256.242.056		455.655.196.910		2.197.635.517.005	

Sumber: hasil analisis, 2019

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta melaksanakan semua urusan pemerintahan, dengan mengalokasikan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung termasuk Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, dimana pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut berdasarkan program Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, maka disusun berbagai program dan kegiatan yang disesuaikan urusan pemerintahan daerah serta prioritas dan kebutuhan daerah sekaligus memuat penjabaran dari program unggulan daerah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta. Program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif dan target kinerja terukur yang akan dilaksanakan oleh semua perangkat daerah yang ada. Rencana Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019–2023 disajikan pada Tabel 7.1.

Selanjutnya, alokasi belanja langsung digunakan untuk mendanai pelaksanaan program perangkat daerah. Program perangkat daerah merupakan penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Daftar program perangkat daerah yang dibutuhkan dalam pembangunan Kabupaten Purwakarta selama kurun waktu Tahun 2018-2023 disajikan berdasarkan urusan pemerintahan daerah serta fungsi penunjang urusan pemerintahan. Penyajian program tersebut dimuat pada Tabel 7.2.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023

Kode			Kapasitas Riil/Belanja	Proyeksi (Rp)				
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
			Kapasitas Riil Keuangan	911.422.422.219	930.671.527.038	958.211.662.740	966.367.966.639	986.169.155.984
2	1		Belanja Tidak Langsung	1.332.319.944.790	1.442.849.466.778	1.540.835.149.476	1.679.775.197.433	1.831.854.576.835
2	1	1	Belanja Pegawai	978.770.494.982	1.076.647.544.480	1.184.312.298.928	1.302.743.528.821	1.433.017.881.703
2	1	2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2	1	3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2	1	4	Belanja Hibah	30.581.650.000	27.110.732.500	29.821.805.750	32.803.986.325	36.084.384.958
2	1	5	Belanja Bantuan Sosial	5.000.000.000	5.250.000.000	5.512.500.000	5.788.125.000	6.077.531.250
2	1	6	Belanja Bagi Hasil	48.663.409.941	51.096.580.438	24.331.704.970	26.764.875.468	29.441.363.014
2	1	7	Belanja Bantuan Keuangan	268.804.389.867	282.244.609.360	296.356.839.828	311.174.681.819	326.733.415.910
2	1	8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
2	2		Belanja Langsung	911.422.422.219	930.671.527.038	958.211.662.740	966.367.966.639	986.169.155.984
2	2	1	Belanja Pegawai	46.346.687.650	47.325.522.740	48.725.964.550	49.140.720.277	50.147.629.385
2	2	2	Belanja Barang dan Jasa	514.238.611.095	525.099.253.411	540.637.823.440	545.239.736.105	556.411.873.041
2	2	3	Belanja Modal	350.837.123.474	358.246.750.887	368.847.874.750	371.987.510.257	379.609.653.559

Sumber: Hasil proueksi Bapenda, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Bappeda dan Litbang, 2019

Tabel 7.2

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Urusan Wajib						713.66 3.611. 673		727.01 8.181. 398		748.99 9.387. 083		756.10 9.629. 603		771.70 5.652. 208		3.717.49 6.461.96 5	
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar						587.33 5.976. 732		595.59 6.574. 668		614.04 2.647. 344		620.47 8.106. 166		633.36 1.498. 302		3.050.81 4.803.21 3	
1.01	Pendidikan						175.32 0.935. 000		177.48 9.219. 920		183.38 9.549. 039		185.53 4.536. 496		189.71 9.057. 239		911.453. 297.694	
1.01.1 .01.01	Dinas Pendidikan						175.32 0.935. 000		177.48 9.219. 920		183.38 9.549. 039		185.53 4.536. 496		189.71 9.057. 239		911.453. 297.694	
1.01.1. 01.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	4.796. 332.00 0								100	4.796.33 2.000	Dinas Pendidikan
1.01.1. 01.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100	530.00 0.000								100	530.000. 000	Dinas Pendidikan
1.01.1. 01.01. 06	Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat	Persen	100	100	100	115.00 0.000								100	115.000. 000	Dinas Pendidikan

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	kinerja dan keuangan		dan Benar																
1.01.1.01.01.07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran									5.597.240.000		5.737.171.000		5.794.542.710		5.910.433.564		23.039.387.274	Dinas Pendidikan
		1	Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100		
		2	Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/prasarana kantor	Persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100		
		3	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100		
		4	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		5	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang - undangan	Persen	100	100			100,00			100,00			100,00		100		
		6	Persentase ketersediaan data kinerja OPD	Persen	100	100			100,00			100,00			100,00		100		
1.01.1.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini		Persentase Lembaga PAUD yang terakreditasi	Persen	10,40	24,56	35,62	746.400.000	46,68	850.000.000	57,74	877.200.000	68,81	885.972.000	79,87	903.691.440	79,87	4.263.263.440	Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun							114.380.480.000		115.584.580.800		119.543.142.148		121.049.665.535		123.944.488.859		594.502.357.341	Dinas Pendidikan
		1	Persentase Sekolah Dasar yang terakreditasi	Persen	0,00	57,35	67,16		76,96		86,76		96,57		96,57		96,57		
		2	Persentase Sekolah Menengah Pertama yang terakreditasi	Persen	0,00	57,41	63,89		70,37		76,85		83,33		89,81		89,81		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.01.1. 01.01. 18	Program Pendidikan Non Formal		Persen		8,14	16,28	725.00 0.000	24,42	798.75 0.000	32,56	824.31 0.000	40,70	832.55 3.100	48,84	849.20 4.162	48,84	4.029.81 7.262	Dinas Pendidikan
1.01.1. 01.01. 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidika n						9.757. 846.00 0		9.818. 300.00 0		10.132 .485.6 00		10.233 .810.4 56		10.438. 486.66 5		50.380.9 28.721	Dinas Pendidikan
		1	Persentase Guru yang berkualifikas i S1 (%)	Persen	93,7 8	95,32	95,99		96,66		97,34		98,02		98,70		98,70	
		2	Persentase Guru yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan	Persen			1,86		1,86		1,86		1,86		1,86		1,86	
1.01.1. 01.01. 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan						40.811 .877.0 00		41.367 .349.1 20		42.691 .104.2 92		43.118 .015.3 35		43.980. 375.64 1		211.968. 721.388	Dinas Pendidikan
		1	Angka Partisipasi Murni Pendidikan Anak Usia Dini (%)	Persen	50,0 7	61,25	61,84		62,46		63,09		63,72		64,35		64,35	
		2	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Pake t A (%)	Persen	99,5 1	99,52	99,53		99,55		99,57		99,59		99,61		99,61	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3	Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/Paket B (%)	Persen	99,72	99,72	99,74		99,76		99,78		99,80		99,82		99,82		
		4	Persentase Kondisi Ruang Kelas SD dalam keadaan baik	Persen	18,91	17,25	18,46		19,75		21,13		22,61		24,19		24,19		
		5	Persentase Kondisi Ruang Kelas SMP dalam keadaan baik	Persen	31,47	32,00	34,24		36,64		39,20		41,95		44,88		44,88		
1.01.1.01.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		Persentase realisasi program Manajemen pelayanan pendidikan (%)	Persen	57,35	97,01	100	3.458.000.000	100	3.473.000.000	100	3.584.136.000	100	3.619.977.360	100	3.692.376.907	100,00	17.827.490.267	Dinas Pendidikan
1.02	Kesehatan						237.388.620.432		238.946.204.388		246.265.831.688		248.728.490.005		253.703.059.805		1.225.032.206.318		
1.02.1.02.01	Dinas Kesehatan						127.164.260.432		128.541.522.388		132.563.532.638		133.889.167.964		136.566.951.324		658.725.434.746		
1.02.1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	11.793.940.000								100	11.793.940.000	Dinas Kesehatan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.02.1. 02.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tersedianya Sarana dan Aparatur	Persen	100	100	100	754.00 0.000								100	754.000. 000	Dinas Kesehatan
1.02.1 .02.01 .05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100	100	100	130.00 0.000								100	130.000. 000	Dinas Kesehatan
1.02.1. 02.01. 06	Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100	100	100	82.500 .000								100	82.500.0 00	Dinas Kesehatan
1.02.1. 02.01. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran								13.045 .495.1 88		13.371 .632.5 68		13.505 .348.8 93		13.775. 455.87 1		53.697.9 32.520	Dinas Kesehatan
		1	Persentase pegawai yang memiliki kescsuaian kompetensi	Persen	70,9	70,9			100		100		100		100		100	
		2	Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/pras arana kantor	Persen	97,3 4	97,34			100		100		100		100		100	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persen	93,04	93,04			100		100		100		100		100		
		4	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	97,34	97,34			100		100		100		100		100		
		5	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang - undangan	Persen	100	100			100		100		100		100		100		
		6	Persentase ketersediaan data kinerja OPD	Persen	100	100			100		100		100		100		100		
1.02.1.02.01.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan		Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	Persen	85,00	88,33	90,00	4.720.897.000	90,00	5.132.364.000	90,00	5.296.599.648	95,00	5.349.565.644	95,00	5.456.556.957	95,00	25.955.983.250	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase pencapaian target SPM sesuai	Persen	58,33	58,33	66,67	17.116.000.000	66,67	17.400.000.000	75,00	17.956.800.000	75,00	18.136.368.000	83,33	18.499.095.360	83,33	89.108.263.360	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			wilayah kerja																
1.02.1. 02.01. 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan		Cakupan sarana farmasi yang dibina	Persen	77,9 2	80,52	85,71												
1.02.1. 02.01. 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaa n Masyarakat																		
		1	Cakupan Strata Posyandu Purnama Dan Mandiri	Persen	60,9 4	61,63	62,02												
		2	Cakupan Rumah Tangga ber- PHBS	Persen	64,8 7	65,25	65,68												
1.02.1. 02.01. 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat																		
		1	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	68,7 2	70,13	71,54												
		2	Cakupan pelayanan bayi	Persen	98,3 5	98,43	98,80												
1.02.1. 02.01. 21	Program Pengembang an Lingkungan																		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Sehat																		
		1	Cakupan Sarana Sanitasi dasar (air Bersih, Rumah Sehat, Jamban Keluarga dan SPAL)	Persen	75,73	75,79	75,83		75,94		75,95		75,96		75,97		75,97		
		2	Cakupan TTU dan TPM Yang Memenuhi Syarat	Persen	54,43	55,61	57,09		58,28		59,14		61,24		61,83		61,83		
1.02.1.02.01.34	Program Pencegahan dan Penanggulan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC; dan Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	Persen	80	80	80	3.182.224.000									80	3.182.224.000	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulan Penyakit Menular dan Tidak								4.174.737.000		4.308.328.584		4.351.411.870		4.438.440.107		17.272.917.561		Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Menular																		
		1	Persentase bayi dengan imunisasi dasar lengkap	Persen	84,18	84,64	84,77		85,02		85,30		85,41		85,90		85,90		
		2	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan penyakit menular (TB paru, HIV)	Persen	81,99	82,48	83,12		83,92		84,41		85,05		86,01		86,01		
		3	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persen	1,19	1,07	1,22		1,26		1,31		1,34		1,40		1,40		
1.02.1.02.01.24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin							69.922.675.432		70.200.000.000		72.446.400.000		73.170.864.000		74.634.281.280		360.374.220.712	Dinas Kesehatan
		1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100		
		2	Persentase kepesertaan Penduduk Miskin yang	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		memiliki Jaminan Kesehatan																
1.02.1. 02.01. 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya dengan kondisi baik	Persen	38,4 6	46,15	46,15	8.717. 299.00 0	53,85	8.900. 000.00 0	63,08	9.184. 800.00 0	69,23	9.276. 648.00 0	75,38	9.462.1 80.960	75,38	45.540.9 27.960	Dinas Kesehatan
1.02.1. 02.01. 28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang dibina	Persen	20,0 0	24,00	31,20	350.00 0.000	43,20	558.00 0.000	53,60	575.85 6.000	63,20	581.61 4.560	69,60	593.24 6.851	69,60	2.658.71 7.411	Dinas Kesehatan
1.02.1. 02.01. 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak						3.491. 000.00 0		2.300. 064.00 0		2.373. 666.04 8		2.397. 402.70 8		2.445.3 50.763		13.007.4 83.519	Dinas Kesehatan
		1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	Persen	98,6 8	99,06	99,06		99,09		99,14		99,19		99,25		99,25		
		2 Cakupan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas Dengan Komplikasi Yang Ditangani	Persen	94,9 5	70,13	70,14		72,69		75,23		77,77		82,86		82,86		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Bidan Atau Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	Persen	98,6 8	98,66	98,88		99,04		99,14		99,57		99,62		99,62		
1.02.1. 02.01. 33	Program Promosi Kesehatan		Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Individu, Keluarga dan Masyarakat Dalam Menumbuhk an Perilaku Hidup Sehat dan Mengembang kan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat	Persen	80	80	80	1.850. 000.00 0								80	1.850.00 0.000	Dinas Kesehatan	
1.02.1. 02.01. 35	Program Pengembang an Mutu Pelayanan Kesehatan		Persentase puskesmas yang terakreditasi minimal madya	Persen	75,0 0	80,00	90,00	3.273. 240.00 0	90,00	2.297. 385.00 0	95,00	2.370. 901.32 0	100,00	2.394. 610.33 3	100	2.442.5 02.540	100	12.778.6 39.193	Dinas Kesehatan
1.02.1. 02.01. 38	Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan								1.511. 100.00 0		1.559. 455.20 0		1.575. 049.75 2		1.606.5 50.747		6.252.15 5.699	Dinas Kesehatan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1	Persentase kunjungan pemeriksaan Labkesda	Persen	70,00	75,00	80,00		85,00		90,00		95,00		100		100		
		2	Persentase parameter pemeriksaan Labkesda	Persen	76,70	80,58	84,47		88,35		92,23		96,12		100		100		
1.02.1.02.01.39	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan		Persentase tenaga kesehatan yang memiliki SIP yang masih berlaku	Persen	78,90	80,17	83,54		85,23	855.000.000	89,03	882.360.000	93,25	891.183.600	100	909.007.272	100	3.537.550.872	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.02	RSUD Bayu Asih						110.224.360.000		110.404.682.000		113.702.299.050		114.839.322.041		117.136.108.481		566.306.771.572		
1.02.1.02.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	2.825.460.000								100	2.825.460.000	RSUD Bayu Asih	
1.02.1.02.02.07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran		Persentase ketersediaan dukungan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100		100	2.904.682.000	100	2.977.299.050	100	3.007.072.041	100	3.067.213.481	100	11.956.266.572	RSUD Bayu Asih
1.02.1.02.02.33	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit							107.398.900.000									107.398.900.000	RSUD Bayu Asih	
		1	Persentase Pencapaian Target SPM Pelayanan Medis	Persen	60	60	60		70		75		80		85		85		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	Tingkat Mutu Keperawatan	Persen	60	60	60		70		75		80		85		85		
		3	Cakupan pelayanan penunjang	Persen	60	60	60		70		75		80		85		85		
1.02.1.02.02.34	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD									34.038.767.125		35.059.930.139		35.410.529.441		36.118.740.029		140.627.966.734	RSUD Bayu Asih
		1	Persentase Pencapaian Target SPM Pelayanan Medis	Persen	60	60	60		70		75		80		85		85		
		2	Tingkat Mutu Keperawatan	Persen	60	60	60		70		75		80		85		85		
		3	Cakupan pelayanan penunjang	Persen	60	60	60		70		75		80		85		85		
1.02.1.02.02.35	Program Penguatan Penunjang Pelayanan BLUD									73.461.232.875		75.665.069.861		76.421.720.559		77.950.154.971		303.498.178.266	RSUD Bayu Asih
		1	Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	70	75	80		85		90		90		100		100		
		2	Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah	Persen	60	60	70		75		80		85		90		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			tangga dan sarana/ prasarana rumah sakit															
		3	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100	
		4	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang - undangan	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100	
		5	Persentase ketersediaan data kinerja OPD	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100	
		6	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional	Persen	90	90	90		90		100		100		100		100	
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						105.97 0.876. 700		109.04 6.942. 600		112.26 4.846. 886		113.38 7.495. 355		115.65 5.245. 262		556.325. 406.803	
1.03.1 .03.01	Dinas Pekerjaan Umum,						92.051 .625.0		94.878 .002.2		97.712 .293.7		98.689 .416.6		100.66 3.204.		483.994. 542.549	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Binamarga dan Pengairan							00		00		14		51		984			
1.03.1. 03.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	1.327. 500.00 0									100	1.327.50 0.000	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1. 03.01. 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100	925.00 0.000									100	925.000. 000	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1. 03.01. 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100	100	100	100.00 0.000									100	100.000. 000	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1. 03.01. 06	Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100	100	100	45.000 .000									100	45.000.0 00	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1. 03.01. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran									2.409. 710.40 0		2.469. 953.16 0		2.494. 652.69 2		2.544.5 45.745		9.918.86 1.997	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		1	Persentase pegawai yang	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
							2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			memiliki kesesuaian kompetensi																
		2	Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/pras arana kantor	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100		
		3	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100		
		4	Persentase unit kerja yang mendapatka n pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100		
		5	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang - undangan	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100		
		6	Persentase ketersediaan data kinerja OPD	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.03.1. 03.01. 15	Program pembanguna n jalan dan jembatan							17.494 .565.0 00		55.100 .000.0 00		56.753 .000.0 00		57.320 .530.0 00		58.466. 940.60 0		245.135. 035.600	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		1	Panjang Ruas Jalan Baru	Km	0,50	0,50	0,50										0,50		
		2	Jumlah Jembatan Baru	Titik	1,00	1,00	1,00										0,50		
		3	Persentase Jalan dan Jembatan yang dibangun	Persen	13	15,89	15,79		15,69		15,48		15,30		15,16		15,16		
		4	Persentase Jalan yang ditingkatkan	Persen	13	15,89	13,30		11,66		10,15		8,78		7,54		51,43		
		5	Persentase Jembatan yang ditingkatkan	Persen	46,3 5	46,35	0		1,43		1,43		1,43		1,43		5,72		
1.03.1. 03.01. 16	Program pembanguna n saluran drainase/gor ong-gorong		Persentase Saluran Drainase/Go rong-Gorong yang berfungsi	Persen					25	945.00 0.000	25	973.35 0.000	25	983.08 3.500	25	1.002.7 45.170	100	3.904.17 8.670	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1. 03.01. 17	Program pembanguna n turap/talud/ bronjong		Persentase Turap/Talud /Bronjong yang berfungsi	Persen					6,25 (4/64 DI)	810.00 0.000	6,25 (4/64 DI)	834.30 0.000	6,25 (4/64 DI)	842.64 3.000	6,25 (4/64 DI)	859.49 5.860	6,25 (4/64 DI)	3.346.43 8.860	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.03.1. 03.01. 18	Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase jalan kondisi mantap (rehabilitasi/ pemeliharaaa n Jalan dan Jembatan)	Persen	83,6 6(60 9,83 0 Km)	84,10 (613,0 52 Km)	85,40 (10,56) (76,98 Km)	16.114 .400.0 00	85,52 (10,58) (77,12 Km)	15.260 .000.0 00	85,66 (11,63) (84,76 Km)	15.717 .800.0 00	85,52 (11,75) (85,65 Km)	15.874 .978.0 00	86,82 (11,99) (87,39 Km)	16.192. 477.56 0	86,82 (11,99) (87,39 Km)	79.159.6 55.560	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1. 03.01. 20	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Tingkat Pemenuhan Inspeksi Kondisi jalan dan Jembatan	Persen			27,3	525.00 0.000	18,20	350.00 0.000	18,20	360.50 0.000	18,20	364.10 5.000	18,20	371.38 7.100	18,20	1.970.99 2.100	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1. 03.01. 21	Program tanggap darurat jalan dan jembatan	Persentase Penanggulan gan Tanggap darurat Jalan dan Jembatan	Persen	95	95		1.650. 000.00 0	95	1.690. 000.00 0	95	1.740. 700.00 0	95	1.758. 107.00 0	95	1.793.2 69.140	95	8.632.07 6.140	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1. 03.01. 22	Program pembanguna n sistem informasi/da ta base jalan dan jembatan	Tingkat Pemenuhan Pembanguna n Sistem Informasi/D ata Base Jalan dan Jembatan	Persen					25	58.291 .800	25	60.040 .554	25	60.640 .960	25	61.853. 779	100	240.827. 092	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1. 03.01. 23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamarga an	Persentase Sarana dan Prasarana Kebinamarga an yang berfungsi	Persen	27,7 7	27,77	5,55	3.260. 000.00 0	5,55	3.200. 000.00 0	5,55	3.296. 000.00 0	5,55	3.328. 960.00 0	5,55	3.395.5 39.200	27,75	16.480.4 99.200	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1. 03.01. 24	Program Pengembang an dan Pengelolaan Jaringan	Persentase Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan	Persen	24,1	30,06		12.022 .155.0 00	32,56 (18,75) (12/64 DI)	11.770 .000.0 00	35,06 (18,75) (12/64 DI)	12.123 .100.0 00	37,56 (18,75) (12/64 DI)	12.244 .331.0 00	40,06 (18,75) (12/64 DI)	12.489. 217.62 0	40,06 (18,75) (12/64 DI)	60.648.8 03.620	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya		Lainnya Secara Partisipatif yang berfungsi																Pengairan
1.03.1.03.01.34	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan							37.463.005.000										37.463.005.000	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		1	Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan	Km	0.40	0.40	0.40										0.40		
		2	Jumlah Jembatan Yang Ditingkatkan	Unit	1	1	1										1		
1.03.1.03.01.35	Program Penelitian dan Perancangan Jalan dan Jembatan		Tingkat Pemenuhan Penelitian dan Perencanaan Jalan dan Jembatan	Persen			20	525.000.000	20	600.000.000	20	618.000.000	20	624.180.000	20	636.663.600	100	3.003.843.600	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1.03.01.37	Program Penelitian dan Perancangan Pengembangan Jaringan Irigasi		Persentase Penelitian dan Perancangan Pengembangan Jaringan Irigasi yang dimanfaatkan	Persen			20	600.000.000	20	697.500.000	20	718.425.000	20	725.609.250	20	740.121.435	100	3.481.655.685	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.03.1. 03.01. 49	Program Pemeliharaan Saluran Drainase /Go rong-Gorong	Persentase Pemeliharaaa n saluran drainase /Go rong - gorong	Persen					25	517.50 0.000	25	533.02 5.000	25	538.35 5.250	25	549.12 2.355	100	2.138.00 2.605	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1. 03.01. 50	Program Pembanguna n Jaringan Irigasi	Persentase Jaringan Irigasi yang dibangun	Persen					3,1	647.50 0.000	3,1	666.92 5.000	3,1	673.59 4.250	3,1	687.06 6.135	12,4	2.675.08 5.385	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1. 03.01. 51	Program Pembanguna n Sistem Informasi/Da ta Base Irigasi	Persentase Sistem Informasi/D ata Base Irigasi yang dikembangk an	Persen					25	90.000 .000	25	92.700 .000	25	93.627 .000	25	95.499. 540	100	371.826. 540	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1. 03.01. 52	Program Pengawasan dan Pengendalian Kebinamarga an dan Pengairan	Persentase Pengawasan dan Pengendalia n Kebinamarga an dan Pengairan yang dilaksana n dengan baik	Persen					32,56	402.50 0.000	35,06	414.57 5.000	37,56	418.72 0.750	40,06	427.09 5.165	40,06	1.662.89 0.915	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1. 03.01. 53	Program Pengujian Bahan dan Alat Laboratorium Teknik	Persentase Bahan dan Alat Laboratoriu m teknik yang berfungsi dengan baik	Persen					25	330.00 0.000	25	339.90 0.000	25	343.29 9.000	25	350.16 4.980	100	1.363.36 3.980	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.03.1 .03.02	Dinas Tata Ruang dan Permukiman						13.919 .251.7 00		14.168 .940.4 00		14.552 .553.1 72		14.698 .078.7 04		14.992 .040.2 78		72.330.8 64.254	
1.03.1. 03.02. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	5.895. 388.00 0								100	5.895.38 8.000	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
1.03.1. 03.02. 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100	1.975. 048.30 0								100	1.975.04 8.300	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
1.03.1. 03.02. 03	Program peningkatan disiplin aparatur		Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100	100	100	150.00 0.000								100	150.000. 000	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
1.03.1. 03.02. 06	Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100	100	100	136.50 0.000								100	136.500. 000	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
1.03.1. 03.02. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran								8.291. 088.00 0		8.498. 365.20 0		8.583. 348.85 2		8.755.0 15.829		34.127.8 17.881	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
		1	Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	100	100			100		100		100		100		100	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/prasarana kantor	Persen	100	100			100			100			100		100	
		3	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persen	100	100			100			100			100		100	
		4	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100			100			100			100		100	
		5	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang - undangan	Persen	100	100			100			100			100		100	
		6	Persentase ketersediaan data kinerja OPD	Persen	100	100			100			100			100		100	
1.03.1.03.02.25	Program Penyediaan dan		Unit Pengolah Air Baku Yang	Unit	1	1		1		1		1		1		1		Dinas Tata Ruang dan Permukiman

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Pengolahan Air Baku		Terbangun (Unit)						0		0		5						
1.03.1.03.02.31	Program Perencanaan Tata Ruang		Persentase RDTR/RTR KSK Yang Ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (%)	Persen	0	0	18,5	800.00 0.000	18,50	990.00 0.000	7,40	1.019.700.00 0	11,10	1.029.897.00 0	18,50	1.050.494.940	18,50	4.890.091.940	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
1.03.1.03.02.32	Program Pemanfaatan Ruang							325.00 0.000		480.00 0.000		494.40 0.000		499.34 4.000		509.33 0.880		2.308.074.880	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
		1	Sistem Informasi Pemanfaatan Ruang Daerah	Jumla h Perang kat Lunak	0	0	1		1		1		1		1		1		
		2	Laporan Status Pemanfaatan Ruang Yang Diselesaikan (Laporan)	Lapora n	0	0	1		1		1		1		1		1		
		3	Persentase Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Tata Ruang (%)	Persen	0	0	80		80		80		80		80		80		
		4	Persentase Perusahaan Pemegang izin Pemanfaatan Ruang yang dibina/	Persen	0	0	100		100		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			ditinjau																
1.03.1. 03.02. 33	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Jumlah Permohonan Rencana Tapak Yang Dikaji	Doku men	60	77	60	50.000 .000	60	174.87 5.400	60	180.12 1.662	60	181.92 2.879	60	185.56 1.336	60	772.481. 277	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
1.03.1. 03.02. 39	Program Pengembang an Kinerja Pengelolaan Air Minum						107.31 5.400		679.72 7.000		700.11 8.810		707.11 9.998		721.26 2.398		2.915.54 3.606	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	
		1	Jumlah Sarana Prasarana Air Bersih Komunal Yang Dibangun	Unit	6	13	5		4		4		4		4		4		
		2	Panjang Saluran Air Bersih Perpipaan Yang Dibangun (Km)	Km	11,0 9	7,8	2		2		2		2		2		2		
1.03.1. 03.02. 47	Program Pembanguna n Saluran Drainase /Go rong-Gorong Lingkungan		Jumlah panjang saluran Drainase / Gorong- gorong Lingkungan yang Dibangun / Diperbaiki	Meter	123	136	150	3.580. 000.00 0	150	2.500. 000.00 0	150	2.575. 000.00 0	150	2.600. 750.00 0	150	2.652.7 65.000	150	13.908.5 15.000	Dinas Tata Ruang dan Permukiman

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman						44.325 .899.6 00		44.692 .067.8 33		46.032 .829.8 68		46.493 .158.1 66		47.423 .021.3 30		228.966. 976.797		
1.04.1 .03.02	Dinas Tata Ruang dan Permukiman						44.325 .899.6 00		44.692 .067.8 33		46.032 .829.8 68		46.493 .158.1 66		47.423 .021.3 30		228.966. 976.797		
1.04.1. 03.02. 15	Program Pengembang an Perumahan						950.00 0.000		1.987. 000.00 0		2.046. 610.00 0		2.067. 076.10 0		2.108.4 17.622		9.159.10 3.722	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	
		1	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Diperbaiki	Unit	987	1345	1840		2.000		2.000		2.000		2.000		2000		
		2	Jumlah Pendirian Kawasan Rusunawa Yang Difasilitasi	Jumla h Menar a	1	1	2		1		1		1		1		1		
1.04.1. 03.02. 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Sanitasi Yang Dibangun / Diperbaiki (Unit)	Unit	0	3	1	550.00 0.000	2	1.802. 000.00 0	2	1.856. 060.00 0	2	1.874. 620.60 0	2	1.912.1 13.012	2	7.994.79 3.612	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
1.04.1. 03.02. 17	Program Pemberdayaa n Komunitas Perumahan/ Permukiman		Kelompok Masyarakat Yang Dibentuk dan Dibina	BKM	192	192	48	200.00 0.000	100	455.00 0.000	100	468.65 0.000	100	473.33 6.500	100	482.80 3.230	100	2.079.78 9.730	Dinas Tata Ruang dan Permukiman

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						2019		2020		2021		2022		2023							
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1.04.1. 03.02. 20	Program pengelolaan areal pemakaman		Luas Areal TPU Yang Dikelola Pemda	Ha	1,8	2,1	4,2		400.00 0.000	4,2		600.00 0.000	4,2		618.00 0.000	4,2	624.18 0.000	636.66 3.600	4,20	2.878.84 3.600	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
1.04.1. 03.02. 24	Program Keselamatan Gedung dan Bangunan						1.325. 000.00 0		655.78 2.750		675.45 6.233		682.21 0.795		695.85 5.011			4.034.30 4.788		Dinas Tata Ruang dan Permukiman	
		1	Rasio Bangunan Ber-IMB Per satuan bangunan	Persen	19,6	20	20,4		20,80		21,20		21,60		22,00		22,00				
		2	Frekuensi Inspeksi Keselamatan Gedung dan Bangunan (Hari)	Hari	5	5	5		5		5		5		5		5				
1.04.1. 03.02. 25	Program Pembanguna n dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan		Jumlah Panjang jalan Lingkungan Dibangun/Di perbaiki	Km	47,8 1	55,61	11,39		6.425. 899.60 0	4,00		2.405. 554.78 3	4,00		2.477. 721.42 6	4,00	2.502. 498.64 0	2.552.5 48.613	83,00	16.364.2 23.063	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
1.04.1. 03.02. 26	Program Pembanguna n dan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)		Jumlah PJU Dalam Kondisi Baik	Unit	2041	3241	2975		1.000. 000.00 0	3110		1.440. 000.00 0	3190		1.483. 200.00 0	3241	1.498. 032.00 0	1.527.9 92.640	3241	6.949.22 4.640	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
1.04.1. 03.02. 26	Program Pemeliharaan Ornamen Kota		Persentase Ornamen Kota yang dipelihara	Persen	100	100	100		300.00 0.000								100	300.000. 000		Dinas Tata Ruang dan Permukiman	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						2019		2020		2021		2022		2023											
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1.04.1. 03.02. 28	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Jumlah RTH yang dibangun/ dipelihara (Lokasi)	Lokasi	50	68	68		4.100. 000.00 0	68		4.550. 000.00 0	68		4.686. 500.00 0	68		4.733. 365.00 0	68		4.828.0 32.300	68		22.897.8 97.300	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
1.04.1. 03.02. 30	Program Pembanguna n dan Penataan Ruang Publik		Jumlah Ruang Publik Yang Direvitalisasi / Dibangun.	Unit	16	10	15		28.550 .000.0 00	15		29.435 .000.0 00	15		30.318 .050.0 00	15		30.621 .230.5 00	15		31.233. 655.11 0	15		150.157. 935.610	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
1.04.1. 03.02. 31	Program Pengelolaan Ornamen Kota dan Reklame		Persentase Ornamen Kota dan Reklame yang dikelola dan diipelihara	Persen	100	100			100			866.25 0.000	100		892.23 7.500	100		901.15 9.875	100		919.18 3.073	100		3.578.83 0.448	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
1.04.1. 03.02. 32	Program Pembanguna n dan Pengelolaan Lampu Hias	1	Jumlah Lampu Hias Dalam Kondisi Baik	Unit	2050	1822	1795		525.00 0.000			495.48 0.300			510.34 4.709			515.44 8.156			525.75 7.119			2.572.03 0.284	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
		2	Jumlah Lampu Hias dan Penerangan Jalan Umum Pada Ruang Publik dan Jalur Perlintasan Strategis	Unit						1810			1815			1822			1822			1822			
1.05	Ketentrama n dan Ketertiban Umum serta Perlindungan								20.939 .770.0 00			21.972 .948.8 00			22.541 .709.3 95			22.751 .066.8 71			23.206 .088.2 08			111.411. 583.274	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Masyarakat																		
1.05.1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja							8.409.666.000		8.867.158.800		9.097.831.520		9.188.809.835		9.372.586.032		44.936.052.187	
1.05.1.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	5.103.930.000									100	5.103.930.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100	513.236.000									100	513.236.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur		Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100	100	100	637.500.000									100	637.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100	100	100	415.000.000									100	415.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100	100	100	55.000.000									100	55.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.05.1. 05.01. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran									7.068. 408.80 0	70	7.245. 119.02 0		7.317. 570.21 0		7.463.9 21.614		29.095.0 19.645	Satuan Polisi Pamong Praja
		1	Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	64	64			65				73		75		75		
		2	Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana / prasarana kantor	Persen	100	100			100		100		100		100		100		
		3	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persen	80	80			80		80		80		85		85		
		4	Persentase Unit Kerja yang mendapatka n pelayanan administrasi Perkantoran	Persen	100	100			100		100		100		100		100		
		5	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	100	100			100		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan																
		6	Persentase ketersediaan data Kinerja OPD	Persen	100	100			100		100		100		100		100		
1.05.1.05.01.23	Program Pemeliharaan Trantibmas dan Penegakan Peraturan Daerah		Frekuensi Penertiban Trantibmas; Frekuensi Pengendalian Trantibmas dan Frekungsi Penertiban Trantibmas	Kali	10 Kali; 45 Kali dan 65 Kali	10 Kali; 45 Kali dan 65 Kali	10 Kali; 45 Kali dan 65 Kali	695.000.000									10 Kali; 45 Kali dan 65 Kali	695.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.24	Program Peningkatan Kapasitas Penanganan Trantibmas		Jenis Pelatihan Penanganan Kantribmas dan Jenis Sarana Prasarana Penanganan Kantribmas	Jenis	4 Jenis dan 1 Jenis	4 Jenis dan 2 Jenis	4 Jenis dan 2 Jenis	990.000.000									4 Jenis dan 2 Jenis	990.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.42	Program Penegakan Perundang-undangan Daerah									450.000.000		463.500.000		468.135.000		477.497.700		1.859.132.700	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1	Persentase pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum	Persen	100	100			100		100		100		100		100		
		2	Persentase kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum yang tertangani	Persen	80	100			100		100		100		100		100		
1.05.1.05.01.43	Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat									165.000.000		169.950.000		171.649.500		175.082.490		681.681.990	Satuan Polisi Pamong Praja
		1	Frekuensi pelaksanaan operasi dan pengendalian/penertiban trantibmas	Kegiat an	33	34			34		34		40		40		40		
		2	Frekuensi pelaksanaan kerjasama, pengawasan, pencegahan dan penertiban	Kegiat an	7	7			8		8		8		8		8		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		terhadap asset daerah																
1.05.1. 05.01. 44	Program Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	Persen	0	48			48	285.00 0.000	60	293.55 0.000	60	296.48 5.500	72	302.41 5.210	72	1.177.45 0.710	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1. 05.01. 45	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Trantibmas								437.50 0.000		450.62 5.000		455.13 1.250		464.23 3.875		1.807.49 0.125	Satuan Polisi Pamong Praja
		1 Tingkat pemenuhan kebutuhan diklat/bimte k satpol pp yang diselenggara kan	Persen	70	80			85		90		95		100		100		
		2 Persentase anggota satpol pp yang dibina	Persen	100	80			85		90		95		100		100		
1.05.1. 05.01. 46	Program Perlindungan Masyarakat								461.25 0.000		475.08 7.500		479.83 8.375		489.43 5.143		1.905.61 1.018	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1	Persentase anggota satlinmas yang dibina	Persen	10	20			20		20		20		20		20		
		2	Jumlah pembinaan potensi masyarakat	Kegiat an	5	5			10		10		10		10		10		
1.05.1 .05.02	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik							5.158. 100.00 0		5.222. 640.00 0		5.353. 206.00 0		5.390. 678.44 2		5.498. 492.01 1		26.623.1 16.453	
1.05.1. 05.02. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	603.20 0.000									603.200. 000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.05.1. 05.02. 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100	199.90 0.000									199.900. 000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.05.1. 05.02. 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100	100	100	55.000 .000									55.000.0 00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.05.1. 05.02. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran								942.64 0.000		966.20 6.000		972.96 9.442		992.42 8.831		3.874.24 4.273	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		1	Persentase Pegawai yang memiliki	Persen	100	100			100		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			kesesuaian Kompetensi															
		2	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan sarana/para sarana Kantor	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
		3	Persentase Sarana dan Parasana dalam Kondisi Baik	Persen	90	90		100		100		100		100		100		
		4	Persentase Unit Kerja yang mendapatka n Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
		5	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
		6	Persentase Ketersediaan Data Kinerja	Persen	100	100		100		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			OPD															
1.05.1. 05.02. 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		Pembinaan Forum Penanganan Keamanan Daerah	Jumla h Forum /Tim	4	4	4	100.00 0.000								4	100.000. 000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1. 05.02. 17	Program pengembang an wawasan kebangsaan		Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi LSM dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Guru dan Pelajar:				1.200. 000.00 0										1.200.00 0.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			- Jumlah LSM		26	27	27									27		
			- Jumlah Kegiatan		5	5	5									5		
1.05.1. 05.02. 19	Program pemberdayaa n masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan		Forum Masyarakat Untuk Ketertiban dan Keamanan (FKUB, FPK, dan FKDM) Yang Dibina	Jumla h forum	3	3	3	2.750. 000.00 0								3	2.750.00 0.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1. 05.02. 21	Program pendidikan politik masyarakat		Persentase Jumlah Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam	Persen	75	76	76	250.00 0.000								76	250.000. 000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkadaes																
1.05.1. 05.02. 39	Program Kesatuan Bangsa								1.625. 000.00 0		1.665. 625.00 0		1.677. 284.37 5		1.710.8 30.063		6.678.73 9.438	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		1	Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100	
		2	Persentase tingkat harmonisasi kerukunan antar umat beragama	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100	
1.05.1. 05.02. 40	Program Kewaspadaa n Dini Daerah		Persentase jumlah penurunan konflik sosial di purwakarta	Persen	100	100	100		100		1.940. 000.00 0		1.988. 500.00 0		2.002. 419.50 0		2.042.4 67.890	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1. 05.02. 41	Program Politik Dalam Negeri		Persentase jumlah partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan politik	Persen	100	100	100		100		715.00 0.000		732.87 5.000		738.00 5.125		752.76 5.228	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.05.1 .05.03	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulan gan Bencana							7.372. 004.00 0		7.883. 150.00 0		8.090. 671.87 5		8.171. 578.59 4		8.335. 010.16 6		39.852.4 14.634	
1.05.1. 05.03. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	4.944. 504.00 0									100	4.944.50 4.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulan gan Bencana
1.05.1. 05.03. 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100	1.080. 000.00 0									100	1.080.00 0.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulan gan Bencana
1.05.1. 05.03. 03	Program peningkatan disiplin aparatur		Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100	100	100	175.00 0.000									100	175.000. 000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulan gan Bencana
1.05.1. 05.03. 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100	100	100	100.00 0.000									100	100.000. 000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulan gan Bencana
1.05.1. 05.03. 06	Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100	100	100	47.500 .000									100	47.500.0 00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulan gan Bencana

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.05.1. 05.03. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran									5.794. 525.00 0		5.939. 388.12 5		5.998. 782.00 6		6.118.7 57.646		23.851.4 52.778	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulan gan Bencana
		1	Persentase Pegawai yang memiliki kesesuaian Kompetensi	Persen	41	56			71		82		93		100		100		
		2	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan sarana/para sarana Kantor	Persen	30	50			100		100		100		100		100		
		3	Persentase Sarana dan Parasana dalam Kondisi Baik	Persen	70	100			100		100		100		100		100		
		4	Persentase Unit Kerja yang Mendapatka n Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	80	100			100		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		5	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	80	100			100		100		100		100		100		
		6	Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	80	100			100		100		100		100		100		
1.05.1. 05.03. 29	Program Pencegahan dan Penanggulangan Pemberdayaan Masyarakat								195.00 0.000		200.85 0.000		202.85 8.500		206.91 5.670		805.624. 170	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	
		1	Persentase Gedung/Bangunan yang memiliki proteksi kebakaran	Persen					100								100		
		2	Persentase sosialisasi dan pelatihan / simulasi yang akan dilaksanakan	Persen					100								100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	Persentase warga negara yang terlatih di kawasan rawan kebakaran	Persen				100								100		
1.05.1.05.03.31	Program Pengembangan SDM dan Sarana Prasarana DPKPB								450.000.000		463.500.000		468.135.000		477.497.700		1.859.132.700	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
		1	Persentase pemenuhan kebutuhan Kompetensi SDM Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	Persen	100	100	100	100								100		
		2	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan prasarana teknis pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana	Persen	100	100	100	100								100		
		3	Persentase Perawatan dan pemeliharaan aset	Persen	100	100	100	100								100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			sarana dan prasarana															
1.05.1. 05.03. 33	Program Penanggulan Kebakaran dan Penyelamata n								484.20 0.000		498.72 6.000		503.71 3.260		513.78 7.525		2.000.42 6.785	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
		1	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penanggulan gan kebakaran dan penyelamata n	Persen				100		100		100		100		100		
		2	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana teknis penanggulan gan kebakaran dan Penyelamata n	Persen				100		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	Persentase peralatan dan perlengkapan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dalam kondisi baik	Persen				100		100		100		100		100		
		4	Persentase ketersediaan data kejadian kebakaran	Persen				100		100		100		100		100		
1.05.1.05.03.34	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi								337.500.000		347.625.000		351.101.250		358.123.275		1.394.349.525	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
		1	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan SDM sesuai kompetensi	Persen				100		100		100		100		100		
		2	Persentase tingkat pemenuhan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi	Persen				100		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.05.1. 05.03. 36	Program Pencegahan dan Kesiapsiaga n									316.92 5.000		326.43 2.750		329.69 7.078		336.29 1.019		1.309.34 5.847	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulan gan Bencana
		1	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiaga n terhadap bencana	Persen					100		100		100		100		100		
		2	Persentase data / informasi tentang informasi dan resiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah / legal	Persen					100		100		100		100		100		
		3	Persentase warga negara yang terlatih di kawasan rawan bencana	Persen					9		22		35		48		48		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4	Persentase tersedianya layanan Pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen					100		100		100		100		100		
		5	Persentase peralatan perlindungan terhadap bencana dalam kondisi baik	Persen					100		100		100		100		100		
		6	Persentase intansi terkait dalam penanggulangan gan Bencana	Persen					100		100		100		100		100		
1.05.1.05.03.37	Program Kedaruratan dan Logistik									240.000.000		247.200.000		249.672.000		254.665.440		991.537.440	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan gan Bencana
		1	Persentase jumlah SDM yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Persen					100		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan di evakuasi terhadap kejadian bencana	Persen				100		100		100		100		100		
		3	Persentase kecepatan response time kurang dari 24 jam untuk status darurat bencana	Persen				100		100		100		100		100		
1.05.1.05.03.38	Program Rehabilitasi dan Rekontruksi	1	Persentase dokumen penilaian kerusakan akibat bencana	Persen				100	65.000.000	100	66.950.000	100	67.619.500	100	68.971.890	100	268.541.390	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulan gan Bencana
		2	Persentase bangunan yang di rehabilitasi pasca bencana	Persen				100		100		100		100		100		
1.05.1.05.03.28	Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		Tingkat Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen			100		1.025.000.000							100	1.025.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulan gan Bencana
1.06	Sosial																	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							3.389.875.000		3.449.191.128		3.547.880.468		3.583.359.273		3.655.026.458		17.625.332.327	
1.06.1.06.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak						3.389.875.000		3.449.191.128		3.547.880.468		3.583.359.273		3.655.026.458		17.625.332.327	
1.06.1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	666.000.000								100	666.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100	290.000.000								100	290.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100	100	100	80.000.000								100	80.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.06.1. 06.01. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran									957.27 8.628		981.21 0.593		991.02 2.699		1.010.8 43.153		3.940.35 5.073	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan, dan Perlindunga n Anak
		1	Persentase Pegawai yang memiliki kesesuaian Kompetensi	Persen					100		100		100		100		100		
		2	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan sarana/para sarana Kantor	Persen					100		100		100		100		100		
		3	Persentase Sarana dan Parasana dalam Kondisi Baik	Persen					100		100		100		100		100		
		4	Persentase Unit Kerja yang Mendapatka n Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen					100		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		5	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan	Persen					100		100		100		100		100		
		6	Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen					100		100		100		100		100		
1.06.1. 06.01. 15	Program Pemberdayaa n Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraa n Sosial (PMKS) Lainnya		Persentase Fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraa n Sosial Lainnya yang diberdayaka n	Persen			85	125.00 0.000	90	126.91 2.500	90	130.71 9.875	90	132.02 7.074	100	134.66 7.615	100	649.327. 064	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan, dan Perlindunga n Anak
1.06.1. 06.01. 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraa n Sosial		Persentase Capaian Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraa n Sosial	Persen			90	1.887. 500.00 0	90	1.815. 000.00 0	85	1.869. 450.00 0	90	1.888. 144.50 0	90	1.925.9 07.390	90	9.386.00 1.890	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan, dan Perlindunga n Anak

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.06.1. 06.01. 17	Program Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah Anak terlantar yang dibina	Orang			20	30.000 .000	20	50.000 .000	20	51.500 .000	20	52.015 .000	20	53.055. 300	20	236.570. 300	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan, dan Perlindunga n Anak
1.06.1. 06.01. 21	Program Pemberdayaa n Kelembagaan Kesejahteraa n Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraa n Sosial yang dibina	Lemba ga			30	311.37 5.000	30	500.00 0.000	30	515.00 0.000	30	520.15 0.000	30	530.55 3.000	30	2.377.07 8.000	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan, dan Perlindunga n Anak
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						126.32 7.634. 941		131.42 1.606. 730		134.95 6.739. 738		135.63 1.523. 437		138.34 4.153. 906		666.681. 658.752	
2.01	Tenaga Kerja						3.021. 950.00 0		3.312. 707.50 0		3.404. 372.68 8		3.421. 394.55 1		3.489. 822.44 2		16.650.2 47.180	
2.01.2 .01.01	Dinas Ketenagaker jaan dan Transmigras i						3.021. 950.00 0		3.312. 707.50 0		3.404. 372.68 8		3.421. 394.55 1		3.489. 822.44 2		16.650.2 47.180	
2.01.2. 01.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	1.079. 450.00 0									100	1.079.45 0.000	Dinas Ketenagakerj aan dan Transmigras i

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023						
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2.01.2.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100		500.000.000								100	500.000.000	Dinas Ketenagakerj aan dan Transmigras i	
2.01.2.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100	100	100		72.500.000								100	72.500.000	Dinas Ketenagakerj aan dan Transmigras i	
2.01.2.01.01.07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran										1.543.207.500		1.581.787.688		1.589.696.626		1.621.490.558		6.336.182.372	Dinas Ketenagakerj aan dan Transmigras i
		1	Persentase Pegawai yang memiliki kesesuaian Kompetensi	Persen						100		100		100		100				
		2	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan sarana/para sana Kantor	Persen						100		100		100		100				
		3	Persentase Sarana dan Parasana dalam Kondisi Baik	Persen						100		100		100		100				

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen					100		100		100		100		100		
		5	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen					100		100		100		100		100		
		6	Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen					100		100		100		100		100		
2.01.2.01.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja							870.000.000		1.050.000.000		1.081.500.000		1.086.907.500		1.108.645.650		5.197.053.150	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
		1	Persentase Pelatihan Berbasis Kompetensi	Persen	41,27	46,66	60,65		75,00		85,55		95		100		100		
		2	Persentase Pelatihan Berbasis Masyarakat	Persen	34,92	47,15	50		60		70		80		90		90		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.01.2. 01.01. 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Calon Tenaga Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	Persen	42,5 6	40,38	50	160.00 0.000	60	259.50 0.000	70	267.28 5.000	80	268.62 1.425	90	273.99 3.854	90	1.229.40 0.279	Dinas Ketenagakerj aan dan Transmigras i
2.01.2. 01.01. 17	Program Perlindungan dan Pengembang an Lembaga Ketenagakerj aan	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persen	100, 00	42,86	50	290.00 0.000	65	360.00 0.000	80	370.80 0.000	95	372.65 4.000	100	380.10 7.080	100	1.773.56 1.080	Dinas Ketenagakerj aan dan Transmigras i
2.01.2. 01.01. 19	Program Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Pelatihan Kewirausaha an	Persen	23,8 1	52,85	60	50.000 .000	70	100.00 0.000	75	103.00 0.000	85	103.51 5.000	95	105.58 5.300	95	462.100. 300	Dinas Ketenagakerj aan dan Transmigras i
2,02	Pemberdaya an Perempuan dan Pelindung Anak						2.800. 000.00 0		2.841. 750.00 0		2.927. 002.50 0		2.941. 637.51 3		3.000. 470.26 3		14.510.8 60.275	
1.06.1 .06.01	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan, dan Perlindunga n Anak						2.800. 000.00 0		2.841. 750.00 0		2.927. 002.50 0		2.941. 637.51 3		3.000. 470.26 3		14.510.8 60.275	
1.06.1. 06.01. 23	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusuta maan Gender dan Anak	Tingkat Penguatan Kelembagaa n Pengarusuta maan	Persen			90	675.00 0.000	90	742.50 0.000	90	764.77 5.000	90	768.59 8.875	90	783.97 0.853	90	3.734.84 4.728	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan, dan

Kode	Bidang Urusan Pemerintah an dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Gender dan Anak																Perlindunga n Anak
1.06.1. 06.01. 24	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persen			85	1.700.000.000	85	1.665.900.000	90	1.715.877.000	90	1.724.456.385	100	1.758.945.513	100	8.565.178.898	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1.06.1. 06.01. 25	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase Peran serta Gender dalam Pembangunan	Persen			85	425.000.000	85	433.350.000	85	446.350.500	85	448.582.253	90	457.553.898	90	2.210.836.650	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2.03	Pangan						2.000.000.000		2.360.000.000		2.430.800.000		2.442.954.000		2.491.813.080		11.725.567.080	
2.03.3 .03.01	Dinas Pangan dan Pertanian						2.000.000.000		2.360.000.000		2.430.800.000		2.442.954.000		2.491.813.080		11.725.567.080	
2.03.3. 03.01. 18	Program Peningkatan Ketahanan Pangan						2.000.000.000									12	2.000.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
		1	Jumlah Lumbung Pangan Yang	Unit	12	12	12											

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terbangun															
		2	Terpenuhiny a Kebutuhan Beras	Ton	1004 96	10300 8	10300 8									103008		
		3	Terpenuhiny a Kebutuhan Pangan Umbi- Umbian	Ton	3654 4	37457	37457									37457		
		4	Terpenuhiny a Kebutuhan Sayuran dan Buah	Ton	9136 0	93644	93644									93644		
2.03.3. 03.01. 19	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat								1.840. 000.00 0		1.895. 200.00 0		1.904. 676.00 0		1.942.7 69.520		7.582.64 5.520	Dinas Pangan dan Pertanian
		1	Persentase ketersediaan beras terhadap kebutuhan beras daerah	Persen	150, 86	152,00		151,64		151,47		151,29		151,11		151,11		
		2	Persentase ketersediaan Bahan Makanan	Persen	100	100		102		103		104		105		105		
2.03.3. 03.01. 20	Program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah		Persentase pengisian gudang cadangan pangan	Persen	53,4 8	53,48		100	520.00 0.000	100	535.60 0.000	100	538.27 8.000	100	549.04 3.560	100	2.142.92 1.560	Dinas Pangan dan Pertanian

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2.04	Pertanahan						7.000.000.000		7.160.000.000		7.353.320.000		7.390.086.600		7.537.888.332		36.441.294.932		
2.04.1.03.02	Dinas Tata Ruang dan Permukiman						7.000.000.000		7.160.000.000		7.353.320.000		7.390.086.600		7.537.888.332		36.441.294.932		
2.04.1.03.02.17	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan		Persentase konflik pertanahan milik pemerintah daerah yang diselesaikan	Persen			100		100		160.000.000	100	164.320.000	100	165.141.600	100	168.444.432	657.906.032	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
2.04.1.03.02.19	Program Penataan Pengusaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah								7.000.000.000		7.189.000.000		7.224.945.000		7.369.443.900		28.783.388.900	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	
		1	Jumlah Lahan Untuk Pembangunan Fasilitas Publik	Lokasi		3	3		3		3		3		3		3		
		2	Persentase Lahan Tanah aset daerah yang disertifikatkan	Persen			100		100		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.03.1. 03.02. 41	Program Fasilitasi Administrasi Umum Pertanahan	Tersedianya Lahan Untuk Pembanguna n Fasiltas Publik	Lokasi	1	1	1	7.000. 000.00 0									1	7.000.00 0.000	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
2.05	Lingkungan Hidup						21.296 .196.2 00		22.127 .680.0 00		22.707 .333.4 00		22.820 .870.0 67		23.277 .287.4 68		112.229. 367.135	
2.05.2 .05.01	Dinas Lingkungan Hidup						21.296 .196.2 00		22.127 .680.0 00		22.707 .333.4 00		22.820 .870.0 67		23.277 .287.4 68		112.229. 367.135	
2.05.2. 05.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	11.216 .196.2 00									100	11.216.1 96.200	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2. 05.01. 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100	5.695. 000.00 0									100	5.695.00 0.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2. 05.01. 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100	100	100	200.00 0.000									100	200.000. 000	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2. 05.01. 06	Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100	100	100	55.000 .000									100	55.000.0 00	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2. 05.01. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi								16.835 .400.0 00		17.256 .285.0 00		17.342 .566.4 25		17.689. 417.75 4		69.123.6 69.179	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Perkantoran																		
		1	Persentase Pegawai yang memiliki kesesuaian Kompetensi	Persen					100		100		100		100		100		
		2	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan sarana/para sana Kantor	Persen					100		100		100		100		100		
		3	Persentase Sarana dan Parasana dalam Kondisi Baik	Persen					100		100		100		100		100		
		4	Persentase Unit Kerja yang Mendapatka n Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen					100		100		100		100		100		
		5	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai	Persen					100		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			peraturan perundang-undangan																
		6	Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen					100		100		100		100		100		
2.05.2.05.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		Jumlah kendaraan operasional pengangkutan sampah	Unit	12	57 Unit kendaraan operasional pengangkutan sampah	63	3.150.000.000	69	3.295.000.000	76	3.393.850.000	84	3.410.819.250	92	3.479.035.635	92	16.728.704.885	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup							275.000.000		280.000.000		288.400.000		289.842.000		295.638.840		1.428.880.840	Dinas Lingkungan Hidup
		1	Jumlah Target pembinaan	perusahaan	30	30	30		30		30		30		30		30		
		2	Jumlah Dokumen Amdal	dokumen	16	16	16		16		16		16		16		16		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.05.2. 05.01. 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		Persen		25	25	145.00 0.000	25	180.00 0.000	75	185.40 0.000	75	186.32 7.000	100	190.05 3.540	100	886.780. 540	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2. 05.01. 25	Program Pemantauan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan						150.00 0.000		220.00 0.000		226.60 0.000		227.73 3.000		232.28 7.660		1.056.62 0.660	Dinas Lingkungan Hidup
		1	Jumlah perusahaan yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan lingkungan hidup (PROPERDA)	perusahaan	24	24	24		24		24		24		24		24	
		2	Jumlah titik lokasi pengelolaan DAS Citarum	Lokasi	2 titik	2	2		2		2		2		2		2	
		3	Jumlah titik pantau kualitas air	Titik	67 titik	20	20		20		20		20		20		20	
		4	Jumlah titik pantau kualitas udara	Titik	10 titik	2	2		2		2		2		2		2	
2.05.2. 05.01. 26	Program Penyadaran dan Penegakkan						150.00 0.000		190.00 0.000		195.70 0.000		196.67 8.500		200.61 2.070		932.990. 570	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Hukum Lingkungan																		
		1	Jumlah sosialisasi penegakan hukum lingkungan ke Perusahaan yang ada di Purwakarta			6	6		6		6		8		8		8		
		2	Penerimaan pengaduan	Kasus	4		4		1		1		1		1		1		
		3	Aplikasi SIPP	Buah		0	1		3		3		3		3		3		
		4	Adipura	Titik pantau (Kecamatan)	3		3		5		6		8		8		8		
		5	Jumlah sosialisasi pembinaan sekolah berbudaya lingkungan dan Sekolah Adiwiyata	lokasi (sekolah)	11		3												
2.05.2.05.01.27	Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah		Jumlah Parameter Kualitas Lingkungan Yang Terakreditasi	jenis	5 jenis	0	4	210.000.000	5	309.280.000	5	318.558.400	5	320.151.192	5	326.554.216	5	1.484.543.808	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						2019		2020		2021		2022		2023										
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
2.05.2. 05.01. 30	Program Pengelolaan Pelayanan Sedot Tinja		Adipura	Titik pantau	3		3		50.000 .000		100.00 0.000		103.00 0.000		105.58 5.300		462.100. 300	Dinas Lingkungan Hidup						
2.05.2. 05.01. 37	Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim		Tingkat Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim	Persen			25		120.00 0.000		123.60 0.000		75		100		126.70 2.360	100	494.520. 360	Dinas Lingkungan Hidup				
2.05.2. 05.01. 38	Program Pengendalian Lingkungan Hidup		Jumlah Peserta Kegiatan PROPERDA	Perusa haan	24	24	24		24		598.00 0.000		24		615.94 0.000		24		619.01 9.700	24	631.40 0.094	24	2.464.35 9.794	Dinas Lingkungan Hidup
2.06	Administrasi Kependuduk an dan Pencatatan Sipil								5.737. 547.00 0		4.959. 900.00 0		5.089. 957.50 0		5.115. 407.28 8		5.217. 715.43 3		26.120.5 27.221					
2.06.2 .06.01	Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil								5.737. 547.00 0		4.959. 900.00 0		5.089. 957.50 0		5.115. 407.28 8		5.217. 715.43 3		26.120.5 27.221					
2.06.2. 06.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100		1.056. 940.00 0									100		1.056.94 0.000		Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil		
2.06.2. 06.01. 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100		600.00 0.000									100		600.000. 000		Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil		
2.06.2. 06.01. 06	Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	100	100	100		55.000 .000									100		55.000.0 00		Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	capaian kinerja dan keuangan		Secara Tepat dan Benar															
2.06.2. 06.01. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran								1.929. 900.00 0		1.978. 147.50 0		1.988. 038.23 8		2.027.7 99.002		7.923.88 4.740	Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil
		1	Persentase Pegawai yang memiliki kesesuaian Kompetensi	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
		2	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan sarana/para sana Kantor	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
		3	Persentase Sarana dan Parasana dalam Kondisi Baik	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
		4	Persentase Unit Kerja yang Mendapatka n Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100		100		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		5	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100	100			100		100		100		100		100	
		6	Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	100	100			100		100		100		100		100	
2.06.2. 06.01. 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan						4.025.607.000		65.000.000		66.755.000		67.088.775		68.430.551		4.292.881.326	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1	Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan:															
			- Tingkat Kepemilikan KTP Elektronik	Persen	75	80	100		100		100		100		100		100	
			- Tingkat Kepemilikan Kartu Keluarga	Persen	75	80	100		100		100		100		100		100	
		2	Tingkat Kesadaran Masyarakat	Persen	20	25	50		100		100		100		100		100	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.06.2. 06.01. 17	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduk an									2.530. 000.00 0		2.598. 310.00 0		2.611. 301.55 0		2.663.5 27.581		10.403.1 39.131	Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil
		1	Tingkat Akurasi data Kependuduk an	Persen	80	80	100		100		100		100		100		100		
		2	Persentase Pengelolaan informasi kependuduk an	Persen		75	85		100		100		100		100		100		
		3	Persentase Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependuduk an	Persen		50	75		85		100		100		100		100		
2.06.2. 06.01. 18	Program Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan Kependuduk an									435.00 0.000		446.74 5.000		448.97 8.725		457.95 8.300		1.788.68 2.025	Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil
		1	Persentase Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Adminduk yang di selenggaraka	Persen		25	50		85		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			n																
		2	Persentase Pemanfaatan data oleh Instansi/Lembaga Pengguna	Persen		15	50		85		100		100		100		100		
		3	Persentase Inovasi Pelayanan Adminduk	Persen		25	50		85		100		100		100		100		
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa							7.029.025.000		7.248.987.900		7.462.039.225		7.499.349.421		7.649.336.409		36.888.737.954	
2.07.2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							7.029.025.000		7.248.987.900		7.462.039.225		7.499.349.421		7.649.336.409		36.888.737.954	
2.07.2.07.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	588.100.000								100	588.100.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.07.2.07.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100	179.500.000								100	179.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.07.2. 07.01. 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100	100	100	37.000.000								100	37.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.2. 07.01. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran								883.662.500		905.754.063		910.282.833		928.488.489		3.628.187.885	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1	Persentase Pegawai yang memiliki kesesuaian Kompetensi	Persen		81			100		100		100		100		100	
		2	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan sarana/para sarana Kantor	Persen		90			100		100		100		100		100	
		3	Persentase Sarana dan Parasana dalam Kondisi Baik	Persen	100	100			100		100		100		100		100	
		4	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen					100		100		100		100		100	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023						
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		5	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan	Persen	83	87			93		96		98		100		100			
		6	Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	0	0			100		100		100		100		100			
2.07.2. 07.01. 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		Jumlah Lembaga Pemberdaya an Masyarakat (LPM) Yang Dibina	Buah	192	192	192		200.00 0.000							192	200.000. 000	Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Desa		
2.07.2. 07.01. 16	Program Pemberdayaa n Ekonomi Desa								200.00 0.000		2.429. 500.00 0		2.502. 385.00 0		2.514. 896.92 5		2.565.1 94.864		10.211.9 76.789	Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Desa
		1	Jumlah Desa Maju Berdasarkan IDM	Desa	11	11	13		15		17		19		21		21			
		2	Jumlah Desa Berkembang Berdasarkan IDM	Desa	118	118	126		134		142		150		158		158			

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	Jumlah Desa Tertinggal Berdasarkan IDM	Desa	54	54	44		34		24		14		4		4		
		4	Persentase Masyarakat dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa (Pamsimas)	Persen		20	20		40		60		80		100		100		
		5	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan di tiap desa	Kegiat an	20	20	20		45		70		95		100		100		
		6	Persentase lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang dibina (LPM)	Persen		20	20		40		60		80		100		100		
		7	Jumlah Posyandu yang dibina	Unit	1018	1018	203		406		609		812		1018		1018		
2.07.2. 07.01. 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana	Persen	6	7	7	5.200.000.000									7	5.200.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Desa																
2.07.2. 07.01. 17	Program Pengembang an Kelembagaan dan Potensi Desa		Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembanguna n Sarana dan Prasarana Desa:							2.538. 450.00 0		2.614. 603.50 0		2.627. 676.51 8		2.680.2 30.048		10.460.9 60.065	Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Desa
		1	Jumlah Bumdes yang dibina	Bumdes	172	172	175		177		179		181		183		183		
		2	Jumlah Potensi/Inov asi Desa yang dikembangk an	Jenis	50	50	230		410		590		770		900		900		
2.07.2. 07.01. 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		Persentase Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Persen	100	100	100	624.42 5.000									100	624.425. 000	Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Desa
2.07.2. 07.01. 18	Program Penguatan dan Pembinaan Pemerintah n Desa									1.222. 500.00 0		1.259. 175.00 0		1.265. 470.87 5		1.290.7 80.293		5.037.92 6.168	Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Desa
		1	Jumlah Pembinaan Pengelolaan	Orang	183	183	183		183		183		183		183		183		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Keuangan dan Keuangan Desa																
		2	Jumlah pembinaan penyelenggar aan tata pemerintah n bagi Kades, Perangkat Desa dan Banmusdes	Orang		300		600		900		1057		1057		1057			
2.07.2. 07.01. 20	Program Pembanguna n Kawasan Perdesaan		Persentase Kawasan Pedesaan yang dibina	Persen	28	28	42		57	174.87 5.400	71	180.12 1.662	85	181.02 2.270	100	184.64 2.716	100	720.662. 048	Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Desa
2.08	Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana						7.980. 037.74 1		8.207. 744.95 0		8.427. 174.81 4		8.469. 310.68 8		8.638. 696.90 1		41.722.9 65.094		
2.08.2 .08.01	Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana						7.980. 037.74 1		8.207. 744.95 0		8.427. 174.81 4		8.469. 310.68 8		8.638. 696.90 1		41.722.9 65.094		
2.08.2. 08.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	678.79 4.741								100	678.794. 741	Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.08.2. 08.01. 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100		468.00 0.000							100	468.000. 000	Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.2. 08.01. 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100	100	100		90.000 .000							100	90.000.0 00	Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.2. 08.01. 06	Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100	100	100		65.000 .000							100	65.000.0 00	Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.2. 08.01. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran								1.089. 625.00 0		1.116. 865.62 5		1.122. 449.95 3		1.144.8 98.952		4.473.83 9.530	Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	100	100			100		100		100		100		100	
		2	Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/pras	Persen	100	100			100		100		100		100		100	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			arana kantor																
		3	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persen	100	100			100		100		100		100		100		
		4	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100			100		100		100		100		100		
		5	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang - undangan	Persen	100	100			100		100		100		100		100		
		6	Persentase ketersediaan data kinerja OPD	Persen	100	100			100		100		100		100		100		
2.08.2.08.01.15	Program Keluarga Berencana							3.212.700.000		3.391.819.200		3.483.398.318		3.500.815.310		3.570.831.616		17.159.564.445	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1	Ratio Akseptor KB	Persen		100	100		100		100		100		100		100		
		2	Persentase jumlah pasangan usia subur (PUS)	Persen		79,45	81,04		82,66		84,31		86,00		86,00		86,00		
		3	Persentase KB Mandiri (Cakupan PUS menjadi peserta KB aktif)	Persen		45	45,01		45,02		45,03		45,04		45,05		45,05		
		4	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)	Orang			7095		7090		7085		7080		7075		7075		
		5	Persentase jumlah peserta KB yang dilayani	Persen		30	31		32		33		34		35		35		
		6	Peserta KB aktif yang drop out selama satu tahun	Persen		10	9,99		9,98		9,97		9,96		9,95		9,95		
		7	Persentase PUS muda usia rendah Cakupan PUS dibawah usia 20 th	Persen		2	1,99		1,98		1,97		1,96		1,95		1,95		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.08.2. 08.01. 16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja							135.00 0.000		240.00 0.000		246.48 0.000		247.71 2.400		252.66 6.648		1.121.85 9.048	Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Persen		35	40		45		50		55		60		60		
		2	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Poin		35	33		30		27		24		20		20		
		3	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun		35	40		45		50		55		60		60		
		4	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	Persen		35	33		30		27		24		20		20		
2.08.2. 08.01. 17	Program pelayanan kontrasepsi							100.00 0.000		262.50 0.000		269.58 7.500		270.93 5.438		276.35 4.146		1.179.37 7.084	Dinas Pengendalia n Penduduk dan

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																			Keluarga Berencana
		1	Persentase peserta KB aktif pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen		35	35		35		35		35		35		35		
		2	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahun	Persen		100	100		100		100		100		100		100		
		3	Efektifitas dan efesiensi penggunaan alat kontrasepsi (Alekon)	Persen		100	100		100		100		100		100		100		
2.08.2.08.01.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri						3.020.560.000		2.016.477.000		2.070.921.879		2.081.276.488		2.122.902.018		11.312.137.386		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1	Persentase jumlah PPKBD dan Sub. PPKBD (1500)	Persen		100	100		100		100		100		100		100		
		2	Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Desa/kelurahan	Rasio		1 : 1	1 : 1		1 : 1		1 : 1		1 : 1		1 : 1		1 : 1		
		3	Ratio Pembantu Pembina Kel Berencana (PPKBD)	Rasio		1 : 1	1 : 1		1 : 1		1 : 1		1 : 1		1 : 1		1 : 1		
		4	Persentase Data Kependudukan Kelurga Berencana dan Pembanguna n Keluarga	Persen		100	100		100		100		100		100		100		
		5	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan setiap tahun	Persen		100	100		100		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.08.2. 08.01. 21	Program peningkatan penanggulan gan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Jumlah Remaja Yang Dibina	Orang	125	150	150	59.983 .000									150	59.983.0 00	Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.2. 08.01. 23	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	Jumlah Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Kader	384	576	576	150.00 0.000									576	150.000. 000	Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.2. 08.01. 28	Program Ketahanan dan Pemberdayaa n Keluarga								425.00 0.000		436.47 5.000		438.65 7.375		447.43 0.523		1.747.56 2.898	Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana
		1 Cakupan Kampung KB	Persen		30	45		60		75		90		100		100		
		2 Persentase perangkat daerah (Dinas/Bada n) yang berperan aktif dalam pembanguna n daerah melalui Kampung KB	Persen		37,5	37,5		40		50		60		100		100		
		3 Persentase penanggulan gan narkoba, PMS, HIV/AIDS	Persen		60	60		70		80		85		90		90		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.08.2. 08.01. 29	Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil									364.32 3.750		374.16 0.491		376.03 1.294		383.55 1.920		1.498.06 7.455	Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Orang		536	563		591		620		652		684		684		
		2	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Orang		541	568		596		626		658		690		690		
		3	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Orang		536	563		591		620		652		684		684		
		4	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB	PUS		536	563		591		620		652		684		684		
		5	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga	Kegiat an		536	563		591		620		652		684		684		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			melalui 8 fungsi keluarga																
		6	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Keluarga		536	563		591		620		652		684		684		
2.08.2.08.01.30	Program Pengendalian Penduduk								418.000.000		429.286.000		431.432.430		440.061.079		1.718.779.509		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	Cakupan kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependuduk	Persen		60	65		70		75		80		85		85		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			an																
		2	Persentase stakeholder/ mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkat wilayah yang mendapat pembinaan advokasi dan KIE	Persen		65	70		75		80		85		90		90		
2.09	Perhubungan							8.001.800.000		9.280.250.000		9.519.752.250		9.567.351.011		9.758.698.031		46.127.851.293	
2.09.2.09.01	Dinas Perhubungan							8.001.800.000		9.280.250.000		9.519.752.250		9.567.351.011		9.758.698.031		46.127.851.293	
2.09.2.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	5.099.300.000									100	5.099.300.000	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100	300.000.000									100	300.000.000	Dinas Perhubungan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023						
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2.09.2.09.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100	100	100		25.000.000								100	25.000.000	Dinas Perhubungan	
2.09.2.09.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100	100	100		47.500.000								100	47.500.000	Dinas Perhubungan	
2.09.2.09.01.07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran										5.532.250.000		5.670.556.250		5.698.909.031		5.812.887.212		22.714.602.493	Dinas Perhubungan
		1	Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	100	100			100		100		100		100		100			
		2	Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/prasarana kantor	Persen	100	100			100		100		100		100		100			
		3	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persen	100	100			100		100		100		100		100			

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100			100			100			100		100	
		5	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang - undangan	Persen	100	100			100			100			100		100	
		6	Persentase ketersediaan data kinerja OPD	Persen	100	100			100			100			100		100	
2.09.2.09.01.17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan						210.000.000										210.000.000	Dinas Perhubungan
		1	Jumlah Trayek Angkutan Umum	Trayek	39	50	50									50		
		2	Jumlah Armada Angkutan Umum	Unit	1363	1378	1378									1378		
2.09.2.09.01.18	Program pembangunan sarana dan						590.000.000		877.500.000		901.192.500		905.698.463		923.812.432		4.198.203.394	Dinas Perhubungan

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	prasarana perhubungan																		
		1	Rasio Terminal Penumpang Angkutan Umum	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100		
		2	Jumlah Fasilitas Perlengkapa n Jalan (Rambu, dan Guardrill) Pada Jalan Kabupaten	Jumla h	415	415			100		100		100		100		100		
		3	Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ Yang Direhabilitas i dan Terpelihara	Persen					100		100		100		100		100		
		4	Persentase jaringan pelayanan Lalu Lintas sungai dan penyebranga n	Persen					100		100		100		100		100		
2.09.2. 09.01. 20	Program peningkatan kelaikan pengoperasi an kendaraan bermotor							730.00 0.000		880.00 0.000		903.76 0.000		908.27 8.800		926.44 4.376		4.348.48 3.176	Dinas Perhubunga n

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1	Persentase angkutan umum yang melakukan uji KIR	Persen	59	91	100		100		100		100		100		100	
		2	Jumlah Dokumen Lalu lintas	Jumla h			100		100		100		100		100		100	
2.09.2. 09.01. 21	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas						1.000.000.000										1.000.000.000	Dinas Perhubungan
		1	Jumlah Rambu, Cermin Lalu Lintas, Lampu Lalu Lintas dan Petunjuk Arah	Unit	1448	3466	3466									3466		
		2	Panjang Marka Jalan	Meter	2600	2800	2800									2800		
		3	Frekuensi Operasi Ketertiban Lalu lintas	Hari/Tahun	22	22	22									22		
2.09.2. 09.01. 23	Program peningkatan pelayanan lalu lintas angkutan jalan								750.000.000		770.250.000		774.101.250		789.583.275		3.083.934.525	Dinas Perhubungan
		1	Persentase Layanan Angkutan Darat	Persen				100		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	Jumlah Dokumen Lalu lintas	Persen					100		100		100		100		100		
2.09.2. 09.01. 25	Program pengembang an dan keselamatan lalu lintas		Jumlah Operasi Angkutan Umum Laik Jalan	Jumla h	29	29			100	727.50 0.000	100	747.14 2.500	100	750.87 8.213	100	765.89 5.777	100	2.991.41 6.489	Dinas Perhubunga n
2.09.2. 09.01. 26	Program pengembang an sistem lalu lintas dan angkutan umum tidak dalam trayek		Persentase Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang dikembangk an	Persen	0	0			100	370.00 0.000	100	379.99 0.000	100	381.88 9.950	100	389.52 7.749	100	1.521.40 7.699	Dinas Perhubunga n
2.09.2. 09.01. 27	Program peningkatan pelayanan perparkiran		Jumlah Sarana Prasarana Parkir	Jumla h	4	4			100	143.00 0.000	100	146.86 1.000	100	147.59 5.305	100	150.54 7.211	100	588.003. 516	Dinas Perhubunga n
2.10	Komunikasi dan Informatika							26.490 .775.0 00		26.975 .763.5 20		27.700 .409.2 15		27.838 .911.2 61		28.395 .689.4 86		137.401. 548.482	
2.10.2 .10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika							26.490 .775.0 00		26.975 .763.5 20		27.700 .409.2 15		27.838 .911.2 61		28.395 .689.4 86		137.401. 548.482	
2.10.2. 10.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	849.72 5.000									100	849.725. 000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2. 10.01. 02	Program peningkatan sarana dan		Tersedianya Sarana dan Prasarana	Persen	100	100	100	835.00 0.000									100	835.000. 000	Dinas Komunikasi dan

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	prasarana aparatur		Aparatur															Informatika
2.10.2. 10.01. 06	Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100	100	100	65.000 .000								100	65.000.0 00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2. 10.01. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran								1.849. 960.00 0		1.896. 209.00 0		1.905. 690.04 5		1.943.8 03.846		7.595.66 2.891	Dinas Komunikasi dan Informatika
		1	Persentase pendukung administrasi perkantoran	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
		2	Persentase sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
		3	Persentase peningkatan disiplin aparatur	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
		4	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
		5	Persentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan	Persen	100	100		100		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			keuangan secara tepat dan benar															
		6	Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
2.10.2. 10.01. 15	Program Pengembang an Komunikasi, Informasi dan Media Massa						14.163 .550.0 00										14.163.5 50.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		1	Persentase Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah Yang di Dokumentas ikan	Persen	90	95	95									95		
		2	Persentase Publikasi Program Pembanguna n Daerah	Persen	90	90	90									90		
		3	Persentase Layanan Informasi Publik	Persen	90	90	90									90		
		4	Persentase Layanan Acara Keprotokolan Pemerintah	Persen	90	95	95									95		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Daerah																
2.10.2. 10.01. 21	Program Pengembang an Aplikasi Telematika		Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pengembang an Aplikasi Telematika	Kegiat an	8	8	8	1.660. 000.00 0									8	1.660.00 0.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2. 10.01. 22	Program Teknologi Informasi Pos dan Telekomunik asi		Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pengembang an Teknologi Informasi, Pos dan Telekomunik asi	Kegiat an	8	8	8	8.917. 500.00 0									8	8.917.50 0.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2. 10.01. 25	Program Pengembang an Informasi dan Komunikasi Publik									14.901 .900.0 00		15.304 .251.3 00		15.380 .772.5 57		15.688. 388.00 8		61.275.3 11.864	Dinas Komunikasi dan Informatika
		1	Persentase media infromasi yang dimanfaatka n	Persen	62	92			100		100		100		100		100		
		2	Persentase Publikasi program pembanguna n daerah	Persen	66	92			100		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	Persentase kegiatan pemerintahan daerah yang didokumentasikan	Persen	97	98			100		100		100		100		100		
		4	Persentase layanan Informasi dan pengaduan masyarakat yang tertangani	Persen	79	93			100		100		100		100		100		
		5	Nilai Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	75	85			100		100		100		100		100		
2.10.2.10.01.28	Program Pengembangan Teknologi Informatika								8.685.000.000		8.919.495.000		8.964.092.475		9.143.374.325		35.711.961.800		Dinas Komunikasi dan Informatika
		1	Tingkat pemenuhan kebutuhan infrastruktur infromatika	Persen	50	95			100		100		100		100		100		
		2	Persentase ketersediaan dokumen master plan	Persen	50	95			100		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			infrastruktur smart city																
		3	Tingkat standarisasi infrastruktur informatika di instansi pemerintah dan ruang publik	Persen	77	90			100		100		100		100		100		
		4	Tingkat kemanan jaringan teknologi informasi	Persen	46	99			100		100		100		100		100		
2.10.2. 10.01. 29	Program Pengembang an Aplikasi Informatika									1.538. 903.52 0		1.580. 453.91 5		1.588. 356.18 5		1.620.1 23.308		6.327.83 6.928	Dinas Komunikasi dan Informatika
		1	Persentase layanan aplikasi Sistem Pemerintah n Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikembangk an	Persen	88	98			100		100		100		100		100		
		2	Persentase aplikasi SPBE yang sudah terintegrasi	Persen	100	100			100		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	Persentase aplikasi SPBE yang dimanfaatkan masyarakat umum	Persen	54	92			100		100		100		100		100		
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							1.950.000.000		2.306.943.200		2.376.151.496		2.388.032.253		2.435.792.899		11.456.919.848	
2.11.3.06.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian							1.950.000.000		2.306.943.200		2.376.151.496		2.388.032.253		2.435.792.899		11.456.919.848	
2.11.3.06.01.19	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif		Jumlah UMKM Yang Termonitoring dan Terevaluasi	Unit	750	800	800	150.000.000									800	150.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2.11.3.06.01.20	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		Terbinanya Pelaku UMKM Menjadi Wiraswasta Yang Profesional	Unit	25	25	25	350.000.000									25	350.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.11.3. 06.01. 21	Program Pengembang an Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah							350.00 0.000										350.000. 000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustria n
		1	Terfasilitasin ya UMKM Dalam Mengakses Kredit Perbankan dan Non Perbankan	Unit	360	380	380										380		
		2	Terfasilitasin ya UMKM Untuk Bermitra Dengan Usaha Besar	Unit	15	15	15										15		
		3	Terfasilitasin ya UMKM Untuk Bermitra Dengan BUMN/BUM D	Unit	100	105	105										105		
2.11.3. 06.01. 22	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		Persentase Koperasi Yang Ada Memenuhi Kriteria Koperasi Sehat	Persen	20	25	25	650.00 0.000									25	650.000. 000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustria n

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.11.3. 06.01. 23	Program Pengembang an Kewirausaha an dan Keunggulan Kompetitif Koperasi		Persen	24	30	30	450.00 0.000									30	450.000. 000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustria n
2.11.3. 06.01. 20	Program Peningkatan Daya Saing Koperasi								405.00 0.000		417.15 0.000		419.23 5.750		427.62 0.465		1.669.00 6.215	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustria n
		1	Jumlah Pameran yang diikuti oleh Koperasi	Even				5		5		5		5		5		
		2	Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitas bantuan	Unit		15		15		15		15		15		15		
		3	Jumlah Koperasi yang bermitra dengan perbankan, non perbankan dan lembaga lainnya	Unit		30		30		30		30		30		30		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4	Jumlah Koperasi yang teridentifikasi mengikuti sosialisasi dan pelatihan	Unit		50			50		50		50		50		50		
2.11.3.06.01.21	Program penguatan Kelembagaan Koperasi								526.943.200		542.751.496		545.465.253		556.374.559		2.171.534.508	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
		1	Laju peningkatan koperasi sehat	Persen		20			5		5		5		5		5		
		2	Laju peningkatan koperasi aktif	Persen		40			10		10		10		10		10		
		3	Laju peningkatan koperasi bersertifikat	Persen		0			15		15		15		15		15		
		4	Laju peningkatan Koperasi melakukan audit melalui akuntan publik	Persen		0			5		5		5		5		5		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		5	Laju peningkatan koperasi melaksanaka n RAT	Persen		20			7		7		7		7		7		
2.11.3.06.01.22	Program peningkatan Daya saing UMKM									925.000.000		952.750.000		957.513.750		976.664.025		3.811.927.775	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustria n
		1	Jumlah Pameran yang diikuti oleh UKKM	Even		10			8		8		8		8		8		
		2	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas bantuan	Unit		20			20		20		20		20		20		
		3	Jumlah UMKM yang bermitra dengan perbankan, non perbankan dan lembaga lainnya	Unit		15			20		20		20		20		20		
		4	Jumlah UMKM yang teridentifikas i mengikuti sosialisasi dan	Unit		30			25		25		25		25		25		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			pelatihan																
2.11.3. 06.01. 23	Program Pengembang an Kewirausaha an									450.00 0.000		463.50 0.000		465.81 7.500		475.13 3.850		1.854.45 1.350	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustria n
		1	Persentase UMKM yang terbina	Persen					10		10		10		15		15		
		2	Jumlah Wirausaha baru yang dibentuk	Unit					50		50		50		50		50		
		3	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan	Unit					150		150		150		150		150		
2.12	Penanaman Modal							3.542. 604.00 0		3.830. 164.66 0		3.930. 348.77 7		3.950. 000.52 0		4.029. 000.53 1		19.282.1 18.488	
2.12.2 .12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							3.542. 604.00 0		3.830. 164.66 0		3.930. 348.77 7		3.950. 000.52 0		4.029. 000.53 1		19.282.1 18.488	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2.12.2. 12.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100		937.81 4.000							100	937.814. 000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.12.2. 12.01. 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100		350.00 0.000							100	350.000. 000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.12.2. 12.01. 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100	100	100		189.79 0.000							100	189.790. 000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.12.2. 12.01. 06	Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100	100	100		55.000 .000							100	55.000.0 00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.12.2. 12.01. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran									1.615. 164.66 0		1.655. 543.77 7		1.663. 821.49 5		1.697.0 97.925		6.631.62 7.857	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1	Persentase Pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	11,6	92,02			93		93		93		93		93		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tanggaa dan sarana/Prasarana	Persen	83,57	88,45			90		90		90		90		90	
		3	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam kondisi Baik	Persen	75	80			85		85		85		85		85	
		4	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	84,1	83,46			85		85		85		85		85	
		5	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang - Undangan	Persen	85,79	64,87			90		90		90		90		90	
		6	Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	100	100			100		100		100		100		100	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.12.2. 12.01. 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1 Jumlah Buku Promosi Potensi Unggulan Daerah	Set	1	1	1	910.00 0.000						-		-	1	910.000. 000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2 Jumlah Buku Peluang Potensi Investasi	Set	1	1	1										1		
		3 Jumlah peran Serta Pada Kegiatan Pameran Investasi Dalam Negeri	Event	4	4	4										4		
2.12.2. 12.01. 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi						500.00 0.000										500.000. 000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1 Persentase Perusahaan PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Persen	80	90	90										90		
		2 Jumlah Dokumen Data dan Laporan Investasi	Jumla h	1	1	1										1		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Yang Akurat															
			Prosentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Persen	3	3	3									3		
2.12.2.12.01.18	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perijinan						600.000.000										600.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1	Persentase Kepastian dan Ketepatan Biaya Pelayanan Perzinan	Persen	100	100	100									100		
		2	Persentase Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	79,50	80	80									80		
		3	Persentase Peningkatan Proses Pengolahan Pelayanan Administrasi Perijinan	Persen	95	95	95									95		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4	Persentase Target Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perjinan	Persen	100	100	100									100		
		5	Persentase Peningkatan Sistem Informasi dan Pengembangan Database Pelayanan Perjinan	Persen	90	100	100									100		
2.12.2.12.01.19	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal								750.00 0.000		770.25 0.000		774.10 1.250		789.58 3.275		3.083.93 4.525	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1	Jumlah buku promosi investasi	Buku	2	2		3		3		2		4		4		
		2	Jumlah keikutsertaan pada pameran investasi	Event	4	5		11		12		14		15		15		
2.12.2.12.01.20	Program Perbaikan Iklim Investasi								540.00 0.000		554.58 0.000		557.35 2.900		568.49 9.958		2.220.43 2.858	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023						
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		1	Persentase perusahaan PMA dan PMDN yang dapat dimonitoring secara berkala	Persen	64,98	58,36			100		100		100		100		100			
		2	Persentase perusahaan yang mendapat pengawasan perizinan dan non perizinan	Persen		80			100		100		100		100		100			
		3	Persentase pengaduan perizinan	Persen		100			100		100		100		100		100			
		4	Peningkatan nilai IKM	Persen		80			80,75		81		81,5		82		82			
2.12.2.12.01.21	Program Pengembangan Layanan Perijinan Terpadu		Persentase jumlah izin yang dapat diselesaikan	Persen		61,24			80	450.000.000	85	462.150.000	90	464.460.750	95	473.749.965	95	1.850.360.715	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.12.2.12.01.22	Program Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi		Persentase kesesuaian regulasi PTSP pusat dan daerah	Persen		80			100	475.000.000	100	487.825.000	100	490.264.125	100	500.069.408	100	1.953.158.533	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.13	Kepemudaa n dan Olah Raga								19.618.700.000		19.682.140.000		20.206.253.500		20.307.284.768		20.713.430.463		100.527.808.730	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.13.2 .13.01	Dinas Kepemudaa n, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan						19.618 .700.0 00		19.682 .140.0 00		20.206 .253.5 00		20.307 .284.7 68		20.713 .430.4 63		100.527. 808.730	
2.13.2. 13.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100		3.228. 700.00 0							100	3.228.70 0.000	Dinas Kepemudaa n, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2.13.2. 13.01. 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100		360.00 0.000							100	360.000. 000	Dinas Kepemudaa n, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2.13.2. 13.01. 06	Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100	100	100		55.000 .000							100	55.000.0 00	Dinas Kepemudaa n, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2.13.2. 13.01. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran								3.652. 140.00 0		3.743. 443.50 0		3.762. 160.71 8		3.837.4 03.932		14.995.1 48.149	Dinas Kepemudaa n, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
		1	Persentase Pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	100	100		100		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tanggaa dan sarana/Prasarana	Persen	100	100			100		100		100		100		100	
		3	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam kondisi Baik	Persen	100	100			100		100		100		100		100	
		4	Persenrase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100			100		100		100		100		100	
		5	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang - Undangan	Persen	100	100			100		100		100		100		100	
		6	Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	100	100			100		100		100		100		100	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.13.2. 13.01. 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan		Persen			20	725.00 0.000	30	866.25 0.000	40	889.63 8.750	85	894.08 6.944	60	911.96 8.683	60	4.286.94 4.376	Dinas Kepemudaa n, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2.13.2. 13.01. 20	Program Pembinaan dan Pemasyaraka tan Olah Raga						8.800. 000.00 0		8.375. 000.00 0		8.601. 125.00 0		8.644. 130.62 5		8.817.0 13.238		43.237.2 68.863	Dinas Kepemudaa n, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
		1	Cakupan pembinaan olahraga	Persen		19,61	19,61	20,00		19,61		23,53		23,53		23,53		
		2	Cakupan pembinaan atlet muda	Persen		11	11	11		13		13		15		15		
2.13.2. 13.01. 22	Program Pembinaan Kepemudaan								192.50 0.000		197.69 7.500		198.68 5.988		202.65 9.707		791.543. 195	Dinas Kepemudaa n, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
		1	Cakupan pembinaan kepemudaan	Persen		20	20	20		20		20		20		20		
2.13.2. 13.01. 23	Program Pembanguna n dan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan		Cakupan Pembanguna n dan/ atau Peningkatan sarana prasarana Kepemudaan	Persen		20	6.450. 000.00 0	20	900.00 0.000	20	924.30 0.000	20	928.92 1.500	20	947.49 9.930	20	10.150.7 21.430	Dinas Kepemudaa n, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.13.2. 13.01. 24	Program pembanguna n dan / peningkatan sarana prasarana kebudayaan	Persen Pembanguna n dan/ atau Peningkatan sarana prasarana Kebudayaan	Persen			20		20	343.75 0.000	20	353.03 1.250	20	354.79 6.406	20	361.89 2.334	20	1.413.46 9.991	Dinas Kepemudaa n, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2.13.2. 13.01. 26	Program Pengembang an Kemitraan	Cakupan wirausaha muda	Persen			20		40	110.00 0.000	50	112.97 0.000	60	113.53 4.850	70	115.80 5.547	70	452.310. 397	Dinas Kepemudaa n, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2.13.2. 13.01. 27	Program Pembanguna n dan/Peningk atan Sarana dan Prasaran Olahraga	Cakupan Pembanguna n dan/atau Peningkatan sarana prasarana Olahraga	Persen	50,0 0	57,14	64,29		64,29	5.242. 500.00 0	64,29	5.384. 047.50 0	64,29	5.410. 967.73 8	71,43	5.519.1 87.092	71,43	21.556.7 02.330	Dinas Kepemudaa n, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	Statistik						1.280. 000.00 0		1.250. 000.00 0		1.283. 750.00 0		1.290. 168.75 0		1.315. 972.12 5		6.419.89 0.875	
2.10.2 .10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika						1.280. 000.00 0		1.250. 000.00 0		1.283. 750.00 0		1.290. 168.75 0		1.315. 972.12 5		6.419.89 0.875	
2.10.2. 10.01. 19	Program Persandian dan Statistik	Jumlah Dokumen Data Persandian dan Statistik Yang Disusun	Doku men		5	5	1.280. 000.00 0									5	1.280.00 0.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2. 10.01. 26	Program Penyediaan dan								1.250. 000.00		1.283. 750.00		1.290. 168.75		1.315,9 72.125		5.139.89 0.875	Dinas Komunikasi dan

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pelayanan Informasi Statistik									0		0		0					Informatika
		1	Persentase ketersediaan data/inform asi statistik sektoral daerah	Doku men		33	100		100		100		100		100		100		
		2	Persentase dokumen hasil pengolahan dan analisisa statistik sektoral dan spasial yang dihasilkan	Doku men	68	90	100		100		100		100		100		100		
	Persandian									585.00 0.000		600.79 5.000		603.79 8.975		615.87 4.955		2.405.46 8.930	
2.10.2 .10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika									585.00 0.000		600.79 5.000		603.79 8.975		615.87 4.955		2.405.46 8.930	
2.10.2. 10.01. 27	Program Pengembang an Persandian Daerah									585.00 0.000		600.79 5.000		603.79 8.975		615.87 4.955		2.405.46 8.930	Dinas Komunikasi dan Informatika
		1	Tingkat kesiapan penilaian/pe ngelolaan risiko kemanan infromasi (D)	Persen	69	95	100		100		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	Tingkat kesiapan penerapan standar prosentase kemanan infromasi (PR)	Persen	65	100	100		100		100		100		100		100		
		3	Tingkat kesiapan penanggulan gan dan pemulihan insiden keamanan infromasi (PP)	Persen	78	98	100		100		100		100		100		100		
2.16	Kebudayaan							4.415.000.000		4.602.500.000		4.726.767.500		4.750.401.338		4.845.409.364		23.340.078.202	
2.16.2.13.01	Dinas Kepemudaa n, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan							4.415.000.000		4.602.500.000		4.726.767.500		4.750.401.338		4.845.409.364		23.340.078.202	
2.16.2.13.01.17	Program Pengembang an Nilai Budaya		Jumlah Kelompok Seni Budaya Lokal Yang Dibina	Kelompok	6	6	6	4.415.000.000									6	4.415.000.000	Dinas Kepemudaa n, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2.16.2.13.01.19	Program Pelestarian Budaya									522.500.000		536.607.500		539.290.538		550.076.348		2.148.474.386	Dinas Kepemudaa n, Olahraga, Pariwisata dan

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																			Kebudayaan
		1	Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	88,89	88,89	88,89		88,89		100		100		100		100		
		2	Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Persen			50		50		50		60		60		60		
2.16.2.13.01.20	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan									4.080.000.000		4.190.160.000		4.211.110.800		4.295.333.016		16.776.603.816	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
		1	Persentase Kelompok Seni Budaya Lokal (Kelompok) yang dibina	Persen		50	50		50		50		55		55		55		
		2	Persentase Event pagelaran seni budaya yang diikuti	Persen		50	50		50		50		50		50		50		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	Persentase festival seni dan budaya yang diselenggarakan	Persen		36	36		36		36		36		36		36		
2.17	Perpustakaa n							600.00 0.000		722.50 0.000		742.00 7.500		745.71 7.538		760.63 1.888		3.570.85 6.926	
2.17.2 .18.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaa n							600.00 0.000		722.50 0.000		742.00 7.500		745.71 7.538		760.63 1.888		3.570.85 6.926	
2.17.2. 18.01. 15	Program Pengembang an Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaa n							600.00 0.000										600.000. 000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaa n
		1	Jumlah Pengunjung Perpustakaa n Per Tahun	Orang	8.00 0	8.000	8.000										8.000		
		2	Jumlah Anggota Perpustakaa n Per Tahun	Orang	39.5 00	39.500	39.500										39.500		
		3	Jumlah Titik Layanan Perpustakaa n Keliling	Titik	103	103	103										103		
		4	Jumlah Perpustakaa n Binaan	Unit	215	215	215										215		
		5	Jumlah	Buah	38.0	38.000	38.000										38.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
							2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Buku Perpustakaa n		00														
2.17.2. 18.01. 16	Program Pengembang an dan Pelestarian Perpustakaa n									322.50 0.000		331.20 7.500		332.86 3.538		339.52 0.808		1.326.09 1.846	Dinas Kearsipan dan Perpustakaa n
		1	Persentase ketersediaan koleksi buku perpustakaa n	Persen			5		5		5		5		5		5		
		2	Persentase jumlah karya cetak dan karya rekam mengenai kabupaten purwakarta	Persen			100				100				100		100		
		3	Persentase pembinaan terhadap perpustakaa n umum dan sekolah	Persen	24,0 6	25,3	26		27		28		29,3		30,4		30,4		
		4	Persentase ketersediaan ruang baca/ pojok baca / sudut baca di ruang publik	Persen		20	20		20		20		20		20		20		
		5	Tingkat pemeliharaaa n bahan perpustakaa	Persen			0,06		0,11		0,15		0,19		0,23		0,23		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			n																
2.17.2. 18.01. 17	Program Peningkatan Layanan Perpustakaa n									400.00 0.000		410.80 0.000		412.85 4.000		421.11 1.080		1.644.76 5.080	Dinas Kearsipan dan Perpustakaa n
		1	Laju pengunjung perpustakaa n	Persen		81,5	4,9		4,70		4,50		4,30		4		4		
		2	Laju anggota perpustakaa n	Persen		57	22,9		18,6		15,70		13,50		12		12		
		3	Tingkat koleksi buku perpustakaa n	Persen		5	5		5		5		5		5		5		
		4	Persentase jumlah koleksi buku yang dibaca	Persen		0	5		5		5		5		5		5		
		5	Persentase titik layanan perpustakaa n keliling	Persen	47	79	49		100		100		100		100		100		
		6	Tingkat koleksi buku perpustakaa n digital	Persen	0	100	0		16,5		14,5		12,4		11		11		
		7	Persentase jumlah koleksi buku perpustakaa n digital yang dibaca	Persen	0	0	19,8		16,5		14		12,4		11		11		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaa n	Persen	0	0	4		4		5		5		7		7		
2.18	Kearsipan							3.564. 000.00 0		3.967. 575.00 0		4.068. 504.37 5		4.088. 846.89 7		4.170. 623.83 5		19.859.5 50.107	
2.18.2 .18.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaa n							3.564. 000.00 0		3.967. 575.00 0		4.068. 504.37 5		4.088. 846.89 7		4.170. 623.83 5		19.859.5 50.107	
2.18.2. 18.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	1.656. 500.00 0									100	1,656.50 0.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaa n
2.18.2. 18.01. 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100	1.175. 000.00 0									100	1,175.00 0.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaa n
2.18.2. 18.01. 03	Program peningkatan disiplin aparatur		Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100	100	100	60.000 .000									100	60.000.0 00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaa n
2.18.2. 18.01. 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100	100	100	15.000 .000									100	15.000.0 00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaa n

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.18.2. 18.01. 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100	100	100	62.500.000								100	62.500.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaa n
2.18.2. 18.01. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran								3.097.575.000		3.175.014.375		3.190.889.447		3.254.707.236		12.718.186.058	Dinas Kearsipan dan Perpustakaa n
		1	Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen		42	42		45		50		55		60		100	
		2	Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana / prasarana kantor	Persen		60	63		63		66		70		73		100	
		3	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persen	70	75	75		73		70		67		65		100	
		4	Persentase Unit Kerja yang mendapatka n pelayanan administrasi	Persen		100	100		100		100		100		100		100	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Perkantoran																
		5	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Persen		80	80		80		80		80		80		80		
		6	Persentase ketersediaan data Kinerja OPD	Persen		80	80		85		90		95		100		100		
2.18.2.18.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah							370.000.000										370.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		1	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Perangkat Daerah	43	43	43										43		
		2	Persentase Akuisisi	Persen	25	25	25										25		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Arsip Daerah																
2.18.2. 18.01. 17	Program pemeliharaan rutin/berkal a sarana dan prasarana kearsipan		Jumlah depo arsip yang mendapatka n Fumigasi dan Anti Rayap	Unit	4	4	4	100.00 0.000									4	100.000. 000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaa n
2.18.2. 18.01. 18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi		Jumlah kegiatan Pembinaan Penataan Kearsipan Daerah	Kegiat an	2	2	2	125.00 0.000									2	125.000. 000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaa n
2.18.2. 18.01. 19	Program Pembinaan, Pelestarian dan Pengembang an Kearsipan								510.00 0.000		523.77 0.000		526.38 8.850		536.91 6.627		2.097.07 5.477	Dinas Kearsipan dan Perpustakaa n	
		1	Persentase pembinaan kearsipan OPD	Persen	100	95,7	100		100		100		100		100		100		
		2	Tingkat penyelamata n arsip statis	Persen	80,0 5	100	100		100		100		100		100		100		
		3	Tingkat pelestarian arsip statis	Persen	1,15	1,75	1,75		1,75		1,75		1,75		1,75		1,75		
		4	Tingkat pemutakhira n Sistem Informasi Kearsipan	Persen	0,6	0,05	22		27		27		27		27		27		
		5	Laju pengunjung diorama/mu	Persen	59,8	42,7	22,9		4,2		3,2		4,7		3,7		3,7		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			sium kearsipan																
2.18.2. 18.01. 20	Program Pengelolaan dan Pemeliharaan Kearsipan									360.00 0.000		369.72 0.000		371.56 8.600		378.99 9.972		1.480.28 8.572	Dinas Kearsipan dan Perpustakaa n
		1	Persentase OPD yang mengelola arsip secara tertib	Persen	15,2	21,7	26,1		30,4		34,8		39,1		43,5		43,5		
		2	Persentase arsip aktif, in aktif dan vital yang disusun kedalam daftar:																
			- arsip aktif	Persen	50	60	20		20		20		20		20		20		
			- arsip in aktif	Persen	50	46,7	20,00		37,80		20		20		53,3		53,3		
			- arsip vital	Persen	67	75	20		20		20		20		20		20		
		3	Persentase penyusutan arsip	Persen	0	0	20		20		20		20		20		20		
		4	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan informasi kearsipan	Persen	0	0	70,00		72		73		75		78		78		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		5	Tingkat pemeliharaa n arsip statis	Persen	1,83	1,83	19,99		19,99		19,99		19,99		19,99		19,99		
3	Urusan Pilihan							25.400 .759.5 66		27.225 .857.0 00		28.008 .393.1 10		28.148 .435.0 76		28.711 .403.7 77		137.494. 848.529	
3.01	Kelautan dan Perikanan							4.931. 191.85 1		4.994. 495.00 0		5.134. 015.85 0		5.159. 685.92 9		5.262. 879.64 8		25.482.2 68.278	
3.01.3 .01.01	Dinas Perikanan dan Peternakan							4.931. 191.85 1		4.994. 495.00 0		5.134. 015.85 0		5.159. 685.92 9		5.262. 879.64 8		25.482.2 68.278	
3.01.3. 01.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	1.498. 304.85 1								100	1.498.30 4.851	Dinas Perikanan dan Peternakan	
3.01.3. 01.01. 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100	550.00 0.000								100	550.000. 000	Dinas Perikanan dan Peternakan	
3.01.3. 01.01. 06	Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100	100	100	55.000 .000								100	55.000.0 00	Dinas Perikanan dan Peternakan	
3.01.3. 01.01. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi									2.062. 800.00 0		2.114. 370.00 0		2.124. 941.85 0		2.167.4 40.687		8.469.55 2.537	Dinas Perikanan dan Peternakan

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Perkantoran																		
		1	Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	40,46	76,29			100		100		100		100		100		
		2	Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/prasarana kantor	Persen	37,5	76,29			100		100		100		100		100		
		3	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persen	75	80			100		100		100		100		100		
		4	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	69,74	81,59			100		100		100		100		100		
		5	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan	Persen	5,75	100			100		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			perundang - undangan															
		6	Persentase ketersediaan data kinerja OPD	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
3.01.3. 01.01. 40	Program Peningkatan Ketahanan Pangan						365.00 0.000										365.000. 000	Dinas Perikanan dan Peternakan
		1	Jumlah Ternak Unggas Yang Disebarkan	Ekor	1.00 0	1.000	1.000									1.000		
		2	Jumlah Benih Ikan Yang Ditebarkan	Ekor	75.0 00	75.000	75.000									75.000		
		3	Kawasan Peternakan dan Perikanan Terpadu	Kegiat an	1	1	1									1		
3.01.3. 01.01. 20	Program pengembang an budidaya perikanan						1.819. 737.00 0		1.912. 000.00 0		1.969. 360.00 0		1.979. 206.80 0		2.018.7 90.936		9.699.09 4.736	Dinas Perikanan dan Peternakan
		1	Jumlah Kelompok Pembudiday a Ikan	Kelom pok	109	115		121		124		127		130		130		
		2	Produksi Benih Ikan	Ekor	514. 740.	555.95 8.000		741.22 5.600		889.47 0.720		1.067.3 64.864		190.83 7.837		190.83 7.837		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			UPR		000														
		3	Produksi Ikan Konsumsi	Ton	92.5 01	84.230			1.899		2.279		2.735		3.282		3.282		
		4	Produksi Ikan Hias	Ekor	94.0 00	117.01 0			135.36 0		162.43 2		194.91 8		233.90 3		233.90 3		
		5	Produksi Benih UPTD BBI	Ekor	5.00 0.00 0	5.075. 000			5.880. 000		6.320. 000		6.740.0 00		7.200. 000		7.200.0 00		
		6	Jumlah Pelaku Usaha Budidaya Ikan	Orang	9.63 5	9.190			9.190		9.190		9.190		9.190		9.190		
		7	Luas Lahan Budidaya yang Disertifikasi	Hektar	4	4			4		4		4		4		4		
3.01.3. 01.01. 21	Program pengembang an perikanan tangkap							498.15 0.000		642.19 5.000		661.46 0.850		664.76 8.154		678.06 3.517		3.144.63 7.522	Dinas Perikanan dan Petrernakan
		1	Produksi Ikan Hasil Tangkapan (ton)	Ton	1.02 3,74	1.100, 81			1.272		1.367		1.470		1.580		1.580		
		2	Jumlah Ikan yang ditebarkan	Ekor	225. 000	375.00 0			450.00 0		500.00 0		550.00 0		600.00 0		600.00 0		
		3	Jumlah Kelompok Usaha Perikanan Tangkap	Kelom pok	14	18			48		51		53		56		56		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.01.3. 01.01. 24	Program pengembang an kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar							50.000 .000		150.00 0.000		154.50 0.000		155.27 2.500		158.37 7.950		668.150. 450	Dinas Perikanan dan Pernakan
		1	Jumlah kawasan Perairan Umum yang dikelola	Jenis	3	3	3		3		3		3		3		3		
		2	Jumlah kawasan perikanan budidaya yang dikelola	Kecam atan	17	17	17		17		17		17		17		17		
		3	Jumlah KJA	Petak	21.0 00	21.000	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		
		4	Produksi Ikan KJA	Ton			12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		
3.01.3. 01.01. 50	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan							95.000 .000		227.50 0.000		234.32 5.000		235.49 6.625		240.20 6.558		1.032.52 8.183	Dinas Perikanan dan Pernakan
		1	Jumlah Unit Pengolahan Hasil Perikanan (Unit)	Unit	50	94	100		105		110		115		120		120		
		2	Produksi Olahan Produk Perikanan (ton)	Ton			85		90		95		100		105		105		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	Jumlah Kelompok Usaha pengolahan ikan (kelompok)	kelomp ok	11	12	13		14		15		16		17		17		
		4	Jumlah Unit Pemasaran Hasil Perikanan (unit)	Unit	1.16 0	1.161	1.170		1.172		1.174		1.176		1.178		1.178		
3.02	Pariwisata							2.655. 000.00 0		3.218. 752.00 0		3.315. 314.56 0		3.331. 891.13 3		3.398. 528.95 5		15.919.4 86.648	
3.02.2 .13.01	Dinas Kepemudaa n, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan							2.655. 000.00 0		3.218. 752.00 0		3.315. 314.56 0		3.331. 891.13 3		3.398. 528.95 5		15.919.4 86.648	
3.02.2. 13.01. 15	Program Pengembang an Pemasaran Pariwisata		Jumlah Event Promosi Yang Diikuti / Diselenggara kan	Event	8	8	8	1.755. 000.00 0									8	1.755.00 0.000	Dinas Kepemudaa n, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
3.02.2. 13.01. 16	Program Pengembang an Destinasi Pariwisata		Jumlah ODTW Yang Ditata	ODTW	4	4	4	900.00 0.000									4	900.000. 000	Dinas Kepemudaa n, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.02.2. 13.01. 18	Program Pengembang an kepariwisata an									1.158. 750.00 0		1.193. 512.50 0		1.199. 480.06 3		1.223.4 69.664		4.775.21 2.226	Dinas Kepemudaa n, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
		1	Persentase Daerah Tujuan Wisata (DTW) Dikembangk an	Persen	11,1 1	11,11			11,11		13,33		15,56		17,78		17,78		
		2	Persentase Jasa Usaha Pariwisata Berstandar baik/ tersertifikasi	Persen	0,00	0,00			2,22		4,44		4,44		6,67		6,67		
		3	Persentase Lembaga dan SDM Pariwisata Meningkat/ tersertifikasi	Persen	0,00	0,00			2,22		4,44		4,44		6,67		6,67		
3.02.2. 13.01. 19	Program Promosi Wisata Daerah		Persentase Event Promosi yang diikuti/disel enggarakan	Persen	20,0 0	20,00			30	1.530. 002.00 0	40	1.575. 902.06 0	40	1.583. 781.57 0	50	1.615.4 57.202	50	6.305.14 2.832	Dinas Kepemudaa n, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
3.02.2. 13.01. 20	Program Pengembang an Ekonomi Kreatif		Persentase komunitas ekonomi kreatif yang dibina	Persen					40	200.00 0.000	40	206.00 0.000	40	207.03 0.000	40	211.17 0.600	40	824.200. 600	Dinas Kepemudaa n, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.13.2. 13.01. 25	Program pembanguna n dan / peningkatan sarana prasarana pariwisata	Cakupan Pembanguna n dan/atau Peningkatan sarana prasarana Pariwisata	Persen					20	330.00 0.000	40	339.90 0.000	40	341.59 9.500	60	348.43 1.490	60	1.359.93 0.990	Dinas Kepemudaa n, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
3.03	Pertanian						10.323 .867.7 15		11.230 .980.0 00		11.558 .656.9 50		11.616 .450.2 35		11.848 .779.2 39		56.578.7 34.139	
3.03.3 .01.01	Dinas Perikanan dan Pernakan						1.505. 000.00 0		2.235. 000.00 0		2.302. 050.00 0		2.313. 560.25 0		2.359. 831.45 5		10.715.4 41.705	
3.03.3. 01.01. 23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan						165.00 0.000		225.00 0.000		231.75 0.000		232.90 8.750		237.56 6.925		1.092.22 5.675	Dinas Perikanan dan Pernakan
		1	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pernakan	Orang	610	615		650		670		685		700		700		
		2	jumlah ternak yang diperjual belikan di Pasar Hewan	Ekor	33.0 60	34.060		36.817		38.195		39.574		40.952		40.952		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	Keikutsertaa n dalam Pameran/ex po produk hasil peternakan	Kegiat an	5	5			5		5		5		5		5		
3.03.3. 01.01. 24	Program peningkatan produksi peternakan							200.00 0.000		395.00 0.000		406.85 0.000		408.88 4.250		417.06 1.935		1.827.79 6.185	Dinas Perikanan dan Pternakan
		1	Budidaya Ternak Ruminansia Besar (lokasi)	Lokasi	2	1			1		1		1		1		1		
		2	Budidaya Ternak Ruminansia Kecil	lokasi	2	1			1		1		1		1		1		
		3	Budidaya Ternak Unggas	Lokasi	1	1			2		2		2		2		2		
		4	Produksi Hasil Ternak	Persen	3	3			3		3		3		3		3		
		5	Jumlah Akseptor IB (ekor)	Ekor		1.500			1.575		1.654		1.736		1.823		1.823		
		6	Jumlah Teknologi yang Diterapkan	Jenis	3	3			3		3		3		3		3		
		7	Jumlah kelahiran Sapi Potong hasil IB dan Kawin Alam (ekor)	Ekor	736	1197			1.224		1.248		1.273		1.299		1.299		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8	Pengembang an Hijauan Makanan Ternak (lokasi)	Lokasi	1	1			1		1		1		1		1		
3.01.3. 01.01. 26	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan							270.00 0.000										270.000. 000	Dinas Perikanan dan Peternakan
		1	Jumlah Akseptor IB	Ekor	3.00 0	3.000	3.000										3.000		
		2	umlah Paket Teknologi Yang Diterapkan	Paket	2	2	2										2		
3.01.3. 01.01. 27	Program Pencegahan dan Penanggulan g Penyakit Menular Ternak							750.00 0.000										750.000. 000	Dinas Perikanan dan Peternakan
		1	Persentase Populasi Ternak Yang Divaksin	Persen	80	80	80										80		
		2	Presentase Populasi Ternak Yang Diobati	Persen	20	20	20										20		
		3	Sarana Kesehatan Hewan	Kegiat an	1	1	1										1		
3.03.3. 01.01. 34	Program Kesehatan Hewan dan									765.00 0.000		787.95 0.000		791.88 9.750		807.72 7.545		3.152.56 7.295	Dinas Perikanan dan

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Kesehatan Masyarakat Veteriner																		Peternakan
		1	Kasus penyakit hewan menular	PHMS	0	0			0		0		0		0		0		
		2	Terjaminya Keamanan PAH/HPAH	kecamatan	17	17			17		17		17		17		17		
		3	Jumlah Ternak dan hewan kesayangan yang ditangani	ekor	117	389			408		429		450		473		473		
		4	Jumlah Ternak Ruminansia yang diperiksa kesehatannya sebelum dipotong	ekor	5.396	6.753			7.699		8.172		8.645		9.118		9.118		
3.03.3.01.01.35	Program Peningkatan Kesejahteraan Peternakan								300.000.000		309.000.000		310.545.000		316.755.900		1.236.300.900		Dinas Perikanan dan Peternakan
		1	Jumlah Kelompok Usaha Peternakan	kelompok	70	95			97		98		99		100		100		
		2	Jumlah Kelompok Peternakan yang mengikuti lomba	kelompok	1	1			2		2		2		2		2		

Kode	Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		(kelompok)																
		3	Jumlah Peternak yang mengikuti magang/stu di banding/kur sus/pelatiha n (orang)	Orang	12	8		50		50		50		50		50		
2.03.3. 03.01. 21	Program Peningkatan Diversifikasi Pangan Hewani						120.00 0.000		550.00 0.000		566.50 0.000		569.33 2.500		580.71 9.150		2.386.55 1.650	Dinas Perikanan dan Pernakan
		1	Jumlah Ternak Unggas Yang Disebarkan (ekor)	Ekor	50	50	50	300		400		500		600		600		
		2	Jumlah Benih Ikan Yang Ditebarkan (ekor)	Ekor	200. 000	200.00 0	200.00 0	200.00 0		200.00 0		200.00 0		200.00 0		200.00 0		
		3	Penyediaan daging, telur dan susu perbaikan gizi masyarakat															
			daging (ton)	Ton	2	2	2	2		2		2		2		2		
			telur (ton)	Ton	5	5	5	5		5		5		5		5		
			susu (liter)	Liter	1100	1100	1100	1100		1100		1100		1100		1100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			susu (liter)	Liter	1100	1100	1100		1100		1100		1100		1100		1100	
3.03.3 .03.01	Dinas Pangan dan Pertanian						8.818. 867.71 5		8.995. 980.00 0		9.256. 606.95 0		9.302. 889.98 5		9.488. 947.78 4		45.863.2 92.434	
3.03.3. 03.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100		1.174. 547.71 5							100	1.174.54 7.715	Dinas Pangan dan Pertanian
3.03.3. 03.01. 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100		631.00 0.000							100	631.000. 000	Dinas Pangan dan Pertanian
3.03.3. 03.01. 06	Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100	100	100		62.500 .000							100	62.500.0 00	Dinas Pangan dan Pertanian
3.03.3. 03.01. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran								1.850. 490.00 0		1.896. 752.25 0		1.906. 236.01 1		1.944.3 60.731		7.597.83 8.993	Dinas Pangan dan Pertanian
		1	Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	40,4 6	76,29		100		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/prasarana kantor	Persen	37,5	76,29			100		100		100		100		100		
		3	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persen	75	80			100		100		100		100		100		
		4	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	69,74	81,59			100		100		100		100		100		
		5	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang - undangan	Persen	5,75	100			100		100		100		100		100		
		6	Persentase ketersediaan data kinerja OPD	Persen	100	100			100		100		100		100		100		
3.03.3.03.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraa							225.000.000		367.500.000		378.525.000		380.417.625		388.025.978		1.739.468.603	Dinas Pangan dan Pertanian

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	n Petani																		
		1	Persentase kelompok Tani yang Menerapkan Teknologi Pertanian	Persen	100	100			100		100		100		100		100		
		2	Persentase kelompok Tani yang mendapat bantuan	Persen	0	30,92			25		25		25		25		25		
3.03.3.03.01.17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/pe rkebunan		Jumlah Promosi Produk Pertanian /Perkebunan yang Dilaksanaka n	Kegiat an	2	2	2	100.000.000									100.000.000		Dinas Pangan dan Pertanian
3.03.3.03.01.19	Program peningkatan produksi pertanian/pe rkebunan							5.758.320.000									5.758.320.000		Dinas Pangan dan Pertanian
		1	Produksi Padi	Ton	226.424	226.424	226.424										226.424		
		2	Produksi Palawija	Ton	133.294	133.294	133.294										133.294		
		3	Produksi Teh	Ton	5.164	5.164	5.164										5.164		
		4	Produksi Cengkeh	Ton	337	337	337										337		
		5	Produksi Sayuran	Ton	45.459	45.459	45.459										45.459		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6	Produksi Buah- Buahan	Ton	115. 468	115.46 8	115.46 8										115.46 8		
3.03.3. 03.01. 20	Program Pemberdayaa n Penyuluh Pertanian/Pe rkebunan Lapangan							630.00 0.000										630.000. 000	Dinas Pangan dan Pertanian
		1	Pendidikan Pelatihan dan Bimbingan Teknis yang Diikuti oleh Penyuluh	Kegiat an	25	30	30										30		
		2	Kelompok Tani yang Menerapkan Teknologi Pertanian	Kelom pok	430	450	450										450		
3.03.3. 03.01. 25	Program Pengembang an Agribisnis							150.00 0.000										150.000. 000	Dinas Pangan dan Pertanian
		1	Penanaman Manggis	Pohon	1.07 5	1.155	1.155										1.155		
		2	Penanaman /Rehabilitasi The	Ha	27	30	30										30		
		3	Penanaman Cengkeh	Ha	1,7	1,75	1,75										1,75		
		4	Penanaman Ubi Kayu	Ha	1460	1610	1610										1610		
		5	Penanaman Pala	Ha	1,50	1,50	1,50										1,50		
		6	Penerapan Pertanian	Ha	45	50	50										50		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Organik																
3.03.3. 03.01. 29	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Pe rkebunan							87.500 .000										87.500.0 00	Dinas Pangan dan Pertanian
		1	Produktivitas Padi Sawah	Ku/Ha	63,0 6	63,85	63,85										63,85		
		2	Produktivitas Padi Ladang		37,1 8	37,64	37,64										37,64		
		3	Produktivitas Jagung	Ku/Ha	52,7 5	53,02	53,02										53,02		
		4	Produktivitas Ubi Kayu	Ku/Ha	198, 57	199,16	199,16										199,16		
		5	Produktivitas Cengkeh	Kg/Ha	250, 79	253,29	253,29										253,29		
		6	Produktivitas Teh	Kg/Ha	1.10 6,16	1.117, 22	1.117, 22										1.117,2 2		
		7	Produktivitas Pala	Kg/Ha	319, 47	322,66	322,66										322,66		
3.03.3. 03.01. 28	Program peningkatan produksi dan mutu hasil tanaman pangan									3.300. 490.00 0		3.399. 504.70 0		3.416. 502.22 4		3.484.8 32.268		13.601.3 29.191	Dinas Pangan dan Pertanian
		1	Laju produksi Padi	Persen	2,62 7	2,657			2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		
		2	Laju produksi Kacang- kacangan	Persen	- 55,6 6	346,35			1		1		1		1		1		
		3	Laju produksi	Persen	- 34,3	-18,55			1		1		1		1		1		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Umbi-umbian		9														
		4	Persentase kehilangan hasil	Persen	18	18			16,5		16		15,5		15		15		
3.03.3.03.01.29	Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian		Persentase penyediaan prasarana dan sarana pertanian	Persen	25	25			25	1.410.000.000	25	1.452.300.000	25	1.459.561.500	25	1.488.752.730	25	5.810.614.230	Dinas Pangan dan Pertanian
3.03.3.03.01.30	Program pengembangan perbenihan pertanian		Persentase produksi benih padi bersertifikat	Persen					100	300.000.000	100	309.000.000	100	310.545.000	100	316.755.900	100	1.236.300.900	Dinas Pangan dan Pertanian
3.03.3.03.01.31	Program perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan									300.000.000		309.000.000		310.545.000		316.755.900		1.236.300.900	Dinas Pangan dan Pertanian
		1	Persentase pengendalian serangan OPT	Persen	5	5			3		3		3		3		3		
		2	Persentase perlindungan lahan dari dampak perubahan iklim	Persen	5	5			3		3		3		3		3		
3.03.3.03.01.32	Program peningkatan penyuluhan dan									687.500.000		708.125.000		711.665.625		725.898.938		2.833.189.563	Dinas Pangan dan Pertanian

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	pelatihan pertanian																		
		1	Persentase ketersediaan program penyuluhan	Persen	100	100			100		100		100		100		100		
		2	Persentase pelaku pertanian yang terlatih	Persen	100	100			100		100		100		100		100		
3.03.3.03.01.33	Program produksi dan mutu hasil perkebunan dan holtikultura		Laju produksi Perkebunan dan hortikultura	Persen	- 53,17	122,89			0,233	780.000.000	0,234	803.400.000	0,234	807.417.000	0,235	823.565.340	0,235	3.214.382.340	Dinas Pangan dan Pertanian
3.06	Perdagangan							5.535.700.000		5.749.130.000		5.907.838.250		5.937.377.441		6.056.124.990		29.186.170.681	
3.06.3.06.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustria n							5.535.700.000		5.749.130.000		5.907.838.250		5.937.377.441		6.056.124.990		29.186.170.681	
3.06.3.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	1.728.200.000									100	1.728.200.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustria

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																			n
3.06.3. 06.01. 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100	405.00 0.000									100	405.000. 000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustria n
3.06.3. 06.01. 06	Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100	100	100	62.500 .000									100	62.500.0 00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustria n
3.06.3. 06.01. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran								2.753. 130.00 0		2.821. 958.25 0		2.836. 068.04 1		2.892.7 89.402			11.303.9 45.693	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustria n
		1	Persentase Pegawai yang memiliki Keseuaian Kompetensi	Persen	40,4 6	76,29			100		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/pras arana kantor	Persen	37,5	76,29			100		100		100		100		100	
		3	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persen	25,5	50			100		100		100		100		100	
		4	Persentase unit kerja yang mendapatka n pelayanan administrasi perkantoran	Persen	45,5	60			75		75		75		75		75	
		5	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang - undangan	Persen	50	75			75		75		75		75		75	
		6	Persentase ketersediaan data kinerja OPD	Persen	75	75			75		75		75		75		75	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.06.3. 06.01. 15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan							585.00 0.000										585.000. 000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustria n
		1	Jumlah Konsumen yang dibina	Orang	630	780	780										780		
		2	Persentase Penyelesaian Permasalah an- Permasalah an Pengaduan Konsumen (BPSK)	Persen	100	100	100										100		
		3	Jumlah Tera dan Tera Ulang Alat UTTP	UTTP/ Tahun	600	600	600										600		
		4	Jumlah Pengukuran BDKT	BDKT/ Tahun	40	40	40										40		
		5	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pengawasan Barang / Jasa	Pelaku Usaha	300	300	300										300		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6	Jumlah Komoditi Yang Diawasi Dalam Pengawasan Barang / Jasa	Komod iti	50	60	60										60		
		7	Jumlah Komoditi Yang Diuji (Lab) Pertahun	Komod iti	25	25	25										25		
3.06.3. 06.01. 21	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		Jumlah Peraturan (Regulasi) Tentang Pengelolaan, Penataan dan Pemetaan Lokasi Pasar Modern	Regula si	1	1	1	195.00 0.000									1	195.000. 000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustria n
3.06.3. 06.01. 21	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri								200.00 0.000		206.00 0.000		207.03 0.000		211.17 0.600			824.200. 600	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustria n
		1	Jumlah Keikutsertaa n dalam Pameran Ekspor.	Even					2		2		2		2		2		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	Jumlah Pelayanan Ekspor	Doku men SKA					13.000		135.00 0		14.500		16.000		16.000		
3.06.3. 06.01. 22	Program Penataan Infrastruktur Perdagangan dan Usaha Serta Lembaga Perdagangan							2.560. 000.00 0									2.560.00 0.000		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustria n
		1	Terbangunnya a Pasar Tradisional Yang Memiliki Fisik dan Sistem Pengelolaan Konsep Modern	Pasar	7	9	9										9		
		2	Tertatanya Penyempurn aan Pusat Perbelanjaan Pasar Jum'at	Pasar	1	1	1										1		
		3	Terbanguna nya Kantor Pengelola / Pelayanan Pasar Tradisional Yang Representati ve	Unit	5	6	6										6		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4	Tertatanya Sarana / Prasarana (Kios / Los / Jalan) Yang Representative di Pasar Tradisional	Unit	5	6	6									6		
3.06.3.06.01.22	Program Peningkatan Perlindungan konsumen								720.000.000		741.600.000		745.308.000		760.214.160		2.967.122.160	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		1	Jumlah pedagang yang mengikuti pembinaan	Orang		200		200								200		
		2	Jumlah Fasilitas pengaduan konsumen	Kasus				150		130		100		80		80		
		3	Jumlah pelayanan kemetrologia n	Unit		2.000		1.500		1.700		1.800		2.000		2.000		
		4	Jumlah pengawasan Alat UTP dan BDKT	Unit		10.000		10.000		11.000		12.000		13.000		13.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		5	Jumlah pengawasan dan pengendalian Harga kebutuhan pokok masyarakat	Kegiat an					5		5		5		5		5		
3.06.3.06.01.23	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri									2.076.000.000		2.138.280.000		2.148.971.400		2.191.950.828		8.555.202.228	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		1	Jumlah Pasar tradisional yang direvitalisasi	Pasar					1		1		1		1		1		
		2	Persentase Capaian target retribusi pasar	Persen		70			100		100		100		100		100		
		3	Jumlah pengunjung Pasar tradisional	Orang					200		250		275		300		300		
		4	Tertatanya pedagang kaki lima dan asongan	Kawas an					1		2		2		3		3		
3.07	Perindustrian							1.705.000.00		1.730.000.00		1.781.900.00		1.790.809.50		1.826.625.69		8.834.335.190	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								0		0		0		0		0			
3.07.3.06.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian							1.705.000.000		1.730.000.000		1.781.900.000		1.790.809.500		1.826.625.690		8.834.335.190	
3.07.3.06.01.17	Perogram Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi							225.000.000										225.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		1	Jumlah Industri Kecil Yang Memiliki SNI	Unit	80	100	100										100		
		2	Jumlah Desain Kemasan Produksi	Unit	96	120	120										120		
3.07.3.06.01.18	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah							530.000.000										530.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1	Jumlah Industri Kecil Pangan Memiliki P-IRT	Unit	96	120	120									120		
		2	Jumlah GKM Industri Kecil Yang Terbentuk	Unit	8	10	10									10		
		3	Jumlah Lokasi Sarana / Prasarana Promosi dan Penjualan Produk Industri Kecil	Unit	4	5	5									5		
3.07.3.06.01.19	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri						75.000.000										75.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		1	Jumlah Bahan Baku Yang Standard Hasil Litbang	Jenis	8	10	10									10		
		2	Jumlah Percontohan Mesin Pengolahan Bahan Baku Keramik	Unit	1	1	1									1		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		(TTG)																
		3	Jumlah Percontohan Tungku Pembakaran Keramik Dengan Bahan Bakar Yang Ramah Lingkungan	Unit	1	1	1									1		
3.07.3.06.01.20	Program Penataan Struktur Industri						125.000.000										125.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		1	Jumlah Lahan Kawasan IKM	Ha	4,8	6,0	6,0									6,0		
		2	Jumlah Data Potensi dan Informasi Industri yang Up To Date	Jenis	8	10	10									10		
3.07.3.06.01.21	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial						600.000.000										600.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																			dan Perindustria n
		1	Jumlah Bangunan Sarana dan Prasarana UPTD Litbang Keramik	Paket	1	1	1										1		
		2	Jumlah Desain Produk Keramik Yang Standar / Spesifik (Berkarakter)	Desain	80	100	100										100		
3.07.3. 06.01. 21	Program Penumbuhan dan Pengembang an Industri Kecil dan Menengah									1.530. 000.00 0		1.575. 900.00 0		1.583. 779.50 0		1.615.4 55.090		6.305.13 4.590	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustria n
		1	Jumlah P2WKSS terbina.	desa					1		1		1		1		1		
		2	Keikutsertaa n dalam pameran kerajinan	Kegiat an					2		2		2		2		2		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Daerah															
		3	Jumlah GKM Industri yang terbina	unit				1		1		1		1		1		
		4	Jumlah lokasi Sarana/Prasarana promosi dan Penjualan Produk Industri Kecil	unit				1		1		1		1		1		
		5	Jumlah desain kemasan produk Industri Keciln Menengah (IKM)	desain				5		5		5		5		5		
		6	Jumlah desain produk keramik yang standar/spe sifik	desain				20		20		20		20		20		
		7	Jumlah data potensi dan informasi industri	buku				1		1		1		1		1		
		8	Jumlah pengrajin sentra industri	pengrajin				30		30		30		30		30		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		keramik yang terbina																
		9 Jumlah pengunjung ke sentra industri keramik dan gerabah	Orang					8.000		9.000		10.000		10.000		10.000		
3.07.3.06.01.22	Program Pengembangan Teknologi dan kebijakan Industri						150.000.000		200.000.000		206.000.000		207.030.000		211.170.600		974.200.600	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		1 Jumlah kerjasama kemitraan dengan industri hulu/lembaga keuangan	IKM					1		1		1		1		1		
		2 Jumlah pemanfaatan potensi sumberdaya IKM	IKM					10		10		10		15		15		
		3 Jumlah bahan baku yang standar produk IKM	Unit					1		1		1		2		2		
3.08	Transmigrasi						250.000.000		302.500.000		310.667.500		312.220.838		318.465.254		1.493.853.592	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.08.2 .01.01	Dinas Ketenagaker jaan dan Transmigras i							250.00 0.000		302.50 0.000		310.66 7.500		312.22 0.838		318.46 5.254		1.493.85 3.592	
3.08.2. 01.01. 18	Program transmigrasi regional		Persentase Transmigran Yang Diberangkat kan	KK	0	100	100	250.00 0.000	100	302.50 0.000	100	310.66 7.500	100	312.22 0.838	100	318.46 5.254	100	1.493.85 3.592	Dinas Ketenagakerj aan dan Transmigras i
4	Urusan Pemerintah n Fungsi Penunjang							172.35 8.050. 980		176.42 7.488. 640		181.20 3.882. 548		182.10 9.901. 960		185.75 2.100. 000		897.851. 424.127	
4.01	Administrasi Pemerintah n							134.39 7.347. 365		136.84 1.603. 370		140.50 6.314. 157		141.20 8.845. 728		144.03 3.022. 642		696.987. 133.262	
4.01.4 .01.03	Sekretariat Daerah							69.221 .480.0 00		69.886 .040.0 00		71.694 .286.0 00		72.052 .757.4 30		73.493 .812.5 79		356.348. 376.009	
4.01.4. 01.03. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	23.333 .480.0 00									100	23.333.4 80.000	Sekretariat Daerah
4.01.4. 01.03. 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100	31.363 .000.0 00									100	31.363.0 00.000	Sekretariat Daerah
4.01.4. 01.03. 03	Program peningkatan disiplin aparatur		Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100	100	100	150.00 0.000									100	150.000. 000	Sekretariat Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.01.4. 01.03. 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100	100	100									100	1.250.00 0.000	Sekretariat Daerah
4.01.4. 01.03. 06	Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100	100	100									100	500.000. 000	Sekretariat Daerah
4.01.4. 01.03. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran								57.667 .040.0 00		59.108 .716.0 00		59.404 .259.5 80		60.592. 344.77 2		236.772. 360.352	Sekretariat Daerah
		1	Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	80	81	85		90		100		100		100		100	
		2	Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/pras arana kantor	Persen	80	81,7	85		90		100		100		100		100	
		3	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persen	80	81,7	85		90		100		100		100		100	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	Persen	90	91,2	95		90		100		100		100		100		
		5	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang - undangan	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100		
		6	Persentase ketersediaan data kinerja OPD	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100		
4.01.4.01.03.09	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan							1.050.000.000										1.050.000.000	Sekretariat Daerah
		1	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan:																
			- Perda	Persen	100	100	100										100		
			- Perbup	Persen	100	100	100										100		
			- Kepbup	Persen	100	100	100										100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	Persentase fasilitasi bantuan hukum	Persen	100	100	100										100		
		3	Persentase sosialisasi produk hukum	Persen	100	100	100										100		
4.01.4. 01.03. 21	Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan									1.125. 000.00 0		1.158. 750.00 0		1.164. 543.75 0		1.187.8 34.625		4.636.12 8.375	Sekretariat Daerah
		1	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan:																
			- Perda	Persen	100	100		100		100		100		100		100			
			- Perbup	Persen	100	100		100		100		100		100		100			
			- Kepbup	Persen	100	100		100		100		100		100		100			
		2	Persentase fasilitasi bantuan hukum	Persen	100	100		100		100		100		100		100			
		3	Persentase sosialisasi produk hukum	Persen	100	100		100		100		100		100		100			
4.01.4. 01.03. 10	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Waki		Jumlah Rangkaian Pelayanan Kedinasan KDH / WKDH	Bulan	12	12	12	1.325. 000.00 0									12	1.325.00 0.000	Sekretariat Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	l Kepala Daerah																		
4.01.4.01.03.11	Program Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan							850.000.000										850.000.000	Sekretariat Daerah
		1	Paket Pelelangan Tahunan	Paket	250	250	250										250		
		2	Dokumen Juknis Pengelolaan APBD	Dokumen	1	1	1										1		
		3	Tambahan Aparat Bersertifikat Pengadaan Barang/Jasa	Orang	25	25	25										25		
4.01.4.01.03.12	Program Koordinasi Implementasi Pembangunan Ekonomi Daerah		Persentase Implementasi Kebijakan Pembangunan Perekonomian daerah	Persen	100	100	100	400.000.000									100	400.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.16	Program Koordinasi Implementasi Pembangunan Ekonomi Daerah		Persentase Implementasi Kebijakan Pembangunan Perekonomian daerah	Persen	100	100			100	475.000.000	100	489.250.000	100	491.696.250	100	501.530.175	100	1.957.476.425	Sekretariat Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.01.4. 01.03. 14	Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Capaian Penataan OPD Sesuai Dengan Peraturan PerundangU ndangan	Persen	100	100	100	100.00 0.000									100	100.000. 000	Sekretariat Daerah
4.01.4. 01.03. 15	Program Pemantapan Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Kajian/Anali sis Ketatalaksan aan Organisasi Perangkat Daerah	Kegiat an	2	2	2	250.00 0.000									2	250.000. 000	Sekretariat Daerah
4.01.4. 01.03. 16	Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Pembinaan Ketatalaksan aan Organisasi Perangkat Daerah	Kegiat an	2	3	3	250.00 0.000									3	250.000. 000	Sekretariat Daerah
4.01.4. 01.03. 17	Program Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Persentase OPD Yang Terevaluasi Kinerjanya	Persen	100	100	100	725.00 0.000									100	725.000. 000	Sekretariat Daerah
4.01.4. 01.03. 18	Program Pengembang an Wilayah Perbatasan	Jumlah Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi WilayahWila yah Perbatasan	Kegiat an	1	2	2	600.00 0.000									2	600.000. 000	Sekretariat Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.01.4. 01.03. 19	Program Fasilitasi Kemasyarak tan dan Keagamaan		Persen	100	100	100	5.275. 000.00 0	100	5.316. 500.00 0	100	5.475. 995.00 0	100	5.503. 374.97 5	100	5.613.4 42.475	100	27.184.3 12.450	Sekretariat Daerah
4.01.4. 01.03. 19	Program Penataan Administrasi Pembanguna n Daerah								797.50 0.000		821.42 5.000		825.53 2.125		842.04 2.768		3.286.49 9.893	Sekretariat Daerah
		1	Persentase laporan capaian kinerja pembanguna n	Persen	75	88	90		93		96		96		100		100	
		2	Persentase ketersediaan dokumen petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan pembanguna n dan analisis standar belanja (ASB)	Persen	50	50	100		100		100		100		100		100	
		3	Persentase ketersediaan dokumen pengembang an teknologi informasi	Persen			25		50		50		75		100		100	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.01.4. 01.03. 21	Program Fasilitasi Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Kegiatan Yang Menunjang Kelancaran Proses Pengadaan Barang/Jasa	Kegiat an		10	10	1.800. 000.00 0									10	1.800.00 0.000	Sekretariat Daerah
4.01.4. 01.03. 37	Program Optimalisasi Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa								2.058. 750.00 0		2.120. 512.50 0		2.131. 115.06 3		2.173.7 37.364		8.484.11 4.926	Sekretariat Daerah
		1	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa	Persen	44,4 4	60	75		81,82		85,71		90		96,77		96,77	
		2	Persentase paket pengadaan barang/jasa yang selesai ditenderkan	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100	
		3	Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa secara elektronik	Persen	32,5 9	37,24	61,54		76,92		92,31		96,15		100		100	
4.01.4. 01.03. 38	Program Pendayaguna an Aparatur Negara dan Reformasi	Indeks Reformasi Biroktasi	Poin			45		50	787.50 0.000	55	811.12 5.000	55	815.18 0.625	60	831.48 4.238	60	3.245.28 9.863	Sekretariat Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Birokrasi																		
4.01.4. 01.03. 40	Program Penatausaha an Keuangan									398.75 0.000		410.71 2.500		412.76 6.063		421.02 1.384		1.643.24 9.946	Sekretariat Daerah
		1	Peresentase penyusunan perencanaan anggaran yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang- undangan	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100		
		2	Persentase data keuangan yang diverifikasi	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100		
		3	Persentase laporan keuangan yang tepat waktu	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100		
4.01.4. 01.03. 43	Program Penyelenggar aan Pemerintah n Umum dan Otonomi Daerah									1.260. 000.00 0		1.297. 800.00 0		1.304. 289.00 0		1.330.3 74.780		5.192.46 3.780	Sekretariat Daerah
		1	Capaian Nilai Laporan Penyelenggar aan	Poin	3127 1	3,5	3,5		3,5		3,5		3,5		3,5		3,5		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pemerintah n Daerah (LPPD)															
		2	Persentase kerjasama daerah yang sesuai dengan kebutuhan	Persen	100 MOU /PKS /100 %	100 MOU/ PKS/1 00%	100		100			100		100		100		
		3	Persentase fasilitasi naskah kerjasama daerah	Persen	100	100	100		100			100		100		100		
		4	Persentase identifikasi dan inventarisasi wilayah perbatasan dan rupa bumi buatan dan alam yang terdokument asikan	Persen	100	100	100		100			100		100		100		
4.01.4 .01.04	Sekretariat DPRD						41.935 .136.0 00		42.377 .231.5 40		43.591 .125.7 84		43.809 .081.4 12		44.685 .263.0 41		216.397. 837.777	
4.01.4. 01.04. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100		4.960. 156.00 0							100	4.960.15 6.000	Sekretariat DPRD

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.01.4. 01.04. 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100									100	4.578.50 0.000	Sekretariat DPRD
4.01.4. 01.04. 03	Program peningkatan disiplin aparatur		Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100	100	100									100	470.000. 000	Sekretariat DPRD
4.01.4. 01.04. 06	Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100	100	100									100	619.500. 000	Sekretariat DPRD
4.01.4. 01.04. 08	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		Jumlah Rapat Pembahasan Raperda Menjadi Perda	Kegiat an	10	10	10									10	31.306.9 80.000	Sekretariat DPRD
4.01.4. 01.04. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran								11.484 .540.5 40		11.771 .654.0 54		11.830 .512.3 24		12.067. 122.57 0		47.153.8 29.488	Sekretariat DPRD
		1	Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen				100		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/prasarana kantor	Persen					100		100		100		100		100		
		3	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persen					100		100		100		100		100		
		4	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	Persen					100		100		100		100		100		
		5	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang - undangan	Persen					100		100		100		100		100		
		6	Persentase ketersediaan data kinerja OPD	Persen					100		100		100		100		100		
4.01.4.01.04.42	Program Fasilitasi Rapat DPRD									13.819.176.0		14.233.751.2		14.304.920.0		14.591.018.43		56.948.865.754	Sekretariat DPRD

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
										00		80		36		7			
		1	Persentase pemenuhan referensi perundang-undangan	Persen					100		100		100		100		100		
		2	Perentase fasilitasi kegiatan rapat DPRD	Persen					100		100		100		100		100		
		3	Persentase penyusunan risalah rapat	Persen					100		100		100		100		100		
4.01.4.01.04.44	Program Perencanaan dan Penatausahaan Keuangan									142.175.000		146.440.250		147.172.451		150.115.900		585.903.602	Sekretariat DPRD
		1	Persentase penyusunan perencanaan anggaran yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen					100		100		100		100		100		
		2	Persentase data keuangan yang diverifikasi	Persen					100		100		100		100		100		
		3	Persentase laporan keuangan	Persen					100		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			yang tepat waktu															
4.01.4.01.04.45	Program Peningkatan Hubungan Masyarakat dan Protokol								16.931.340.000		17.439.280.200		17.526.476.601		17.877.006.133		69.774.102.934	Sekretariat DPRD
		1	Persentase fasilitas hubungan antar lembaga	Persen				100		100		100		100		100		
		2	Persentase publikasi kegiatan DPRD	Persen				100		100		100		100		100		
		3	Persentase fasilitasi pelaksanaan kegiatan DPRD	Persen				100		100		100		100		100		
4.01.4.01.05	Kecamatan Jatiluhur						624.510.000		688.032.500		705.638.113		709.166.303		723.349.629		3.450.696.545	
4.01.4.01.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	302.010.000								100	302.010.000	Kecamatan Jatiluhur
4.01.4.01.05.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100	130.000.000								100	130.000.000	Kecamatan Jatiluhur

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna		Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.01.4. 01.05. 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100	100	100	42.500.000									100	42.500.000	Kecamatan Jatiluhur
4.01.4. 01.05. 07	Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan		Frekuensi Pembinaan/ Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Desa/Kelurahan	Kali	51	51	51	150.000.000									51	150.000.000	Kecamatan Jatiluhur
4.01.4. 01.05. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran									485.632.500		497.773.313		500.262.179		510.267.423		1.993.935.414	Kecamatan Jatiluhur
		1	Persentase Pegawai yang memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	99,97	43,26			100		100		100		100		100		
		2	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan sarana prasarana kantor	Persen			100		100		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	99,93	99,44	100		100		100		100		100		100		
		4	Presntase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	86,31	73,12	100		100		100		100		100		100		
		5	Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan per Undang-Undangan	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100		
4.01.4.01.05.41	Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan		Persentase Perencanaan , Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,41	73,5	100		100	202.400.000	100	207.864.800	100	208.904.124	100	213.082.206	100	832.251.130	Kecamatan Jatiluhur
4.01.4.01.06	Kecamatan Sukasari							749.750.000		848.960.000		870.454.000		874.806.270		892.302.395		4.236.272.665	
4.01.4.01.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100		443.700.000								100	443.700.000	Kecamatan Sukasari
4.01.4.01.06.02	Program peningkatan sarana dan prasarana		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100		185.600.000								100	185.600.000	Kecamatan Sukasari

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	aparatur																		
4.01.4. 01.06. 06	Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100	100	100	42.500 .000									100	42.500.0 00	Kecamatan Sukasari
4.01.4. 01.05. 07	Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggar aan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan		Frekuensi Pembinaan/ Pengawasan Penyelenggar aan Pelayanan Pemerintaha n Tingkat Desa/Kelura han	Kali	51	51	51	77.950 .000									51	77.950.0 00	Kecamatan Sukasari
4.01.4. 01.06. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran								713.96 0.000		731.80 9.000		735.46 8.045		750.17 7.406		2.931.41 4.451		Kecamatan Sukasari
		1	Persentase Pegawai yang memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	99,9 7	43,26	0		100		100		100		100		100		
		2	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan sarana	Persen	0	0	100		100		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							2019		2020		2021		2022		2023					
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			prasarana kantor																	
		3	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	99,9 3	99,44	100		100		100		100		100		100			
		4	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	86,3 1	73,12	100		100		100		100		100		100			
		5	Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan per Undang- Undangan	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100			
4.01.4. 01.06. 41	Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggar aan Urusan Pemerintah n di Wilayah Kecamatan		Persentase Perencanaan , Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,4 1	73,5	100		100		135.00 0.000		138.64 5.000		139.33 8.225		142.12 4.990	100	555.108. 215	Kecamatan Sukasari
4.01.4 .01.07	Kecamatan Maniis							633.85 4.300		688.58 2.155		706.09 9.109		709.62 9.604		723.82 2.197		3.461.98 7.365		
4.01.4. 01.07. 01	Program Pelayanan Administrasi		Tersedianya Pendukung Administrasi	Persen	100	100	100	301.78 4.300										301.784. 300	Kecamatan Maniis	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Perkantoran		Perkantoran																
4.01.4. 01.07. 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100	167.57 0.000										167.570. 000	Kecamatan Maniis
4.01.4. 01.07. 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100	100	100	42.500 .000										42.500.0 00	Kecamatan Maniis
4.01.4. 01.07. 07	Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan		Frekuensi Pembinaan/ Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51	51	51	122.00 0.000										122.000. 000	Kecamatan Maniis
4.01.4. 01.07. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran								537.38 2.155		550.81 6.709		553.57 0.792		564.64 2.208		2.206.41 1.865		Kecamatan Maniis
		1	Persentase Pegawai yang memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	99,9 7	43,26			100		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan sarana prasarana kantor	Persen			100		100		100		100		100		100		
		3	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	99,93	99,44	100		100		100		100		100		100		
		4	Presntase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	86,31	73,12	100		100		100		100		100		100		
		5	Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan per Undang-Undangan	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100		
4.01.4.01.07.41	Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan		Persentase Perencanaan , Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,41	73,5	100		100	151.200.000	100	155.282.400	100	156.058.812	100	159.179.988	100	621.721.200	Kecamatan Maniis
4.01.4.01.08	Kecamatan Tegalwaru							825.589.065		868.604.299		890.703.406		895.156.923		913.060.062		4.393.113.755	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.01.4. 01.08. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100									100	328.589. 065	Kecamatan Tegalwaru
4.01.4. 01.08. 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100									100	297.000. 000	Kecamatan Tegalwaru
4.01.4. 01.08. 06	Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100	100	100									100	42.500.0 00	Kecamatan Tegalwaru
4.01.4. 01.08. 07	Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggar aan Pelayanan Pemerintah n Berbasis Kewilayahan		Frekuensi Pembinaan/ Pengawasan Penyelenggar aan Pelayanan Pemerintah n Tingkat Desa/Kelura han	Kali	51	51	51									51	157.500. 000	Kecamatan Tegalwaru
4.01.4. 01.08. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran								676.60 4.299	100	693.51 9.406	100	696.98 7.003	100	710.92 6.743	100	2.778.03 7.452	Kecamatan Tegalwaru
		1	Persentase Pegawai yang memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	99,9 7	43,26			100									

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan sarana prasarana kantor	Persen			100		100		100		100		100		100		
		3	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	99,93	99,44	100		100		100		100		100		100		
		4	Presntase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	86,31	73,12	100		100		100		100		100		100		
		5	Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan per Undang-Undangan	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100		
4.01.4.01.08.41	Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan		Persentase Perencanaan , Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,41	73,5	100		100	192.000.000	100	197.184.000	100	198.169.920	100	202.133.318	100	789.487.238	Kecamatan Tegalwaru
4.01.4.01.09	Kecamatan Plered							837.880.000		886.240.000		908.726.000		913.269.630		931.535.023		4.477.650.653	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.01.4. 01.09. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100									100	385.380. 000	Kecamatan Plered
4.01.4. 01.09. 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100									100	280.000. 000	Kecamatan Plered
4.01.4. 01.09. 06	Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100	100	100									100	42.500.0 00	Kecamatan Plered
4.01.4. 01.09. 07	Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggar aan Pelayanan Pemerintah n Berbasis Kewilayahan		Frekuensi Pembinaan/ Pengawasan Penyelenggar aan Pelayanan Pemerintah n Tingkat Desa/Kelura han	Kali	51	51	51									51	130.000. 000	Kecamatan Plered
4.01.4. 01.09. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran								721.24 0.000		739.27 1.000		742.96 7.355		757.82 6.702		2.961.30 5.057	Kecamatan Plered
		1	Persentase Pegawai yang memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	99,9 7	43,26			100		100		100		100			

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan sarana prasarana kantor	Persen			100		100		100		100		100		100		
		3	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	99,93	99,44	100		100		100		100		100		100		
		4	Presntase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	86,31	73,12	100		100		100		100		100		100		
		5	Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan per Undang-Undangan	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100		
4.01.4.01.10.41	Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan		Persentase Perencanaan , Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,41	73,5	100		100	165.000.000	100	169.455.000	100	170.302.275	100	173.708.321	100	678.465.596	Kecamatan Plered
4.01.4.01.10	Kecamatan Sukatani							677.900.000		719.180.000		737.449.500		741.136.748		755.959.482		3.631.625.730	

Kode	Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.01.4. 01.10. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100		321.40 0.000							100	321.400. 000	Kecamatan Sukatani
4.01.4. 01.10. 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100		203.50 0.000							100	203.500. 000	Kecamatan Sukatani
4.01.4. 01.10. 06	Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100	100	100		33.500 .000							100	33.500.0 00	Kecamatan Sukatani
4.01.4. 01.10. 07	Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggar aan Pelayanan Pemerintaha n Berbasis Kewilayahan		Frekuensi Pembinaan/ Pengawasan Penyelenggar aan Pelayanan Pemerintaha n Tingkat Desa/Kelura han	Kali	51	51	51		119.50 0.000							51	119.500. 000	Kecamatan Sukatani
4.01.4. 01.09. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran								574.18 0.000		588.53 4.500		591.47 7.173		603.30 6.716		2.357.49 8.388	Kecamatan Sukatani
		1	Persentase Pegawai yang memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	99,9 7	43,26			100		100		100		100		100	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan sarana prasarana kantor	Persen			100		100		100		100		100		100		
		3	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	99,93	99,44	100		100		100		100		100		100		
		4	Presntase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	86,31	73,12	100		100		100		100		100		100		
		5	Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan per Undang-Undangan	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100		
4.01.4.01.10.41	Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan		Persentase Perencanaan , Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,41	73,5	100		100	145.000.000	100	148.915.000	100	149.659.575	100	152.652.767	100	596.227.342	Kecamatan Sukatani
4.01.4.01.11	Kecamatan Darangdan							654.400.000		744.134.200		763.110.705		766.926.259		782.264.784		3.710.835.947	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.01.4. 01.11. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100		331.94 5.000							100	331.945. 000	Kecamatan Darangdan
4.01.4. 01.11. 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100		135.00 0.000							100	135.000. 000	Kecamatan Darangdan
4.01.4. 01.11. 06	Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100	100	100		35.930 .000							100	35.930.0 00	Kecamatan Darangdan
4.01.4. 01.11. 07	Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggar aan Pelayanan Pemerintah n Berbasis Kewilayahan		Frekuensi Pembinaan/ Pengawasan Penyelenggar aan Pelayanan Pemerintah n Tingkat Desa/Kelura han	Kali	51	51	51		151.52 5.000							51	151.525. 000	Kecamatan Darangdan
4.01.4. 01.11. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran								557.55 9.200		571.49 8.180		574.35 5.671		585.84 2.784		2.289.25 5.835	Kecamatan Darangdan
		1	Persentase Pegawai yang memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	99,9 7	43,26			100		100		100		100		100	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan sarana prasarana kantor	Persen			100		100		100		100		100			
		3	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	99,93	99,44	100		100		100		100		100			
		4	Presntase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	86,31	73,12	100		100		100		100		100			
		5	Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan per Undang-Undangan	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
4.01.4.01.11.41	Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan		Persentase Perencanaan , Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen				100	186.575.000	100	191.612.525	100	192.570.588	100	196.421.999	100	767.180.112	Kecamatan Darangdan
4.01.4.01.12	Kecamatan Bojong						575.418.000		636.910.000		653.200.570		656.466.573		669.595.904		3.191.591.047	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.01.4. 01.12. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	292.71 8.000								100	292.718. 000	Kecamatan Bojong
4.01.4. 01.12. 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100	107.70 0.000								100	107.700. 000	Kecamatan Bojong
4.01.4. 01.12. 06	Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100	100	100	35.000 .000								100	35.000.0 00	Kecamatan Bojong
4.01.4. 01.12. 07	Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggar aan Pelayanan Pemerintah n Berbasis Kewilayahan		Frekuensi Pembinaan/ Pengawasan Penyelenggar aan Pelayanan Pemerintah n Tingkat Desa/Kelura han	Kali	51	51	51	140.00 0.000								51	140.000. 000	Kecamatan Bojong
4.01.4. 01.12. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran								453.00 0.000		464.32 5.000		466.64 6.625		475.97 9.558		1.859.95 1.183	Kecamatan Bojong
		1	Persentase Pegawai yang memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	99,9 7	43,26			100		100		100		100		100	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan sarana prasarana kantor	Persen			100		100		100		100		100		100		
		3	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	99,93	99,44	100		100		100		100		100		100		
		4	Presntase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	86,31	73,12	100		100		100		100		100		100		
		5	Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan per Undang-Undangan	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100		
4.01.4.01.12.41	Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan		Persentase Perencanaan , Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,41	73,5	100		100	183.910.000	100	188.875.570	100	189.819.948	100	193.616.347	100	756.221.865	Kecamatan Bojong
4.01.4.01.13	Kecamatan Wanayasa							475.698.000		535.500.000		549.241.300		551.987.507		563.027.257		2.675.454.063	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.01.4. 01.13. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	224.69 8.000								100	224.698. 000	Kecamatan Wanayasa
4.01.4. 01.13. 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100	85.000 .000								100	85.000.0 00	Kecamatan Wanayasa
4.01.4. 01.13. 06	Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100	100	100	41.000 .000								100	41.000.0 00	Kecamatan Wanayasa
4.01.4. 01.13. 07	Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggar aan Pelayanan Pemerintah n Berbasis Kewilayahan		Frekuensi Pembinaan/ Pengawasan Penyelenggar aan Pelayanan Pemerintah n Tingkat Desa/Kelura han	Kali	51	51	51	125.00 0.000								51	125.000. 000	Kecamatan Wanayasa
4.01.4. 01.13. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran								358.60 0.000		367.56 5.000		369.40 2.825		376.79 0.882		1.472.35 8.707	Kecamatan Wanayasa
		1	Persentase Pegawai yang memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	99,9 7	43,26			100		100		100		100		100	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan sarana prasarana kantor	Persen			100		100		100		100		100		100		
		3	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	99,93	99,44	100		100		100		100		100		100		
		4	Presntase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	86,31	73,12	100		100		100		100		100		100		
		5	Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan per Undang-Undangan	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100		
4.01.4.01.13.41	Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan		Persentase Perencanaan , Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,41	73,5	100		100	176.900.000	100	181.676.300	100	182.584.682	100	186.236.375	100	727.397.357	Kecamatan Wanayasa
4.01.4.01.14	Kecamatan Kiarapedes							551.200.000		625.000.000		640.975.000		644.179.875		657.063.473		3.118.418.348	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.01.4. 01.14. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	256.20 0.000								100	256.200. 000	Kecamatan Kiarapedes
4.01.4. 01.14. 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100	125.00 0.000								100	125.000. 000	Kecamatan Kiarapedes
4.01.4. 01.14. 06	Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100	100	100	50.000 .000								100	50.000.0 00	Kecamatan Kiarapedes
4.01.4. 01.14. 07	Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggar aan Pelayanan Pemerintah n Berbasis Kewilayahan		Frekuensi Pembinaan/ Pengawasan Penyelenggar aan Pelayanan Pemerintah n Tingkat Desa/Kelura han	Kali	51	51	51	120.00 0.000								51	120.000. 000	Kecamatan Kiarapedes
4.01.4. 01.14. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran								450.00 0.000		461.25 0.000		463.55 6.250		472.82 7.375		1.847.63 3.625	Kecamatan Kiarapedes
		1	Persentase Pegawai yang memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	99,9 7	43,26			100		100		100		100		100	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan sarana prasarana kantor	Persen			100		100		100		100		100		100		
		3	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	99,93	99,44	100		100		100		100		100		100		
		4	Presntase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	86,31	73,12	100		100		100		100		100		100		
		5	Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan per Undang-Undangan	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100		
4.01.4.01.14.41	Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan		Persentase Perencanaan , Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,41	73,5	100		100	175.000.000	100	179.725.000	100	180.623.625	100	184.236.098	100	719.584.723	Kecamatan Kiarapedes
4.01.4.01.15	Kecamatan Pasawahan							519.120.000		602.080.826		617.440.925		620.528.129		632.938.692		2.992.108.572	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.01.4. 01.15. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	303.12 0.000								100	303.120. 000	Kecamatan Pasawahan
4.01.4. 01.15. 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100	65.000 .000								100	65.000.0 00	Kecamatan Pasawahan
4.01.4. 01.15. 06	Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100	100	100	32.000 .000								100	32.000.0 00	Kecamatan Pasawahan
4.01.4. 01.15. 07	Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggar aan Pelayanan Pemerintah n Berbasis Kewilayahan		Frekuensi Pembinaan/ Pengawasan Penyelenggar aan Pelayanan Pemerintah n Tingkat Desa/Kelura han	Kali	51	51	51	119.00 0.000								51	119.000. 000	Kecamatan Pasawahan
4.01.4. 01.15. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran								448.04 1.836		459.24 2.882		461.53 9.096		470.76 9.878		1.839.59 3.692	Kecamatan Pasawahan
		1	Persentase Pegawai yang memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	99,9 7	43,26			100		100		100		100		100	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan sarana prasarana kantor	Persen			100		100		100		100		100		100		
		3	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	99,93	99,44	100		100		100		100		100		100		
		4	Presntase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	86,31	73,12	100		100		100		100		100		100		
		5	Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan per Undang-Undangan	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100		
4.01.4.01.15.41	Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan		Persentase Perencanaan , Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,41	73,5	100		100	154.038.990	100	158.198.043	100	158.989.033	100	162.168.814	100	633.394.879	Kecamatan Pasawahan
4.01.4.01.16	Kecamatan Pondoksalam							530.850.000		602.613.250		618.029.481		621.119.629		633.542.021		3.006.154.381	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.01.4. 01.16. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	256.10 0.000								100	256.100. 000	Kecamatan Pondoksala m
4.01.4. 01.16. 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100	127.75 0.000								100	127.750. 000	Kecamatan Pondoksala m
4.01.4. 01.16. 06	Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100	100	100	32.000 .000								100	32.000.0 00	Kecamatan Pondoksala m
4.01.4. 01.16. 07	Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggar aan Pelayanan Pemerintah n Berbasis Kewilayahan		Frekuensi Pembinaan/ Pengawasan Penyelenggar aan Pelayanan Pemerintah n Tingkat Desa/Kelura han	Kali	51	51	51	115.00 0.000								51	115.000. 000	Kecamatan Pondoksala m
4.01.4. 01.16. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran								427.16 3.250		437.84 2.331		440.03 1.543		448.83 2.174		1.753.86 9.298	Kecamatan Pondoksala m
		1	Persentase Pegawai yang memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	99,9 7	43,26			100		100		100		100		100	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								00		00		50		02		12			
4.01.4. 01.17. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	1.922. 960.00 0									100	1.922.96 0.000	Kecamatan Purwakarta
4.01.4. 01.17. 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100	310.00 0.000									100	310.000. 000	Kecamatan Purwakarta
4.01.4. 01.17. 06	Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100	100	100	42.500 .000									100	42.500.0 00	Kecamatan Purwakarta
4.01.4. 01.17. 07	Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggar aan Pemerintah n Berbasis Kewilayahan		Frekuensi Pembinaan/ Pengawasan Penyelenggar aan Pelayanan Pemerintah n Tingkat Desa/Kelura han	Kali	51	51	51	11.021 .000.0 00									51	11.021.0 00.000	Kecamatan Purwakarta
4.01.4. 01.17. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran									2.334. 848.00 0		2.393. 219.20 0		2.405. 185.29 6		2.453.2 89.002		9.586.54 1.498	Kecamatan Purwakarta
		1	Persentase Pegawai yang memiliki Kesesuaian	Persen	99,9 7	43,26			100		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Kompetensi																
		2	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan sarana prasarana kantor	Persen			100		100		100		100		100		100		
		3	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	99,93	99,44	100		100		100		100		100		100		
		4	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	86,31	73,12	100		100		100		100		100		100		
		5	Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan per Undang-Undangan	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100		
4.01.4.01.17.41	Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan		Persentase Perencanaan , Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,41	73,5	100		100	11.223.750.000	100	11.526.791.250	100	11.584.425.206	100	11.816.113.710	100	46.151.080.167	Kecamatan Purwakarta

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.01.4 .01.18	Kecamatan Babakancika o							559.00 0.000		603.17 0.000		618.49 9.250		621.59 1.746		634.02 3.581		3.036.28 4.577	
4.01.4. 01.18. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	269.50 0.000									100	269.500. 000	Kecamatan Babakancik ao
4.01.4. 01.18. 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100	124.00 0.000									100	124.000. 000	Kecamatan Babakancik ao
4.01.4. 01.18. 06	Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100	100	100	44.000 .000									100	44.000.0 00	Kecamatan Babakancik ao
4.01.4. 01.18. 07	Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggar aan Pelayanan Pemerintah n Berbasis Kewilayahan		Frekuensi Pembinaan/ Pengawasan Penyelenggar aan Pelayanan Pemerintah n Tingkat Desa/Kelura han	Kali	51	51	51	121.50 0.000									51	121.500. 000	Kecamatan Babakancik ao
4.01.4. 01.18. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran									478.17 0.000		490.12 4.250		492.57 4.871		502.42 6.369		1.963.29 5.490	Kecamatan Babakancik ao
		1	Persentase Pegawai yang	Persen	99,9 7	43,26			100		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			memiliki Kesesuaian Kompetensi																
		2	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan sarana prasarana kantor	Persen			100		100		100		100		100		100		
		3	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	99,9 3	99,44	100		100		100		100		100		100		
		4	Presntase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	86,3 1	73,12	100		100		100		100		100		100		
		5	Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan per Undang- Undangan	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100		
4.01.4. 01.18. 41	Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggar aan Urusan Pemerintah n di Wilayah Kecamatan		Persentase Perencanaan , Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,4 1	73,5	100		100	125.00 0.000	100	128.37 5.000	100	129.01 6.875	100	131.59 7.213	100	513.989. 088	Kecamatan Babakancik ao

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.01.4 .01.19	Kecamatan Campaka							560.59 4.000		652.59 4.000		669.29 8.850		672.64 5.344		686.09 8.251		3.241.23 0.445	
4.01.4. 01.19. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	283.09 0.000									100	283.090. 000	Kecamatan Campaka
4.01.4. 01.19. 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100	95.004 .000									100	95.004.0 00	Kecamatan Campaka
4.01.4. 01.19. 06	Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100	100	100	42.500 .000									100	42.500.0 00	Kecamatan Campaka
4.01.4. 01.19. 07	Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggar aan Pelayanan Pemerintah n Berbasis Kewilayahan		Frekuensi Pembinaan/ Pengawasan Penyelenggar aan Pelayanan Pemerintah n Tingkat Desa/Kelura han	Kali	51	51	51	140.00 0.000									51	140.000. 000	Kecamatan Campaka
4.01.4. 01.19. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran								457.59 4.000		469.03 3.850		471.37 9.019		480.80 6.600		1.878.81 3.469		Kecamatan Campaka
		1	Persentase Pegawai yang	Persen	99,9 7	43,26			100		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			memiliki Kesesuaian Kompetensi																
		2	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan sarana prasarana kantor	Persen			100		100		100		100		100		100		
		3	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	99,9 3	99,44	100		100		100		100		100		100		
		4	Presntase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	86,3 1	73,12	100		100		100		100		100		100		
		5	Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan per Undang- Undangan	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100		
4.01.4. 01.19. 41	Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggar aan Urusan Pemerintah n di Wilayah Kecamatan		Persentase Perencanaan , Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,4 1	73,5	100		100	195.00 0.000	100	200.26 5.000	100	201.26 6.325	100	205.29 1.652	100	801.822. 977	Kecamatan Campaka

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.01.4 .01.20	Kecamatan Cibatu							615.46 6.000		692.03 2.600		709.79 7.415		713.34 6.402		727.61 3.330		3.458.25 5.747	
4.01.4. 01.20. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	243.91 6.000									100	243.916. 000	Kecamatan Cibatu
4.01.4. 01.20. 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100	139.05 0.000									100	139.050. 000	Kecamatan Cibatu
4.01.4. 01.20. 06	Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100	100	100	42.500 .000									100	42.500.0 00	Kecamatan Cibatu
4.01.4. 01.20. 07	Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggar aan Pelayanan Pemerintah n Berbasis Kewilayahan		Frekuensi Pembinaan/ Pengawasan Penyelenggar aan Pelayanan Pemerintah n Tingkat Desa/Kelura han	Kali	51	51	51	190.00 0.000									51	190.000. 000	Kecamatan Cibatu
4.01.4. 01.20. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran									460.03 2.600		471.53 3.415		473.89 1.082		483.36 8.904		1.888.82 6.001	Kecamatan Cibatu
		1	Persentase Pegawai yang	Persen	99,9 7	43,26			100		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			memiliki Kesesuaian Kompetensi																
		2	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan sarana prasarana kantor	Persen			100		100		100		100		100		100		
		3	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	99,9 3	99,44	100		100		100		100		100		100		
		4	Presntase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	86,3 1	73,12	100		100		100		100		100		100		
		5	Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan per Undang- Undangan	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100		
4.01.4. 01.20. 41	Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggar aan Urusan Pemerintah n di Wilayah Kecamatan		Persentase Perencanaan , Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,4 1	73,5	100		100	232.00 0.000	100	238.26 4.000	100	239.45 5.320	100	244.24 4.426	100	953.963. 746	Kecamatan Cibatu

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.01.4 .01.21	Kecamatan Bungursari							553.04 2.000		626.10 0.000		642.22 8.300		645.43 9.442		658.34 8.230		3.125.15 7.972	
4.01.4. 01.21. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	232.83 2.000									100	232.832. 000	Kecamatan Bungursari
4.01.4. 01.21. 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100	90.000 .000									100	90.000.0 00	Kecamatan Bungursari
4.01.4. 01.21. 06	Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100	100	100	50.000 .000									100	50.000.0 00	Kecamatan Bungursari
4.01.4. 01.21. 07	Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggar aan Pelayanan Pemerintah n Berbasis Kewilayahan		Frekuensi Pembinaan/ Pengawasan Penyelenggar aan Pelayanan Pemerintah n Tingkat Desa/Kelura han	Kali	51	51	51	180.21 0.000									51	180.210. 000	Kecamatan Bungursari
4.01.4. 01.21. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran								388.20 0.000		397.90 5.000		399.89 4.525		407.89 2.416		1.593.89 1.941		Kecamatan Bungursari
		1	Persentase Pegawai yang	Persen	99,9 7	43,26			100		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			memiliki Kesesuaian Kompetensi																
		2	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan sarana prasarana kantor	Persen			100		100		100		100		100		100		
		3	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	99,9 3	99,44	100		100		100		100		100		100		
		4	Presntase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	86,3 1	73,12	100		100		100		100		100		100		
		5	Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan per Undang- Undangan	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100		
4.01.4. 01.21. 41	Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggar aan Urusan Pemerintah n di Wilayah Kecamatan		Persentase Perencanaan , Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,4 1	73,5	100		100	237.90 0.000	100	244.32 3.300	100	245.54 4.917	100	250.45 5.815	100	978.224. 031	Kecamatan Bungursari

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.02	Pengawasan							5.027.800.00		5.215.625.00		5.362.415.62		5.389.227.70		5.497.012.25		26.492.080.585	
4.02.4.02.01	Inspektorat							5.027.800.00		5.215.625.00		5.362.415.62		5.389.227.70		5.497.012.25		26.492.080.585	
4.02.4.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	1.046.400.00									100	1.046.400.000	Inspektorat
4.02.4.02.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100	506.320.000									100	506.320.000	Inspektorat
4.02.4.02.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100	100	100	422.080.000									100	422.080.000	Inspektorat
4.02.4.02.01.07	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kegiat an	43	43	43	2.953.000.00									43	2.953.000.000	Inspektorat

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.02.4. 02.01. 08	Program Peningkatan Profesionalis me Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Diklat Yang Telah Dilaksana n Oleh Aparatur Pengawas	Kegiat an	4	4	4	100.00 0.000									4	100.000. 000	Inspektorat
4.02.4. 02.01. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran								1.935. 625.00 0		1.984. 015.62 5		1.993. 935.70 3		2.033.8 14.417		7.947.39 0.745	Inspektorat
		1	Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	4	60	80		85		90		95		100		100	
		2	Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/pras arana kantor	Persen	60	80	100		100		100		100		100		100	
		3	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persen	70	100	100		100		100		100		100		100	
		4	Persentase unit kerja yang mendapatka n pelayanan administrasi perkantoran	Persen	80	100	100		100		100		100		100		100	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		5	Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Persen	80	100	100		100		100		100		100		100		
		6	Persentase ketersediaan data kinerja OPD	Persen	80	100	100		100		100		100		100		100		
4.02.4.02.01.18	Program Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan									3.280.000.000		3.378.400.000		3.395.292.000		3.463.197.840		13.516.889.840	Inspektorat
		1	Oponi penilaian SAKIP Kabupaten	Persen	CC	B	B		BB		BB		A		AA		AA		
		2	Opini penilaian LKPD Kabupaten	Persen	WTP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
		3	Persentase penurunan temuan APIP (Aparat Pengawas Intern	Persen	80	90	100		100		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemerintah) terhadap OPD																
4.03	Perencanaan						5.561.609.500		5.521.162.500		5.679.089.063		5.707.484.508		5.821.634.198		28.290.979.768	
4.03.4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah						5.561.609.500		5.521.162.500		5.679.089.063		5.707.484.508		5.821.634.198		28.290.979.768	
4.03.4.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	763.085.200								100	763.085.200	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100	555.500.000								100	555.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100	100	100	82.500.000								100	82.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	keuangan																		an Daerah
4.03.4. 03.01. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran									1.541. 662.50 0		1.580. 204.06 3		1.588. 105.08 3		1.619.8 67.184		6.329.83 8.830	Badan Perencanaan Pembangun an, Penelitian dan Pengembang an Daerah
		1	Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	80	80	80		83		85		85		88		88		
		2	Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana / prasarana kantor	Persen	82	82	82		85		88		90		93		93		
		3	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persen	85	85	85		87		88		89		90		90		
		4	Persentase Unit Kerja yang mendapatka n pelayanan	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			administrasi Perkantoran																
		5	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang- undangan	Persen	100	100	100		100			100		100		100			
		6	Persentase ketersediaan data Kinerja OPD	Persen	100	100	100		100			100		100		100			
4.03.4. 03.01. 21	Program perencanaan pembanguna n daerah		Persentase dokumen perencanaan pembanguna n daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan	Persen	100	100	100	3.065. 524.30 0	100	1.762. 500.00 0	100	1.815. 375.00 0	100	1.824. 451.87 5	100	1.860.9 40.913	100	10.328.7 92.088	Badan Perencanaan Pembangun an, Penelitian dan Pengembang an Daerah
4.03.4. 03.01. 26	Program Evaluasi Pembanguna n Daerah		Tingkat capaian program kinerja Daerah terhadap perencanaan	Persen	85	86	87	665.00 0.000	93	300.00 0.000	94	309.00 0.000	95	310.54 5.000	96	316.75 5.900	96	1.901.30 0.900	Badan Perencanaan Pembangun an, Penelitian dan Pengembang

Kode	Bidang Urusan Pemerintah an dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		pembanguna n yang ditetapkan																an Daerah
4.03.4. 03.01. 27	Program pengembang an data/informa si	Jumlah Data dan Informasi Pembanguna n Daerah yang tersedia	Doku men	7	7	7	430.00 0.000									7	430.000. 000	Badan Perencanaan Pembangun an, Penelitian dan Pengembang an Daerah
4.03.4. 03.01. 27	Program Sinkronisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah Lingkup Bidang Ekonomi	Persentase kesesuaian capaian program dan kegiatan PD terhadap capaian RPJMD dan Renstra OPD lingkup Bidang Ekonomi	Persen	80	80	80		83	735.00 0.000	85	757.05 0.000	87	760.83 5.250	89	776.05 1.955	89	3.028.93 7.205	Badan Perencanaan Pembangun an, Penelitian dan Pengembang an Daerah
4.03.4. 03.01. 28	Program Sinkronisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah Lingkup Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah	Persentase kesesuaian capaian program dan kegiatan PD terhadap capaian RPJMD dan Renstra OPD lingkup Bidang Sarana dan Prasarana	Persen	80	80	80		83	432.00 0.000	85	444.96 0.000	87	447.18 4.800	89	456.12 8.496	89	1.780.27 3.296	Badan Perencanaan Pembangun an, Penelitian dan Pengembang an Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wilayah															
4.03.4. 03.01. 29	Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Sosial dan Budaya		Persen	80	80	80		83	405.00 0.000	85	417.15 0.000	87	419.23 5.750	89	427.62 0.465	89	1.669.00 6.215	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4. 03.01. 30	Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat		Persen	80	80	80		83	345.00 0.000	85	355.35 0.000	87	357.12 6.750	89	364.26 9.285	89	1.421.74 6.035	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.04	Keuangan						18.777 .010.0 00		19.027 .577.7 70		19.553 .954.9 03		19.651 .724.6 78		20.044 .759.1 71		97.055.0 26.522	
4.04.4 .04.06	Badan Keuangan dan Aset Daerah						9.557. 810.00 0		9.674. 157.77 0		9.945. 552.30 3		9.995. 280.06 5		10.195 .185.6 66		49.367.9 85.804	
4.04.4. 04.06. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	2.008. 750.00 0								100	2.008.75 0.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4. 04.06. 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100	940.00 0.000								100	940.000. 000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4. 04.06. 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100	100	100	415.00 0.000								100	415.000. 000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4. 04.06. 06	Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100	100	100	138.40 0.000								100	138.400. 000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4. 04.06. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran								3.766. 040.00 0		3.860. 191.00 0		3.879. 491.95 5		3.957.0 81.794		15.462.8 04.749	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1	Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	52,38	52,38			55,56		55,56		55,56		55,56		55,56		
		2	Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana / prasarana kantor	Persen	90,56	90,56			91		91,5		92		92,5		92,5		
		3	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persen	97	97			97,15		97,15		97,15		97,15		97,15		
		4	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	Persen	100	100			100		100		100		100		100		
		5	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Persen	90	90			90		90		90		90		90		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6	Persentase ketersediaan data Kinerja OPD	Persen	100	100			100		100		100		100		100		
4.04.4.04.06.16	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah							4.230.660.000		1.580.229.000		1.627.635.870		1.635.774.049		1.668.489.530		10.742.788.450	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		1	Persentase pelayanan verifikasi dokumen administrasi keuangan sesuai dengan SOP pelayanan	Persen	100	100			100		100		100		100		100		
		2	Persentase laporan keuangan daerah yang tepat waktu	Persen	100	100			100		100		100		100		100		
4.04.4.04.06.18	Program Pengelolaan Aset Daerah							1.825.000.000		2.353.500.000		2.424.105.000		2.436.225.525		2.484.950.036		11.523.780.561	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		1	Persentase pedoman pengelolaan barang milik daerah yang tersedia	Persen	71,24	71,24			78,57		85,71		93		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	Persentase inventarisasi asset daerah	Persen	60,24	60,24			61		62		65		66		66		
		3	Persentase pengelola aset OPD yang dibina	Persen	75	75			100		100		100		100		100		
4.04.4.04.06.19	Program Pengelolaan Anggaran Daerah									1.974.388.770		2.033.620.433		2.043.788.535		2.084.664.306		8.136.462.044	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		1	Persentase ketepatan waktu penyusunan APBD	Persen	100	100			100		100		100		100		100		
		2	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD	Persen	100	100			100		100		100		100		100		
		3	Persentase penyerapan anggaran	Persen	82,48	89,97			92		93		94		95		95		
4.04.4.04.07	Badan Pendapatan Daerah							9.219.200.000		9.353.420.000		9.608.402.600		9.656.444.613		9.849.573.505		47.687.040.718	
4.04.4.04.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	60,24	60,24	100	2.222.200.000									100	2.222.200.000	Badan Pendapatan Daerah
4.04.4.04.07.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	75	75	75	2.603.000.000									75	2.603.000.000	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.04.4. 04.07. 06	Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100	100	100		135.00 0.000							100	135.000. 000	Badan Pendapatan Daerah
4.04.4. 04.07. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran								5.124. 000.00 0		5.252. 100.00 0		5.278. 360.50 0		5.383.9 27.710		21.038.3 88.210	Badan Pendapatan Daerah
		1	Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	40,4 6	76,29			100		100		100		100		100	
		2	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana /Prasarana Kantor	Persen	37,5	76,29			100		100		100		100		100	
		3	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	75	80			100		100		100		100		100	
		4	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatka n Pelayanan Administrasi	Persen	69,7 4	81,59			100		100		100		100		100	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Perkantoran																
		5	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Dengan Perundang - Undangan	Persen	5,75	100			100		100		100		100		100		
		6	Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	100	100			100		100		100		100		100		
4.04.4. 04.07. 17	Program Intensifikasi dan Ekstensifikas i Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	14,5	15	15	4.259. 000.00 0									15	4.259.00 0.000	Badan Pendapatan Daerah
4.04.4. 04.07. 20	Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB									1.542. 750.00 0		1.589. 032.50 0		1.596. 977.66 3		1.628.9 17.216		6.357.67 7.378	Badan Pendapatan Daerah
		1	Persentase Peningkatan Potensi Pajak Non PBB dan	Persen					36,25		38,75		41,25		43,75		43,75		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			BPHTB															
		2	Persentase Peningkatan Pendapatan Potensi Pajak Non PBB dan BPHTB	Persen				36,26		38,76		41,26		43,76		43,76		
		3	Persentase Penyelesaian Pengaduan Permasalahan Wajib Pajak Non PBB dan BPHTB	Persen				36,27		38,77		41,27		43,77		43,77		
		4	Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Non PBB dan BPHTB	Persen				36,28		38,78		41,28		43,78		43,78		
4.04.4.04.07.21	Program Peningkatan Pendapatan PBB dan BPHTB								1.234.750.000		1.271.792.500		1.278.151.463		1.303.714.492		5.088.408.454	Badan Pendapatan Daerah
		1	Persentase Peningkatan Potensi Objek Pajak PBB	Persen		1,19		1,19		1,19		1,19		1,19		1,19		
		2	Persentase Peningkatan Data PBB P2 yang	Persen		0,52		0,52		0,52		0,52		0,52		0,52		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terekam																
		3	Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak PBB P2	Persen		2,94			2,50		2,50		2,50		2,50		2,50		
		4	Persentase Peningkatan Pendapatan dari sektor Pajak BPHTB	Persen		8,60			2,50		2,50		2,50		2,50		2,50		
		5	Persentase Penyelesaian Pengaduan Permasalahan n PBB P2 dan BPHTB	Persen		80			90,00		90,00		95,00		95,00		95,00		
4.04.4. 04.07. 22	Program Intensifikasi Penagihan Pendapatan Daerah								1.451.920.000		1.495.477.600		1.502.954.988		1.533.014.088		5.983.366.676	Badan Pendapatan Daerah	
		1	Persentase Pencapaian Target PBB P2	Persen		102			115		115		120		120		120		
		2	Persentase Pencapaian Target PBB P2	Persen		5			15		20		25		30		30		
		3	Persentase Terhapusnya Piutang Pajak Daerah kadaluwarsa	Persen		10			35		45		55		75		75		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masalah Keberatan Pajak Daerah/ Pendapatan Lainnya	Persen		95			95		95		95		95		95	
		5	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persen		3,5			3,50		3,50		3,50		3,50		3,50	
4.05	Kepegawaia n						8.594. 284.11 5		8.861. 520.00 0		9.113. 308.80 0		9.158. 875.34 4		9.342. 052.85 1		45.070.0 41.110	
4.05.4 .05.01	Badan Kepegawaia n dan Pengembang an Sumber Daya Manusia						8.594. 284.11 5		8.861. 520.00 0		9.113. 308.80 0		9.158. 875.34 4		9.342. 052.85 1		45.070.0 41.110	
4.05.4. 05.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	1.591. 650.00 0								100	1.591.65 0.000	Badan Kepegawaia n dan Pengembang an Sumber Daya Manusia
4.05.4. 05.01. 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100	1.067. 634.11 5								100	1.067.63 4.115	Badan Kepegawaia n dan Pengembang an Sumber Daya Manusia

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.05.4. 05.01. 03	Program peningkatan disiplin aparatur		Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100	100	100		60.000 .000							100	60.000.0 00	Badan Kepegawaia n dan Pengembang an Sumber Daya Manusia
4.05.4. 05.01. 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100	100	100		10.000 .000							100	10.000.0 00	Badan Kepegawaia n dan Pengembang an Sumber Daya Manusia
4.05.4. 05.01. 06	Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100	100	100		45.000 .000							100	45.000.0 00	Badan Kepegawaia n dan Pengembang an Sumber Daya Manusia
4.05.4. 05.01. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran								2.811. 360.00 0		2.881. 644.00 0		2.896. 052.22 0		2.953.9 73.264		11.543.0 29.484	Badan Kepegawaia n dan Pengembang an Sumber Daya Manusia
		1	Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana /Prasarana Kantor	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100	
		3	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100	
		4	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatka n Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100	
		5	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Dengan Perundang - Undangan	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100	
		6	Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.05.4. 05.01. 17	Program peningkatan Potensi dan kompetensi SDM Aparatur Pemerintah							4.075. 000.00 0		4.176. 000.00 0		4.301. 280.00 0		4.322. 786.40 0		4.409.2 42.128		21.284.3 08.528	Badan Kepegawaia n dan Pengembang an Sumber Daya Manusia
		1	Persentase Calon ASN yang telah mengikuti Pelatihan Dasar	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100		
		2	Persentase ASN yang diklat fungsional/ teknis//bimt ek/seminar/ lokakarya dan Tugas Belajar	Persen	0,12	0,12	0,28		1,53		1,53		1,53		1,53		1,53		
		3	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	6,49	12,52	4,01		12,15		8,02		8,02		7,9		7,9		
4.05.4. 05.01. 18	Program Peningkatan Kedisiplinan dan Kinerja Aparatur Pemerintah							260.00 0.000		290.00 0.000		298.70 0.000		300.19 3.500		306.19 7.370		1.455.09 0.870	Badan Kepegawaia n dan Pengembang an Sumber Daya Manusia

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1	Persentase penurunan Indisipliner pegawai	Persen	3,35	12,12	3,13		3,33		3,45		3,45		3,57		3,57		
		2	Persentase Peraturan Perundang- undangan dibidang kepegawaian yang disosialisasik an	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100		
		3	Persentase Sistem Aplikasi Kinerja	Persen	0	100	100		100		100		100		100		100		
4.05.4. 05.01. 19	Program Penyelenggar aan Manajemen Kepegawaian Negara							1.405. 000.00 0		1.463. 700.00 0		1.507. 611.00 0		1.515. 149.05 5		1.545.4 52.036		7.436.91 2.091	Badan Kepegawaia n dan Pengembang an Sumber Daya Manusia
		1	Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai	Persen	0,98	3,95	3,18		0,35		5,41		5,41		5,22		5,22		
		2	Persentase pengisian pemangku Jabatan Tinggi Pratama, jabatan Administrato	Persen	99,9 9	93,95	99		100		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			r,dan jabatan																
		3	Persentase Penataan ASN sesuai dengan kompetensi	Persen	0	0	100		100		100		100		100		100		
		4	Persentase Pelayanan kenaikan pangkat pegawai yang tepat waktu	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100		
		5	Persentase data ASN yang mutakhir	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100		
		6	Persentase Integrasi Aplikasi Kepegawaian	Persen					100		100		100		100		100		
4.05.4. 05.01. 20	Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah							80.000 .000		120.46 0.000		124.07 3.800		124.69 4.169		127.18 8.052		576.416. 021	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		1	Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2 Persentase ASN berprestasi/t eladan/berinovasi dan berdedikasi yang mendapat penghargaan	Persen	0,69		3,19		1,28		1,28		1,28		1,28		1,28		
		3 Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu	Persen	100	100	100		4,23		4,99		4,99		5,65		5,65		
	Penelitian dan Pengembangan								960.000.000		988.800.000		993.744.000		1.013.618.880		3.956.162.880	
4.03.4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah								960.000.000		988.800.000		993.744.000		1.013.618.880		4.079.818.990	
4.03.4.03.01.33	Program Penelitian, Penguasaan, Dan Pemanfaatan IPTEK								630.000.000		648.900.000		652.144.500		665.187.390		2.719.888.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1	Persentase penelitian pembanguna n yang sesuai dengan kebutuhan	Persen	80	85	90		93		94		95		96		96		
		2	Persentase pemanfaatan inovasi berbasis iptek dalam pembanguna n daerah	Persen	80	85	90		93		94		95		96		96		
4.03.4.03.01.31	Program Pengembangan Data dan Pelaporan Informasi Pembanguna n		Tingkat ketersediaan data dan informasi pembanguna n Daerah	Persen	80	85	90		93	330.000.000	94	339.900.000	95	341.599.500	96	348.431.490	96	1.359.930.990	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	TOTAL								911.422.422.219		930.671.527.038		958.211.662.740		966.367.966.639		986.169.155.984		4.752.842.734.620

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja daerah adalah alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (*outcome*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018-2023; dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan targetnya selama 5 (lima) tahun sampai akhir periode masa jabatan.

Indikator kinerja utama IKU Pemerintah Kabupaten Purwakarta ditetapkan dengan mempertimbangkan pada target yang ditetapkan

oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta arahan RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya daerah. Penyajian IKU Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 disajikan pada Tabel 8.1.

Sementara itu, IKK atau Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 yang terdiri dari berbagai indikator disajikan dalam 3 (tiga) kelompok besar yaitu: (1) Aspek Kesejahteraan Masyarakat; (2) Aspek Pelayanan Umum; dan (3) Aspek Daya Saing Daerah.

Indikator kinerja kunci pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator pada tingkat dampak atau *impact*. Indikator tingkat *impact* ini merupakan IKU pemerintah daerah dan IKU perangkat daerah Kabupaten Purwakarta. Sedangkan indikator kinerja pada Aspek Pelayanan Umum memuat indikator kinerja daerah tingkat hasil (*outcome*). Tabel 8.2 menyajikan IKK yang dimaksud.

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

No	Indikator	Kondisi Awal		Target Tahun					Kondisi Akhir
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	69,28	69,84	70,40	70,97	71,54	72,12	72,70	72,70
2	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,74	7,91	8,08	8,25	8,43	8,62	8,80	8,80
3	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,89	12,06	12,24	12,42	12,6	12,78	12,97	12,97
4	Persentase Seni dan Budaya Yang Dibina dan Dilestarikan (%)	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00
5	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin)	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00
6	Persentase Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional (%)	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	55,00	55,00
7	Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,42	70,54	70,65	70,77	70,89	71,01	71,13	71,13
8	Angka Kemiskinan (%)	9,06	8,88	8,7	8,53	8,36	8,19	8,03	8,03
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	45,81	46,11	46,54	46,95	47,35	47,75	48,14	48,14
10	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9.11	8.93	8.75	8.57	8.40	8.23	8.07	8.07

No	Indikator	Kondisi Awal		Target Tahun					Kondisi Akhir
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
11	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Poin)	87,40	87,86	88,32	88,79	89,25	89,71	90,18	90,18
12	Indeks Perberdayaan Gender (IDG) (Poin)	71,51	72,50	73,49	74,48	75,48	76,47	77,46	77,46
13	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	0	0	45	50	55	55	60	60
14	Nilai SAKIP Kab. Purwakarta	CC	B	B	B	BB	BB	A	A
15	Nilai LPPD Kab. Purwakarta	31,3	35	35	35	35	35	35	35
16	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (Poin)	73	75	75	76	77	78	79	79
17	Persentase aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikembangkan (%)	88	98	100	100	100	100	100	100
18	Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	0	0	2	4	6	8	10	10
19	Indeks Profesionalitas ASN (Poin)	Sangat Rendah (0-60)	Sangat Rendah (0-60)	Sangat Rendah (0-60)	Sangat Rendah (0-60)	Sangat Rendah (0-60)	Rendah (61-70)	Rendah (61-70)	Rendah (61-70)
20	Persentase Jalan Kabupaten Dalam	83,63	84,63	85,63	86,63	87,63	88,63	89,63	89,63

No	Indikator	Kondisi Awal		Target Tahun					Kondisi Akhir
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Kondisi Mantap (%)								
21	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	69,81	70,31	70,81	71,31	71,81	72,31	72,81	72,81
22	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	82,60	84,00	85,40	85,52	85,66	85,82	86,00	86,00
23	Cakupan Layanan Persampahan (%)	46,00	49,00	52,00	55,00	58,00	61,00	64,00	64,00
24	Cakupan Layanan Air Limbah Domestik (%)	2,00	9,00	16,00	20,00	25,00	32,00	40,00	40,00
25	Cakupan Layanan Air Bersih (%)	15,52	25,52	35,52	45,52	55,52	65,52	75,52	75,52
26	Persentase Rencana Rinci Tata Ruang Yang Ditetapkan (%)	0,00	0,00	18,52	18,52	7,41	11,11	18,52	18,52
27	Kontribusi Pariwisata Terhadap PAD (%)	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	55,00
28	Jumlah Wisatawan (Orang)	4.500	5.000	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	9.000
29	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.12	5.22	5.33	5.43	5.54	5.65	5.77	5.77
30	Indeks Gini (Poin)	0.39	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.36	0.36
31	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Rp)	10,941,000	11,056,000	11,173,000	11,291,000	11,410,000	11,531,000	11,652,000	11,652,000
32	Laju UMKM Yang Dibina (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33	Laju Koperasi Aktif	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00

No	Indikator	Kondisi Awal		Target Tahun					Kondisi Akhir
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	(%)								
34	Laju Pertumbuhan IKM (%)	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00
35	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	4,51	4,60	4,69	4,74	4,83	4,92	5,00	5,00
36	Laju Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (%)	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00
37	Skor Pola pangan Harapan (Poin)	86,25	87,40	88,55	89,70	90,85	92,00	93,15	93,15
38	Laju Produksi Pertanian (%)	1,08	1,15	1,22	1,22	1,22	1,08	1,10	1,10
39	Laju Produksi Peternakan (%)	3	3	3	3	3	3	3	3
40	Laju Produksi Perikanan (%)	14	14	14	14	14	14	14	14
41	Status Indeks Desa Membangun	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang

Sumber: hasil proyeksi, 2019

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	69.28	69.84	70.40	70.97	71.54	72.12	72.70	72.70	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7.74	7.91	8.08	8.25	8.43	8.62	8.80	8.80	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
3	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11.89	12.06	12.24	12.42	12.6	12.78	12.97	12.97	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
4	Angka Harapan Hidup	Tahun	70.42	70.54	70.65	70.77	70.89	71.01	71.13	71.13	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
5	Angka Kemiskinan	Persen	9.06	8.88	8.7	8.53	8.36	8.19	8.03	8.03	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	45,81	46,11	46,54	46,95	47,35	47,75	48,14	48,14	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9.11	8.93	8.75	8.57	8.40	8.23	8.07	8.07	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	87,4	87,86	88,32	88,79	89,25	89,71	90,18	90,18	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
9	Indeks Perberdayaan Gender (IDG)	Poin	71,51	72,5	73,49	74,48	75,48	76,47	77,46	77,46	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
10	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	Persen	83,63	84,63	85,63	86,63	87,63	88,63	89,63	89,63	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69,81	70,31	70,81	71,31	71,81	72,31	72,81	72,81	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
12	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	82,6	84	85,4	85,52	85,66	85,82	86	86	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
13	Cakupan Layanan Persampahan	Persen	46	49	52	55	58	61	64	64	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
14	Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	Persen	2	9	16	20	25	32	40	40	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
15	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	15,52	25,52	35,52	45,52	55,52	65,52	75,52	75,52	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
16	Persentase Rencana Rinci Tata Ruang	Persen	0	0	18,52	18,52	7,41	11,11	18,52	18,52	IKU Pemerintah

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Yang Ditetapkan										Daerah Kab Purwakarta
17	Kontribusi Pariwisata Terhadap PAD	Persen	25	30	35	40	45	50	55	55	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
18	Jumlah Wisatawan	Orang	4.500	5.000	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	9.000	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
19	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5.12	5.22	5.33	5.43	5.54	5.65	5.77	5.77	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
20	Indeks Gini	Poin	0.39	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.36	0.36	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
21	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	Rp	10,941,000	11,056,000	11,173,000	11,291,000	11,410,000	11,531,000	11,652,000	11,652,000	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
22	Laju UMKM Yang Dibina	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
23	Laju Koperasi Aktif	Persen	70	75	80	85	90	95	100	100	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
24	Laju Pertumbuhan IKM	Persen	45	50	55	60	65	70	75	75	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
25	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	4,51	4,6	4,69	4,74	4,83	4,92	5	5	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
26	Laju Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Persen	65	70	75	80	85	90	95	95	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
27	Skor Pola pangan Harapan	Poin	86,25	87,4	88,55	89,7	90,85	92	93,15	93,15	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
28	Laju Produksi Pertanian	Persen	1,08	1,15	1,22	1,22	1,22	1,08	1,1	1,1	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
29	Laju Produksi Peternakan	Persen	3	3	3	3	3	3	3	3	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
30	Laju Produksi Perikanan	Persen	14	14	14	14	14	14	14	14	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
31	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7.74	7.91	8.08	8.25	8.43	8.62	8.80	8.80	IKU Dinas Pendidikan
32	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11.89	12.06	12.24	12.42	12.6	12.78	12.97	12.97	IKU Dinas Pendidikan
33	Umur Harapan Hidup	Tahun	70,43	70,55	70,71	70,85	70,98	71,11	71,24	71,24	IKU Dinas Kesehatan
34	Persentase kematian ibu	Persen	0,11	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,09	0,09	IKU Dinas Kesehatan
35	Persentase kematian bayi	Persen	0,53	0,29	0,5	0,49	0,46	0,44	0,41	0,41	IKU Dinas Kesehatan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
36	Persentase Pencapaian SPM Rumah Sakit	Persen	60	60	60	65	70	75	80	80	IKU RS Bayu Asih
37	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	Persen	83,66	84,1	10,56	10,58	11,63	11,75	11,99	11,99	IKU Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
38	Jumlah Bangunan Gedung milik pemerintah Yang Dibangun/Direvitalisasi	Unit	16	10	15	15	15	15	15	75	IKU Dinas Tata Ruang dan Permukiman
39	Presentase RTH yang terpelihara	Persen	80	100	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Tata Ruang dan Permukiman
40	Persentase Ornamen Kota dan Reklame Yang Terpelihara	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Tata Ruang dan Permukiman
41	Rasio Lampu Hias dan Penerangan Jalan Umum Yang Terpasang	Persen	0	0	80	80	80	80	80	80	IKU Dinas Tata Ruang dan Permukiman
42	Jumlah Lokasi yang Jalan Lingkungannya Dibangun/Diperbaiki	Titik	13	36	8	8	8	8	8	40	IKU Dinas Tata Ruang dan Permukiman
43	Jumlah Daerah Genangan Yang Tertangani	Titik	3	1	3	3	3	3	3	15	IKU Dinas Tata Ruang dan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Permukiman
44	Presentase Kawasan Kumuh yang Ditangani sesuai dengan Surat Keputusan	Persen	0	0	5	5	5	5	5	5	IKU Dinas Tata Ruang dan Permukiman
45	Rasio Ketersediaan TPU milik pemda	Persen	1,4	1,79	2,18	2,57	2,96	3,35	3,74	4,13	IKU Dinas Tata Ruang dan Permukiman
46	Rasio Rumah Layak Huni	Persen	92,09	92,33	92,57	92,81	93,05	93,29	93,53	93,77	IKU Dinas Tata Ruang dan Permukiman
47	Presentase Cakupan layanan Air Minum	Persen	70,89	79,12	80	81,5	83	84,5	86	87,5	IKU Dinas Tata Ruang dan Permukiman
48	Persentase RDTR / RTR Kawasan Strategis Yang Ditetapkan	Persen	0	0	18,5	18,5	7,4	11,1	18,5	18,5	IKU Dinas Tata Ruang dan Permukiman
49	Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Tata Ruang dan Permukiman
50	Lama Proses Pengesahan Rencana Tapak/Penerbitan Rekomendasi IMB	Hari	9	5	5	5	4	4	3	3	IKU Dinas Tata Ruang dan Permukiman
51	Persentase Pemenuhan	Persen	0	100	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Tata Ruang

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kebutuhan Tanah Untuk Pembangunan										dan Permukiman
52	Frekuensi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum	Persen		10	9	10	10	10	10	10	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
53	Persentase kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum yang tertangani	Persen		80	80	80	80	80	80	80	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
54	Frekuensi pelaksanaan operasi dan pengendalian/ penertiban trantibmas	Kegiatan		33	34	34	34	40	40	40	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
55	Frekuensi pelaksanaan kerjasama, pengawasan, pencegahan dan penertiban terhadap asset daerah	Kegiatan		7	7	8	8	8	8	8	IKU Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
56	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	Persen		-	48	48	60	60	72	72	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
57	Tingkat pemenuhan kebutuhan diklat/bimtek satpol pp yang diselenggarakan	Persen		70	80	85	90	95	100	100	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
58	Persentase anggota satpol pp yang dibina	Persen		100	80	85	90	95	100	100	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
59	Persentase anggota satlinmas yang dibina	Persen		10	20	20	20	20	20	20	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
60	Banyaknya pembinaan potensi masyarakat	Kegiatan		5	5	10	10	10	10	45	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
61	Tingkat Pemenuhan Dukungan Kesatuan Bangsa	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
62	Tingkat Pemenuhan Dukungan Politik Dalam Negeri	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
63	Tingkat Pemenuhan Dukungan Kewaspadaan Dini di Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
64	Tingkat keamanan, tentram, dan tertib dari bahaya kebakaran dan kebencanaan	Persen	41	56	60	71	82	93	100	100	IKU Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulang an Bencana
65	Indeks ketahanan daerah	Persen	80	100	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulang an Bencana
66	Tingkat Pemenuhan Dukungan Layanan Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS	Persen			100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Sosial, Pemberdayaa n Perempuan, dan Perlindungan Anak
67	Tingkat Pemenuhan Dukungan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persen			100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Sosial, Pemberdayaa n Perempuan, dan Perlindungan Anak
68	Tingkat Pemenuhan Pembinaan Anak Terlantar	Persen			100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Sosial, Pemberdayaa n Perempuan, dan Perlindungan Anak

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
69	Tingkat Dukungan terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial	Persen			100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Sosial, Pemberdayaa n Perempuan, dan Perlindungan Anak
70	Tingkat Pemenuhan dukungan terhadap Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Persen			100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Sosial, Pemberdayaa n Perempuan, dan Perlindungan Anak
71	Tingkat Pemenuhan dukungan terhadap Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan	Persen			100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Sosial, Pemberdayaa n Perempuan, dan Perlindungan Anak
72	Tingkat Pemenuhan dukungan terhadap Peningkatan Peran serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	Persen			100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Sosial, Pemberdayaa n Perempuan, dan Perlindungan Anak
73	Waktu penyelesaian perijinan perijinan lingkungan hidup	Persen			100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Lingkungan Hidup
74	Persentase pengaduan dan sengketa lingkungan hidup yang	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Lingkungan Hidup

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	diselesaikan										
75	Persentase volume sampah yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Lingkungan Hidup
76	Persentase Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Persen	20	23	25	27	30	33	35	35	IKU Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
77	Persentase Pembinaan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
78	TFR	Persen		2,49	2,49	2,37	2,25	2,23	2,10	2,10	IKU Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
79	CPR (Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern /Modern Contraceptive Prevalence Rate)	Persen		79,01	79,01	79,03	79,06	79,07	79,08	79,08	IKU Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
80	Tingkat Kualitas pelayanan Publik yang berbasis Teknologi Informasi (IT)	Persen	59	91	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Perhubungan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
81	Rasio kelengkapan pengatur dan pengamanan lalu lintas	Persen	59	91	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Perhubungan
82	Laju Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Persen	3	3	5	5	5	5	5	5	IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
83	Nilai Realisasi Investasi PMA Dan PMDN	Rp Triliun			55	60	65	70	75	75	IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
84	Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	80,31	82,23	82,30	82,35	82,4	82,45	82,5	82,5	IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
85	Persentase Pemuda Berprestasi (Pemuda pelopor, PPAN, PASKIBRA, KPN)	Persen		0	7,14	7,14	14,29	14,29	21,43	21,43	IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
86	Persentase Cabang Olah raga Berprestasi	Persen		45,45	45,45	45,45	45,45	54,55	54,55	54,55	IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
87	Persentase partisipasi masyarakat berolahraga	Persen		3,69	3,69	3,69	3,69	3,66	3,69	3,69	IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
88	Persentase Sarana dan prasarana Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan yang Dibangun/ Direvitalisasi	Persen		50	50	50	50	50	50	50	IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
89	Jumlah prestasi Seni Budaya tingkat provinsi dan nasional	Prestasi	2	3	4	5	6	7	8	30	IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
90	Persentase Karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	Persen	0	0	20	20	20	40	40	40	IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
91	Persentase Pembangunan/ Revitalisasi Sarana dan prasarana Bidang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	Persen		50	50	50	50	50	50	50	IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
92	Persentase prestasi Seni Budaya	Persen	20	30	40	50	60	70	80	80	IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
93	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara yang berkunjung	Orang	1.866	14.815	14.815	14.815	14.815	15.000	15.000	74445	IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
94	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara yang berkunjung	Orang	1.835.249	2.245.883	2.245.883	2.245.883	2.245.883	2.500.000	2.500.000	11737649	IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
95	Jumlah Destinasi wisata yang menarik dan diminati oleh wisatawan	Buah	45	45	46	46	47	47	48	48	IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
96	Persentase nilai ekonomi masyarakat melalui kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	3,11	3,26	3,41	3,56	3,71	3,86	4,01	4,01	IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
97	Persentase kecukupan Pangan Gizi Asal Ternak dan Ikan:										IKU Dinas Perikanan dan Peternakan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	- Daging (2)	Persen	10	10,2	10,40	10,61	10,82	11,04	11,26	11,26	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan
	- Telur (5)	Persen	6,2	6,5	6,83	7,17	7,52	7,90	8,30	8,30	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan
	- Susu (50)	Persen	0,22	0,25	0,38	0,56	0,84	1,27	1,90	1,90	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan
	- Ikan (2)	Persen	27,9	28,2	28,76	29,34	29,93	30,52	31,14	31,14	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan
98	Persentase kecukupan bahan pangan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan
99	Laju Produksi Perikanan:										
	- Laju produksi perikanan budidaya	Persen			14	14	14	14	14	14	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan
	- Laju produksi perikanan tangkap	Persen			7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan
	- Laju produksi ikan KJA	Persen			0	0	0	0	0	0	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
100	Laju Produksi Ternak	Persen			2	2	2	2	2	2	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan
101	Laju produksi peternakan	Persen			2	2	2	2	2	2	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan
102	Laju Populasi Ternak	Persen			2	2	2	2	2	2	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan
103	Laju Aktivitas usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan	Persen			2	2	2	2	2	2	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan
104	Persentase pelaku usaha pemasaran produk hasil peternakan	Persen			2	2	2	2	2	2	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan
105	Persentase petani pelaku agribisnis yang meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	Persen			100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan
106	Jumlah kecamatan yang dilakukan Pengelolaan kawasan budidaya dan perairan umum	Kecamatan	17	17	17	17	17	17	17	17	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan
107	Laju Produksi Ikan KJA	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
108	Jumlah kecamatan yang disediakan PAH / HPAH (Produk Asal Hewan/Hasil Pangan Asal Hewan) yang ASUH	Kecamatan	17	17	17	17	17	17	17	17	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan
109	Jumlah Status kesehatan hewan bebas penyakit hewan menular	Kasus	0	0	0	0	0	0	0	0	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan
110	Persentase kecukupan bahan pangan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Pangan dan Pertanian
111	Laju produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Persen	-24,9	26,27	27,27	28,27	29,27	30,27	31,27	31,27	IKU Dinas Pangan dan Pertanian
112	Persentase peningkatan peran koperasi	Persen			100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
113	Persentase koperasi yang sehat dan aktif	Persen			100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
114	Persentase usaha mikro, kecil dan menengah yang tangguh	Persen			100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
115	Persentase perdagangan yang mampu menguasai pangsa pasar pada skala lokal, regional, nasional dan global serta menciptakan tertib niaga	Persen			100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
116	Persentase struktur perdagangan, iklim usaha perdagangan yang kondusif dan optimalnya kinerja UPTD pasar serta terciptanya tertib niaga	Persen			100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
117	Persentase usaha industri guna menghasilkan produk yang memiliki keunggulan kompetitif terutama bagi industri kecil dan menengah serta memperkuat struktur industri	Persen			100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
118	Persentase industri kecil dan menengah yang memenuhi standar dan optimalnya kinerja UPTD pengembangan sentra kramik dan grabah	Persen			100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
119	Persentase Tenaga Kerja yang Terampil dan Produktif	Persen	41,27	46,66	60,65	75	85,55	95	100	100	IKU Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
120	Persentase Tenaga Kerja yang dapat memenuhi Pasar Kerja	Persen	34,92	47,15	65	75	85	95	100	100	IKU Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
121	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja	Persen	42,56	40,38	60	70	80	90	100	100	IKU Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
123	Tingkat Kelancaran berusaha/Investasi, Pemenuhan Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja dan Perusahaan	Persen		42,86	60	70	80	90	100	100	IKU Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
124	Persentase Perselisihan dan PHK, Perlindungan Tenaga Kerja, Pembinaan Perusahaan dan Serikat Pekerja Yang Dapat Ditangani	Persen		42,86	50	65	80	95	100	100	IKU Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
125	Persentase Penyebaran Penduduk melalui pengiriman Transmigran	Persen	0	60	70	80	90	95	100	100	IKU Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
126	Persentase Pengiriman Transmigran	Persen	0	100	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
127	Persentase fasilitasi kegiatan rapat-rapat DPRD	Persen	66	60	100	100	100	100	100	100	IKU Sekretariat DPRD
128	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Persen	90	91	91	92	92	93	93	93	IKU Kecamatan Jatiluhur
129	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Persen	66.63	76.18	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Jatiluhur
130	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Persen	90	91	91	92	92	93	93	93	IKU Kecamatan Sukasari
131	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Persen	66.63	76.18	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Sukasari
132	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Persen	90	91	91	92	92	93	93	93	IKU Kecamatan Maniis

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	di Kecamatan										
133	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Persen	66.63	76.18	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Maniis
134	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Persen	90	91	91	92	92	93	93	93	IKU Kecamatan Tegalwaru
135	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Persen	66.63	76.18	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Tegalwaru
136	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Persen	90	91	91	92	92	93	93	93	IKU Kecamatan Plered
137	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Persen	66.63	76.18	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Plered
138	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Persen	90	91	91	92	92	93	93	93	IKU Kecamatan Sukatani
139	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Persen	66.63	76.18	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Sukatani

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
140	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Persen	90	91	91	92	92	93	93	93	IKU Kecamatan Darangdan
141	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Persen	66.63	76.18	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Darangdan
142	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Persen	90	91	91	92	92	93	93	93	IKU Kecamatan Bojong
143	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Persen	66.63	76.18	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Bojong
144	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Persen	90	91	91	92	92	93	93	93	IKU Kecamatan Wanayasa
145	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Persen	66.63	76.18	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Wanayasa
146	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Persen	90	91	91	92	92	93	93	93	IKU Kecamatan Kiarapedes
147	Tingkat Pemenuhan Dukungan	Persen	66.63	76.18	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Manajemen Perkantoran										Kiarapedes
148	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Persen	90	91	91	92	92	93	93	93	IKU Kecamatan Pasawahan
149	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Persen	66.63	76.18	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Pasawahan
150	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Persen	90	91	91	92	92	93	93	93	IKU Kecamatan Pondoksalam
151	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Persen	66.63	76.18	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Pondoksalam
152	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Persen	90	91	91	92	92	93	93	93	IKU Kecamatan Purwakarta
153	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Persen	66.63	76.18	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Purwakarta
154	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Persen	90	91	91	92	92	93	93	93	IKU Kecamatan Babakancika o

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
155	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Persen	66.63	76.18	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Babakancika o
156	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Persen	90	91	91	92	92	93	93	93	IKU Kecamatan Campaka
157	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Persen	66.63	76.18	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Campaka
158	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Persen	90	91	91	92	92	93	93	93	IKU Kecamatan Cibatu
159	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Persen	66.63	76.18	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Cibatu
160	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Persen	90	91	91	92	92	93	93	93	IKU Kecamatan Bungursari
161	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Persen	66.63	76.18	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Bungursari
162	Sistem Merit	Persen	0	0	0	100	100	100	100	100	IKU Badan Kepegawaian dan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Pengembangan Sumber Daya Manusia
163	Jumlah sistem pelayanan di bidang kepegawaian yang dapat diaplikasikan dengan baik	Persen	1	2	2	2	3	3	3	3	IKU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
164	Persentase pemberian penghargaan ASN berprestasi/ Berinovasi/ dan ASN Purna Bhakti / Pensiun	Persen	3.79	3.99	3.25	3.39	3.47	5.42	5.08	5.08	IKU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
165	Persentase Sistem Manajemen Kepegawaian Berbasis teknologi informasi yang sudah di aplikasikan dengan baik	Persen	1	2	2	3	3	4	4	4	IKU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
166	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kearsipan dan Perpustakaan	Poin	0	0	70	75	80	80	85	85	IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
167	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Persen	70	72	72	76	77	81	83	83	IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Daerah
168	Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP dan KK)	Persen	75	75	80	100	100	100	100	100	IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
169	Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran serta Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Kependudukan	Persen	50	50	80	100	100	100	100	100	IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
170	Tingkat Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian)	Persen	80	80	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
171	Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran serta Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Pencatatan Sipil	Persen	20	25	50	75	100	100	100		IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
172	Umur Harapan Hidup	Umur	70.43	70.55	70.71	70.85	70.98	71.11	71.24	71.24	IKU Dinas Kesehatan
173	Persentase kematian ibu	Persen	0.11	0.17	0.15	0.13	0.12	0.11	0.09	0.09	IKU Dinas Kesehatan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
174	Persentase kematian bayi	Persen	0.53	0.29	0.5	0.49	0.46	0.44	0.41	0.41	IKU Dinas Kesehatan
175	Persentase Perangkat Daerah yang strukturnya sesuai dengan fungsi organisasinya	Persen			60	70	80	90	100	100	IKU Sekretariat Daerah
176	Persentase dokumen ketatalaksanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan organisasi	Persen			70	80	90	100	100	100	IKU Sekretariat Daerah
177	Persentase Perangkat Daerah yang sudah melaksanakan Reformasi Birokrasi	Persen			25	50	75	100	100	100	IKU Sekretariat Daerah
178	Capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persen			100	100	100	100	100	100	IKU Sekretariat Daerah
179	Persentase produk hukum yang berkeadilan, efektif dan tepat sasaran	Persen			100	100	100	100	100	100	IKU Sekretariat Daerah
180	Persentase peningkatan capaian kinerja pembangunan	Persen			25	50	50	75	100	100	IKU Sekretariat Daerah
181	Optimalisasi pengelolaan sistem pengadaan barang/jasa	Persen			100	100	100	100	100	100	IKU Sekretariat Daerah
182	Persentase pegawai yang memiliki	Persen			85	90	100	100	100	100	IKU Sekretariat

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	kesesuaian kompetensi										Daerah
183	Persentase penyusunan anggaran yang tepat waktu dan sesuai Peraturan PerUndang-Undangan	Persen			100	100	100	100	100	100	IKU Sekretariat Daerah
184	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Persen			100	100	100	100	100	100	IKU Sekretariat Daerah
185	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Persen			60	70	80	85	90	90	IKU Sekretariat Daerah
186	Tingkat Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Purwakarta	Persen	40	60	80	85	90	95	100	100	IKU Inspektorat
187	Persentase nilai SAKIP katagori Baik (B) pada Perangkat Daerah	Persen	80	100	100	100	100	100	100	100	IKU Inspektorat
188	Tingkat Kapabilitas APIP/ <i>Internal Audit Capability Model</i> (IACM)	Persen	80	90	100	100	100	100	100	100	IKU Inspektorat

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
189	Persentase Kualitas Perencanaan Pembangunan	Persen	80	80	80	80	81	82	83	83	IKU Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
190	Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan	Persen	80	80	80	80	81	82	83	83	IKU Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
191	Persentase Implementasi Kajian Pembangunan Daerah	Persen	50	50	50	60	65	70	75	75	IKU Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
192	Opini Laporan keuangan Pemerintah Daerah	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah
193	Jumlah sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Sistem	3	3	4	4	4	4	4	4	IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah
194	Persentase capaian PAD	Persen		95.1	100	100	100	100	100	100	IKU Badan Pendapatan Daerah

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
195	Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah	Persen			5	5,5	6	6,5	7	7	IKU Badan Pendapatan Daerah
196	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin			76	77	78	79	80	80	IKU Badan Pendapatan Daerah
B ASPEK DAYA SAING DAERAH											
1	Persentase Seni dan Budaya Yang Dibina dan Dilestarikan	Persen	70	75	80	85	90	95	100	100	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	70	75	80	85	90	95	100	100	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
3	Persentase Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional	Persen	15	20	25	30	35	40	55	55	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	0	0	45	50	55	55	60	60	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
5	Nilai SAKIP Kab. Purwakarta	Predikat	CC	B	B	B	BB	BB	A	A	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
6	Nilai LPPD Kab. Purwakarta	Poin	31,3	35	35	35	35	35	35	35	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Poin	73	75	75	76	77	78	79	79	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
8	Persentase aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikembangkan	Persen	88	98	100	100	100	100	100	100	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
9	Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Predikat	0	0	2	4	6	8	10	10	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
10	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	Tinggi (81-90)	Tinggi (81-90)	Tinggi (81-90)	Tinggi (81-90)	Tinggi (81-90)	Tinggi (81-90)	Tinggi (81-90)	Tinggi (81-90)	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
11	Status Indeks Desa Membangun	Status	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
C. ASPEK PELAYANAN UMUM											
I	Pendidikan										
1	Persentase Lembaga PAUD yang terakreditasi	Persen	10,40	24,56	35,62	46,68	57,74	68,81	79,87	79,87	Dinas Pendidikan
2	Persentase Sekolah Dasar yang terakreditasi	Persen	0,00	57,35	67,16	76,96	86,76	96,57	96,57	96,57	Dinas Pendidikan
3	Persentase Sekolah Menengah Pertama yang terakreditasi	Persen	0,00	57,41	63,89	70,37	76,85	83,33	89,81	89,81	Dinas Pendidikan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Pesentase Lembaga Dikmas yang terakreditasi	Persen		8,14	16,28	24,42	32,56	40,70	48,84	48,84	Dinas Pendidikan
5	Persentase Guru yang berkualifikasi S1 (%)	Persen	93,78	95,32	95,99	96,66	97,34	98,02	98,70	98,70	Dinas Pendidikan
6	Persentase Guru yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan	Persen			1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	Dinas Pendidikan
7	Angka Partisipasi Murni Pendidikan Anak Usia Dini (%)	Persen	50,07	61,25	61,84	62,46	63,09	63,72	64,35	64,35	Dinas Pendidikan
8	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A (%)	Persen	99,51	99,52	99,53	99,55	99,57	99,59	99,61	99,61	Dinas Pendidikan
9	Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/Paket B (%)	Persen	99,72	99,72	99,74	99,76	99,78	99,80	99,82	99,82	Dinas Pendidikan
10	Persentase Kondisi Ruang Kelas SD dalam keadaan baik	Persen	18,91	17,25	18,46	19,75	21,13	22,61	24,19	24,19	Dinas Pendidikan
11	Persentase Kondisi Ruang Kelas SMP dalam keadaan baik	Persen	31,47	32,00	34,24	36,64	39,20	41,95	44,88	44,88	Dinas Pendidikan
12	Persentase realisasi program Manajemen pelayanan pendidikan (%)	Persen	57,35	97,01	100	100	100	100	100	100,00	Dinas Pendidikan
II	Kesehatan										
1	Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat	Persen	85,00	88,33	90,00	90,00	90,00	95,00	95,00	95,00	Dinas Kesehatan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dan Vaksin Esensial										
2	Persentase pencapaian target SPM sesuai wilayah kerja	Persen	58,33	58,33	66,67	66,67	75,00	75,00	83,33	83,33	Dinas Kesehatan
3	Cakupan sarana farmasi yang dibina	Persen	77,92	80,52	85,71		92,00	95,00	100	100	Dinas Kesehatan
4	Cakupan Strata Posyandu Purnama Dan Mandiri	Persen	60,94	61,63	62,02	62,71	63,30	63,89	65,16	65,16	Dinas Kesehatan
5	Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS	Persen	64,87	65,25	65,68	65,84	65,87	66,00	66,09	66,09	Dinas Kesehatan
6	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	68,72	70,13	71,54	74,35	78,57	83,03	85,99	85,99	Dinas Kesehatan
7	Cakupan pelayanan bayi	Persen	98,35	98,43	98,80	98,80	98,80	98,80	98,80	98,80	Dinas Kesehatan
8	Cakupan Sarana Sanitasi dasar (air Bersih, Rumah Sehat, Jamban Keluarga dan SPAL)	Persen	75,73	75,79	75,83	75,94	75,95	75,96	75,97	75,97	Dinas Kesehatan
9	Cakupan TTU dan TPM Yang Memenuhi Syarat	Persen	54,43	55,61	57,09	58,28	59,14	61,24	61,83	61,83	Dinas Kesehatan
10	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC; dan Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	Persen	80	80	80					80	Dinas Kesehatan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	Persentase bayi dengan imunisasi dasar lengkap	Persen	84,18	84,64	84,77	85,02	85,30	85,41	85,90	85,90	Dinas Kesehatan
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan penyakit menular (TB paru, HIV)	Persen	81,99	82,48	83,12	83,92	84,41	85,05	86,01	86,01	Dinas Kesehatan
13	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persen	1,19	1,07	1,22	1,26	1,31	1,34	1,40	1,40	Dinas Kesehatan
14	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
15	Persentase kepesertaan Penduduk Miskin yang memiliki Jaminan Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
16	Persentase sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya dengan kondisi baik	Persen	38,46	46,15	46,15	53,85	63,08	69,23	75,38	75,38	Dinas Kesehatan
17	Persentase fasilitas kesehatan yang dibina	Persen	20,00	24,00	31,20	43,20	53,60	63,20	69,60	69,60	Dinas Kesehatan
18	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	Persen	98,68	99,06	99,06	99,09	99,14	99,19	99,25	99,25	Dinas Kesehatan
19	Cakupan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas Dengan Komplikasi Yang Ditangani	Persen	94,95	70,13	70,14	72,69	75,23	77,77	82,86	82,86	Dinas Kesehatan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
20	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Bidan Atau Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	Persen	98,68	98,66	98,88	99,04	99,14	99,57	99,62	99,62	Dinas Kesehatan
21	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Individu, Keluarga dan Masyarakat Dalam Menumbuhkan Perilaku Hidup Sehat dan Mengembangkan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat	Persen	80	80	80					80	Dinas Kesehatan
22	Persentase puskesmas yang terakreditasi minimal madya	Persen	75,00	80,00	90,00	90,00	95,00	100,00	100	100	Dinas Kesehatan
23	Persentase kunjungan pemeriksaan Labkesda	Persen	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100	100	Dinas Kesehatan
24	Persentase parameter pemeriksaan Labkesda	Persen	76,70	80,58	84,47	88,35	92,23	96,12	100	100	Dinas Kesehatan
25	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki SIP yang	Persen	78,90	80,17	83,54	85,23	89,03	93,25	100	100	Dinas Kesehatan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	masih berlaku										
26	Persentase Pencapaian Target SPM Pelayanan Medis	Persen	60	60	60	70	75	80	85	85	RSUD Bayu Asih
27	Tingkat Mutu Keperawatan	Persen	60	60	60	70	75	80	85	85	RSUD Bayu Asih
28	Cakupan pelayanan penunjang	Persen	60	60	60	70	75	80	85	85	RSUD Bayu Asih
III	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
2	Panjang Ruas Jalan Baru	Km	0,50	0,50	0,50					0,50	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
3	Jumlah Jembatan Baru	Titik	1,00	1,00	1,00					1,00	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
4	Persentase Jalan dan Jembatan yang dibangun	Persen	13	15,89	15,79	15,69	15,48	15,30	15,16	15,16	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
5	Persentase Jalan yang ditingkatkan	Persen	13	15,89	13,30	11,66	10,15	8,78	7,54	51,43	Dinas Pekerjaan Umum,

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Binamarga dan Pengairan
6	Persentase Jembatan yang ditingkatkan	Persen	46,35	46,35	0	1,43	1,43	1,43	1,43	5,72	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
7	Persentase Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang berfungsi	Persen				25	25	25	25	100	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
8	Persentase Turap/Talud/Bronjong yang berfungsi	Persen				6,25 (4/64 DI)	6,25 (4/64 DI)	6,25 (4/64 DI)	6,25 (4/64 DI)	6,25 (4/64 DI)	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
9	Persentase jalan kondisi mantap (rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan)	Persen	83,66 (609,830 Km)	84,10 (613,052 Km)	85,40 (10,56) (76,98 Km)	85,52 (10,58) (77,12 Km)	85,66 (11,63) (84,76 Km)	85,52 (11,75) (85,65 Km)	86,82 (11,99) (87,39 Km)	86,82 (11,99) (87,39 Km)	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
10	Tingkat Pemenuhan Inspeksi Kondisi jalan dan Jembatan	Persen			27,3	18,20	18,20	18,20	18,20	18,20	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	Persentase Penanggulangan Tanggap darurat Jalan dan Jembatan	Persen	95	95		95	95	95	95	95	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
12	Tingkat Pemenuhan Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Persen				25	25	25	25	100	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
13	Persentase Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang berfungsi	Persen	27,77	27,77	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	27,75	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
14	Persentase Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Secara Partisipatif yang berfungsi	Persen	24,1	30,06		32,56 (18,75) (12/64 DI)	35,06 (18,75) (12/64 DI)	37,56 (18,75) (12/64 DI)	40,06 (18,75) (12/64 DI)	40,06 (18,75) (12/64 DI)	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
15	Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan	Km	0.40	0.40	0.40					0.40	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
16	Jumlah Jembatan Yang Ditingkatkan	Unit	1	1	1					1	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Pengairan
17	Tingkat Pemenuhan Penelitian dan Perencanaan Jalan dan Jembatan	Persen			20	20	20	20	20	100	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
18	Persentase Penelitian dan Perancangan Pengembangan Jaringan Irigasi yang dimanfaatkan	Persen			20	20	20	20	20	100	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
19	Persentase Pemeliharaan saluran drainase/Gorong - gorong	Persen				25	25	25	25	100	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
20	Persentase Jaringan Irigasi yang dibangun	Persen				3,1	3,1	3,1	3,1	12,4	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
21	Persentase Sistem Informasi/Data Base Irigasi yang dikembangkan	Persen				25	25	25	25	100	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
22	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Kebinamargaan dan Pengairan yang dilaksanakan dengan baik	Persen				32,56	35,06	37,56	40,06	40,06	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
23	Persentase Bahan dan Alat Laboratorium teknik yang berfungsi dengan baik	Persen				25	25	25	25	100	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
24	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100	100	100					100	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
25	Unit Pengolah Air Baku Yang Terbangun (Unit)	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
26	Persentase RDTR/RTR KSK Yang Ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (%)	Persen	0	0	18,5	18,50	7,40	11,10	18,50	18,50	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
27	Sistem Informasi Pemanfaatan Ruang Daerah	Jumlah Perangkat Lunak	0	0	1	1	1	1	1	1	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
28	Laporan Status Pemanfaatan Ruang Yang Diselesaikan (Laporan)	Laporan	0	0	1	1	1	1	1	1	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
29	Persentase Penyelesaian Pengaduan dan	Persen	0	0	80	80	80	80	80	80	Dinas Tata Ruang dan Permukiman

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sengketa Tata Ruang (%)										
30	Persentase Perusahaan Pemegang izin Pemanfaatan Ruang yang dibina/ ditinjau	Persen	0	0	100	100	100	100	100	100	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
31	Jumlah Permohonan Rencana Tapak Yang Dikaji	Dokumen	60	77	60	60	60	60	60	60	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
32	Jumlah Sarana Prasarana Air Bersih Komunal Yang Dibangun	Unit	6	13	5	4	4	4	4	4	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
33	Panjang Saluran Air Bersih Perpipaan Yang Dibangun (Km)	Km	11,09	7,8	2	2	2	2	2	2	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
34	Jumlah panjang saluran Drainase/ Gorong-gorong Lingkungan yang Dibangun / Diperbaiki	Meter	123	136	150	150	150	150	150	150	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
IV	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman										
1	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Diperbaiki	Unit	987	1345	1840	2.000	2.000	2.000	2.000	2000	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
2	Jumlah Pendirian Kawasan Rusunawa Yang Difasilitasi	Jumlah Menara	1	1	2	1	1	1	1	1	Dinas Tata Ruang dan Permukiman

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Jumlah Sarana dan Prasarana Sanitasi Yang Dibangun / Diperbaiki (Unit)	Unit	0	3	1	2	2	2	2	2	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
4	Kelompok Masyarakat Yang Dibentuk dan Dibina	BKM	192	192	48	100	100	100	100	100	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
5	Luas Areal TPU Yang Dikelola Pemda	Ha	1,8	2,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,20	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
6	Rasio Bangunan Ber-IMB Per satuan bangunan	Persen	19,6	20	20,4	20,80	21,20	21,60	22,00	22,00	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
7	Frekuensi Inspeksi Keselamatan Gedung dan Bangunan (Hari)	Hari	5	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
8	Jumlah Panjang jalan Lingkungan Dibangun/Diperbaiki	Km	47,81	55,61	11,39	4,00	4,00	4,00	4,00	83,00 -	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
9	Jumlah PJU Dalam Kondisi Baik	Unit	2041	3241	2975	3110	3190	3241	3241	3241	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
10	Persentase Ornamen Kota yang dipelihara	Persen	100	100	100					100	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
11	Jumlah RTH yang dibangun/ dipelihara (Lokasi)	Lokasi	50	68	68	68	68	68	68	68	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
12	Jumlah Ruang Publik Yang Direvitalisasi /	Unit	16	10	15	15	15	15	15	15	Dinas Tata Ruang dan Permukiman

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Dibangun.										
13	Persentase Ornamen Kota dan Reklame yang dikelola dan diupelihara	Persen	100	100		100	100	100	100	100	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
14	Jumlah Lampu Hias Dalam Kondisi Baik	Unit	2050	1822	1795						Dinas Tata Ruang dan Permukiman
15	Jumlah Lampu Hias dan Penerangan Jalan Umum Pada Ruang Publik dan Jalur Perlintasan Strategis	Unit				1810	1815	1822	1822	1822	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
V	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat										
1	Frekuensi Penertiban Trantibmas; Frekuensi Pengendalian Trantibmas dan Frekuensi Penertiban Trantibmas	Kali	10 Kali; 45 Kali dan 65 Kali	10 Kali; 45 Kali dan 65 Kali	10 Kali; 45 Kali dan 65 Kali					10 Kali; 45 Kali dan 65 Kali	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Jenis Pelatihan Penanganan Kantribmas dan Jenis Sarana Prasarana Penanganan Kantribmas	Jenis	4 Jenis dan 1 Jenis	4 Jenis dan 2 Jenis	4 Jenis dan 2 Jenis					4 Jenis dan 2 Jenis	Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Persentase pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum	Persen	100	100		100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
4	Persentase kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum yang tertangani	Persen	80	100		100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
5	Frekuensi pelaksanaan operasi dan pengendalian/penerbitan trantibmas	Kegiatan	33	34		34	34	40	40	40	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Frekuensi pelaksanaan kerjasama, pengawasan, pencegahan dan penertiban terhadap asset daerah	Kegiatan	7	7		8	8	8	8	8	Satuan Polisi Pamong Praja
7	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	Persen	0	48		48	60	60	72	72	Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Tingkat pemenuhan kebutuhan diklat/bimtek satpol pp yang diselenggarakan	Persen	70	80		85	90	95	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
9	Persentase anggota satpol pp yang dibina	Persen	100	80		85	90	95	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
10	Persentase anggota satlinmas yang dibina	Persen	10	20		20	20	20	20	20	Satuan Polisi Pamong Praja
11	Jumlah pembinaan potensi masyarakat	Kegiatan	5	5		10	10	10	10	10	Satuan Polisi Pamong Praja
12	Pembinaan Forum Penanganan Keamanan Daerah	Jumlah Forum/Tim	4	4	4					4	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
13	Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi LSM dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Guru dan Pelajar:										Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
14	- Jumlah LSM		26	27	27					27	
15	- Jumlah Kegiatan		5	5	5					5	
16	Forum Masyarakat Untuk Ketertiban dan Keamanan (FKUB, FPK, dan FKDM) Yang Dibina	Jumlah forum	3	3	3					3	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	Persentase Jumlah Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkadaes	Persen	75	76	76					76	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
18	Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
19	Persentase tingkat harmonisasi kerukunan antar umat beragama	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
20	Persentase jumlah penurunan konflik sosial di purwakarta	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
21	Persentase jumlah partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan politik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
22	Persentase Gedung/Bangunan yang memiliki proteksi kebakaran	Persen				100				100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
23	Persentase sosialisasi dan pelatihan / simulasi yang akan dilaksanakan	Persen				100				100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
24	Persentase warga negara yang terlatih di kawasan rawan kebakaran	Persen				100				100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
25	Persentase pemenuhan kebutuhan Kompetensi SDM Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	Persen	100	100	100	100				100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
26	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan prasarana teknis pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana	Persen	100	100	100	100				100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
27	Persentase Perawatan dan pemeliharaan asset sarana dan prasarana	Persen	100	100	100	100				100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
28	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Persen				100	100	100	100	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
29	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana teknis penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan	Persen				100	100	100	100	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulang an Bencana
30	Persentase peralatan dan perlengkapan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dalam kondisi baik	Persen				100	100	100	100	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulang an Bencana
31	Persentase ketersediaan data kejadian kebakaran	Persen				100	100	100	100	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulang an Bencana
32	Persentase tingkat pemenuhan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi	Persen				100	100	100	100	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulang an Bencana
33	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen				100	100	100	100	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulang an Bencana

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
34	Persentase data / informasi tentang informasi dan resiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah / legal	Persen				100	100	100	100	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
35	Persentase warga negara yang terlatih di kawasan rawan bencana	Persen				9	22	35	48	48	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
36	Persentase tersedianya layanan Pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen				100	100	100	100	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
37	Persentase peralatan perlindungan terhadap bencana dalam kondisi baik	Persen				100	100	100	100	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
38	Persentase intansi terkait dalam penanggulangan Bencana	Persen				100	100	100	100	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
39	Persentase jumlah SDM yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Persen				100	100	100	100	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
40	persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan di evakuasi terhadap kejadian bencana	Persen				100	100	100	100	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
41	Persentase kecepatan response time kurang dari 24 jam untuk status darurat bencana	Persen				100	100	100	100	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
42	Persentase dokumen penilaian kerusakan akibat bencana	Persen				100	100	100	100	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
43	Persentase bangunan yang di rehabilitasi pasca bencana	Persen				100	100	100	100	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
44	Tingkat Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen			100					100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											an Bencana
VI	Sosial										
1	Persentase Fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya yang diberdayakan	Persen			85	90	90	90	100	100	Dinas Sosial, Pemberdayaa n Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	Persentase Capaian Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persen			90	90	85	90	90	90	Dinas Sosial, Pemberdayaa n Perempuan, dan Perlindungan Anak
3	Jumlah Anak terlantar yang dibina	Orang			20	20	20	20	20	20	Dinas Sosial, Pemberdayaa n Perempuan, dan Perlindungan Anak
4	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	Lembaga			30	30	30	30	30	30	Dinas Sosial, Pemberdayaa n Perempuan, dan Perlindungan Anak
VII	Tenaga Kerja										
1	Persentase Pelatihan Berbasis	Persen	41,27	46,66	60,65	75,00	85,55	95	100	100	Dinas Ketenagakerj

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kompetensi										aan dan Transmigrasi
2	Persentase Pelatihan Berbasis Masyarakat	Persen	34,92	47,15	50	60	70	80	90	90	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
3	Persentase Calon Tenaga Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	Persen	42,56	40,38	50	60	70	80	90	90	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
4	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persen	100,00	42,86	50	65	80	95	100	100	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
5	Persentase Pelatihan Kewirausahaan	Persen	23,81	52,85	60	70	75	85	95	95	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
VIII	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindung Anak										
1	Tingkat Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persen			90	90	90	90	90	90	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persen			85	85	90	90	100	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Anak
3	Persentase Peran serta Gender dalam Pembangunan	Persen			85	85	85	85	90	90	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
IX	Pangan										
1	Jumlah Lumbung Pangan Yang Terbangun	Unit	12	12	12						Dinas Pangan dan Pertanian
2	Terpenuhinya Kebutuhan Beras	Ton	100496	103008	103008					103008	Dinas Pangan dan Pertanian
3	Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Umbi-Umbian	Ton	36544	37457	37457					37457	Dinas Pangan dan Pertanian
4	Terpenuhinya Kebutuhan Sayuran dan Buah	Ton	91360	93644	93644					93644	Dinas Pangan dan Pertanian
5	Persentase ketersediaan beras terhadap kebutuhan beras daerah	Persen	150,86	152,00		151,64	151,47	151,29	151,11	151,11	Dinas Pangan dan Pertanian
6	Persentase ketersediaan Bahan Makanan	Persen	100	100		102	103	104	105	105	Dinas Pangan dan Pertanian
7	Persentase pengisian gudang cadangan pangan	Persen	53,48	53,48		100	100	100	100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
X	Pertanahan										

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Persentase konflik pertanahan milik pemerintah daerah yang diselesaikan	Persen			100	100	100	100	100	100	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
2	Jumlah Lahan Untuk Pembangunan Fasilitas Publik	Lokasi		3	3	3	3	3	3	3	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
3	Persentase Lahan Tanah aset daerah yang disertifikatkan	Persen			100	100	100	100	100	100	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
4	Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan Fasilitas Publik	Lokasi	1	1	1					1	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
XI	Lingkungan Hidup										
1	Jumlah kendaraan operasional pengangkutan sampah	Unit	12	57 Unit kendaraan operasional pengangkutan sampah	63	69	76	84	92	92	Dinas Lingkungan Hidup
2	Jumlah Target pembinaan	perusahaan	30	30	30	30	30	30	30	30	Dinas Lingkungan Hidup
3	Jumlah Dokumen Amdal	dokumen	16	16	16	16	16	16	16	16	Dinas Lingkungan Hidup
4	Persentase Sumber Daya Alam (Mata Air) yang terjaga dan terlindungi	Persen		25	25	25	75	75	100	100	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Jumlah perusahaan yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan lingkungan hidup (PROPERDA)	perusahaan	24	24	24	24	24	24	24	24	Dinas Lingkungan Hidup
6	Jumlah titik lokasi pengelolaan DAS Citarum	Lokasi	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup
7	Jumlah titik pantau kualitas air	Titik	67	20	20	20	20	20	20	20	Dinas Lingkungan Hidup
8	Jumlah titik pantau kualitas udara	Titik	10	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup
9	Jumlah sosialisasi penegakan hukum lingkungan ke Perusahaan yang ada di Purwakarta			6	6	6	6	8	8	8	Dinas Lingkungan Hidup
10	Penerimaan pengaduan	Kasus	4		4	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
11	Aplikasi SIPP	Buah		0	1	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup
12	Adipura	Titik pantau (Kecamatan)	3		3	5	6	8	8	8	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13	Jumlah sosialisasi pembinaan sekolah berbudaya lingkungan dan Sekolah Adiwiyata	lokasi (sekolah)	11		3						Dinas Lingkungan Hidup
14	Jumlah Parameter Kualitas Lingkungan Yang Terakreditasi	jenis	5 jenis	0	4	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup
15	Tingkat Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim	Persen			25	25	25	75	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
16	Jumlah Peserta Kegiatan PROPERDA	Perusahaan	24	24	24	24	24	24	24	24	Dinas Lingkungan Hidup
XII	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
1	Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan:										Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	- Tingkat Kepemilikan KTP Elektronik	Persen	75	80	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	- Tingkat Kepemilikan Kartu Keluarga	Persen	75	80	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Tingkat Kesadaran Masyarakat	Persen	20	25	50	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Tingkat Akurasi data Kependudukan	Persen	80	80	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Persentase Pengelolaan informasi kependudukan	Persen		75	85	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Persentase Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	Persen		50	75	85	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Persentase Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Adminduk yang di selenggarakan	Persen		25	50	85	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Persentase Pemanfaatan data oleh Instansi/Lembaga Pengguna	Persen		15	50	85	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Persentase Inovasi Pelayanan Adminduk	Persen		25	50	85	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Pencatatan Sipil
XIII	Pemberdayaan Masyarakat Desa										
1	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Yang Dibina	Buah	192	192	192					192	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
2	Jumlah Desa Maju Berdasarkan IDM	Desa	11	11	13	15	17	19	21	21	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
3	Jumlah Desa Berkembang Berdasarkan IDM	Desa	118	118	126	134	142	150	158	158	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
4	Jumlah Desa Tertinggal Berdasarkan IDM	Desa	54	54	44	34	24	14	4	4	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
5	Persentase Masyarakat dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa (Pamsimas)	Persen		20	20	40	60	80	100	100	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
6	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan di tiap desa	Kegiatan	20	20	20	45	70	95	100	100	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
7	Persentase lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang dibina (LPM)	Persen		20	20	40	60	80	100	100	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Jumlah Posyandu yang dibina	Unit	1018	1018	203	406	609	812	1018	1018	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
9	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa	Persen	6	7	7					7	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
10	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa:										Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
11	Jumlah Bumdes yang dibina	Bumdes	172	172	175	177	179	181	183	183	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
12	Jumlah Potensi/Inovasi Desa yang dikembangkan	Jenis	50	50	230	410	590	770	900	900	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
13	Persentase Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Persen	100	100	100					100	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
14	Jumlah Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Keuangan Desa	Orang	183	183	183	183	183	183	183	183	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
15	Jumlah pembinaan penyelenggaraan tata pemerintahan bagi Kades,	Orang			300	600	900	1057	1057	1057	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perangkat Desa dan Banmusdes										
16	Persentase Kawasan Pedesaan yang dibina	Persen	28	28	42	57	71	85	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
XIV	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
1	Ratio Akseptor KB	Persen		100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Persentase jumlah pasangan usia subur (PUS)	Persen		79,45	81,04	82,66	84,31	86,00	86,00	86,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Persentase KB Mandiri (Cakupan PUS menjadi peserta KB aktif)	Persen		45	45,01	45,02	45,03	45,04	45,05	45,05	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)	Orang			7095	7090	7085	7080	7075	7075	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Persentase jumlah peserta KB yang dilayani	Persen		30	31	32	33	34	35	35	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6	Peserta KB aktif yang drop out selama satu tahun	Persen		10	9,99	9,98	9,97	9,96	9,95	9,95	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Persentase PUS muda usia rendah Cakupan PUS dibawah usia 20 th	Persen		2	1,99	1,98	1,97	1,96	1,95	1,95	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Persen		35	40	45	50	55	60	60	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Poin		35	33	30	27	24	20	20	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun		35	40	45	50	55	60	60	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	Persen		35	33	30	27	24	20	20	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Berencana
12	Persentase peserta KB aktif pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen		35	35	35	35	35	35	35	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahun	Persen		100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14	Efektifitas dan efesiensi penggunaan alat kontrasepsi (Alekon)	Persen		100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15	Persentase jumlah PPKBD dan Sub. PPKBD (1500)	Persen		100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16	Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Desa/kelurahan	Rasio		1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	Ratio Pembantu Pembina Kel Berencana (PPKBD)	Rasio		1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18	Persentase Data Kependudukan Kelurga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Persen		100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
19	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan setiap tahun	Persen		100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
20	Jumlah Remaja Yang Dibina	Orang	125	150	150					150	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
21	Jumlah Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Kader	384	576	576					576	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
22	Cakupan Kampung KB	Persen		30	45	60	75	90	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
23	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	Persen		37,5	37,5	40	50	60	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
24	Persentase penanggulangan narkoba, PMS, HIV/AIDS	Persen		60	60	70	80	85	90	90	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
25	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Orang		536	563	591	620	652	684	684	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
26	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Orang		541	568	596	626	658	690	690	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
27	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Orang		536	563	591	620	652	684	684	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
28	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB	PUS		536	563	591	620	652	684	684	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
29	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Kegiatan		536	563	591	620	652	684	684	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
30	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Keluarga		536	563	591	620	652	684	684	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
31	Cakupan kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Persen		60	65	70	75	80	85	85	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
32	Persentase stakeholder/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkat wilayah yang mendapat pembinaan advokasi dan KIE	Persen		65	70	75	80	85	90	90	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
XV	Perhubungan										
1	Jumlah Trayek Angkutan Umum	Trayek	39	50	50					50	Dinas Perhubungan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Jumlah Armada Angkutan Umum	Unit	1363	1378	1378					1378	Dinas Perhubungan
3	Rasio Terminal Penumpang Angkutan Umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perhubungan
4	Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, dan Guardrail) Pada Jalan Kabupaten	Jumlah	415	415		100	100	100	100	100	Dinas Perhubungan
5	Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ Yang Direhabilitasi dan Terpelihara	Persen				100	100	100	100	100	Dinas Perhubungan
6	Persentase jaringan pelayanan Lalu Lintas sungai dan penyebrangan	Persen				100	100	100	100	100	Dinas Perhubungan
7	Persentase angkutan umum yang melakukan uji KIR	Persen	59	91	100	100	100	100	100	100	Dinas Perhubungan
8	Jumlah Dokumen Lalu lintas	Jumlah			100	100	100	100	100	100	Dinas Perhubungan
9	Jumlah Rambu, Cermin Lalu Lintas, Lampu Lalu Lintas dan Petunjuk Arah	Unit	1448	3466	3466					3466	Dinas Perhubungan
10	Panjang Marka Jalan	Meter	2600	2800	2800					2800	Dinas Perhubungan
11	Frekuensi Operasi Ketertiban Lalu lintas	Hari/Tahun	22	22	22					22	Dinas Perhubungan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	Persentase Layanan Angkutan Darat	Persen				100	100	100	100	100	Dinas Perhubungan
13	Jumlah Dokumen Lalu lintas	Persen				100	100	100	100	100	Dinas Perhubungan
14	Jumlah Operasi Angkutan Umum Laik Jalan	Jumlah	29	29		100	100	100	100	100	Dinas Perhubungan
15	Persentase Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang dikembangkan	Persen	0	0		100	100	100	100	100	Dinas Perhubungan
16	Jumlah Sarana Prasarana Parkir	Jumlah	4	4		100	100	100	100	100	Dinas Perhubungan
XVI	Komunikasi dan Informatika										
1	Persentase Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah Yang diDokumentasikan	Persen	90	95	95					95	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Persentase Publikasi Program Pembangunan Daerah	Persen	90	90	90					90	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Persentase Layanan Informasi Publik	Persen	90	90	90					90	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Persentase Layanan Acara Keprotokolan Pemerintah Daerah	Persen	90	95	95					95	Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pengembangan Aplikasi Telematika	Kegiatan	8	8	8					8	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pengembangan Teknologi Informasi, Pos dan Telekomunikasi	Kegiatan	8	8	8					8	Dinas Komunikasi dan Informatika
7	Persentase media informasi yang dimanfaatkan	Persen	62	92		100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
8	Persentase Publikasi program pembangunan daerah	Persen	66	92		100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Persentase kegiatan Pemerintahan daerah yang didokumentasikan	Persen	97	98		100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Persentase layanan Informasi dan pengaduan masyarakat yang tertangani	Persen	79	93		100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	Nilai Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	75	85		100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	Tingkat pemenuhan kebutuhan infrastruktur infomatika	Persen	50	95		100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	Persentase ketersediaan dokumen master plan infrastruktur smart city	Persen	50	95		100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
14	Tingkat standarisasi infrastruktur informatika di instansi pemerintah dan ruang publik	Persen	77	90		100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Tingkat kemandirian jaringan teknologi informasi	Persen	46	99		100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	Persentase layanan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikembangkan	Persen	88	98		100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Persentase aplikasi SPBE yang sudah terintegrasi	Persen	100	100		100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
18	Persentase aplikasi SPBE yang dimanfaatkan masyarakat umum	Persen	54	92		100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
XVII	Koperasi, usaha kecil, dan										

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	menengah										
1	Jumlah UMKM Yang Termonitoring dan Terevaluasi	Unit	750	800	800					800	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	Terbinanya Pelaku UMKM Menjadi Wiraswasta Yang Profesional	Unit	25	25	25					25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3	Terfasilitasinya UMKM Dalam Mengakses Kredit Perbankan dan Non Perbankan	Unit	360	380	380					380	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
4	Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan Usaha Besar	Unit	15	15	15					15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan BUMN/BUMD	Unit	100	105	105					105	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
6	Persentase Koperasi Yang Ada Memenuhi Kriteria Koperasi Sehat	Persen	20	25	25					25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
7	Persentase Koperasi Yang Bermitra Dengan Lembaga Perbankan	Persen	24	30	30					30	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
8	Jumlah Pameran yang diikuti oleh Koperasi	Even				5	5	5	5	5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitas bantuan	Unit		15		15	15	15	15	15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
10	Jumlah Koperasi yang bermitra dengan perbankan, non perbankan dan lembaga lainnya	Unit		30		30	30	30	30	30	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
11	Jumlah Koperasi yang teridentifikasi mengikuti sosialisasi dan pelatihan	Unit		50		50	50	50	50	50	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
12	Laju peningkatan koperasi sehat	Persen		20		5	5	5	5	5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13	Laju peningkatan koperasi aktif	Persen		40		10	10	10	10	10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
14	Laju peningkatan koperasi bersertifikat	Persen		0		15	15	15	15	15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
15	Laju peningkatan Koperasi melakukan audit melalui akuntan publik	Persen		0		5	5	5	5	5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
16	Laju peningkatan koperasi melaksanakan RAT	Persen		20		7	7	7	7	7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	Jumlah Pameran yang diikuti oleh UKKM	Even		10		8	8	8	8	8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
18	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas bantuan	Unit		20		20	20	20	20	20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
19	Jumlah UMKM yang bermitra dengan perbankan, non perbankan dan lembaga lainnya	Unit		15		20	20	20	20	20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
20	Jumlah UMKM yang teridentifikasi mengikuti sosialisasi dan pelatihan	Unit		30		25	25	25	25	25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
21	Persentase UMKM yang terbina	Persen				10	10	10	15	15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
22	Jumlah Wirausaha baru yang dibentuk	Unit				50	50	50	50	50	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
23	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan	Unit				150	150	150	150	150	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
XVIII	Penanaman Modal										
1	Jumlah Buku Promosi Potensi Unggulan Daerah	Set	1	1	1					1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Jumlah Buku Peluang Potensi Investasi	Set	1	1	1					1	Dinas Penanaman Modal dan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Jumlah peran Serta Pada Kegiatan Pameran Investasi Dalam Negeri	Event	4	4	4					4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Persentase Perusahaan PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Persen	80	90	90					90	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Jumlah Dokumen Data dan Laporan Investasi Yang Akurat	Jumlah	1	1	1					1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	Prosentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Persen	3	3	3					3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7	Persentase Kepastian dan Ketepatan Biaya Pelayanan Perzinan	Persen	100	100	100					100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Persentase Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	79,50	80	80					80	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9	Persentase Peningkatan Proses Pengolahan Pelayanan Administrasi Perijinan	Persen	95	95	95					95	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10	Persentase Target Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perjinan	Persen	100	100	100					100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11	Persentase Peningkatan Sistem Informasi dan Pengembangan Database Pelayanan Perjinan	Persen	90	100	100					100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12	Jumlah buku promosi investasi	Buku	2	2		3	3	2	4	4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13	Jumlah keikutsertaan pada pameran investasi	Event	4	5		11	12	14	15	15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Pintu
14	Persentase perusahaan PMA dan PMDN yang dapat dimonitoring secara berkala	Persen	64,98	58,36		100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15	Persentase perusahaan yang mendapat pengawasan perizinan dan non perizinan	Persen		80		100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16	Persentase pengaduan perizinan	Persen		100		100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17	Peningkatan nilai IKM	Persen		80		80,75	81	81,5	82	82	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	Persentase jumlah izin yang dapat diselesaikan	Persen		61,24		80	85	90	95	95	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
19	Persentase kesesuaian regulasi PTSP pusat dan daerah	Persen		80		100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
XIX	Kepemudaan dan olah raga										
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen			20	30	40	85	60	60	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2	Cakupan pembinaan olahraga	Persen		19,61	19,61	20,00	19,61	23,53	23,53	23,53	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
3	Cakupan pembinaan atlet muda	Persen		11	11	11	13	13	15	15	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
4	Cakupan pembinaan kepemudaan	Persen		20	20	20	20	20	20	20	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Cakupan pembinaan keagamaan	Persen		20	20	20	20	20	20	20	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
6	Cakupan Pembangunan dan/ atau Peningkatan sarana prasarana Kepemudaan	Persen			20	20	20	20	20	20	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
7	Persen Pembangunan dan/ atau Peningkatan sarana prasarana Kebudayaan	Persen			20	20	20	20	20	20	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
8	Cakupan wirausaha muda	Persen			20	40	50	60	70	70	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
9	Cakupan Pembangunan dan/ atau Peningkatan sarana prasarana Olahraga	Persen	50,00	57,14	64,29	64,29	64,29	64,29	71,43	71,43	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
XX	Statistik										
1	Jumlah Dokumen Data Persandian dan Statistik Yang	Dokumen		5	5					5	Dinas Kepemudaan, Olahraga,

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Disusun										Pariwisata dan Kebudayaan
2	Persentase ketersediaan data/infromasi statistik sektoral daerah	Dokumen		33	100	100	100	100	100	100	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
3	Persentase dokumen hasil pengolahan dan analisis statistik sektoral dan spasial yang dihasilkan	Dokumen	68	90	100	100	100	100	100	100	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
XXI	Persandian										
1	Tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan risiko kemanan infomasi (D)	Persen	69	95	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Tingkat kesiapan penerapan standar prosentase kemanan infomasi (PR)	Persen	65	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Tingkat kesiapan penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan infomasi (PP)	Persen	78	98	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
XXII	Kebudayaan										

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Jumlah Kelompok Seni Budaya Lokal Yang Dibina	Kelompok	6	6	6					6	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2	Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	88,89	88,89	88,89	88,89	100	100	100	100	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
3	Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Persen			50	50	50	60	60	60	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
4	Persentase Kelompok Seni Budaya Lokal (Kelompok) yang dibina	Persen		50	50	50	50	55	55	55	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
5	Persentase Event pagelaran seni budaya yang diikuti	Persen		50	50	50	50	50	50	50	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
6	Persentase festival seni dan budaya yang diselenggarakan	Persen		36	36	36	36	36	36	36	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Kebudayaan
XXIII	Perpustakaan										
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	8.000	8.000	8.000					8.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	Jumlah Anggota Perpustakaan Per Tahun	Orang	39.500	39.500	39.500					39.500	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3	Jumlah Titik Layanan Perpustakaan Keliling	Titik	103	103	103					103	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
4	Jumlah Perpustakaan Binaan	Unit	215	215	215					215	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5	Jumlah Buku Perpustakaan	Buah	38.000	38.000	38.000					38.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
6	Persentase ketersediaan koleksi buku perpustakaan	Persen			5	5	5	5	5	5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
7	Persentase jumlah karya cetak dan karya rekam mengenai kabupaten purwakarta	Persen			100		100		100	100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Persentase pembinaan terhadap perpustakaan umum dan sekolah	Persen	24,06	25,3	26	27	28	29,3	30,4	30,4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
9	Persentase ketersediaan ruang baca/ pojok baca / sudut baca di ruang publik	Persen		20	20	20	20	20	20	20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
10	Tingkat pemeliharaan bahan perpustakaan	Persen			0,06	0,11	0,15	0,19	0,23	0,23	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
11	Laju pengunjung perpustakaan	Persen		81,5	4,9	4,70	4,50	4,30	4	4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
12	Laju anggota perpustakaan	Persen		57	22,9	18,6	15,70	13,50	12	12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
13	Tingkat koleksi buku perpustakaan	Persen		5	5	5	5	5	5	5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
14	Persentase jumlah koleksi buku yang dibaca	Persen		0	5	5	5	5	5	5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
15	Persentase titik layanan perpustakaan keliling	Persen	47	79	49	100	100	100	100	100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16	Tingkat koleksi buku perpustakaan digital	Persen	0	100	0	16,5	14,5	12,4	11	11	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
17	Persentase jumlah koleksi buku perpustakaan digital yang dibaca	Persen	0	0	19,8	16,5	14	12,4	11	11	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
18	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaan	Persen	0	0	4	4	5	5	7	7	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
XXIV	Kearsipan										
1	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Perangkat Daerah	43	43	43					43	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	Persentase Akuisisi Arsip Daerah	Persen	25	25	25					25	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3	Jumlah depo arsip yang mendapatkan Fumigasi dan Anti Rayap	Unit	4	4	4					4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
4	Jumlah kegiatan Pembinaan Penataan Kearsipan Daerah	Kegiatan	2	2	2					2	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5	Persentase pembinaan	Persen	100	95,7	100	100	100	100	100	100	Dinas Kearsipan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	kearsipan OPD										dan Perpustakaan
6	Tingkat penyelamatan arsip statis	Persen	80,05	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
7	Tingkat pelestarian arsip statis	Persen	1,15	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
8	Tingkat pemutakhiran Sistem Informasi Kearsipan	Persen	0,6	0,05	22	27	27	27	27	27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
9	Laju pengunjung diorama/musium kearsipan	Persen	59,8	42,7	22,9	4,2	3,2	4,7	3,7	3,7	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
10	Persentase OPD yang mengelola arsip secara tertib	Persen	15,2	21,7	26,1	30,4	34,8	39,1	43,5	43,5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
11	Persentase arsip aktif, in aktif dan vital yang disusun kedalam daftar:										Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	- arsip aktif	Persen	50	60	20	20	20	20	20	20	
	- arsip in aktif	Persen	50	46,7	20,00	37,80	20	20	53,3	53,3	
	- arsip vital	Persen	67	75	20	20	20	20	20	20	
12	Persentase penyusutan arsip	Persen	0	0	20	20	20	20	20	20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan informasi kearsipan	Persen	0	0	70,00	72	73	75	78	78	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
14	Tingkat pemeliharaan arsip statis	Persen	1,83	1,83	19,99	19,99	19,99	19,99	19,99	19,99	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
XXV	Kelautan dan Perikanan										
1	Jumlah Benih Ikan Yang Ditebarkan	Ekor	75.000	75.000	75.000					75.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	Kawasan Peternakan dan Perikanan Terpadu	Kegiatan	1	1	1					1	Dinas Perikanan dan Peternakan
5	Pendapatan Usaha Tani Tanaman Padi	Rp/Ha	10.500.000	12.000.000	12.000.000					12.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
7	Persentase kelompok Tani yang Menerapkan Teknologi Pertanian	Persen	100	100		100	100	100	100	100	Dinas Perikanan dan Peternakan
9	Persentase kelompok Tani yang mendapat bantuan	Persen	0	30,92		25	25	25	25	25	Dinas Perikanan dan Peternakan
11	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan	Kelompok	109	115		121	124	127	130	130	Dinas Perikanan dan Peternakan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13	Produksi Benih Ikan UPR	Ekor	514.740.000	555.958.000		741.225.600	889.470.720	1.067.364.864	190.837.837	190.837.837	Dinas Perikanan dan Peternakan
15	Produksi Ikan Konsumsi	Ton	92.501	84.230		1.899	2.279	2.735	3.282	3.282	Dinas Perikanan dan Peternakan
17	Produksi Ikan Hias	Ekor	94.000	117.010		135.360	162.432	194.918	233.903	233.903	Dinas Perikanan dan Peternakan
19	Produksi Benih UPTD BBI	Ekor	5.000.000	5.075.000		5.880.000	6.320.000	6.740.000	7.200.000	7.200.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
21	Jumlah Pelaku Usaha Budidaya Ikan	Orang	9.635	9.190		9.190	9.190	9.190	9.190	9.190	Dinas Perikanan dan Peternakan
23	Luas Lahan Budidaya yang Disertifikasi	Hektar	4	4		4	4	4	4	4	Dinas Perikanan dan Peternakan
25	Produksi Ikan Hasil Tangkapan (ton)	Ton	1.023,74	1.100,81		1.272	1.367	1.470	1.580	1.580	Dinas Perikanan dan Peternakan
27	Jumlah Ikan yang ditebarkan	Ekor	225.000	375.000		450.000	500.000	550.000	600.000	600.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
29	Jumlah Kelompok Usaha Perikanan	Kelompok	14	18		48	51	53	56	56	Dinas Perikanan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Tangkap										dan Pernakan
31	Jumlah kawasan Perairan Umum yang dikelola	Jenis	3	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Perikanan dan Pernakan
33	Jumlah kawasan perikanan budidaya yang dikelola	Kecamatan	17	17	17	17	17	17	17	17	Dinas Perikanan dan Pernakan
35	Jumlah KJA	Petak	21.000	21.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Dinas Perikanan dan Pernakan
37	Produksi Ikan KJA	Ton			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Dinas Perikanan dan Pernakan
39	Jumlah Unit Pengolahan Hasil Perikanan (Unit)	Unit	50	94	100	105	110	115	120	120	Dinas Perikanan dan Pernakan
41	Produksi Olahan Produk Perikanan (ton)	Ton			85	90	95	100	105	105	Dinas Perikanan dan Pernakan
43	Jumlah Kelompok Usaha pengolahan ikan (kelompok)	kelompok	11	12	13	14	15	16	17	17	Dinas Perikanan dan Pernakan
45	Jumlah Unit Pemasaran Hasil Perikanan (unit)	Unit	1.160	1.161	1.170	1.172	1.174	1.176	1.178	1.178	Dinas Perikanan dan Pernakan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
XXVI	Pariwisata										
1	Jumlah Event Promosi Yang Diikuti / Diselenggarakan	Event	8	8	8					8	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2	Jumlah ODTW Yang Ditata	ODTW	4	4	4					4	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
3	Persentase Daerah Tujuan Wisata (DTW) Dikembangkan	Persen	11,11	11,11		11,11	13,33	15,56	17,78	17,78	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
4	Persentase Jasa Usaha Pariwisata Berstandar baik/ tersertifikasi	Persen	0	0		2,22	4,44	4,44	6,67	6,67	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
5	Persentase Lembaga dan SDM Pariwisata Meningkatkan/ tersertifikasi	Persen	0	0		2,22	4,44	4,44	6,67	6,67	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
6	Persentase Event Promosi yang diikuti/diselenggara	Persen	20	20		30	40	40	50	50	Dinas Kepemudaan, Olahraga,

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	kan										Pariwisata dan Kebudayaan
7	Persentase komunitas ekonomi kreatif yang dibina	Persen				40	40	40	40	40	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
8	Cakupan Pembangunan dan/atau Peningkatan sarana prasarana Pariwisata	Persen				20	40	40	60	60	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
XXVII	Pertanian										
1	Jumlah Ternak Unggas Yang Disebarkan	Ekor	1.000	1.000	1.000					1.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
2	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Orang	610	615		650	670	685	700	700	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	jumlah ternak yang diperjual belikan di Pasar Hewan	Ekor	33.060	34.060		36.817	38.195	39.574	40.952	40.952	Dinas Perikanan dan Peternakan
4	Keikutsertaan dalam Pameran/expo produk hasil peternakan	Kegiatan	5	5		5	5	5	5	5	Dinas Perikanan dan Peternakan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Budidaya Ternak Ruminansia Besar (lokasi)	Lokasi	2	1		1	1	1	1	1	Dinas Perikanan dan Peternakan
6	Budidaya Ternak Ruminansia Kecil	lokasi	2	1		1	1	1	1	1	Dinas Perikanan dan Peternakan
7	Budidaya Ternak Unggas	Lokasi	1	1		2	2	2	2	2	Dinas Perikanan dan Peternakan
8	Produksi Hasil Ternak	Persen	3	3		3	3	3	3	3	Dinas Perikanan dan Peternakan
9	Jumlah Akseptor IB (ekor)	Ekor		1.500		1.575	1.654	1.736	1.823	1.823	Dinas Perikanan dan Peternakan
10	Jumlah Teknologi yang Diterapkan	Jenis	3	3		3	3	3	3	3	Dinas Perikanan dan Peternakan
11	Jumlah kelahiran Sapi Potong hasil IB dan Kawin Alam (ekor)	Ekor	736	1197		1.224	1.248	1.273	1.299	1.299	Dinas Perikanan dan Peternakan
12	Pengembangan Hijauan Makanan Ternak (lokasi)	Lokasi	1	1		1	1	1	1	1	Dinas Perikanan dan Peternakan
13	Jumlah Akseptor IB	Ekor	3.000	3.000	3.000					3.000	Dinas Perikanan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											dan Pernakan
14	umlah Paket Teknologi Yang Diterapkan	Paket	2	2	2					2	Dinas Perikanan dan Pernakan
15	Persentase Populasi Ternak Yang Divaksin	Persen	80	80	80					80	Dinas Perikanan dan Pernakan
16	Presentase Populasi Ternak Yang Diobati	Persen	20	20	20					20	Dinas Perikanan dan Pernakan
17	Sarana Kesehatan Hewan	Kegiatan	1	1	1					1	Dinas Perikanan dan Pernakan
18	Kasus penyakit hewan menular	PHMS	0	0		0	0	0	0	0	Dinas Perikanan dan Pernakan
19	Terjaminya Keamanan PAH/HPAH	kecamatan	17	17		17	17	17	17	17	Dinas Perikanan dan Pernakan
20	Jumlah Ternak dan hewan kesayangan yang ditangani	ekor	117	389		408	429	450	473	473	Dinas Perikanan dan Pernakan
21	Jumlah Ternak Ruminansia yang diperiksa kesehatanya	ekor	5.396	6.753		7.699	8.172	8.645	9.118	9.118	Dinas Perikanan dan Pernakan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	sebelum dipotong										
22	Jumlah Kelompok Usaha Peternakan	kelompok	70	95		97	98	99	100	100	Dinas Perikanan dan Peternakan
23	Jumlah Kelompok Peternakan yang mengikuti lomba (kelompok)	kelompok	1	1		2	2	2	2	2	Dinas Perikanan dan Peternakan
24	Jumlah Peternak yang mengikuti magang/studi banding/kursus/pelatihan (orang)	Orang	12	8		50	50	50	50	50	Dinas Perikanan dan Peternakan
25	Jumlah Ternak Unggas Yang Disebarkan (ekor)	Ekor	50	50	50	300	400	500	600	600	Dinas Perikanan dan Peternakan
26	Jumlah Benih Ikan Yang Ditebarkan (ekor)	Ekor	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
27	Penyediaan daging, telur dan susu perbaikan gizi masyarakat										Dinas Perikanan dan Peternakan
	daging (ton)	Ton	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Perikanan dan Peternakan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	telur (ton)	Ton	5	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Perikanan dan Peternakan
	susu (liter)	Liter	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	Dinas Perikanan dan Peternakan
	susu (liter)	Liter	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	Dinas Perikanan dan Peternakan
28	Persentase kelompok Tani yang Menerapkan Teknologi Pertanian	Persen	100	100		100	100	100	100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
29	Persentase kelompok Tani yang mendapat bantuan	Persen	0	30,92		25	25	25	25	25	Dinas Pangan dan Pertanian
30	Jumlah Promosi Produk Pertanian /Perkebunan yang Dilaksanakan	Kegiatan	2	2	2						Dinas Pangan dan Pertanian
31	Produksi Padi	Ton	226.424	226.424	226.424					226.424	Dinas Pangan dan Pertanian
32	Produksi Palawija	Ton	133.294	133.294	133.294					133.294	Dinas Pangan dan Pertanian
33	Produksi Teh	Ton	5.164	5.164	5.164					5.164	Dinas Pangan dan Pertanian
34	Produksi Cengkeh	Ton	337	337	337					337	Dinas Pangan dan Pertanian

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
35	Produksi Sayuran	Ton	45.459	45.459	45.459					45.459	Dinas Pangan dan Pertanian
36	Produksi Buah-Buahan	Ton	115.468	115.468	115.468					115.468	Dinas Pangan dan Pertanian
37	Pendidikan Pelatihan dan Bimbingan Teknis yang Diikuti oleh Penyuluh	Kegiatan	25	30	30					30	Dinas Pangan dan Pertanian
38	Kelompok Tani yang Menerapkan Teknologi Pertanian	Kelompok	430	450	450					450	Dinas Pangan dan Pertanian
39	Penanaman Manggis	Pohon	1.075	1.155	1.155					1.155	Dinas Pangan dan Pertanian
40	Penanaman /Rehabilitasi The	Ha	27	30	30					30	Dinas Pangan dan Pertanian
41	Penanaman Cengkeh	Ha	1,7	1,75	1,75					1,75	Dinas Pangan dan Pertanian
42	Penanaman Ubi Kayu	Ha	1460	1610	1610					1610	Dinas Pangan dan Pertanian
43	Penanaman Pala	Ha	1,50	1,50	1,50					1,50	Dinas Pangan dan Pertanian
44	Penerapan Pertanian Organik	Ha	45	50	50					50	Dinas Pangan dan Pertanian
45	Produktivitas Padi Sawah	Ku/Ha	63,06	63,85	63,85					63,85	Dinas Pangan dan Pertanian
46	Produktivitas Padi Ladang		37,18	37,64	37,64					37,64	Dinas Pangan dan Pertanian
47	Produktivitas Jagung	Ku/Ha	52,75	53,02	53,02					53,02	Dinas Pangan dan Pertanian

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
48	Produktivitas Ubi Kayu	Ku/Ha	198,57	199,16	199,16					199,16	Dinas Pangan dan Pertanian
49	Produktivitas Cengkeh	Kg/Ha	250,79	253,29	253,29					253,29	Dinas Pangan dan Pertanian
50	Produktivitas Teh	Kg/Ha	1.106,16	1.117,22	1.117,22					1.117,22	Dinas Pangan dan Pertanian
51	Produktivitas Pala	Kg/Ha	319,47	322,66	322,66					322,66	Dinas Pangan dan Pertanian
52	Laju produksi Padi	Persen	2,627	2,657		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	Dinas Pangan dan Pertanian
53	Laju produksi Kacang-kacangan	Persen	-55,66	346,35		1	1	1	1	1	Dinas Pangan dan Pertanian
54	Laju produksi Umbi-umbian	Persen	-34,39	-18,55		1	1	1	1	1	Dinas Pangan dan Pertanian
55	Persentase kehilangan hasil	Persen	18	18		16,5	16	15,5	15	15	Dinas Pangan dan Pertanian
56	Persentase penyediaan prasarana dan sarana pertanian	Persen	25	25		25	25	25	25	25	Dinas Pangan dan Pertanian
57	Persentase produksi benih padi bersertifikat	Persen				100	100	100	100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
58	Persentase pengendalian serangan OPT	Persen	5	5		3	3	3	3	3	Dinas Pangan dan Pertanian
59	Persentase perlindungan lahan dari dampak perubahan iklim	Persen	5	5		3	3	3	3	3	Dinas Pangan dan Pertanian

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
60	Persentase ketersediaan program penyuluhan	Persen	100	100		100	100	100	100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
61	Persentase pelaku pertanian yang terlatih	Persen	100	100		100	100	100	100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
62	Laju produksi Perkebunan dan hortikultura	Persen	-53,17	122,89		0,233	0,234	0,234	0,235	0,235	Dinas Pangan dan Pertanian
XXVIII	Perdagangan										
1	Persentase Pegawai yang memiliki Keseuaian Kompetensi	Persen	40,46	76,29		100	100	100	100	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	Jumlah Konsumen yang dibina	Orang	630	780	780					780	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3	Persentase Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen (BPSK)	Persen	100	100	100					100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											dan Perindustrian
4	Jumlah Tera dan Tera Ulang Alat UTP	UTTP/Tahun	600	600	600					600	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
5	Jumlah Pengukuran BDKT	BDKT/Tahun	40	40	40					40	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
6	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pengawasan Barang / Jasa	Pelaku Usaha	300	300	300					300	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
7	Jumlah Komoditi Yang Diawasi Dalam Pengawasan Barang / Jasa	Komoditi	50	60	60					60	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											dan Perindustrian
8	Jumlah Komoditi Yang Diuji (Lab) Pertahun	Komoditi	25	25	25					25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
9	Jumlah Peraturan (Regulasi) Tentang Pengelolaan, Penataan dan Pemetaan Lokasi Pasar Modern	Regulasi	1	1	1					1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
10	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran Ekspor.	Even				2	2	2	2	2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
11	Jumlah Pelayanan Ekspor	Dokumen SKA				13.000	135.000	14.500	16.000	16.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											dan Perindustrian
12	Terbangunnya Pasar Tradisional Yang Memiliki Fisik dan Sistem Pengelolaan Konsep Modern	Pasar	7	9	9					9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
13	Tertatanya Penyempurnaan Pusat Perbelanjaan Pasar Jum'at	Pasar	1	1	1					1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
14	Terbangunnya Kantor Pengelola / Pelayanan Pasar Tradisional Yang Representative	Unit	5	6	6					6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
15	Tertatanya Sarana / Prasarana (Kios / Los / Jalan) Yang Representative di Pasar Tradisional	Unit	5	6	6					6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											dan Perindustrian
16	Jumlah pedagang yang mengikuti pembinaan	Orang		200		200				200	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
17	Jumlah Fasilitas pengaduan konsumen	Kasus				150	130	100	80	80	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
18	Jumlah pelayanan kemetrolgian	Unit		2.000		1.500	1.700	1.800	2.000	2.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
19	Jumlah pengawasan Alat UTTP dan BDKT	Unit		10.000		10.000	11.000	12.000	13.000	13.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											dan Perindustrian
20	Jumlah pengawasan dan pengendalian Harga kebutuhan pokok masyarakat	Kegiatan				5	5	5	5	5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
21	Jumlah Pasar tradisional yang direvitalisasi	Pasar				1	1	1	1	1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
22	Persentase Capaian target retribusi pasar	Persen		70		100	100	100	100	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
23	Jumlah pengunjung Pasar tradisional	Orang				200	250	275	300	300	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											dan Perindustrian
24	Tertatanya pedagang kaki lima dan asongan	Kawasan				1	2	2	3	3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
XXIX	Perindustrian										
1	Jumlah Industri Kecil Yang Memiliki SNI	Unit	80	100	100					100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	Jumlah Desain Kemasan Produksi	Unit	96	120	120					120	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3	Jumlah Industri Kecil Pangan Memiliki P-IRT	Unit	96	120	120					120	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Perdagangan dan Perindustrian
4	Jumlah GKM Industri Kecil Yang Terbentuk	Unit	8	10	10					10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
5	Jumlah Lokasi Sarana / Prasarana Promosi dan Penjualan Produk Industri Kecil	Unit	4	5	5					5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
6	Jumlah Bahan Baku Yang Standard Hasil Litbang	Jenis	8	10	10					10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
7	Jumlah Percontohan Mesin Pengolahan Bahan Baku Keramik (TTG)	Unit	1	1	1					1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											dan Perindustrian
8	Jumlah Percontohan Tungku Pembakaran Keramik Dengan Bahan Bakar Yang Ramah Lingkungan	Unit	1	1	1					1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
9	Jumlah Lahan Kawasan IKM	Ha	4,8	6,0	6,0					6,0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
10	Jumlah Data Potensi dan Informasi Industri yang Up To Date	Jenis	8	10	10					10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
11	Jumlah Bangunan Sarana dan Prasarana UPTD Litbang Keramik	Paket	1	1	1					1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											dan Perindustrian
12	Jumlah Desain Produk Keramik Yang Standar / Spesifik (Berkarakter)	Desain	80	100	100					100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
13	Jumlah P2WKSS terbina.	desa				1	1	1	1	1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
14	Jumlah Keikutsertaan dalam pameran kerajinan Daerah	Kegiatan				2	2	2	2	2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
15	Jumlah GKM Industri yang terbina	unit				1	1	1	1	1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											dan Perindustrian
16	Jumlah lokasi Sarana/Prasarana promosi dan Penjualan Produk Industri Kecil	unit				1	1	1	1	1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
17	Jumlah desain kemasan produk Industri Kecil Menengah (IKM)	desain				5	5	5	5	5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
18	Jumlah desain produk keramik yang standar/spesifik	desain				20	20	20	20	20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
19	Jumlah data potensi dan informasi industri	buku				1	1	1	1	1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											dan Perindustrian
20	Jumlah pengrajin sentra industri keramik yang terbina	pengrajin				30	30	30	30	30	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
21	Jumlah pengunjung ke sentra industri keramik dan gerabah	Orang				8.000	9.000	10.000	10.000	10.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
22	Jumlah kerjasama kemitraan dengan industri hulu/lembaga keuangan	IKM				1	1	1	1	1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
23	Jumlah pemanfaatan potensi sumberdaya IKM	IKM				10	10	10	15	15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											dan Perindustrian
24	Jumlah bahan baku yang standar produk IKM	Unit				1	1	1	2	2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
XXX	Transmigrasi										
1	Persentase Transmigran Yang Diberangkatkan	KK	0	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
XXXI	Sekretariat Daerah										
1	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100	100	100					100	Sekretariat Daerah
2	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100	100	100					100	Sekretariat Daerah
3	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan:										Sekretariat Daerah
	- Perda	Persen	100	100	100					100	
	- Perbup	Persen	100	100	100					100	
	- Kepbup	Persen	100	100	100					100	
4	Persentase fasilitasi	Persen	100	100	100					100	Sekretariat

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	bantuan hukum										Daerah
5	Persentase sosialisasi produk hukum	Persen	100	100	100					100	Sekretariat Daerah
6	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan:										Sekretariat Daerah
	- Perda	Persen	100	100		100	100	100	100	100	
	- Perbup	Persen	100	100		100	100	100	100	100	
	- Kepbup	Persen	100	100		100	100	100	100	100	
7	Persentase fasilitasi bantuan hukum	Persen	100	100		100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
8	Persentase sosialisasi produk hukum	Persen	100	100		100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
9	Jumlah Rangkaian Pelayanan Kedinasan KDH / WKDH	Bulan	12	12	12					12	Sekretariat Daerah
10	Paket Pelelangan Pertahun	Paket	250	250	250					250	Sekretariat Daerah
11	Dokumen Juknis Pengelolaan APBD	Dokumen	1	1	1					1	Sekretariat Daerah
12	Tambahan Aparat Bersertifikat Pengadaan Barang/Jasa	Orang	25	25	25					25	Sekretariat Daerah
13	Persentase Implementasi Kebijakan Pembangunan	Persen	100	100	100					100	Sekretariat Daerah

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perekonomian daerah										
14	Persentase Implementasi Kebijakan Pembangunan Perekonomian daerah	Persen	100	100		100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
15	Capaian Penataan OPD Sesuai Dengan Peraturan PerundangUndangan	Persen	100	100	100					100	Sekretariat Daerah
16	Jumlah Kajian/Analisis Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan	2	2	2					2	Sekretariat Daerah
17	Pembinaan Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan	2	3	3					3	Sekretariat Daerah
18	Persentase OPD Yang Terevaluasi Kinerjanya	Persen	100	100	100					100	Sekretariat Daerah
19	Jumlah Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi WilayahWilayah Perbatasan	Kegiatan	1	2	2					2	Sekretariat Daerah
20	Persentase Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	yang difasilitasi										
21	Persentase laporan capaian kinerja pembangunan	Persen	75	88	90	93	96	96	100	100	Sekretariat Daerah
22	Persentase ketersediaan dokumen petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan pembangunan dan analisis standar belanja (ASB)	Persen	50	50	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
23	Persentase ketersediaan dokumen pengembangan teknologi informasi	Persen			25	50	50	75	100	100	Sekretariat Daerah
24	Jumlah Kegiatan Yang Menunjang Kelancaran Proses Pengadaan Barang/Jasa	Kegiatan		10	10					10	Sekretariat Daerah
25	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa	Persen	44,44	60	75	81,82	85,71	90	96,77	96,77	Sekretariat Daerah

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
26	Persentase paket pengadaan barang/jasa yang selesai ditenderkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
27	Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa secara elektronik	Persen	32,59	37,24	61,54	76,92	92,31	96,15	100	100	Sekretariat Daerah
28	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin			45	50	55	55	60	60	Sekretariat Daerah
29	Peresentase penyusunan perencanaan anggaran yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
30	Persentase data keuangan yang diverifikasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
31	Persentase laporan keuangan yang tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
32	Capaian Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Poin	31271	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	Sekretariat Daerah
33	Persentase kerjasama daerah yang sesuai dengan kebutuhan	Persen	100 MOU/PKS /100%	100 MOU/PKS /100%	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
34	Persentase fasilitasi naskah kerjasama daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
35	Persentase identifikasi dan inventarisasi wilayah perbatasan dan rupa bumi buatan dan alam yang terdokumentasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
XXXII	Sekretariat DPRD										
1	Jumlah Rapat Pembahasan Raperda Menjadi Perda	Kegiatan	10	10	10					10	Sekretariat DPRD
2	Persentase pemenuhan referensi perundang-undangan	Persen				100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
3	Perentase fasilitasi kegiatan rapat DPRD	Persen				100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
4	Persentase penyusunan risalah rapat	Persen				100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
5	Persentase penyusunan perencanaan anggaran yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-	Persen				100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	undangan										
6	Persentase data keuangan yang diverifikasi	Persen				100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
7	Persentase laporan keuangan yang tepat waktu	Persen				100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
8	Persentase fasilitas hubungan antar lembaga	Persen				100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
9	Persentase publikasi kegiatan DPRD	Persen				100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
10	Persentase fasilitasi pelaksanaan kegiatan DPRD	Persen				100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
XXXII I	Kecamatan										
1	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51	51	51					51	Kecamatan Jatiluhur
2	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	77,41	73,5	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Jatiluhur

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51	51	51					51	Kecamatan Sukasari
4	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	77,41	73,5	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Sukasari
5	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51	51	51						Kecamatan Maniis
6	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	77,41	73,5	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Maniis
7	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51	51	51					51	Kecamatan Tegalwaru

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	77,41	73,5	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Tegalwaru
9	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51	51	51					51	Kecamatan Plered
10	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	77,41	73,5	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Plered
11	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51	51	51					51	Kecamatan Sukatani
12	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	77,41	73,5	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Sukatani
13	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan	Kali	51	51	51					51	Kecamatan Darangdan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan										
14	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen				100	100	100	100	100	Kecamatan Darangdan
15	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51	51	51					51	Kecamatan Bojong
16	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	77,41	73,5	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Bojong
17	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51	51	51					51	Kecamatan Wanayasa
18	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	77,41	73,5	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Wanayasa

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
19	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51	51	51					51	Kecamatan Kiarapedes
20	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	77,41	73,5	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Kiarapedes
21	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51	51	51					51	Kecamatan Pasawahan
22	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	77,41	73,5	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Pasawahan
23	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51	51	51					51	Kecamatan Pondoksalam

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
24	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	77,41	73,5	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Pondoksalam
25	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51	51	51					51	Kecamatan Purwakarta
26	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	77,41	73,5	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Purwakarta
27	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51	51	51					51	Kecamatan Babakancikao
28	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	77,41	73,5	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Babakancikao
29	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan	Kali	51	51	51					51	Kecamatan Campaka

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan										
30	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	77,41	73,5	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Campaka
31	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51	51	51					51	Kecamatan Cibatu
32	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	77,41	73,5	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Cibatu
33	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51	51	51					51	Kecamatan Bungursari
34	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	77,41	73,5	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Bungursari

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengawasan										
1	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kepada SKPD Yang Telah Dilaksanakan	Kegiatan	43	43	43					43	Inspektorat
2	Jumlah Diklat Yang Telah Dilaksanakan Oleh Aparatur Pengawas	Kegiatan	4	4	4					4	Inspektorat
3	Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Persen	80	100	100	100	100	100	100	100	Inspektorat
4	Oponi penilaian SAKIP Kabupaten	Persen	CC	B	B	BB	BB	A	AA	AA	Inspektorat
5	Opini penilaian LKPD Kabupaten	Persen	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Inspektorat
6	Persentase penurunan temuan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) terhadap OPD	Persen	80	90	100	100	100	100	100	100	Inspektorat
	Perencanaan										
1	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	disusun tepat waktu dan sesuai aturan										Pengembangan Daerah
2	Tingkat capaian program kinerja Daerah terhadap perencanaan pembangunan yang ditetapkan	Persen	85	86	87	93	94	95	96	96	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3	Jumlah Data dan Informasi Pembangunan Daerah yang tersedia	Dokumen	7	7	7					7	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4	Persentase kesesuaian capaian program dan kegiatan PD terhadap capaian RPJMD dan Renstra OPD lingkup Bidang Ekonomi	Persen	80	80	80	83	85	87	89	89	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	Persentase kesesuaian capaian program dan kegiatan PD terhadap capaian RPJMD dan Renstra OPD lingkup Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah	Persen	80	80	80	83	85	87	89	89	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Persentase kesesuaian capaian program dan kegiatan PD terhadap capaian RPJMD dan Renstra OPD lingkup Bidang Sosial dan Budaya	Persen	80	80	80	83	85	87	89	89	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
7	Persentase kesesuaian capaian program dan kegiatan PD terhadap capaian RPJMD dan Renstra OPD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persen	80	80	80	83	85	87	89	89	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
8	Tingkat ketersediaan data dan informasi pembangunan Daerah	Persen	80	85	90	93	94	95	96	96	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Keuangan										
1	Persentase pelayanan verifikasi dokumen administrasi keuangan sesuai dengan SOP pelayanan	Persen	100	100		100	100	100	100	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Persentase laporan keuangan daerah yang tepat waktu	Persen	100	100		100	100	100	100	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3	Persentase pedoman pengelolaan barang milik daerah yang tersedia	Persen	71,24	71,24		78,57	85,71	93	100	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
4	Persentase inventarisasi aset daerah	Persen	60,24	60,24		61	62	65	66	66	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	Persentase pengelola aset OPD yang dibina	Persen	75	75		100	100	100	100	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
6	Persentase ketepatan waktu penyusunan APBD	Persen	100	100		100	100	100	100	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
7	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD	Persen	100	100		100	100	100	100	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
8	Persentase penyerapan anggaran	Persen	82,48	89,97		92	93	94	95	95	Badan Keuangan dan Aset Daerah
9	Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	14,5	15	15					15	Badan Pendapatan Daerah
10	Persentase Peningkatan Potensi	Persen				36,25	38,75	41,25	43,75	43,75	Badan Pendapatan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pajak Non PBB dan BPHTB										Daerah
11	Persentase Peningkatan Pendapatan Potensi Pajak Non PBB dan BPHTB	Persen				36,26	38,76	41,26	43,76	43,76	Badan Pendapatan Daerah
12	Persentase Penyelesaian Pengaduan Permasalahan Wajib Pajak Non PBB dan BPHTB	Persen				36,27	38,77	41,27	43,77	43,77	Badan Pendapatan Daerah
13	Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Non PBB dan BPHTB	Persen				36,28	38,78	41,28	43,78	43,78	Badan Pendapatan Daerah
14	Persentase Peningkatan Potensi Objek Pajak PBB	Persen		1,19		1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	Badan Pendapatan Daerah
15	Persentase Peningkatan Data PBB P2 yang Terekam	Persen		0,52		0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	Badan Pendapatan Daerah
16	Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak PBB P2	Persen		2,94		2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	Badan Pendapatan Daerah
17	Persentase Peningkatan Pendapatan dari sektor Pajak BPHTB	Persen		8,60		2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	Badan Pendapatan Daerah

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
18	Persentase Penyelesaian Pengaduan Permasalahan PBB P2 dan BPHTB	Persen		80		90,00	90,00	95,00	95,00	95,00	Badan Pendapatan Daerah
19	Persentase Pencapaian Target PBB P2	Persen		102		115	115	120	120	120	
20	Persentase Pencapaian Target PBB P2	Persen		5		15	20	25	30	30	
21	Persentase Terhapusnya Piutang Pajak Daerah kadaluwarsa	Persen		10		35	45	55	75	75	
22	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masalah Keberatan Pajak Daerah/Pendapatan Lainnya	Persen		95		95	95	95	95	95	
23	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persen		3,5		3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	
	Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan										
1	Persentase Calon ASN yang telah mengikuti Pelatihan Dasar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Manusia
2	Persentase ASN yang diklat fungsional/ teknis//bimtek/seminar/ lokakarya dan Tugas Belajar	Persen	0,12	0,12	0,28	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	6,49	12,52	4,01	12,15	8,02	8,02	7,9	7,9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	Persentase penurunan Indisipliner pegawai	Persen	3,35	12,12	3,13	3,33	3,45	3,45	3,57	3,57	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	Persentase Peraturan Perundang-undangan dibidang kepegawaian yang disosialisasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Persentase Sistem Aplikasi Kinerja	Persen	0	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7	Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai	Persen	0,98	3,95	3,18	0,35	5,41	5,41	5,22	5,22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8	Persentase pengisian pemangku Jabatan Tinggi Pratama, jabatan Administrator, dan jabatan	Persen	99,99	93,95	99	100	100	100	100	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
9	Persentase Penataan ASN sesuai dengan kompetensi	Persen	0	0	100	100	100	100	100	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
10	Persentase Pelayanan kenaikan pangkat pegawai yang tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	Persentase data ASN yang mutakhir	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
12	Persentase Integrasi Aplikasi Kepegawaian	Persen				100	100	100	100	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
13	Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
14	Persentase ASN berprestasi/teladan /berinovasi dan berdedikasi yang mendapat penghargaan	Persen	0,69		3,19	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
15	Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu	Persen	100	100	100	4,23	4,99	4,99	5,65	5,65	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penelitian dan Pengembangan										
1	Persentase penelitian pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan	Persen	80	85	90	93	94	95	96	96	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2	Persentase pemanfaatan inovasi berbasis iptek dalam pembangunan daerah	Persen	80	85	90	93	94	95	96	96	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sumber: hasil analisis, 2019

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten dan RPJMN.

RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, perlu diatur juga mengenai pedoman transisi yang akan mengatur proses penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2024.

9.1 Kaidah Pelaksanaan

Dokumen RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020-2023, serta merupakan dokumen yang harus dipedomani oleh pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD

Tahun 2018 - 2023 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta masyarakat termasuk dunia usaha;

2. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, seyogyanya harus memperhatikan dan mempedomani RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, serta mengerahkan semua potensi dan kemampuan daerah guna tercapainya kinerja pembangunan daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
3. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya;
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023
5. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 berpedoman pada RPJMD Tahun 2018-2023 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

PEDOMAN TRANSISI

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Tahun 2023. Sebagaimana diketahui, Tahun 2023 adalah tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RPJPD Kabupaten

Purwakarta Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024. Selanjutnya RKPD Tahun 2024 menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/ terselesaikan sampai dengan Tahun 2023, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional, provinsi, kabupaten dan lain-lain.

Keberhasilan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat agar mensukseskan dan mengawal pembangunan daerah guna Mewujudkan Purwakarta Istimewa.

 **BUPATI PURWAKARTA**

ANNE RATNA MUSTIKA